



TUGAS AKHIR - RP 091333

**ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN KAPUK,
JAKARTA BARAT**

**NIKEN FITRIA
NRP 3610 100 029**

**Dosen Pembimbing
Rulli Pratiwi Setiawan, ST. M.Sc**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2014**



TUGAS AKHIR - RP 091333

REFERRAL OF QUALITY IMPROVEMENT OF SLUM AREAS IN KAPUK VILLAGE, WEST JAKARTA

**NIKEN FITRIA
NRP 3610 100 029**

**Dosen Pembimbing
Rulli Pratiwi Setiawan, ST. M.Sc**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2014**

LEMBAR PENGESAHAN

**ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KELURAHAN KAPUK, JAKARTA BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :
NIKEN FITRIA
NRP. 3610 100 029

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :



Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc
NIP. 197906032008122004

SURABAYA, JULI 2014



ABSTRAK
ARAHAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN KAPUK,
JAKARTA BARAT.

Nama Mahasiswa : Niken Fitria
NRP : 3610100029
Jurusan : Perencanaan Wilayah & Kota FTSP- ITS
Dosen : Rulli Pratiwi, ST., M.Sc

Kelurahan Kapuk merupakan satu kelurahan dengan tingkat kekumuhan mulai dari kumuh rendah, sedang, hingga berat. Permukiman kumuh tersebut terbentuk dari adanya keragaman kondisi baik fisik, ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial dan juga bahaya (hazard). Diperlukan adanya suatu upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh secara komprehensif dengan mengetahui bagaimana karakteristik permukiman kumuh yang terbentuk dan apa faktor yang menyebabkan terbentuknya lingkungan kumuh tersebut.

Dalam mencapai tujuan penelitian, dilakukan: identifikasi karakteristik permukiman kumuh terlebih dahulu dengan menggunakan analisis statistik deskriptif; menganalisis faktor-faktor penyebab terbentuknya lingkungan permukiman kumuh menggunakan content analysis; dan merumuskan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh menggunakan alat content analysis.

Arahan peningkatan kualitas yang dihasilkan adalah melalui penetapan kebijakan, pengurusan administrasi dan penertiban penduduk pendatang; membangun rumah susun, landed house dan mess; penyediaan lahan TPS, sarana persampahan, penerapan konsep bank sampah; pembersihan dan pembangunan sanitasi masyarakat; pengoptimalan fungsi saluran air, pengadaan dan pengoperasian RPH modern dan IPAL; pengembangan konsep Tridaya; diversifikasi dan intensifikasi pekerjaan masyarakat; sosialisasi kepada masyarakat dan ketegasan penerapan kebijakan; penguatan kemampuan ekonomi masyarakat; pemberian kegiatan dengan sistem dana stimulan; dan pemberian pendidikan informal.

Kata kunci : faktor penyebab permukiman kumuh, permukiman kumuh, peningkatan kualitas lingkungan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

ABSTRACT
**REFERRAL OF QUALITY IMPROVEMENT OF SLUM
AREAS IN KAPUK VILLAGE, WEST JAKARTA**

Name : Niken Fitria
NRP : 3610100029
Department : Perencanaan Wilayah & Kota FTSP- ITS
Supervisor : Rulli Pratiwi, ST., M.Sc

Kapuk Village is a village with slumness level ranging from low, moderate, until severe slumness. The slum areas are formed of diverse conditions, including physical, economic, social, and hazard conditions as well as the availability of basic infrastructure. An effort to comprehensively improve the quality of slum areas is needed, which can be done by studying the characteristic of the slum area and factors that cause the formation of the slum environment.

In achieving the purpose of the study, the identification of the characteristics of slum areas was conducted in advance through descriptive statistical analysis. The next is analyzing the factors that cause the formation of the slum environment through content analysis. And the last is formulating the referral of quality improvement of slum areas using content analysis tool.

The referral of quality improvement consists of policies establishment; administrative proceedings and controlling of migrants; construction of flats, landed house and mess; provision of landfills (TPS), waste facility, and application of waste bank concept; improvement and development of community sanitation; optimization of waterways function; procurement and operation of modern abattoir (RPH) and wastewater treatment plant (IPAL); Tridaya concept development; diversification and intensification of community work; dissemination of policy to the public and policy implementation firmness; reinforcement of economic capacity of the community; provision of activities with stimulant fund system; and provision of informal education.

Keywords: *factors causing slum areas, slum areas, environment quality improvement*

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala kemudahan yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat”**

Penulis menyadari bahwa pada proses penulisan Tugas Akhir ini penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis, Ibu, Bapak, yang tidak berhenti memberikan dorongan dan doa kepada penulis.
2. Ibu Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis hingga menyelesaikan Tugas Akhir.
3. Bapak Adjie Pamungkas, ST. M.Dev.Plg. Ph.D., Ibu Dian Rahmawati, ST. MT. dan Ibu Hertiaro Idajati, ST. M.Sc yang telah memberi banyak masukan dalam penelitian ini.
4. Mbak Desi yang selalu baik dan sabar dalam membantu penulis di ruang baca.
5. Teman-teman pita merah, Novita Prahastha, Annabel Noor, Reza Satria, Kety Intana, Hidayat Isa, yang selalu menemani disetiap kegalauan penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini dan terima kasih untuk keceriaan yang kalian berikan selama ini.
6. Medhiansyah Putra Prawira, yang banyak memberikan semangat dan selalu menemani penulis saat penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Teman-teman seperjuangan, angkatan terbaik dari yang terbaikku, PLAX, yang banyak sekali membantu dan

selalu kompak dalam berjuang sebagai wisudawan/wisudawati 110.

8. Seluruh masyarakat dan pihak Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, dan juga Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang terlibat yang sudah sangat baik dan ramah dalam membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota atas semua bantuan dan dukungan yang diberikan.
10. Semua orang yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam lembar ini, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar Tugas Akhir ini dapat lebih baik. Pada akhir kata, penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi orang lain sebagai bahan bacaan atau referensi.

Surabaya, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	4
1.4 Ruang lingkup penelitian	
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	5
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi	9
1.4.3 Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.5 Manfaat Penelitian	
1.5.1 Manfaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis.....	9
1.6 Kerangka Berfikir Penelitian.....	11
1.7SistematikaPenulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Permukiman Kumuh	

2.1.1 Pengertian Permukiman Kumuh	15
2.1.2 Karakteristik Permukiman Kumuh	17
2.1.3 Tipologi Permukiman Kumuh	26
2.1.4 Penyebab Pertumbuhan Permukiman Kumuh.....	28
2.2 Upaya Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh.....	33
2.3 Hasil Studi Terkait.....	34
2.4 Sintesa Tinjauan Pustaka	35
2.4.1 Sintesa Karakteristik Permukiman Kumuh.....	36
2.4.2 Sintesa Faktor Yang Menyebabkan Permukiman Kumuh.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Jenis Penelitian	41
3.3 Variabel Penelitian	42
3.4 Populasi dan Sampel.....	47
3.4.1 Proportional Random Sampling.....	48
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.5.1 Metode Pengumpulan Data Primer	52
3.5.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder	53
3.6 Mengidentifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Berdasarkan Kekumuhan di Kelurahan Kapuk	55
3.7 Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk..	56
3.8 Merumuskan Arah Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh Didasarkan Pada Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan	58

3.9 Tahapan Penelitian	62
------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi	67
4.1.1 Orientasi Wilayah Studi	67
4.1.2 Kondisi Umum Wilayah.....	71
4.1.2.1 Keadaan Fisik Bangunan	71
4.1.2.2 Keadaan Daerah Rawan Banjir	74
4.1.3 Pola Penggunaan Lahan	75
4.1.4 Kependudukan.....	81
4.2 Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Kapuk.....	84
4.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh Ringan	84
4.2.1.1 Sarana dan Prasarana	84
4.2.1.2 Fisik	88
4.2.1.3 Sosial.....	88
4.2.1.4 Ekonomi	91
4.2.1.5 Bahaya (<i>hazard</i>)	92
4.2.2 Karakteristik Permukiman Sedang.....	93
4.2.2.1 Sarana dan Prasarana	93
4.2.2.2 Fisik	96
4.2.2.3 Sosial.....	97
4.2.2.4 Ekonomi	99
4.2.2.5 Bahaya (<i>hazard</i>).....	101
4.2.3 Karakteristik Permukiman Kumuh Berat.....	102
4.2.3.1 Sarana dan Prasarana.....	102

4.2.3.2 Fisik.....	104
4.2.3.3 Sosial.....	105
4.2.3.4 Ekonomi.....	107
4.2.3.5 Bahaya	108
4.3 Analisis Penyebab Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk	135
4.4 Rumusan Arahan Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk.....	159
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	195
5.2 Rekomendasi	200
DAFTAR PUSTAKA.....	xxvii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh	21
Tabel 2.2 Sintesa Tinjauan Teori	38
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya	42
Tabel 3.2 Sampel Kuesioner	49
Tabel 3.3 Stakeholder Mapping	51
Tabel 3.4 Data dan Perolehan Data Primer	53
Tabel 3.5 Instrumen Pengumpulan Data.....	54
Tabel 4.1 Luas, Jumlah RT dan Jumlah Penduduk Kumuh Kelurahan Kapuk.....	67
Tabel 4.2 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Rendah Kelurahan Kapuk.....	71
Tabel 4.3 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Sedang Kelurahan Kapuk	72
Tabel 4.4 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Tinggi Kelurahan Kapuk	73
Tabel 4.5 Daerah Rawan Genangan di Permukiman Kumuh Rendah Kelurahan Kapuk Tahun 2007	74
Tabel 4.6 Daerah Rawan Genangan di Permukiman Kumuh Sedang Kelurahan Kapuk Tahun 2007	74
Tabel 4.7 Daerah Rawan Genangan di Permukiman Kumuh Tinggi Kelurahan Kapuk Tahun 2007	75
Tabel 4,8 Persentase Luas Tanah Menurut Penggunaannya di Kelurahan Kapuk	76
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	82
Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	83
Tabel 4.12 Kondisi Fisik Permukiman Kumuh Rendah	88
Tabel 4.13 Kondisi Fisik Permukiman Kumuh Sedang.....	97
Tabel 4.14 Kondisi Fisik Permukiman Kumuh Berat.....	105

Tabel 4.15 Tabulasi Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh di Kelurahan kapuk.....	129
Tabel 4.16 Pengkodean Dalam Transkrip.....	137
Tabel 4.17 Analisis Faktor Pertambahan Jumlah Penduduk	139
Tabel 4.18 Faktor Penyediaan Perumahan Layak.....	140
Tabel 4.19 Analisis Faktor Penyediaan Prasarana Air Bersih	142
Tabel 4.20 Analisis Faktor Penyediaan Sarana Persampahan	143
Tabel 4.21 Analisis Faktor Penyediaan Prasarana Sanitasi.....	145
Tabel 4.22 Analisis Faktor Prasarana Drainase	146
Tabel 4.23 Analisis Faktor Penyediaan Prasarana Jalan.....	147
Tabel 4.24 Analisis Faktor Jenis Pekerjaan.....	149
Tabel 4.25 Analisis Faktor Tingkat Pendapatan.....	150
Tabel 4.26 Analisis Faktor Kesadaran Masyarakat Memelihara Lingkungannya	152
Tabel 4.27 Analisis Faktor Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	153
Tabel 4.28 Analisis Faktor Kapasitas Masyarakat Dalam Peningkatan Lingkungan.....	154
Tabel 4.29 Analisis Faktor Tingkat Pendidikan.....	155
Tabel 4.30 Hasil Abstraksi Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Studi.....	157
Tabel 4.31 Pengkodean Faktor Dalam Transkrip.....	161
Tabel 4.32 Hasil Arahan Faktor Pertambahan Penduduk Pendetang.....	163
Tabel 4.33 Hasil Arahan Faktor Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah Bagi Masyarakat Miskin.....	165
Tabel 4.34 Arahan Faktor Kurangnya Penyediaan Prasarana Persampahan.....	167

Tabel 4.35 Arahan Faktor Kurang Layaknya Penyediaan Prasarana Sanitasi.....	170
Tabel 4.36 Arahan Faktor Kurang Maksimalnya Kinerja Prasarana Drainase.....	171
Tabel 4.37 Arahan Faktor Jenis Pekerjaan Masyarakat.....	173
Tabel 4.38 Arahan Faktor Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat.....	175
Tabel 4.39 Arahan Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Memelihara Lingkungan.....	178
Tabel 4.40 Arahan Faktor Rendahnya Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	180
Tabel 4.41 Arahan Rendahnya Kapasitas Masyarakat Dalam Peningkatan Lingkungan.....	181
Tabel 4.42 Arahan Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	183
Tabel 4.43 Abstraksi Arahan dalam Peningkatan Lingkungan di Wilayah Studi.....	185

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Studi	7
Gambar 1.2 Kerangka Berfikir Penelitian	11
Gambar 3.1 Tahapan Proses dalam <i>Deductive Content Analysis</i> sasaran 2	58
Gambar 3.2 Proses <i>Inductive Content Analysis</i>	59
Gambar 3.3 Tahapan Proses dalam <i>Inductive Content Analysis</i> sasaran 3	61
Gambar 3.4 Proses Pengkategorian Dalam Sasaran 3	61
Gambar 3.5 Kerangka Berpikir Penelitian	65
Gambar 4.1 Klasifikasi Permukiman Kumuh Kelurahan Kapuk	69
Gambar 4.2 Bangunan Semi Permanen di Permukiman Kumuh Tingkat Rendah.....	72
Gambar 4.3 Bangunan Semi Permanen di Permukiman Kumuh Tingkat Sedang.....	73
Gambar 4.4 Keadaan Lokasi Banjir di Permukiman Kumuh Berat	75
Gambar 4.5 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kelurahan Kapuk	76
Gambar 4.6 Sarana Peribadatan di Kelurahan Kapuk	77
Gambar 4.7 Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Kapuk	79
Gambar 4.8 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	81
Gambar 4.9 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama ...	82
Gambar 4.10 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	83
Gambar 4.11 Kondisi Prasarana Air di Permukiman Kumuh Rendah.....	85
Gambar 4.12 Kondisi Prasarana Drainase di Permukiman Kumuh Rendah	86
Gambar 4.13 Diagram Kondisi Sanitasi di Permukiman Kumuh Rendah	86

Gambar 4.14 Kondisi Persampahan di Permukiman Kumuh Rendah.....	87
Gambar 4.15 Kondisi Prasarana Jalan di Permukiman Kumuh Rendah.....	87
Gambar 4.16 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Permukiman Kumuh Rendah	89
Gambar 4.17 Asal Daerah Masyarakat di Permukiman Kumuh Rendah.....	89
Gambar 4.18 Alasan Memilih Hunian Masyarakat di Permukiman Kumuh Rendah.....	90
Gambar 4.19 Status Kependudukan Masyarakat di Permukiman Kumuh Rendah.....	90
Gambar 4.20 Tingkat Keekerabatan Masyarakat di Permukiman Kumuh Rendah.....	91
Gambar 4.21 Jenis Pekerjaan Masyarakat di Permukiman Kumuh Rendah	91
Gambar 4.22 Tingkat Pendapatan Masyarakat di Permukiman Kumuh Rendah	92
Gambar 4.23 Intensitas Banjir di Permukiman Kumuh Rendah	92
Gambar 4.24 Ketinggian Banjir di Permukiman Kumuh Rendah.....	93
Gambar 4.25 Lama Genangan di Permukiman Kumuh Rendah	93
Gambar 4.26 Prasarana Air bersih di Permukiman Kumuh Sedang	94
Gambar 4.27 Diagram Kondisi Sanitasi	94
Gambar 4.28 Kondisi Persampahan di Permukiman Kumuh Sedang	95
Gambar 4.29 Kondisi Prasarana Drainase di Permukiman Kumuh Sedang.....	96
Gambar 4.30 Kondisi Prasarana Jalan di Permukiman Kumuh Sedang	96
Gambar 4.31 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang.....	97
Gambar 4.32 Asal Daerah Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang.....	98

Gambar 4.33 Alasan Memilih Hunian Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang	98
Gambar 4.34 Status Kependudukan Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang	99
Gambar 4.35 Tingkat Keekerabatan Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang	99
Gambar 4.36 Jenis Pekerjaan Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang.....	100
Gambar 4.37 Tingkat Pendapatan Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang.....	100
Gambar 4.38 Intensitas Banjir di Permukiman Kumuh Sedang.	101
Gambar 4.39 Lama Banjir di Permukiman Kumuh Sedang	101
Gambar 4.40 Ketinggian Genangan di Permukiman Kumuh Sedang	102
Gambar 4.41 Prasarana Air di Permukiman Kumuh Berat.....	102
Gambar 4.42 Diagram Kondisi Sanitasi	103
Gambar 4.43 Persampahan di Permukiman Kumuh Berat	103
Gambar 4.44 Prasarana Drainase di Permukiman Kumuh Berat	104
Gambar 4.45 Prasarana Jalan di Permukiman Kumuh Berat	104
Gambar 4.46 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Permukiman Kumuh Berat.....	105
Gambar 4.47 Asal Daerah Masyarakat di Permukiman Kumuh Berat	106
Gambar 4.48 Status Kependudukan Masyarakat di Permukiman Kumuh Berat	106
Gambar 4.49 Alasan Memilih Hunian Masyarakat di Permukiman Kumuh Berat	107
Gambar 4.50 Tingkat Keekerabatan Masyarakat di Permukiman Kumuh Berat	107
Gambar 4.51 Jenis Pekerjaan Masyarakat di Permukiman Kumuh Berat.....	108
Gambar 4.52 Tingkat Pendapatan di Permukiman Kumuh Berat	108
Gambar 4.53 Intensitas Banjir di Permukiman Kumuh Berat....	109

Gambar 4.54 Lama Genangan di Permukiman Kumuh Berat....	109
Gambar 4.55 Ketinggian Banjir di Permukiman Kumuh Berat...	110
Gambar 4.56 Diagram Komparasi Prasarana Air Bersih.....	111
Gambar 4.57 Diagram Komparasi Prasarana Drainase	111
Gambar 4.58 Kondisi Saluan Air di Permukiman Kumuh Ringan dan Kumuh Berat	112
Gambar 4.59 Diagram Komparasi Prasarana Kamar Mandi	113
Gambar 4.60 Diagram Komparasi Prasarana Jamban	113
Gambar 4.61 Kondisi Kamar Mandi di Permukiman Kumuh Sedang dan Kumuh Berat	114
Gambar 4.62 Diagram Komparasi Prasarana Persampahan	115
Gambar 4.63 Timbunan Sampah di Permukiman Kumuh Sedang dan Pembuangan Sampah Dengan cara Dibakar Di Permukiman Kumuh Berat	115
Gambar 4.64 Diagram Komparasi Aksesibilitas	116
Gambar 4.65 Diagram Komparasi Bahan Atap	116
Gambar 4.66 Diagram Komparasi Bahan Lantai	117
Gambar 4.67 Diagram Komparasi Bahan Dinding	117
Gambar 4.68 Kondisi Bangunan di permukiman kumuh sedang dan berat.....	118
Gambar 4.69 Komparasi Tingkat Pendidikan Masyarakat	119
Gambar 4.70 Komparasi Asal Daerah Masyarakat	119
Gambar 4.71 Komparasi Alasan Pemilihan Masyarakat	120
Gambar 4.72 Komparasi Status Kependudukan Masyarakat.....	121
Gambar 4.73 Komparasi Tingkat Keekerabatan Masyarakat	122
Gambar 4.74 Komparasi Jenis Pekerjaan Masyarakat.....	123
Gambar 4.75 Kompaasi Tingkat Pendapatan Masyarakat	124
Gambar 4.76 Komparasi Intensitas Genangan.....	125
Gambar 4.77 Komparasi Ketinggian Banjir	126
Gambar 4.78 Komparasi Lama Genangan.....	127
Gambar 4.79 Tahapan <i>Organizing</i> pada <i>Inductive Content Analysis</i>	159
Gambar 4.80 Peta Arahkan Faktor Pertambahan Jumlah Penduduk Pendatang	191

Gambar 4.81. Peta Arahkan Faktor Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah.....	192
Gambar 4.82 Peta Arahkan Faktor Kurangnya Penyediaan Sarana Persampahan.....	193
Gambar 4.83 Peta Arahkan Faktor Kurang Maksimalnya Kinerja Prasarana Drainase.....	194

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	201
LAMPIRAN II	209
LAMPIRAN III	216
LAMPIRAN IV	224
LAMPIRAN V	240
LAMPIRAN VI	244
LAMPIRAN VII	247

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut data Dinas Perumahan DKI Jakarta, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2011 berjumlah 9.607.787 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.315.763 jiwa/ha. Jumlah penduduk miskin di Jakarta tahun 2012 mencapai 363.200 jiwa. Dari luas total wilayah DKI Jakarta yang mencapai 66.200 Ha, sebesar 49,47% diperuntukkan sebagai kawasan perumahan dan permukiman dimana terdapat 5,4% permukiman kumuh didalamnya dengan 392 RW kumuh (Direktori Kumuh Tahun 2011).

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo,2005). Berdasarkan Direktori RW Kumuh 2011 dalam *Evaluasi RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011* menetapkan kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta yang memiliki RW kumuh didalamnya, dimana salah satunya adalah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan tipologi permukiman kumuh ringan, sedang, hingga berat.

Kelurahan Kapuk memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 562,68 Ha dan sebesar 131,27 Ha merupakan RW kumuh dengan jumlah penduduk kumuh sebesar 75.393 jiwa (BPS Provinsi DKI Jakarta Dalam *Evaluasi RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta, 2011*). Jumlah Rukun Warga (RW) keseluruhan di Kelurahan Kapuk berjumlah 16 RW dengan jumlah RW kumuh sebanyak 7 RW. RW dengan klasifikasi permukiman kumuh ringan sejumlah 1 buah (RW 07),

kumuh sedang 4 buah (RW 01, 03, 04 dan 13), dan kumuh berat 2 buah (RW 12 dan 16) (BPS Provinsi DKI Jakarta Dalam *Evaluasi RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta, 2011*). Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa Kelurahan Kapuk memiliki tingkat kumuh yang sangat bervariasi dari kumuh ringan, sedang, hingga berat.

Secara umum, apabila dilihat secara fisik, masing-masing tingkat RW kumuh tersebut memiliki karakteristik dasar yang beragam. Karakteristik dasar yang dapat ditemui di permukiman kumuh ringan, (RW 07) adalah adanya kedekatan dengan pusat kegiatan sosial-ekonomi berupa industri dan juga Rumah Pemotongan Hewan (RPH) (Survey Primer, 2013). Kedua, permukiman kumuh dengan kategori sedang (RW 01, 03, 04 dan 13), berdasarkan lokasinya, permukiman ini memiliki karakteristik lokasi permukiman kumuh di daerah bantaran kali (Survey Primer, 2013). Terakhir, karakteristik kumuh yang ditemui di permukiman dengan kategori permukiman kumuh berat (RW 12 dan 16), adalah RW dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dimana RW 12 memiliki kepadatan penduduk sebesar 449,58 jiwa/Ha dan RW 16 sebesar 1.431,79 jiwa/Ha (diolah dari Data Direktori RW Kumuh 2011)

Sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta sudah berusaha untuk dapat memperbaiki lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya program-program yang diberikan terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan kumuh. Program-program yang ada diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP), Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Mohammad Husni Thamrin (MHT) plus, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kampung Deret (Kantor Kelurahan Kapuk, 2013). Namun program-program tersebut belum memberikan hasil yang signifikan terhadap lingkungan permukiman tersebut.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali penanganan permukiman kumuh yang tepat dengan mengetahui seperti apa sebenarnya karakteristik permukiman kumuh yang terbentuk di Kelurahan Kapuk tersebut. Tidak hanya karakteristik yang membentuk permukiman kumuh di kelurahan tersebut, tetapi juga dengan mengetahui apa saja sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi kumuh.

Asumsi dasar dari konsep ini adalah, bahwa dalam merumuskan suatu arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, diperlukan adanya pemahaman secara komprehensif mengenai kondisi sebenarnya yang terdapat pada daerah permukiman kumuh tersebut sehingga dapat dirumuskan pendekatan atau upaya seperti apa yang tepat untuk diimplementasikan pada wilayah tersebut.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dalam penelitian ini akan dilakukan eksplorasi dan identifikasi mengenai karakteristik masing-masing kategori permukiman kumuh yang terbentuk di Kelurahan Kapuk, setelah mengetahui karakteristik eksisting kelurahan tersebut selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekumuhan di wilayah tersebut untuk kemudian dapat dilakukan analisis terkait arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang tepat.

1.2.Rumusan Masalah

Kelurahan Kapuk memiliki 7 RW yang masuk dalam kategori permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan yang beragam, mulai dari kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Adanya keragaman aspek yang membentuk masing-masing kategori kumuh, mulai dari segi lokasinya yang berdekatan dengan kegiatan industri, kondisi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hingga lokasi permukiman yang mengalami genangan/banjir. Tidak hanya adanya

keragaman aspek pembentuk permukiman kumuh, namun juga adanya faktor-faktor yang berkontribusi dalam terjadinya permukiman kumuh di kelurahan tersebut sehingga perlu adanya suatu upaya dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan cara memahami secara komprehensif akar penyebab kekumuhan yang terdapat di kelurahan tersebut.

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah *:Bagaimana rumusan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat ?*

1.3. Tujuan Dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat berdasarkan faktor-faktor penyebab kekumuhannya.

1.3.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a. Mengidentifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh berdasarkan tingkat kekumuhan di Kelurahan Kapuk
- b. Menganalisis faktor-faktor penyebab kekumuhan di Kelurahan Kapuk
- c. Merumuskan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan pada lingkup penelitian terdiri dari tiga bagian, yaitu lingkup wilayah penelitian, lingkup substansi, dan lingkup pembahasan.

1.4.1. Lingkup wilayah penelitian

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kelurahan Kapuk yang terletak di Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Luas wilayah penelitian adalah 562,68 Ha. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kelurahan Kapuk adalah sebagai berikut :

Utara : Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal

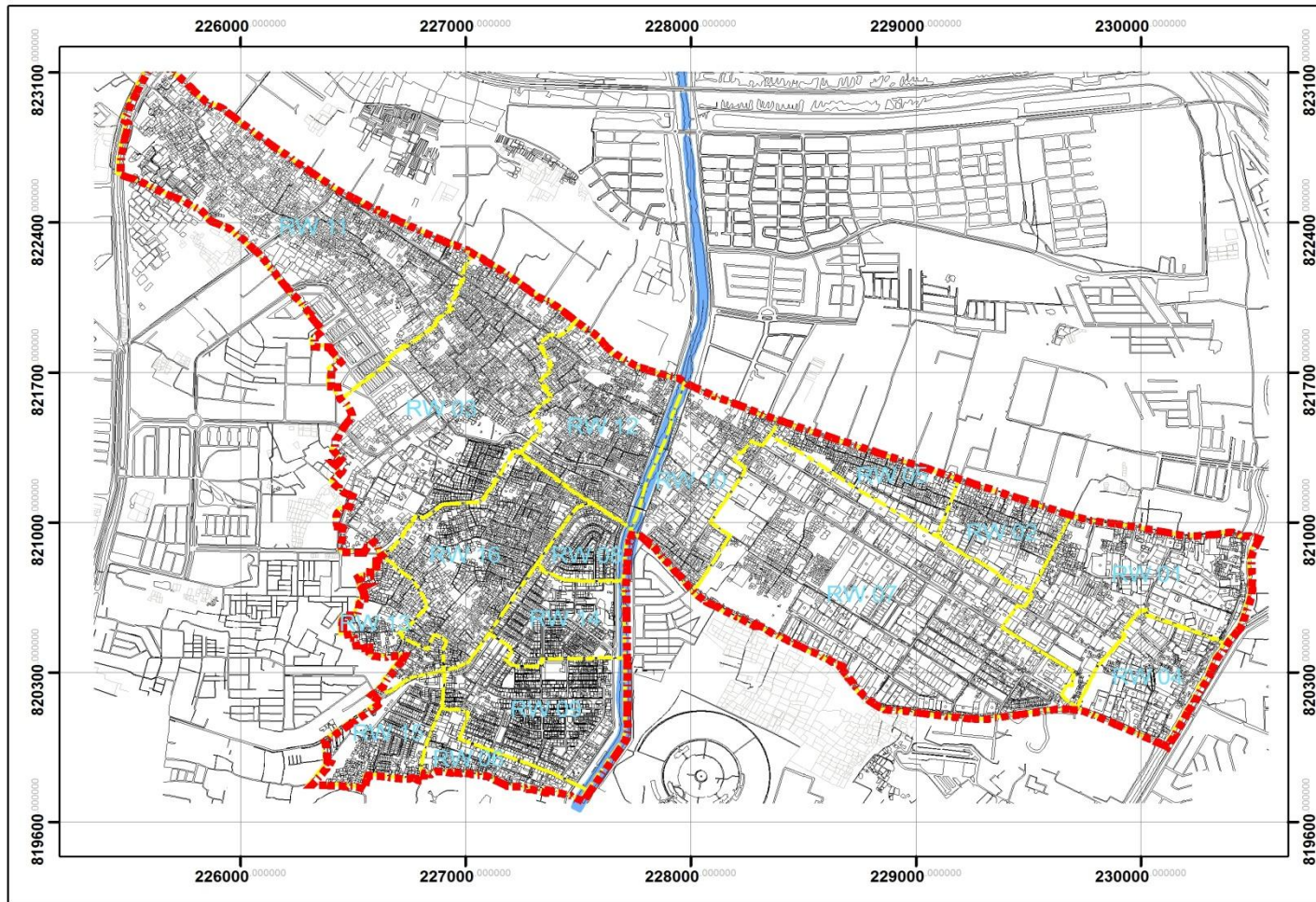
Timur : Kelurahan Kedaung Kali Angke

Selatan : Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Kedaung Kali Angke

Barat : Kelurahan Cengkareng Timur

Peta wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

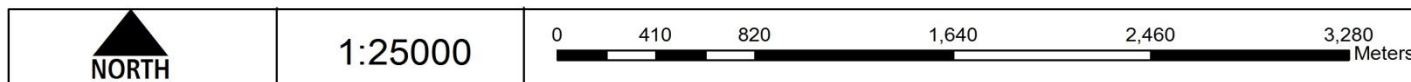


Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Legenda

-  Batas Kelurahan Kapuk
-  Batas RW
-  Jalan
-  Sungai

Sumber :
Suku Dinas Tata Ruang
Kota Administrasi Jakarta Barat



Peta 1. Batas Wilayah Kelurahan Kapuk

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

1.4.2. Lingkup Substansi

Adapun ruang lingkup substansi dalam penelitian ini diantaranya menggunakan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan karakteristik permukiman kumuh dan upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuh.

1.4.3. Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini meliputi gambaran atas identifikasi dan analisis aspek-aspek seperti karakteristik masyarakat di permukiman kumuh, kemudian karakteristik lingkungan, serta upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuh didalamnya.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan mengenai upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh.

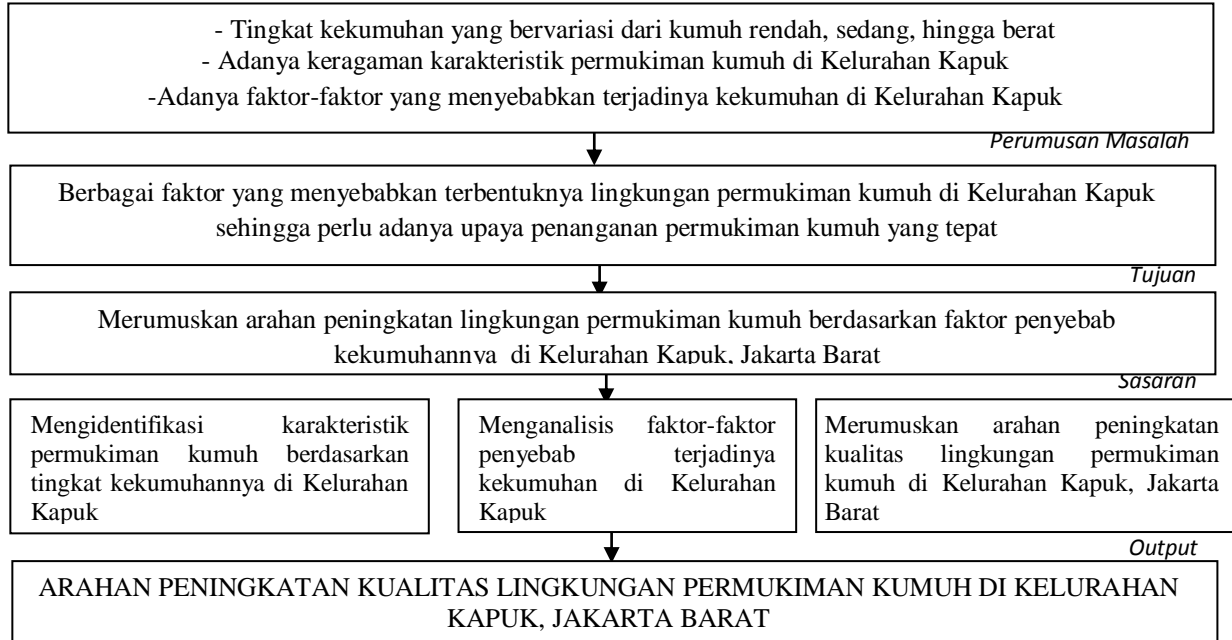
1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian adalah diharapkan dapat memberikan masukan mengenai upaya peningkatan lingkungan permukiman kumuh yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam menangani permukiman kumuh, khususnya pada wilayah studi yaitu di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

1.6 Kerangka Berpikir

Latar Belakang



Gambar 1.2. Kerangka Berfikir Penelitian

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir penelitian, hasil yang diharapkan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang seluruh teori dan studi literatur terkait yang sesuai dengan tema dan topik serta permasalahan yang ada di penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam melaksanakan seluruh rangkaian proses penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pengamatan atau pengumpulan data dan informasi lapangan serta pengolahan data dan informasi

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil peneliti.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Permukiman Kumuh

2.1.1. Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya parasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan kehidupan penghuninya (Budiharjo,1997). Definisi lain terkait permukiman kumuh berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sadyohutomo (2008) menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah tempat tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman padat tidak teratur di pinggiran kota yang penghuninya umumnya berasal dari para migran luar daerah. Suparlan (2000) dalam Andini (2013) mengatakan bahwa permukiman kumuh dapat dicirikan sebagai berikut :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin
3. Tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan

- adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :
 - a. Sebuah komunitas tunggal di tanah milik Negara, dan arena itu digolongkan sebagai hunian liar
 - b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
 - c. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai kelurahan, dan bukan hunian liar.
 5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya.
 6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencahariantambahan di sektor informal.

Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh merupakan suatu lingkungan hunian yang dilihat pada kondisi fisiknya yang mengalami penurunan kualitas utamanya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang umumnya tidak memadai, memiliki kepadatan yang tinggi dan kualitas bangunan yang buruk. Tidak hanya secara fisik, secara sosial umumnya penghuni permukiman kumuh juga terdiri dari masyarakat yang beranekaragam asalnya dan bukan merupakan penduduk asli. Dalam hal ini, permukiman kumuh juga merupakan lingkungan yang terdiri dari satuan komuniti

tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai kelurahan dan bukan merupakan hunian liar. Dari kajian tersebut maka dapat dirumuskan indikator penelitian mengenai permukiman kumuh adalah:

1. Sarana dan prasarana
Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat.
2. Kondisi fisik bangunan
Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada keadaan fisik bangunan rumah pada lingkungan permukiman tersebut.
3. Sosial
Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada asal dan pola hidup masyarakat setempat.

2.1.2. Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Avelar et al (2008) karakteristik permukiman permukiman kumuh adalah kondisi perumahan dengan kepadatan tinggi dan ukuran unit perumahan relatif kecil, atap rumah di daerah kumuh biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan dinding dan tidak jarang pula permukiman kumuh terdapat di daerah yang secara berkala mengalami banjir. Sedangkan Silas (1996) mencirikan karakteristik permukiman kumuh sebagai berikut :

1. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas kota secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.
2. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat dengan tempat mencari nafkah

(*opportunity value*) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.

3. Manfaat permukiman disamping pertimbangan lapangan pekerjaan dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi.

Menurut Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Depdagri), ciri-ciri permukiman atau daerah perkampungan kumuh dan miskin dipandang dari segi sosial ekonomi adalah:

1. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan
2. Sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal. Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarana di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki :
 - a. Kepadatan penduduk yang tinggi >200 jiwa/km²
 - b. Kepadatan bangunan >110 bangunan/Ha
 - c. Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan)
 - d. Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun <20% dari luas persampahan
 - e. Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal.
 - f. Permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan.
 - g. Kawasan permukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungan.

Rahardjo (2005), mengatakan bahwa permukiman kumuh dapat dilihat dari karakteristiknya sebagai berikut :

1. Dari segi fisik
Pada umumnya ukuran persil dan tanah sempit serta dibawah standar dalam arti ratio luas ruang tempat

tinggal per satu jiwa sangat rendah, pola penggunaan lahan tidak teratur, letak dan bentuk bangunan tidak teratur, prasarana fisik lingkungan seperti air minum, drainase, air limbah dan sampah dibawah standar atau sama sekali tidak ada. Kesehatan lingkungan sangat rendah, hal ini diakibatkan karena kurang sempurnanya pembuangan air limbah rumah tangga dan sampah sehingga sering terkena wabah penyakit. Selain itu, ciri lainnya adalah kondisi jaringan jalan yang tidak beraturan dan juga kondisi bangunan yang umumnya terbuat dari material temporer atau semi permanen dan umumnya dalam keadaan kurang memenuhi syarat.

2. Dari segi sosial

Pada umumnya merupakan lingkungan yang padat dalam area yang terbatas. Mayoritas pendapatan penduduk rendah, tingkat pendidikan masyarakat juga rata-rata rendah, serta umumnya memiliki hubungan antara individu yang lebih menonjol dibanding masyarakat pada bagian kota lainnya. Lebih lanjut Colletta & Cullen dalam Nasdian (2014) menyatakan bahwa modal sosial yang terdapat di masyarakat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial dan ekonomi seperti pandangan umum (*world-view*), kepercayaan (*trust*), pertukaran timbal-balik (*reciprocity*), pertukaran ekonomi dan informasi (*informational and economic exchange*), kelompok-kelompok formal dan informal, serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi modal-modal lainnya (fisik, manusiawi, budaya) sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Selanjutnya Nasdian (2014) mengatakan bahwa modal sosial memiliki 4 dimensi. Pertama adalah integrasi, yaitu ikatan yang kuat antar anggota

keluarga, dan keluarga dengan tetangga sekitarnya. Contohnya, ikatan berdasarkan kekerabatan, etnik, dan agama. Kedua, pertalian (*linkage*), yaitu ikatan dengan komunitas lain diluar komunitas asal. Ketiga, integritas organisasional, yaitu keefektifan dan kemampuan institusi negara untuk menjalankan fungsinya, termasuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan peraturan. Keempat, sinergi, yaitu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintah dengan komunitas.

3. Dari segi hukum

Sebagian besar kawasan permukiman kumuh umumnya terbentuk tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang ada, hal ini disebabkan karena langka dan mahalnya lahan diperkotaan.

4. Dari segi ekonomi

Umumnya terdiri dari masyarakat dengan pola mata pencaharian yang heterogen, tingkat produktivitas dan kesehatan lingkungan rata-rata rendah, sektor perekonomian bersifat informal, misalnya seperti penarik becak, buruh, pedagang kaki lima, dan tingkat pendapatn yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya Dwyer (1975) menjabarkan beberapa karakter sosial-ekonomi secara umum yang terdapat pada kawasan kumuh, diantaranya yaitu:

1. Ketidakragaman karakteristik masyarakat per negara, regional, maupun kota. Pandangan umum mengatakan bahwa karakteristik masyarakat permukiman kumuh adalah tidak berpendidikan, miskin, dan kebanyakan pengangguran.
2. Masyarakat permukiman kumuh memiliki asal daerah yang berbeda-beda. Adapun asal dari masyarakat permukiman kumuh ini juga berbeda-beda dan tidak bisa diasumsikan semuanya berasal dari wilayah

perdesaan. Terdapat pula beberapa wilayah permukiman kumuh yang didiami oleh migran dari pusat kota yang sudah terlalu padat. Secara umum, asal masyarakat kumuh dapat dikategorikan dalam dua jenis migrasi yaitu: perpindahan langsung (direct movement) dari pinggir kota ke pusat kota dan perpindahan bertahap (step migration) dari kota kecil ke kota besar. Adapun perbedaan jenis migrasi ini berdampak pada kondisi masyarakat permukiman kumuh. Dimana untuk step migration kemiskinan seringkali terjadi di kota kecil tempat para migran pertama kali tiba.

Berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik permukiman kumuh diatas, pada dasarnya terdapat kesamaan pemikiran antara para ahli tersebut. Guna memudahkan pemahaman dalam mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh, berikut akan disajikan matrik kompilasi dari teori tersebut.

Tabel 2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh

Sumber Teori	Karakteristik Permukiman Kumuh	Aspek Penentuan Permukiman Kumuh
Avelar et al (2008)	1) Kondisi perumahan dengan kepadatan tinggi	Fisik
	2) Ukuran unit perumahan relatif kecil	Fisik
	3) Atap rumah terbuat dari bahan yang sama dengan dinding	Fisik
	4) Terdapat di daerah yang secara berkala mengalami banjir	Bahaya (<i>Hazard</i>)
Silas (1996)	1) Keadaan rumah dibawah standar	Fisik

Sumber Teori	Karakteristik Permukiman Kumuh	Aspek Penentuan Permukiman Kumuh
	2) Fasilitas kotaan secara langsung tidak terlayani	Sarana an Prasarana
	3) Dekat tempat mencari nafkah	Sosial
	4) Harga rumah terjangkau (asas keterjangkauan)	Sosial
	5) Aksesibilitas tinggi	Sosial
Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Depdagri)	1) Penduduknya berpenghasilan rendah	Ekonomi
	2) Penduduk berpendidikan rendah	Sosial
	3) Penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal	Ekonomi
	4) Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarana di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim	Sarana dan Prasarana
Rahardjo (2005)	1) Memiliki ukuran persil dan tanah sempit	Fisik
	2) Pola penggunaan lahan tidak teratur, letak dan bentuk bangunan tidak teratur	Fisik
	3) Prasarana fisik lingkungan seperti air minum, drainase,	Sarana dan Prasarana

Sumber Teori	Karakteristik Permukiman Kumuh	Aspek Penentuan Permukiman Kumuh
	air limbah dan sampah dibawah standar atau sama sekali tidak ada	
	4) Kondisi jaringan jalan yang tidak beraturan	Sarana dan Prasarana
	5) Kondisi bangunan yang umumnya terbuat dari material temporer atau semi permanen	Fisik
	6) Pendapatan penduduk rendah	Ekonomi
	7) Tingkat pendidikan masyarakat juga rata-rata rendah	Sosial
	8) Memiliki hubungan antara individu yang lebih menonjol dibanding masyarakat pada bagian kota lainnya.	Sosial
	9) Pola mata pencaharian yang heterogen, dan sektor perekonomian bersifat informal	Ekonomi

Sumber Teori	Karakteristik Permukiman Kumuh	Aspek Penentuan Permukiman Kumuh
Dwyer (1975)	1) Masyarakat permukiman kumuh adalah tidak berpendidikan	Sosial
	2) Masyarakatnya miskin, dan kebanyakan pengangguran.	Ekonomi

Sumber: Hasil Kompilasi Teori, 2014

Berdasarkan hasil komparasi mengenai karakteristik permukiman kumuh pada tabel diatas, maka secara garis besar karakteristik permukiman kumuh tersebut dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu Sarana dan Prasarana, Fisik, Ekonomi, Bahaya (*Hazard*) dan Sosial. Sintesa yang didapat dari membandingkan karakteristik pada tabulasi diatas adalah bahwa indikator yang digunakan terkait dengan penelitian, yaitu :

1. Sarana dan prasarana
Aspek sarana dan prasarana penting untuk ditinjau di lokasi penelitian, mengingat umumnya ketersediaan dari kebutuhan dasar tersebut di wilayah permukiman kumuh cukup minim. Adapun variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana seperti drainase, air bersih, sanitasi, persampahan, dan kondisi jalan.
2. Kondisi fisik
Konstruksi bangunan yang terdapat di wilayah permukiman kualitas rendah umumnya bukan merupakan bangunan permanen, dimana umumnya

masyarakat menggunakan material temporer didalamnya. Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat baik pada kondisi fisik bangunan.

3. Sosial

Kondisi sosial ini dapat ditinjau baik dari keadaan masing-masing individu maupun keterkaitan antar individu itu sendiri. Kondisi sosial dari masing-masing individu, dapat dilihat seperti misalnya dari tingkat pendidikan yang dimiliki masing-masing masyarakat, alasan pemilihan masyarakat untuk bermukim, status kependudukan masyarakat, dan asal daerah masyarakat penghuni yang umumnya merupakan mereka yang melakukan urbanisasi. Sedangkan untuk kondisi sosial dalam hal keterkaitan antar individu, merupakan keadaan dimana didalam masyarakat permukiman kumuh umumnya memiliki keterkaitan antar individu yang cukup menonjol (*social capital*).

Variabel yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah melihat pada tingkat pendidikan, status kependudukan, alasan pemilihan lokasi, asal daerah masyarakat, dan tingkat kekerabatan.

4. Ekonomi

Kondisi ekonomi yang dimiliki masyarakat permukiman kumuh umumnya cukup lemah dengan jenis pekerjaan sebagian besar penduduknya yang berusaha atau bekerja di sektor informal.

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada jenis pekerjaan masyarakat dan pendapatan masyarakat

5. Bahaya (*Hazard*)

Tidak jarang permukiman kumuh yang ada rawan terhadap bencana, seperti banjir dan terdapat di daerah yang secara berkala mengalami banjir.

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada intensitas dan lamanya terjadinya banjir/genangan di lingkungan tersebut.

2.1.3. Tipologi Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh secara umum diklasifikasikan menjadi 7 tipologi (Ditjen Perumahan dan Permukiman,2002) berdasarkan lokasinya terdiri dari :

- a. Daerah pesisir pantai/nelayan
Merupakan permukiman kumuh yang terletak di daerah pesisir laut yaitu luar area antara garis pasang tertinggi dan terendah, dengan bangunan-bangunan yang langsung bertumpu pada tanah, baik itu bangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya.
- b. Dekat pusat kegiatan sosial ekonomi
Permukiman kumuh yang terletak disekitar pusat-pusat aktifitas sosial-ekonomi, seperti lingkungan industri, pasar tradisional, pertokoan, lingkungan pendidikan/kampus, obyek-obyek wisata dan pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi lainnya.
- c. Pusat kota
Permukiman kumuh yang terletak di tengah kota (*urban core*) yang pada umumnya berada di sekitar pusat-pusat keramaian dimana banyak bermunculan usaha-usaha sektor informal
- d. Pinggiran kota
Permukiman kumuh pinggiran kota adalah permukiman kumuh yang berada di luar pusat kota (*urban fringe*), yang ada pada umumnya merupakan permukiman yang tumbuh dan berkembang di pinggiran kota sebagai konsekuensi dari perkembangan kota, perkembangan penduduk yang sangat cepat serta tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sangat tinggi.

- e. Daerah pasang surut
Merupakan permukiman kumuh yang terletak didaerah antara garis pasang tertinggi dan terendah yang secara berkala selalu terendam air pasang, dengan sebagian besar type bangunan yang ada baik itu bangunan rumah tinggal maupun bangunan lainnya adalah tipe panggung. Jalan penghubung antara bangunan yang satu dengan bangunan lainnya adalah jalan titian. Karakter lain yang cukup menonjol adalah perletakan dermaga atau tempat menambat perahu yang berdekatan dengan permukiman
- f. Daerah rawan bencana
Permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya tanah longsor, gempa bumi dan banjir.
- g. Daerah bantaran
Permukiman kumuh yang menempati area-area sempadan yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kawasan terbangun. Permukiman kumuh jenis ini pada umumnya berlokasi di area bantaran sungai, bantarat rel kereta api, kolong jalan layang, dsb.

Berdasarkan pada tipologi permukiman yang dikemukakan diatas, maka permukiman kumuh dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan pada kedekatan permukiman dengan kegiatan ataupun lokasi tertentu yang kemudian membentuk dan mempengaruhi karakteristik dari permukiman kumuh itu sendiri. Dari hasil kajian terhadap tipologi permukiman kumuh, maka indikator yang dirumuskan dalam penelitian adalah :

1. Lahan

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada lokasi lahan permukiman kumuh berada

2. Bahaya (*Hazard*)

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada kerawanan lokasi permukiman kumuh terhadap bencana banjir.

2.1.4 Penyebab Pertumbuhan Permukiman Kumuh

Cities Alliance (2000) dalam Chang (2009) menyebutkan bahwa permukiman kumuh terjadi karena adanya penerapan kebijakan yang tidak sesuai/tepat sasaran, pasar lahan yang tidak berfungsi dengan baik, sistem keuangan yang tidak responsif terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, dan politik. Sedangkan menurut Constantinos A. Doxiadis (1968) dalam Surtiani (2006) pertumbuhan permukiman kumuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

a. *Growth of density* (pertumbuhan penduduk)

Dengan adanya penambahan penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertumbuhan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang terdapat di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

b. *Urbanization* (Urbanisasi)

Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk dapat tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan

menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

Pendapat lain yang mengatakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh di perkotaan menurut (Masrun-Dinas PU Kabupaten Konawe, Kendari, 2009), yaitu :

a. Aspek Urbanisasi

Terdapat beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa peluang dan kesempatan kerja akan lebih banyak ditemui di kawasan perkotaan. Hal tersebutlah yang kemudian memicu pesatnya laju urbanisasi, sehingga terjadi penambahan penduduk tiap tahunnya yang jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja di dalam wilayahnya. Hal inilah yang membuat semakin bertambah beratnya permasalahan perkotaan.

b. Aspek Ekonomi

Desakan ekonomi yang ada, memaksa para kaum urban untuk menempati *slum areayang* kemudian membentuk lingkungan permukiman kumuh. Selain itu, karena rendahnya tingkat ekonomi yang dimiliki masyarakat tersebut juga berakibat pada terbatasnya akses masyarakat dalam menjangkau hunian yang layak dan juga terbatasnya kemampuan mereka untuk dapat mengakses pelayanan sarana dan prasarana yang layak.

c. Aspek Lahan Perkotaan

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat telah menyebabkan berbagai persoalan serius, diantaranya adalah permasalahan terkait perumahan. Permasalahan perumahan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penyediaan unit hunian bagi kaum mampu dan kaum tidak mampu dipertkotaan.

- d. **Aspek Peran Pemerintah Dalam Penyediaan dan Pelayanan Prasarana dan Sarana Dasar**
Pada umumnya lingkungan permukiman kumuh dicirikan dengan tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti misalnya suplai airbersih, drainase, sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan kesehatan, ruang terbuka, pasar, dan sebagainya. Rendahnya ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana dasar ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Selain pemerintah, adanya kemampuan dan kapasitas serta kesadaran masyarakat yang juga terbatas kerap kali menambah buruk permasalahan terkait penyediaan sarana dan prasarana dasar tersebut.
- e. **Faktor Sosial Budaya**
Umumnya permukiman kumuh juga ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakatnya. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tersebut umumnya juga akan berpengaruh pada rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat tersebut sehingga membatasi akses mereka terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan hunian dan lingkungan yang sehat.
- f. **Faktor Tata Ruang**
Perencanaan tata ruang kota yang dilakukan juga perlu didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Investasi yang salah terhadap pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya

lingkungan permukiman kumuh atau kantong-kantong lingkungan permukiman kumuh baru.

Berdasarkan paparan menurut Masrun (2009) tersebut dapat diketahui bahwa yang menyebabkan tumbuhnya suatu lingkungan kumuh adalah akibat adanya laju urbanisasi, keterbatasan ekonomi, peran pemerintah, keterbatasan lahan perkotaan, minimnya sarana dan prasarana, sosial budaya, dan juga aspek tata ruang. Selain pendapat dari kedua teori tersebut, terdapat pendapat lainnya yang juga membahas mengenai penyebab adanya permukiman kumuh menurut Rindarjono (2007) adalah :

a. Faktor Urbanisasi

Laju urbanisasi yang tidak terkendali serta proses urbanisasi yang tidak terorganisir dengan baik berakibat terhadap adanya krisis perumahan.

b. Faktor Lahan

Peningkatan kebutuhan akan lahan untuk bertempat tinggal bagi penduduk kota yang tidak diimbangi dengan peningkatan luas lahan akan menyebabkan terjadinya pemadatan rumah mukim (densifikasi) dan menurunnya kualitas permukiman itu sendiri (deteriorisasi)

c. Faktor Ekonomi

Umumnya seseorang atau sebuah keluarga yang berpenghasilan rendah akan cenderung meletakkan prioritas lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat memberikan kesempatan kerja karena tanpa adanya kesempatan kerja yang dapat menopang kebutuhan sehari-hari maka akan sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan hidupnya.

Berdasarkan paparan dari berbagai pendapat mengenai faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh

tersebut, hampir semua pendapat sepakat bahwa urbanisasi merupakan salah satu aspek yang memicu terbentuknya lingkungan kumuh. Selain urbanisasi, hal lainnya yang juga turut mempengaruhi adalah aspek lahan, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan luas lahan yang terdapat di perkotaan. Minimnya penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana juga menjadi aspek pembentuk lingkungan kumuh lainnya. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. selanjutnya, aspek sosial budaya juga merupakan salah satu aspek yang ambil bagian dalam pembentukan lingkungan kumuh di perkotaan karena pada umumnya, masyarakat yang menempati lingkungan tersebut memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah yang kemudian juga akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendapatan sehingga dapat membatasi akses masyarakat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemenuhan hunian yang layak. Aspek lainnya adalah lokasi, umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah akan cenderung meletakkan prioritas lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat memberikan kesempatan kerja.

Dari kajian diatas, maka dapat dirumuskan indikator penelitian terkait dengan faktor yang menyebabkan permukiman kumuh, yaitu

1. Urbanisasi
Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada penambahan jumlah penduduk yang ada.
2. Peran Pemerintah
Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada, penyediaan perumahan layak.

3. Sarana dan Prasarana
Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada penyediaan sarana dan prasarana air bersih, persampahan, sanitasi, saluran drainase dan jalan yang memadai.
4. Sosial Budaya
Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada tingkat pendidikan masyarakat
5. Ekonomi
Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada jenis pekerjaan masyarakat, lokasi tempat bekerja, dan tingkat pendapatan masyarakat.
6. Peran Masyarakat
Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada keinginan masyarakat di dalam menjaga dan memelihara lingkungannya, kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana dasar dan kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungannya.

2.2. Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh

Penanganan permukiman kumuh dilakukan sebagai upaya perbaikan lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, kepadatan bangunan sangat tinggi, struktur bangunan sangat rendah, dan umumnya memiliki keterbatasan terhadap akses sarana dan prasarana permukiman, seperti drainase, sampah, air bersih dan sebagainya.

Program peningkatan kualitas lingkungan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan permukiman yang masuk kedalam kategori kawasan kumuh yang ditandai dengan kondisi prasarana dan sarana yang tidak memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi sosial budaya masyarakat yang umumnya juga rendah, dan kondisi lingkungan yang rawan bencana penyakit, dan keamanan (*Dirjen Cipta Karya, 1999*)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 27 menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas permukiman meliputi upaya melalui perbaikan atau pemugaran, peremajaan serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Yang dimaksud dengan peremajaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan perbaikan dengan perubahan yang mendasar dan penataan yang menyeluruh terhadap kawasan hunian yang kumuh. Dalam menangani permukiman kumuh sebagai langkah-langkah perbaikan lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan dimana umumnya memiliki kondisi kehidupan masyarakat yang memprihatinkan, kepadatan bangunan yang sangat tinggi, struktur bangunan yang sangat rendah, serta kurangnya akses prasarana dan sarana permukiman, maka kondisi non fisik seperti sosial budaya masyarakat perlu dipahami sebagai pendekatan dalam upaya penanganan dimasa mendatang secara seimbang dan berkesinambungan.

2.3. Hasil Studi Terkait

Tina Chang, dalam jurnalnya *Improving Slum Conditions with Public-Private Partnerships*, 2009, mengambil contoh upaya perbaikan lingkungan permukiman di Ahmedabad, India. Permukiman kumuh di Ahmedabad terjadi karena adanya kegiatan ekonomi berupa industri tekstil

dan telekomunikasi sehingga menyebabkan banyaknya penduduk yang bermigrasi ke wilayah tersebut. Akibatnya, karena sektor formal tidak mampu memenuhi permintaan akan rumah yang layak, maka hal ini menyebabkan terciptanya permukiman informal di wilayah tersebut. Dalam *paper* tersebut menjelaskan, karena kompleksnya permasalahan yang dijumpai pada kawasan permukiman kumuh, maka perlu adanya suatu upaya yang tidak lagi konvensional, yang hanya mengandalkan pihak pemerintah saja, diperlukan suatu upaya yang lebih inovatif didalamnya, seperti misalnya saja dengan mengajak pihak lain untuk bekerja sama, seperti yang dikutip dalam *paper* tersebut :

“Due to the complexity and multitude of underlying issues presented by slum settlements, conventional publicpartnership fail to adequately address this complexity”

Selain pemerintah, pihak lain yang juga dapat dilibatkan adalah pihak swasta, *non-governmental organization* (NGO), dan juga peran serta masyarakat itu sendiri. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penunjang dalam melakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di wilayah studi, misalnya saja dengan melibatkan pihak-pihak lainnya selain pemerintah, seperti pihak swasta. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di permukiman kumuh.

2.4. Sintesa Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa teori yang dibahas dan dikaji dalam tinjauan pustaka ini, didapatkan beberapa hal yang relevan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis arahan peningkatan lingkungan permukiman kumuh yang didasarkan pada faktor-faktor penyebab kekumuhan di Kelurahan Kapuk.

2.4.1. Karakteristik Permukiman Kumuh

Dari kajian pustaka terkait dengan karakteristik permukiman kumuh, didapatkan indikator yang dapat digunakan dalam mengetahui karakteristik permukiman kumuh yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

1 Sarana dan Prasarana

Merupakan aspek dasar yang diperlukan masyarakat dalam menunjang kehidupannya sehari-hari. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai kerap kali menjadi permasalahan utama yang ditemui pada lingkungan permukiman kumuh. Adapun variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana seperti drainase, air bersih, sanitasi, persampahan, dan kondisi jalan.

2 Kondisi Fisik

Pada dasarnya permukiman kumuh umumnya dapat dilihat berdasarkan penampakan fisik bangunan yang terdapat didalamnya. Dalam penelitian guna mengetahui karakteristik permukiman kumuh dilihat dari sudut pandang kondisi fisiknya, memiliki variabel berupa kondisi fisik bangunan.

3 Sosial

Tidak hanya dari aspek fisik saja, namun permukiman kumuh dapat pula dilihat dari aspek sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat padatingkat pendidikan, status kependudukan, alasan pemilihan lokasi, asal daerah masyarakat, dan tingkat kekerabatan.

4 Ekonomi

Dapat mengetahui bagaimana karakteristik ekonomi yang dimiliki masyarakat di lingkungan

permukiman kumuh. Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada jenis pekerjaan masyarakat dan pendapatan masyarakat

5 Bahaya (*Hazard*)

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada intensitas dan lamanya terjadinya banjir/genangan di lingkungan tersebut.

2.4.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Permukiman Kumuh

Dari teori terkait faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya lingkungan permukiman kumuh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator yang berpengaruh tersebut, diantaranya adalah :

1 Urbanisasi

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada penambahan jumlah penduduk yang ada.

2 Peran Pemerintah

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada kesesuaian kebijakan dan penyediaan perumahan layak.

3 Sarana dan Prasarana

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada penyediaan sarana dan prasarana air bersih, persampahan, sanitasi, saluran drainase dan jalan yang memadai

4 Sosial Budaya

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada tingkat pendidikan masyarakat

5 Ekonomi

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada jenis pekerjaan masyarakat, lokasi tempat bekerja, dan tingkat pendapatan masyarakat.

6 Peran Masyarakat

Variabel yang dapat digunakan dalam mengukur indikator tersebut adalah dengan melihat pada keinginan masyarakat di dalam menjaga dan memelihara lingkungannya, kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana dasar dan kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungannya

Tabel 2.2 Sintesa Tinjauan Teori

Tinjauan Teori	Indikator	Variabel
Karakteristik Permukiman Kumuh	Sarana dan Prasarana	1. Ketersediaan air bersih 2. Ketersediaan sanitasi 3. Ketersediaan persampahan 4. Kondisi dan ketersediaan drainase 5. Kondisi jalan
	Fisik	Kondisi bangunan
	Sosial	1. Tingkat pendidikan asal daerah masyarakat. 3. Alasan Pemilihan Lokasi 4. Status kependudukan 5. Tingkat kekerabatan.
	Ekonomi	1. Jenis pekerjaan masyarakat 2. Pendapatan

Tinjauan Teori	Indikator	Variabel
		masyarakat
	Bahaya (Hazard)	Intensitas dan lama terjadinya genangan/banjir
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Permukiman Kumuh	Urbanisasi	Pertambahan jumlah penduduk
	Peran Pemerintah	Penyediaan perumahan layak
	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan prasarana air bersih 2. Pemenuhan prasarana persampahan 3. Pemenuhan prasarana sanitasi 4. Pemenuhan prasarana saluran drainase 5. Pemenuhan prasarana jalan
	Sosial Budaya	Tingkat pendidikan masyarakat
	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis pekerjaan masyarakat 2. Tingkat pendapatan masyarakat
	Peran Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungannya 2. Kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana dasar 3. Kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungannya.

Sumber : Hasil Analisa Pustaka, 2014

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, penentuan *stakeholder* kunci, teknik analisis, dan tahapan penelitian.

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara rasionalistik. Pendekatan rasionalistik membangun kebenaran teori secara empiri atau bersumber dari fakta empiri. Artinya, ilmu yang dibangun berasal dari pengamatan indera atau secara nalar yang kemudian didukung oleh landasan teori. Sarasin (1996) mengatakan bahwa desain penelitian yang bercorak rasionalistik ini dibuat berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori yang dikenal, buah pikiran para pakar dan dikonstruksikan menjadi sesuatu yang problematik yang kemudian diteliti. Dalam hal ini kebenaran empiri yang didapatkan adalah berupa adanya permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk yang kemudian diteliti dengan mengacu pada teori-teori yang ada, dimana dalam penelitian ini fokus penelitian adalah untuk menentukan bagaimana arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang ada di kelurahan tersebut dengan mengacu pada faktor-faktor penyebab kekumuhannya.

3.2. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Lincoln dan Guba (1985) dalam Jackson (2007) menyebutkan bahwa “manusia sebagai instrumen” adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Sementara menurut Kirk dan Miller (1986), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya. Artinya, penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dimana proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian. Landasan teori digunakan sebagai panduan yang memfokuskan penelitian agar sesuai dengan fakta empiri di lapangan.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan faktor dasar yang diperoleh dari sintesa tinjauan pustaka dan memiliki ukuran sehingga dapat ditentukan sifat penelitian yang kualitatif. Variabel penelitian merupakan gambaran awal dari hasil penelitian yang dijadikan dasar suatu penelitian. Untuk itu perlu dilakukan pengorganisasian variabel yang berisi tahapan, cara mengorganisasikan variabel-variabel tersebut beserta definisi operasionalnya dimana definisi tersebut berfungsi sebagai petunjuk dalam menemukan data yang sesuai dengan empirisnya

Tabel 3.1
Variabel Penelitian beserta Definisi Operasionalnya

No	Sintesa Teori	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
1	Karakteristik Permukiman Kumuh	Sarana dan Prasarana	Prasarana air bersih	Kondisi pemenuhan prasarana air bersih
			Prasarana sanitasi	Kondisi pemenuhan prasarana sanitasi

No	Sintesa Teori	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
			Prasarana persampahan	Kondisi pemenuhan prasarana persampahan
			Prasarana drainase	Kondisi pemenuhan prasarana drainase
			Kondisi jalan	Kondisi prasarana jalan di lingkungan permukiman
		Fisik	Kondisi bangunan	Jenis bahan material yang digunakan pada atap, lantai dan dinding bangunan (asbes, semen, tembok, papan, ½papan+½tembok, dsb)
		Sosial	Tingkat pendidikan	Jenjang pendidikan formal tertinggi yang dimiliki masyarakat
			Asal daerah masyarakat.	Asal daerah masyarakat permukiman kumuh
			Alasan Pemilihan lokasi	Alasan masyarakat permukiman kumuh dalam memilih lokasi hunian

No	Sintesa Teori	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
			Status kependudukan	Status kependudukan masyarakat permukiman kumuh
			Tingkat kekerabatan.	Tingkat hubungan kekerabatan antar masyarakat di lingkungan permukiman kumuh
		Ekonomi	Jenis pekerjaan masyarakat	Jenis pekerjaan/mata pencaharian yang dimiliki masyarakat permukiman kumuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
			Pendapatan masyarakat	Jumlah pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
			Bahaya (Hazard)	Bahaya (<i>hazard</i>) terhadap banjir
2.	Faktor-Faktor Yang	Urbanisasi	Pertambahan jumlah penduduk	Jumlah pertambahan penduduk yang

No	Sintesa Teori	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
	Menyebabkan Permukiman Kumuh			bertempat tinggal di permukiman kumuh
			Pendapatan yang dihasilkan	Pendapatan masyarakat dari pekerjaan/mata pencaharian mereka
		Peran Pemerintah	Penyediaan perumahan layak	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
		Sarana dan Prasarana	Pemenuhan prasarana air bersih	Penyediaan prasarana air bersih yang memadai oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
			Pemenuhan Prasarana Persampahan	Penyediaan prasarana persampahan yang memadai oleh pemerintah di lingkungan permukiman kumuh
			Pemenuhan Prasarana Sanitasi	Penyediaan prasarana sanitasi yang memadai oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan

No	Sintesa Teori	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
				rendah
			Pemenuhan Prasarana Saluran Drainase	Penyediaan prasarana drainase oleh pemerintah di lingkungan permukiman kumuh
			Pemenuhan Prasarana Jalan	Penyediaan prasarana jalan oleh pemerintah di lingkungan permukiman kumuh
		Ekonomi	Jenis pekerjaan masyarakat	Jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat di permukiman kumuh
			Tingkat pendapatan masyarakat	Jumlah pendapatan/penghasilan yang dimiliki masyarakat tiap bulannya
		Peran Masyarakat	Keinginan masyarakat memelihara lingkungan	Tingkat keinginan masyarakat dalam memelihara lingkungannya.
			Kemampuan masyarakat menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana	Tingkat keterjangkauan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarananya (pendidikan,

No	Sintesa Teori	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
				kesehatan, sanitasi, persampahan dan sebagainya)
			Kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungannya.	Bentuk partisipasi masyarakat (tenaga, uang, pikiran) dalam peningkatan lingkungan baik secara swadaya maupun program/kegiatan peningkatan lingkungan di wilayah studi.
		Sosial Budaya	Tingkat pendidikan masyarakat	Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di permukiman kumuh

Sumber : Hasil Analisis, 2014

3.4 Populasi dan Sampel

Pengertian populasi disini adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki sifat representative. Pengambilan sampel digunakan untuk mencari keterangan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini untuk mencapai sasaran 1 digunakan sampel masyarakat reponden yang bermukim di permukiman kumuh Kelurahan Kapuk dengan menggunakan teknik *proportional random sampling*. Sedangkan untuk sampel dalam mencapai sasaran 2 dan 3 menggunakan sampel dengan cara analisis *stakeholder*. Berikut akan dipaparkan

lebih jelas mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian

3.4.1 Proportional Random Sampling

Perhitungan sampel ini akan digunakan dalam mencapai sasaran 1, yaitu mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) Kelurahan Kapuk yang bermukim di permukiman kumuh, karena tidak semua permukiman yang ada di kelurahan tersebut merupakan permukiman kumuh. Permukiman kumuh tersebut tersebar di RW 07 (kumuh ringan), RW 01, 03, 06 dan 13 (kumuh sedang), RW 12 dan 16 (kumuh berat). Jumlah populasi penduduk pada wilayah penelitian ini adalah 19.871 jiwa (BPS Provinsi DKI Jakarta Dalam *Evaluasi RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta, 2011*). Untuk menentukan jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini dengan rumus pengambilan sampel dengan ukuran populasi terhitung menggunakan rumus Slovin (Sarwono, 2006)

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Dimana :

N = Ukuran populasi

n = Besar sampel yang dibutuhkan

d = Standar error yang digunakan (0,1)

Dengan rumus tersebut, kemudian dimasukkan jumlah penduduk dalam wilayah studi, yaitu sebesar 19.871 dan tingkat *error* yang diinginkan adalah 10%, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} n &= 19.871 / (1 + (19.871 \times 0,01) \\ &= 99, 49 \\ &= 99 \end{aligned}$$

Kemudian dengan menggunakan teknik *proportional random sampling*, dilakukan pembagian proporsi sampel tiap RW agar terjadi pemerataan penyebaran kuesioner pada wilayah studi.

Tabel 3.2 Sampel Kuesioner

Klasifikasi Kumuh	Jumlah KK	Proporsi	Jumlah Sampel
Ringan	1542	8%	8
Sedang	9617	48%	47
Berat	8712	44%	44
Total	19.871	100%	99

Sumber : Analisa Penulis, 2013

Dalam penelitian ini sampel digenapkan menjadi 100 sampel. Selain itu, penelitian dengan menggunakan teknik *proportional random sampling* ini, responden yang digunakan dipilih secara acak di masing-masing RW dengan tingkat kekumuhan yang beragam (rendah, sedang dan berat). Karena adanya keterbatasan data sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan acak berdasarkan nama Kepala Keluarga (KK) pada tiap RW, maka penentuan responden ini dilakukan dengan pendekatan berdasarkan keterangan dan informasi dari pejabat setempat (Ketua RW dan RT) mengenai responden yang representatif untuk dijadikan sebagai sampel dalam mewakili permukiman kumuh.

Analisis Stakeholder

Analisis stakeholder merupakan pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dan menilai kepentingan masing-masing ke dalam sistem tersebut. Analisis ini dilakukan dengan cara menentukan *stakeholder* yang dianggap terlibat kemudian menentukan yang dianggap paling berpengaruh dan berkepentingan. Dalam penelitian ini analisis stakeholder digunakan untuk menentukan pihak-pihak yang berkompetensi dan terlibat dalam kondisi permukiman

kumuh di Kelurahan Kapuk, dimana konsensus pendapat dari *stakeholder* tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam analisis konten (*content analysis*) dalam menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan di Kelurahan Kapuk dan juga rumusan arahnya.

Dalam analisis *stakeholder* terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan *stakeholder* kunci, yaitu :

1. Mengidentifikasi *stakeholder* kunci

Melihat peran serta siapa saja (baik institusi atau individu) yang berpotensi untuk memberi perubahan atau yang terkena dampak dari peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk. Berdasarkan pada informasi, dokumen rencana, profil kelurahan dan survey primer yang dilakukan, didapatkan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk.

2. Menganalisa wewenang *stakeholder*

Untuk menentukan wewenang yang mungkin dapat dilakukan para *stakeholder* terkait dengan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk. Kewenangan masing-masing tiap *stakeholder* ini diperoleh berdasarkan informasi sekunder serta konsultasi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang telah mengetahui kelompok-kelompok *stakeholder* yang dimaksud.

3. Menilai dan memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder*

Tingkat kepentingan dalam konteks ini adalah seberapa besar peranan aktif suatu *stakeholder* dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Sementara yang dimaksud pengaruh, merupakan kekuatan yang dimiliki *stakeholder* tersebut dalam memberi keputusan atau mengontrol pelaksanaan terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk. Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan pembobotan mulai dari tidak berpengaruh/penting sampai dengan sangat

berpengaruh/penting dengan skala 1-5. Berikut merupakan tabel *stakeholder mapping* yang memetakan kelompok *stakeholder* beserta tingkat pengaruh dan kepentingannya.

Tabel 3.3 Stakeholder Mapping

	Pengaruh Rendah	Pengaruh Tinggi
Kepentingan Rendah	Kelompok <i>stakeholder</i> yang paling rendah prioritasnya	Kelompok yang bermanfaat untuk merumuskan atau menjembatani keputusan dan opini
Kepentingan Tinggi	Kelompok <i>stakeholder</i> yang penting namun perlu pemberdayaan	Kelompok <i>stakeholder</i> yang paling kritis

Sumber : Tools to Support Participatory Urban Decision Making Process (UN Habitat), 2001)

Dari analisa tersebut akan diperoleh *stakeholder* kunci yang berlaku sebagai *critical player* (**Lampian B**). Setelah didapatkan *stakeholder* tersebut maka kemudian dapat dilakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan tahapan *content analysis* untuk mencapai sasaran 2 dan 3, yang terdiri dari

- a. Pemerintah
 1. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Kelurahan Kapuk
- b. Kelompok Masyarakat
 1. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
 2. Ketua RW
- c. Private Sector
 1. Koperasi Kredit (*Credit Union*) Pelita

3.5. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik survey primer dan

sekunder. Metode pengumpulan data yang telah digunakan adalah sebagai berikut.

3.5.1. Metode Pengumpulan Data Primer

Survey primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung (observasi lapangan), kuesioner dan wawancara. Berikut metode pengumpulan data primer yang dilakukan.

a. Observasi

Metode ini dilakukan guna mendapatkan data primer, yaitu dengan cara mengamati kondisi lapangan terkait dengan permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Kapuk seperti misalnya kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh di kelurahan tersebut beserta dengan permasalahan kekumuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian (Burns, 1990)

b. Kuesioner

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya dengan mengacu pada sintesa tinjauan pustaka yang telah dilakukan. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan dalam mengetahui karakteristik permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Kapuk.

c. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara jenis ini terlebih dahulu membuat *interview guide*, yaitu sebuah daftar tertulis mengenai pertanyaan dan topik yang perlu dilakukan sebelum melakukan proses wawancara tersebut. Wawancara ini dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kekumuhan di Kelurahan Kapuk.

Tabel 3.4 Data dan Perolehan Data Primer

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data
1	Kondisi eksisting dan karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk	Wilayah permukiman kumuh Kelurahan Kapuk	Observasi dan kuesioner
2	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekumuhan di Kelurahan Kapuk	Pendapat dari <i>stakeholder</i>	Wawancara semi terstruktur (<i>in-depth interview</i>)
3	Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk	Pendapat dari <i>stakeholder</i>	Wawancara semi terstruktur (<i>in-depth interview</i>)

Sumber : Penulis, 2014

3.5.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Survey sekunder yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, informasi kepada instansi dan literatur yang terkait. Studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari tinjauan teoritis yang ada yang berkaitan dengan pembahasan studi. Berikut metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini.

a. Survey Instansi

Survey instansi ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti data yang bersifat pelengkap. Pada penelitian ini survey instansi dilakukan pada instansional yang memiliki relevansi dengan fokus pembahasan dalam penelitian, seperti Kantor Kelurahan Kapuk, BPS, Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Barat, dan sumber-sumber lainnya.

b. Studi Literatur

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan meninjau isi dari literatur yang berkaitan dengan fokus pembahasan dalam penelitian, diantaranya berupa buku-buku teori dan literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan berita ilmiah. Studi literatur ini dilakukan dengan cara membaca, merangkum dan juga menyimpulkan referensi mengenai penanganan permukiman kumuh.

Tabel 3.5 Instrumen Pengumpulan Data

No.	Jenis Data	Teknik Survey	Sumber
1	Ketersediaan air bersih	Survey Instansional Kuesioner	Kelurahan Kapuk
2	Ketersediaan sanitasi		
3	Ketersediaan persampahan		
4	Kondisi dan ketersediaan drainase		
5	Kondisi jalan		Masyarakat setempat
6	Kondisi bangunan		
7	Tingkat pendidikan		
8	Asal daerah masyarakat	Kuesioner	Masyarakat setempat
9	Alasan pemilihan lokasi		
10	Status kependudukan		
11	Status kepemilikan lahan masyarakat		
12	Jenis pekerjaan masyarakat		
13	Pendapatan masyarakat		
14	Intensitas dan lama terjadinya genangan/banjir	Survey Instansional Kuesioner	Kelurahan Kapuk Masyarakat setempat
15	Pertambahan jumlah penduduk	Wawancara <i>In-depth interview</i>	<i>Stakeholder</i>

No.	Jenis Data	Teknik Survey	Sumber
16	Kesesuaian kebijakan		
17	Penyediaan perumahan layak		
18	Keinginan masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungannya		
19	Kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana dasar		
20	Kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungannya.		
21	Kesesuaian peruntukkan lahan.		

Sumber :Peneliti, 2014

3.6. Mengidentifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Berdasarkan Kekumuhan di Kelurahan Kapuk

Dalam mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk digunakan teknik analisis yaitu analisis statistik deskriptif. Menurut Nawawi (2003) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Sebelum merumuskan upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di kelurahan Kapuk, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi karakteristik permukiman kumuh dari masing-masing tingkat kumuh yang ada. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang terkumpul secara sistematis, faktual dan

cermat terhadap fakta atau karakteristik yang diteliti yang kemudian dapat disajikan melalui tabel dan gambar. Pada analisis ini akan mendeskripsikan secara kuantitatif dalam bentuk persentase hasil dari kuesioner terstruktur mengenai variabel karakteristik yang digunakan dalam penelitian.

Analisis identifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat dilihat dari aspek kondisi fisik bangunan, sosial, sarana dan prasarana, ekonomi, dan bahaya (*hazard*).

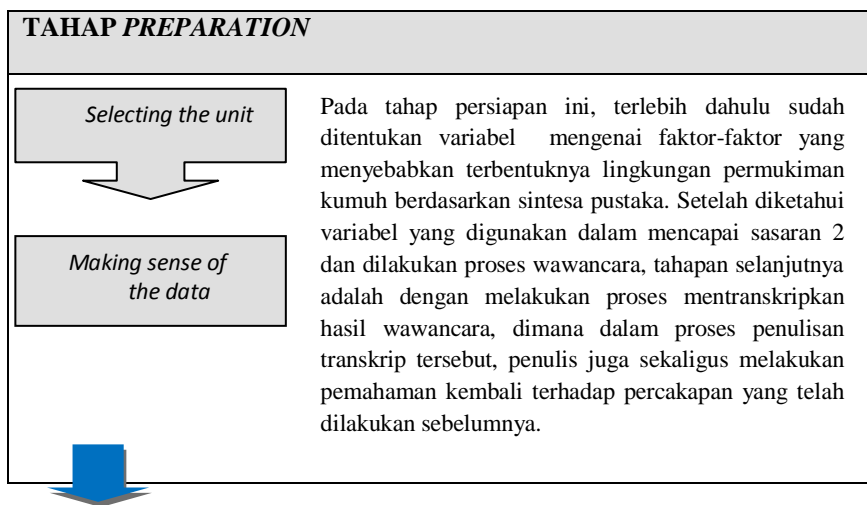
3.7. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk

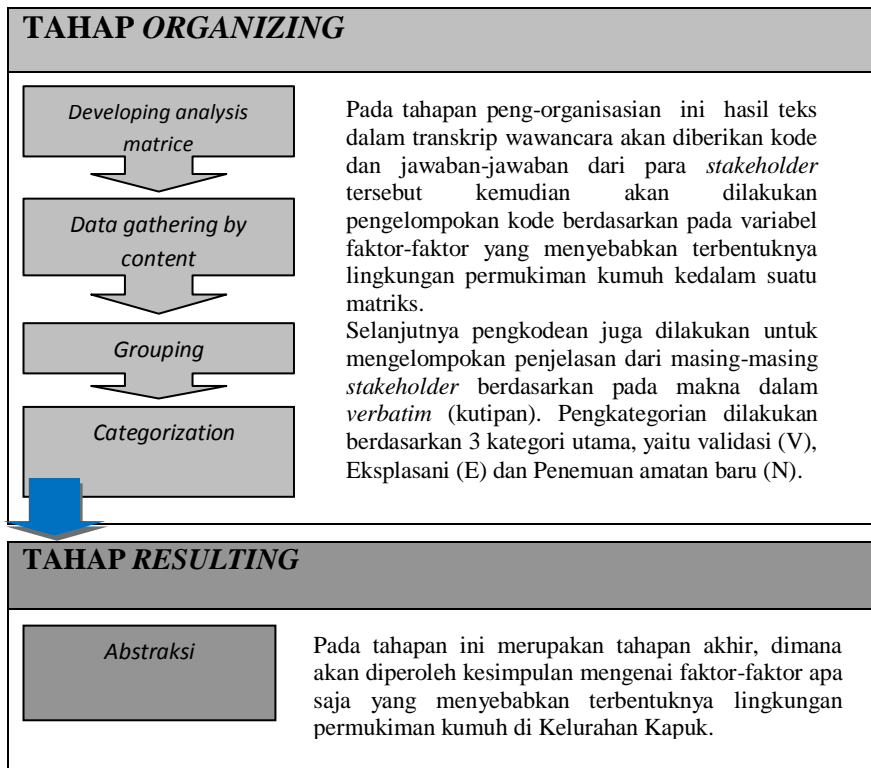
Analisis ini digunakan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kekumuhan yang terdapat di Kelurahan Kapuk. Dalam penelitian ini menggunakan analisis konten (*content analysis*), namun sebelum melakukan *content analysis* terlebih dahulu dilakukan analisis *stakeholder*. Hal ini dilakukan agar responden yang dipilih untuk *content analysis* dapat tepat sasaran.

Setelah mendapatkan *stakeholder*, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara semiterstruktur untuk mendapatkan data yang akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa *content analysis*. Teknik ini merupakan analisa yang mengandalkan kode-kode yang ditemukan dalam sebuah teks perekaman data selama proses wawancara dilakukan dengan responden di lapangan. Menurut Bungin (2010), menyatakan bahwa *content analysis* memiliki 3 syarat utama, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk

diperoleh dari variabel-variabel sasaran 2 berdasarkan hasil kajian terhadap pustaka yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kemudian faktor-faktor tersebut ditanyakan kepada *stakeholder*. Ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam terbentuknya lingkungan kumuh di kelurahan tersebut..Selanjutnya, hasil dari wawancara tersebut diolah menggunakan teknik *content analysis*. Kunci utama dalam penggunaan *content analysis* adalah pada pengklasifikasian sejumlah kata yang terdapat dalam sebuah teks kedalam kategori-kategori yang lebih kecil (Weber dan Burnard dalam Martadwiprani, 2013). Dalam analisa sasaran 2 ini menggunakan *deductive content analysis*.*Deductive content analysis* digunakan apabila struktur analisa dilakukan berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan jika tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk pengujian teori (Kyngäs & Vanhanen, 1999). Berikut merupakan alur dalam pelaksanaan *content analysis* yang dilakukan dalam mencapai sasaran 2 menurut Elo & Kyngäs (2008)





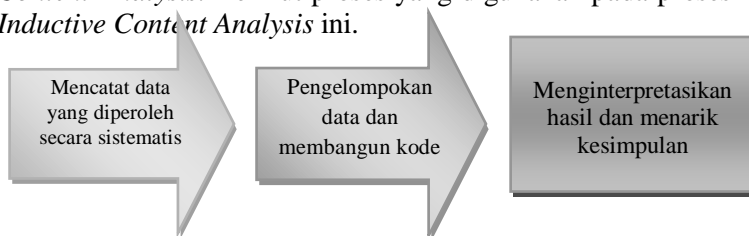
Sumber : Diolah dari Elo & Kyngäs (2008) dan Rahmawati (2013)

Gambar 3.1 Tahapan Proses dalam *Deductive Content Analysis* Sasaran 2

3.8 Perumusan Arahana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Setelah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kekumuhan di Kelurahan Kapuk, maka kemudian hasil tersebut dijadikan input dalam perumusan arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan. Dalam merumuskan arahan, digunakan pula alat analisis konten, namun berbeda dengan analisis konten yang

digunakan dalam mencapai sasaran 2 dimana proses konten yang digunakan adalah *Deductive Content Analysis*, pada sasaran 3 ini proses konten yang digunakan adalah *Inductive Content Analysis*. Berikut proses yang digunakan pada proses *Inductive Content Analysis* ini.



Gambar 3.2 Proses *Inductive Content Analysis*

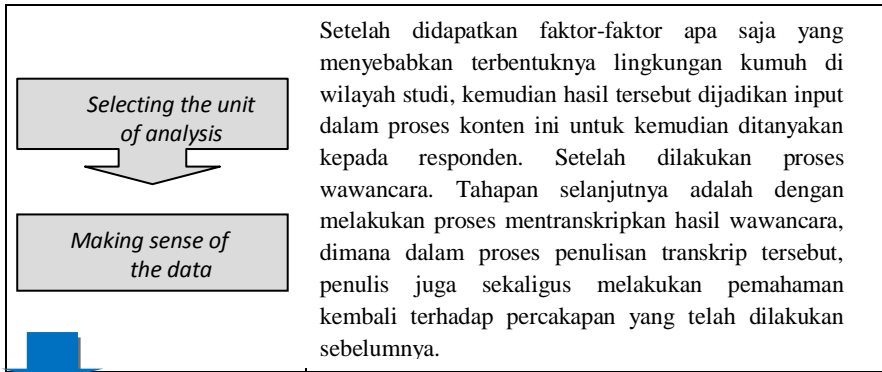
Sumber : Diolah dari Boyatzis, 1998

Content analysis diawali dengan proses pengolahan data mentah (transkrip wawancara) secara induktif (*data driven*). Setelah itu, dilakukan pemberian kode pada catatan transkrip wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya setelah dilakukan pengkodean, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengkategorian terhadap jawaban responden untuk kemudian dilakukan abstraksi guna mengetahui arahan yang tepat digunakan di wilayah studi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Robson (1993), Burnard (1996), dan Polit & Beck (2004) dalam Elo & Kyngas (2008), yang mengatakan bahwa :

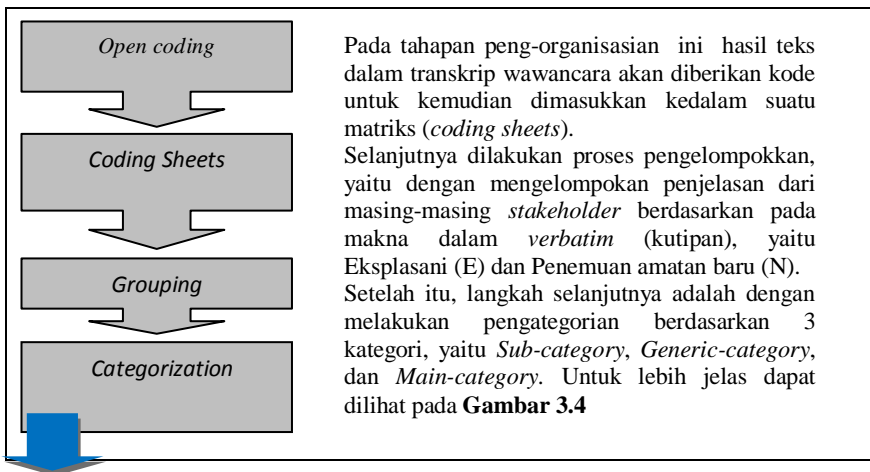
“ *Abstraction means formulating a general description of the research topic through generating categories*”

Berikut merupakan alur dalam pelaksanaan *Inductive content analysis* yang dilakukan dalam mencapai sasaran 3 menurut Elo & Kyngäs (2008).

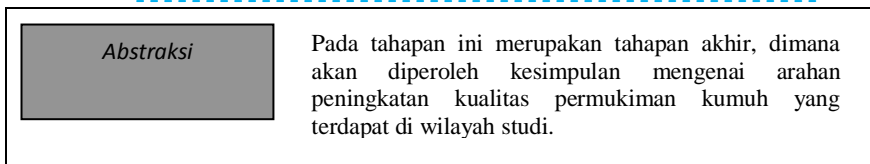
TAHAP PREPARATION



TAHAP ORGANISING



TAHAP RESULTING

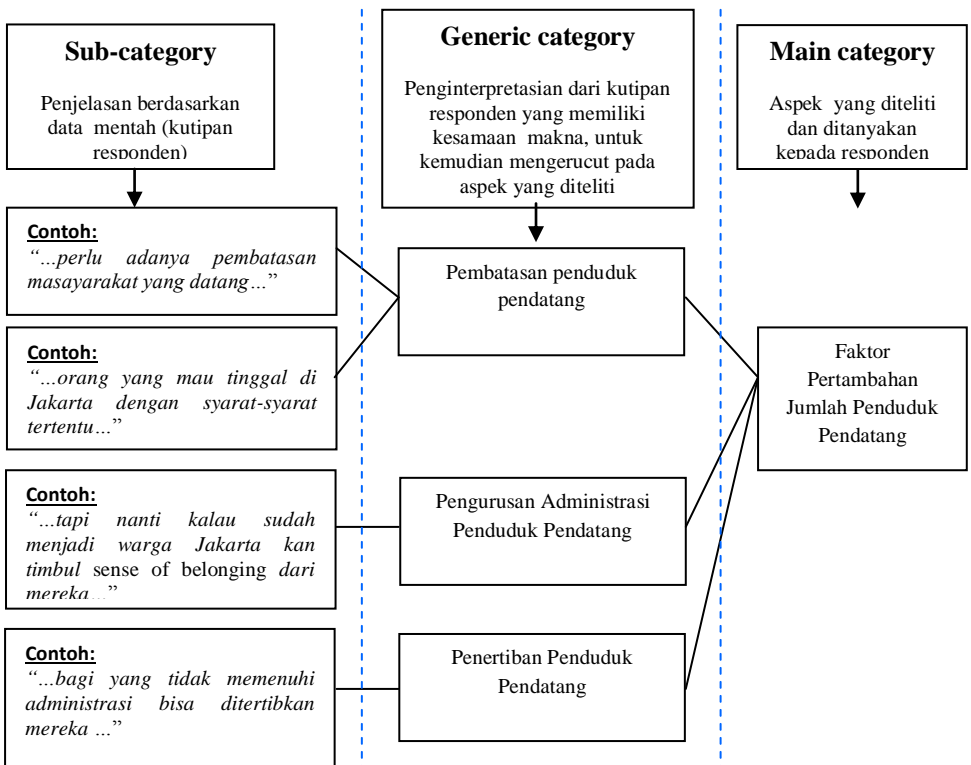


Arahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Wilayah Studi

Sumber : Diolah dari Elo & Kyngäs (2008) dan Rahmawati (2013)

Gambar 3.3 Tahapan Proses dalam Inductive Content Analysis Sasaran 3

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana pada tahapan *organising* dalam mencapai sasaran 3 ini dilakukan proses pengkategorian, pengkategorian ini dilakukan berdasarkan 3 kategori, yaitu *Sub-category*, *Generic-category*, dan *Main-category*. Berikut agar lebih jelasnya.



Sumber: Diolah dari *An example of the abstraction process* dalam Elo & Kyngas (2008)

Gambar 3.4 Proses Pengkategorian dalam Sasaran 3

3.9. Tahapan Penelitian

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian.

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan tahapan identifikasi isu permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini mengangkat masalah kondisi lingkungan kumuh yang terjadi di permukiman Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dimana pada kelurahan tersebut memiliki keragaman tingkat kekumuhan, mulai dari rendah, sedang, hingga berat. Pemerintah sudah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai program/kegiatan terkait permukiman kumuh. Hanya saja kegiatan tersebut belum maksimal berdampak pada perbaikan lingkungan mereka. Maka dari itu, dalam penelitian ini sebelum menganalisis mengenai arahan upaya perbaikan yang dapat dilakukan, terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi mengenai karakteristik permukiman kumuh di masing-masing tingkat kekumuhan untuk mengetahui bagaimana gambaran eksisting di tiap-tiap kategori kumuh tersebut selanjutnya dilakukan analisis mengenai faktor apa saja yang sebenarnya menyebabkan terjadinya kekumuhan di kelurahan tersebut untuk kemudian dianalisis bagaimana arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang tepat

Setelah mengetahui arahan upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh tersebut, maka kedepannya diharapkan arahan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk.

2. Tinjauan Pustaka

Tahapan ini merupakan tahap pengumpulan informasi dan literatur yang terkait dengan fokus pembahasan yang akan diteliti. Dimana dalam hal ini literatur yang

digunakan adalah terkait dengan teori yang membahas mengenai permukiman, permukiman kumuh, dan juga upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan permukiman kumuh.

3. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini merupakan proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk proses analisa, yaitu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Dalam penggunaan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data baik secara primer maupun sekunder.

4. Analisis

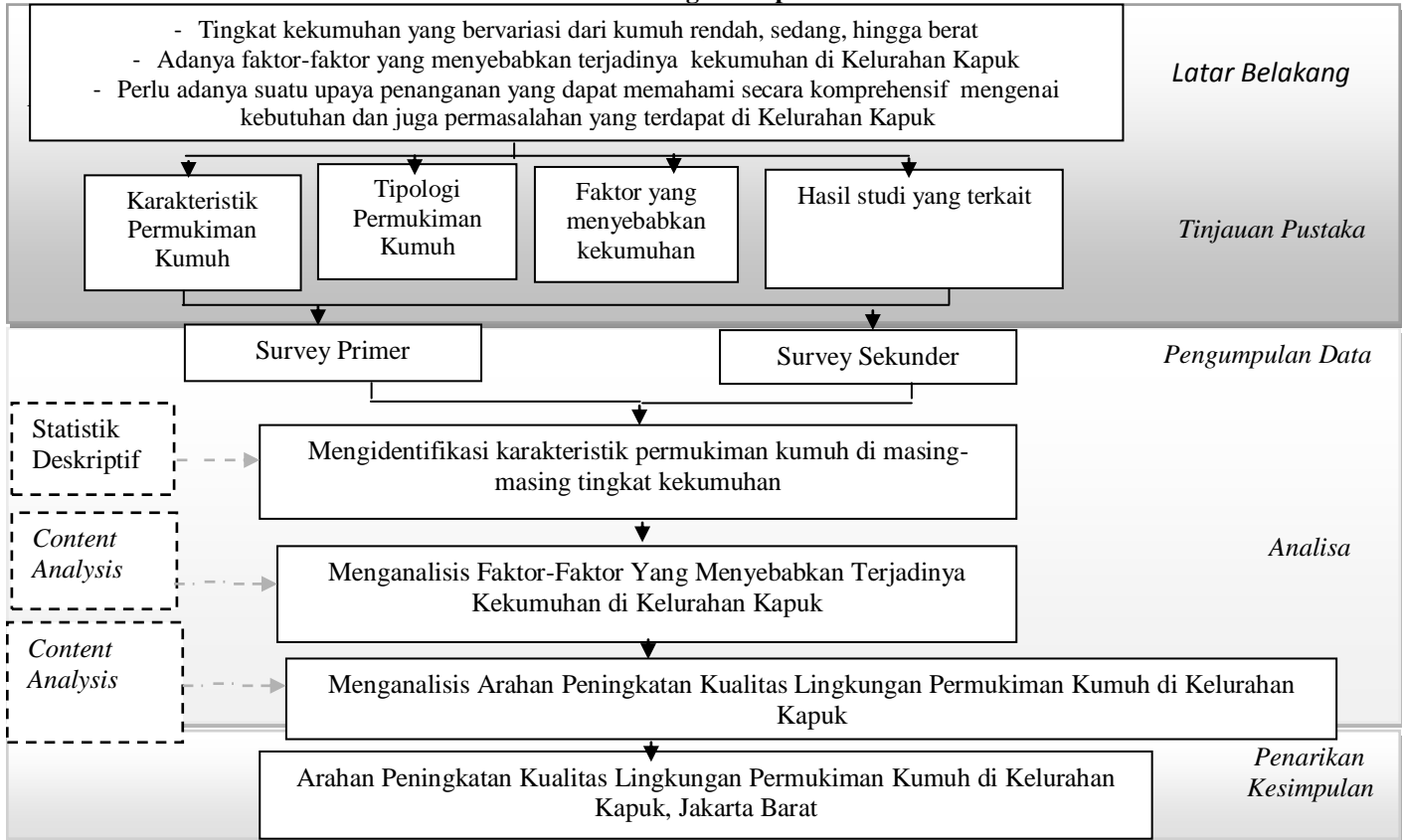
Setelah mendapatkan data/informasi dari proses sebelumnya, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan tahapan analisis. Tahapan analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam tahapan ini dilaksanakan segala sesuatu yang telah dirumuskan dalam desain penelitian.

5. Penarikan kesimpulan

Ini merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah proses analisis. Tahapan ini dilakukan penarikan kesimpulan atas rumusan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan awal penelitian. Kesimpulan ini dilakukan setelah melalui proses analisis yang dilaksanakan sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah rekomendasi, merupakan tahapan yang berisi rekomendasi mengenai upaya-upaya lain yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam memaksimalkan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di wilayah studi.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Gambar 3.5 Kerangka Berpikir Penelitian



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

4.1.1 Orientasi Wilayah Studi

Kawasan permukiman kumuh di wilayah Kelurahan Kapuk berada di 7 unit Rukun Warga (RW) dari 16 RW di wilayah ini. Wilayah studi penelitian yang terdapat di 7 RW kumuh tersebut, yaitu RW 01, 03, 04, 07, 12, 13 dan 16. Luas permukiman kumuh tersebut sebesar 131,27 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Luas, Jumlah RT dan Jumlah Penduduk Kumuh Kelurahan Kapuk

RW	Klasifikasi	Luas RW Kumuh (Ha)	Jumlah RT Kumuh	Jumlah Penduduk Kumuh
01	Kumuh sedang	16,47	11	8891
03	Kumuh sedang	17,10	15	15181
04	Kumuh sedang	13,90	6	3020
07	Kumuh ringan	28,07	6	6039
12	Kumuh berat	36,71	20	17459
13	Kumuh sedang	7,67	16	7883
16	Kumuh berat	11,35	21	16920

Sumber: Evaluasi RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta, 2011

Secara administratif, batas dari Kelurahan Kapuk adalah :

Utara : Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara

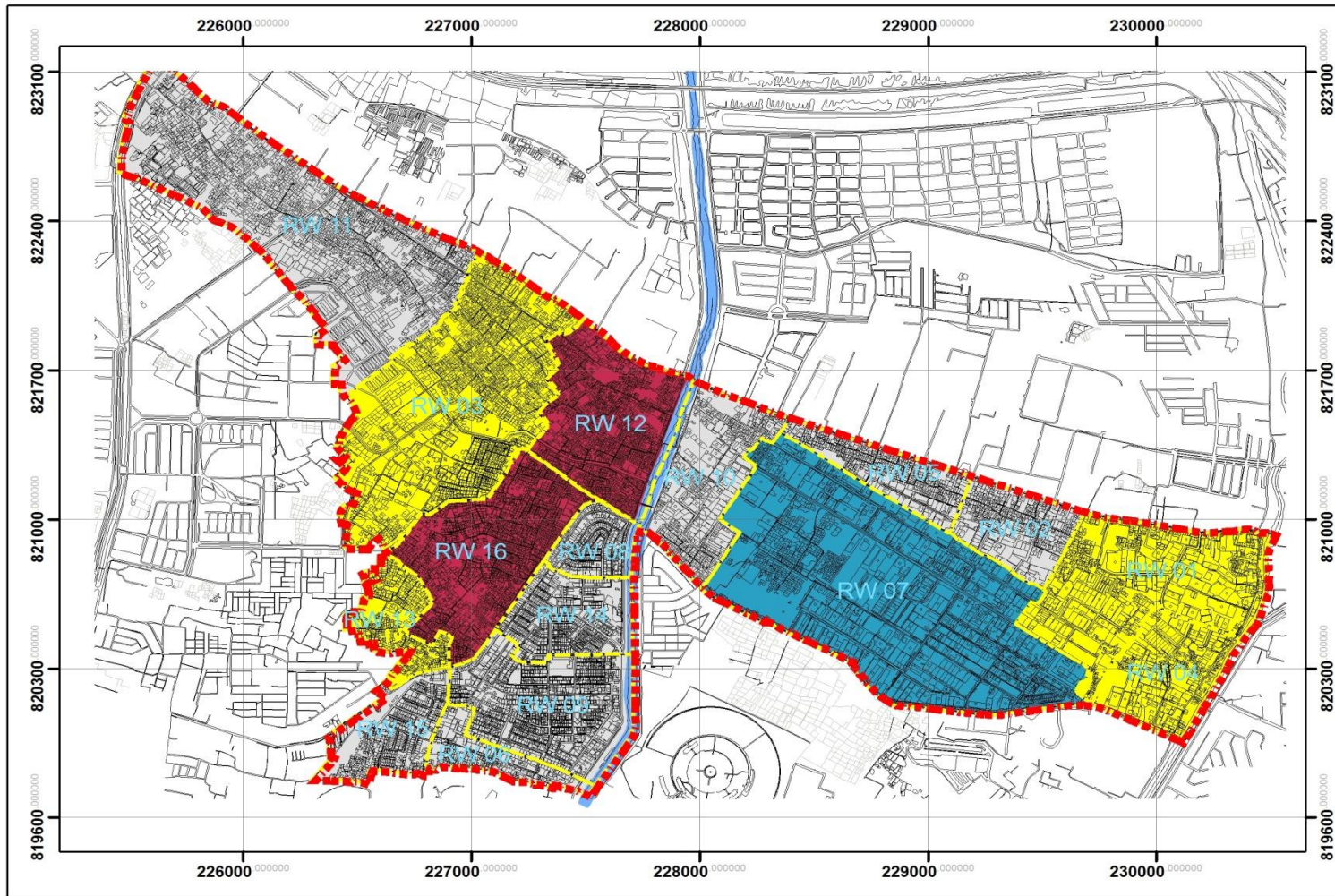
Timur : Kelurahan Kedaung Kali Angke

Selatan : Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Kedaung Angke

Barat : Kelurahan Cengkareng Timur

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 4.1 berikut

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Legenda

- Batas Kelurahan Kapuk
- Batas RW
- Jalan
- Sungai

Klasifikasi Pemukiman

- Kumuh Berat
- Kumuh Sedang
- Kumuh Ringan
- Tidak Kumuh

Sumber :
 Suku Dinas Tata Ruang
 Kota Administrasi Jakarta Barat



NORTH
1:25000

 0 410 820 1,640 2,460 3,280 Meters

Peta 2. Klasifikasi Pemukiman Kelurahan Kapuk

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

4.1.2 Kondisi Umum Wilayah

Beberapa kondisi umum wilayah permukiman yang ditemui pada wilayah studi diantaranya dapat dilihat dari segi kondisi bangunan, bahaya, dan juga kepadatan penduduk yang dimiliki. Adanya keragaman tingkat kekumuhan yang dimiliki Kelurahan Kapuk, mulai dari tingkat kumuh rendah, sedang, dan berat, turut mempengaruhi pula keragaman kondisi wilayahnya. Umumnya kondisi ini secara langsung atau tidak dipengaruhi pula oleh karakteristik lokasi masing-masing wilayah. Berikut merupakan gambaran awal mengenai kondisi wilayah penelitian secara umum berdasarkan tingkat kekumuhan sebelum dilakukan analisa dan kajian yang lebih mendalam mengenai karakteristik eksisting wilayah Kelurahan Kapuk.

4.1.2.1 Keadaan Fisik Bangunan

a. Permukiman Kumuh Rendah

Kondisi fisik bangunan yang terdapat pada permukiman dengan tingkat kumuh rendah (RW 07), didominasi oleh bangunan dengan konstruksi semi-permanen, yaitu berjumlah 992 unit, seperti dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 4.2 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Rendah Kelurahan Kapuk

RW	Permanen	Semi Permanen	Darurat	Jumlah
07	238	992	244	1.474
Jumlah	238	992	244	1.474

Sumber: Laporan Kegiatan Pembinaan Kel. Kapuk 2011



Gambar 4.2 Bangunan Semi-Permanen di Permukiman Kumuh Tingkat Rendah

Sumber: Survey Primer, 2014

Seperti dapat dilihat pada gambar diatas, bahwa umumnya bangunan semi-permanen maupun non permanen yang terdapat pada wilayah ini terbentuk karena lokasinya yang berdekatan bahkan bersebelahan dengan industri

b. Permukiman Kumuh Sedang

Tidak jauh berbeda dengan permukiman kumuh rendah, permukiman kumuh sedang juga didominasi oleh bangunan dengan konstruksi semi-permanen. Agar lebih jelas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 4.3 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Sedang Kelurahan Kapuk

RW	Permanen	Semi Permanen	Darurat	Jumlah
01	204	1.013	288	1.505
03	239	1.051	276	1.566
04	207	1.031	246	1.484
13	242	1.071	272	1.585
Jumlah	892	4.166	1.082	6.140

Sumber: Laporan Kegiatan Pembinaan Kel. Kapuk 2011



Gambar 4.3 Bangunan Semi-Permanen di Permukiman Kumuh Tingkat Sedang

Sumber: Survey Primer, 2014

c. Permukiman Kumuh Tinggi

Sama seperti permukiman tingkat rendah dan sedang, pada permukiman kumuh tinggi juga umumnya merupakan bangunan dengan konstruksi semi-permanen, sebanyak 2.291 unit dan terbanyak kedua merupakan bangunan dengan konstruksi non permanen 559 unit.

Tabel 4.4 Kondisi Fisik Bangunan Permukiman Kumuh Tinggi Kelurahan Kapuk

RW	Permanen	Semi Permanen	Darurat	Jumlah
12	293	1.146	277	1.716
16	236	1.145	282	1.663
Jumlah	529	2.291	559	3.379

Sumber: Laporan Kegiatan Pembinaan Kel. Kapuk 2011

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa permukiman kumuh tinggi merupakan permukiman yang memiliki jumlah bangunan semi-permanen dan non-permanen terbanyak dibandingkan dengan yang lainnya, dimana pada RW 12 memiliki bangunan semi-permanen sebanyak 1.146 unit dan RW 16 sebanyak 1.145 unit.

4.1.2.2 Keadaan Daerah Rawan Banjir/Genangan

Kelurahan Kapuk termasuk kedalam daerah rawan bencana banjir. Hal ini terlihat pada Dokumen Gambaran Wilayah Rawan Banjir di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa semua RW yang ada merupakan lokasi rawan banjir, termasuk 7 RW kumuh yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

a. Permukiman Kumuh Rendah

Pada permukiman kumuh tingkat rendah (RW 07) hampir semua wilayahnya merupakan daerah rawan banjir, dimana dari 7 RT yang ada, 6 diantaranya merupakan daerah rawan banjir.

Tabel 4.5 Daerah Rawan Genangan di Permukiman Kumuh Rendah Kelurahan Kapuk Tahun 2007

RW	Jumlah RT	Lokasi RT yang Banjir	Ketinggian Air (cm)
07	7	01,02, 03, 04, 05, 06	20 – 40

Sumber: Dokumen Gambaran Wilayah Rawan Banjir di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Tahun 2012

b. Permukiman Kumuh Sedang

Pada umumnya genangan yang terdapat di permukiman kumuh sedang memiliki ketinggian antara 30 cm hingga 50 cm. agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Daerah Rawan Genangan di Permukiman Kumuh Sedang Kelurahan Kapuk Tahun 2007

RW	Jumlah RT	Lokasi RT yang Banjir	Ketinggian Air (cm)
01	12	01,02, 03, 07, 09, 10	30 – 50
03	20	05, 11, 12, 16, 18, 19, 20	30 – 40
04	7	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	30 – 50
13	17	11, 12,17	30 – 50

Sumber: Dokumen Gambaran Wilayah Rawan Banjir di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Tahun 2012

c. Permukiman Kumuh Tinggi

Kondisi genangan yang terdapat di permukiman kumuh tinggi cukup parah, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.7 di mana pada RW 16 dari 25 RT yang ada, semuanya merupakan daerah rawan banjir/genangan.

Tabel 4.7 Daerah Rawan Genangan di Permukiman Kumuh Tinggi Kelurahan Kapuk Tahun 2007

RW	Jumlah RT	Lokasi RT yang Banjir	Ketinggian Air (cm)
12	22	04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	30 – 50
16	25	Semua RT	20 – 30

Sumber: Dokumen Gambaran Wilayah Rawan Banjir di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Tahun 2012



Gambar 4.4 Keadaan Lokasi Banjir di Permukiman Kumuh Berat Kelurahan Kapuk

Sumber : Survey Primer, 2014

4.1.3 Pola Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan pada wilayah penelitian didominasi oleh permukiman, selanjutnya perkantoran/gudang dan industri juga banyak ditemui di wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8 Persentase Luas Tanah menurut Penggunaannya di Kelurahan Kapuk

Perumahan (%)	Industri (%)	Perkantoran/ Gudang (%)	Taman (%)	Pertanian (%)	Lainnya (%)
72,16	22,72	3,79	0,37	0,94	0,02

Sumber: Cengkareng Dalam Angka, 2012

Pada wilayah penelitian juga terdapat fasilitas umum perkotaan didalamnya, seperti fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, perkantoran dan perdagangan & jasa. Melihat pada data Cengkareng Dalam Angka 2012 diketahui bahwa jumlah fasilitas pendidikan berjumlah 53 unit, dengan fasilitas SD sebanyak 13 unit, SLTP 14 unit, SLTA 5 unit dan TK 21 unit.



Gambar 4.5 Sarana Pendidikan di Kelurahan Kapuk

Sumber: Survey Primer, 2014

Dari data Cengkareng Dalam Angka 2012 juga diketahui jumlah fasilitas peribadatan di kelurahan ini adalah masjid sebanyak 32 unit, musholla 80, gereja 8, pura 2 unit, klenteng 3 unit.

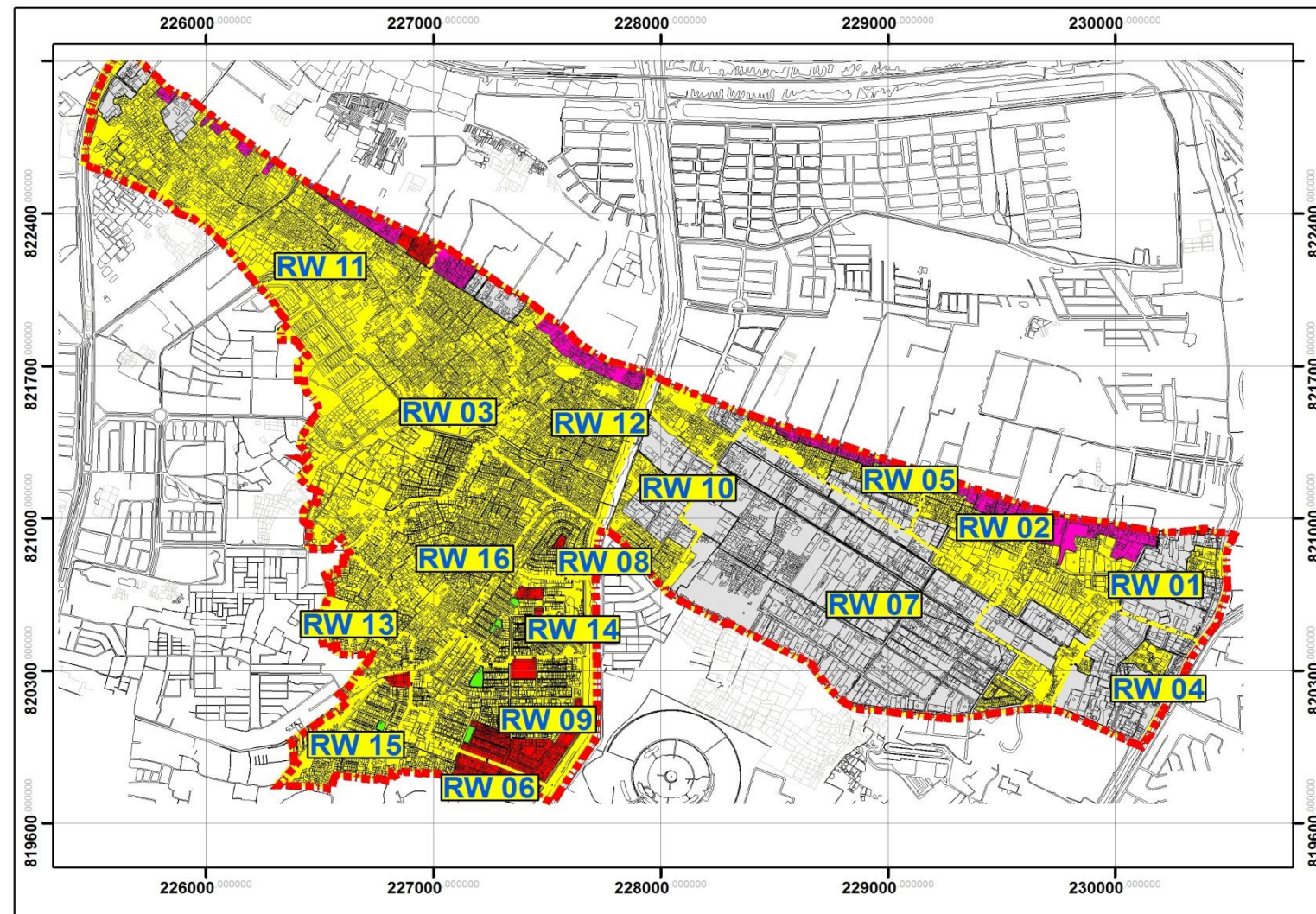


Gambar 4.6 Sarana Peribadatan di Kelurahan Kapuk

Sumber: Survey Primer, 2014

Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan yang terdapat di wilayah studi dapat dilihat dalam Gambar 4.7 berikut ini.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 Surabaya

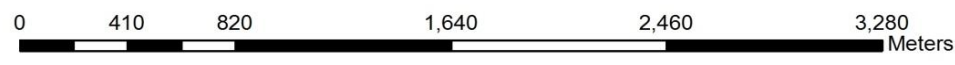
Legenda

- Batas Kelurahan Kapuk
- Batas RW
- Jalan
- Sungai
- Pemukiman
- Industri
- Fasilitas Umum
- Perdagangan dan Jasa
- RTH

Sumber :
 Suku Dinas Tata Ruang
 Kota Administrasi Jakarta Barat



1:25000



Peta 3. Penggunaan Lahan Kelurahan Kapuk

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

4.1.4 Kependudukan

Penduduk total Kelurahan Kapuk pada tahun 2011 berjumlah 137.915 jiwa. Namun tidak seluruh masyarakat tersebut tinggal di permukiman kumuh. Permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk berada 01, 03, 04, 07, 12, 13 dan 16. Jumlah seluruh penduduk yang tinggal pada delapan RW tersebut adalah 75.393 jiwa.

4.1.4.1 Komposisi Penduduk

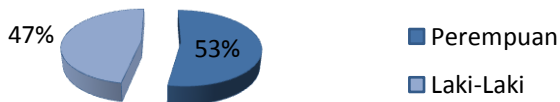
Komposisi keseluruhan penduduk di Kelurahan Kapuk dapat dilihat dari jenis kelamin, agama, dan pekerjaan. Berikut merupakan komposisi penduduk keseluruhan Kelurahan Kapuk:

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
Perempuan	72.904
Laki-laki	65.011
Total	137.915

Sumber: Cengkareng Dalam Angka 2012

Jumlah Penduduk



Gambar 4.8 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Cengkareng Dalam Angka, 2012

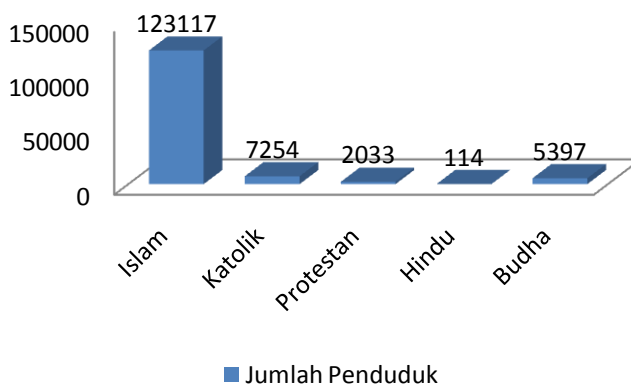
Penduduk Kelurahan Kapuk mayoritas memeluk agama Islam, selanjutnya diikuti oleh pemeluk agama Katolik,

Budha, Kristen dan Hindu. Berikut merupakan tabel dari komposisi penduduk menurut agama di Kelurahan Kapuk.

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Agama	Jumlah (jiwa)
Islam	123.117
Katolik	7.254
Protestan	2.033
Hindu	114
Budha	5.397
Total	137.915

Sumber: Cengkareng Dalam Angka 2012



Gambar 4.9 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

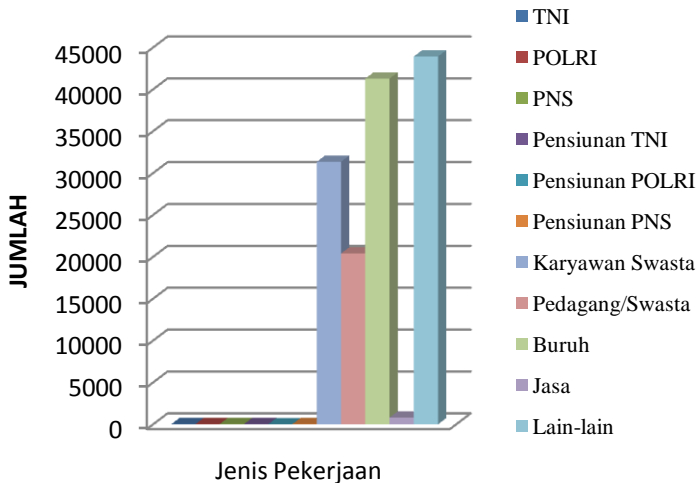
*Sumber :*Cengkareng Dalam Angka, 2012

Selanjutnya adalah komposisi penduduk menurut pekerjaan. Pada Kelurahan Kapuk mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh, yaitu sebesar 41.278 jiwa. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
TNI	22
POLRI	28
Pegawai Negeri Sipil	42
Pensiunan TNI	22
Pensiunan POLRI	17
Pensiunan PNS	33
Karyawan Swasta	31.350
Pedagang/ Swasta	20.401
Buruh	41.278
Jasa	805
Lain-lain	43917
Jumlah	137.915

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Kelurahan Kapuk 2011



Gambar 4.10 Diagram Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Kelurahan Kapuk 2011

Berdasarkan diagram tersebut dapat terlihat bahwa mata pencaharian sebagai buruh merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat Kelurahan Kapuk. Hal tersebut dikarenakan adanya kawasan industri yang berada di RW 07. Jenis pekerjaan karyawan swasta dan pedagang/swasta juga merupakan pekerjaan yang banyak dimiliki oleh masyarakat kelurahan tersebut.

4.2 Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Kapuk

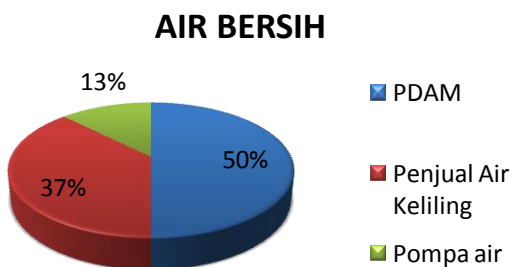
Sebelum merumuskan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi mengenai karakteristik permukiman yang terbentuk di masing-masing tingkat kekumuhan yang ada. Untuk mencapai sasaran ini digunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menggunakan kuesioner yang ditanyakan kepada 100 sampel yang terbagi atas masyarakat penghuni permukiman kumuh rendah, sedang dan berat di Kelurahan Kapuk. Pada pembahasan ini untuk melihat karakteristik permukiman yang ada, terlebih dahulu akan ditampilkan mengenai tabulasi kondisi masing-masing tingkat permukiman kumuh dilihat dari masing-masing aspek sesuai dengan variabel yang digunakan, untuk kemudian baru akan dilakukan komparasi antara ketiga tingkat permukiman kumuh tersebut. Dalam analisis ini, karakteristik permukiman kumuh dilihat tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari aspek pemenuhan masyarakat akan sarana dan prasarana dasar, sosial, ekonomi, hingga bahaya (*hazard*) daerah studi terhadap bencana banjir.

4.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh Ringan

4.2.1.1 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil kuesioner yang ditanyakan kepada responden secara acak, didapatkan gambaran mengenai kondisi pemenuhan sarana dan prasarana yang ada. Untuk kebutuhan air

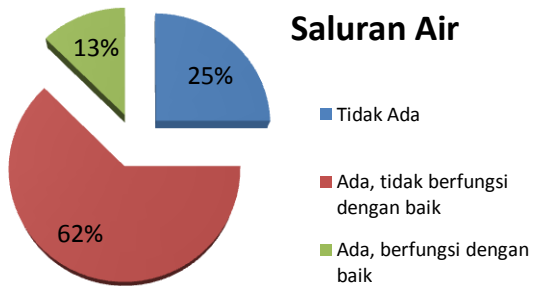
bersih, melihat pada nilai modus yang didapatkan, diketahui bahwa mayoritas masyarakat sudah menggunakan air PAM, yaitu sebanyak 50 % sedangkan masyarakat yang menggunakan air penjual keliling sebanyak 37% dan hanya 13% masyarakat yang menggunakan air sumur/pompa air. Umumnya masyarakat menggunakan air PAM untuk kebutuhan mencuci dan mandi dan sedangkan untuk keperluan air minum mereka memilih untuk menggunakan air dari penjual air.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.11 Kondisi Prasarana Air di Permukiman Kumuh Rendah

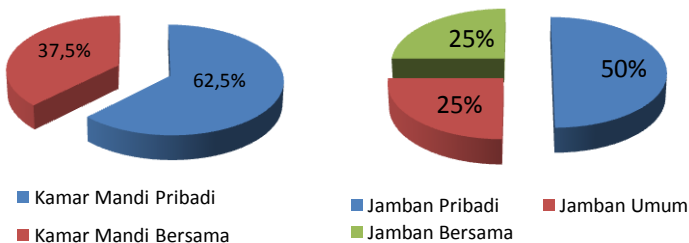
Untuk prasarana drainase, melihat pada nilai modus terlihat bahwa mayoritas masyarakat menyatakan saluran air yang ada kurang berfungsi dengan baik yaitu sebanyak 62%, bahkan ada juga lingkungan permukiman masyarakat yang tidak dilengkapi oleh saluran air, yaitu sebesar 25%. Buruknya kondisi saluran air di lingkungan permukiman ini juga dipengaruhi oleh keberadaan industri dan juga RPH babi yang ada disekitar lokasi permukiman masyarakat yang kerap kali membuang limbahnya ke saluran air yang terdapat di permukiman tersebut sehingga menyebabkan saluran air tersebut tercemar dan juga berbau.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

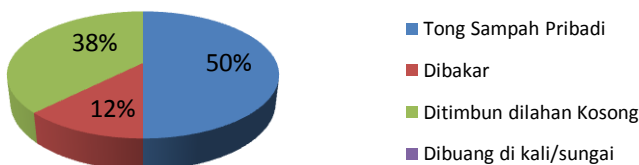
Gambar 4.12 Kondisi Prasarana Drainase di Permukiman Kumuh Rendah

Untuk pemenuhan prasarana sanitasi, umumnya masyarakat telah memiliki kamar mandi dan juga jamban masing-masing yaitu masing-masing sebesar 62,5% dan 50%. Sedangkan sisanya memanfaatkan kamar mandi bersama dan juga jamban bersama. Umumnya masyarakat yang menggunakan kamar mandi dan jamban bersama tersebut, tinggal di kontrakan yang juga banyak ditemui pada daerah tersebut.



Gambar 4.13 Diagram Kondisi Sanitasi

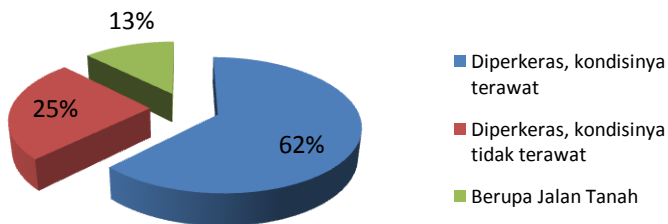
Dalam pemenuhan prasarana sampah, umumnya masyarakat telah memiliki tong sampah masing-masing dirumahnya, yaitu sebesar 50% sedangkan sebanyak 38% masyarakat menimbun sampahnya di lahan kosong, dan sisanya sebanyak 12% masyarakat langsung membakar sampah yang dihasilkan tersebut.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.14 Kondisi Persampahan di Permukiman Kumuh Rendah

Untuk aspek aksesibilitas, umumnya jalan yang ada dilingkungan permukiman tersebut sudah diperkeras baik menggunakan aspal maupun paving, mayoritas kondisinya terawat (62%), hanya sebesar 25% masyarakat yang menyatakan bahwa kondisi jalan di lingkungannya tidak terawat sedangkan sisanya (13%) masih berupa jalan tanah.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.15 Kondisi Prasarana Jalan di Permukiman Kumuh Rendah

4.2.1.2 Fisik

Kondisi fisik bangunan yang ada di permukiman ini umumnya merupakan bangunan dengan konstruksi semi permanen. Hal ini terlihat dari material konstruksi bangunan yang dipakai masyarakat untuk membangun rumahnya. Sebanyak 63% masyarakat memakai asbes sebagai bahan atap rumah mereka, 50% menggunakan semen sebagai bahan lantai, dan sebanyak 50% bahan dinding rumah mereka berupa $\frac{1}{2}$ tembok- $\frac{1}{2}$ papan.

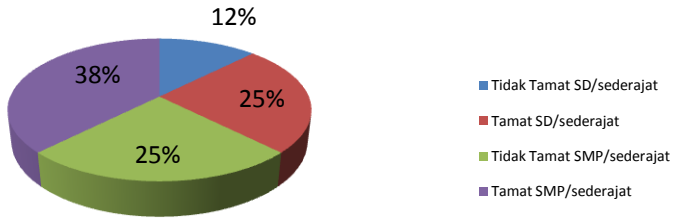
Tabel 4.12 Kondisi Fisik Permukiman Kumuh Rendah

Atap		Lantai		Dinding	
Kondisi	Persentase	Kondisi	Persentase	Kondisi	Persentase
Genteng	25 %	Keramik	37%	Tembok	12%
Seng	22%	Semen	50%	Papan	25%
Asbes	63%	Tanah	13%	$\frac{1}{2}$ tembok- $\frac{1}{2}$ papan	50%
Lainnya	0%	Lainnya	0%	Lainnya	13%
Total	100%	Total	100%	Total	100%

Sumber : Survey Primer, 2014

4.2.1.3 Sosial

Berdasarkan hasil kuesioner (Lampiran D), diketahui bahwa rata-rata masyarakat di lingkungan permukiman tersebut tidak memiliki jenjang pendidikan yang tidak tinggi. Sebanyak 38% masyarakat menyatakan bahwa mereka hanya mengenyam pendidikan sampai bangku SMP, sebanyak 25% tamat SD, 25% tidak tamat SMP dan sisanya sebesar 12% menyatakan mereka tidak tamat SD.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.16 Tingkat Pendidikan Masyarakat Permukiman Kumuh Rendah

Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa masyarakat yang terdapat di lingkungan hunian ini tidak hanya mereka yang berasal dari Jakarta (37%), namun juga mereka yang berasal dari luar Jakarta (63%), seperti misalnya Tegal, Brebes, Majalengka, Kebumen dan Cilacap (Lampiran D).

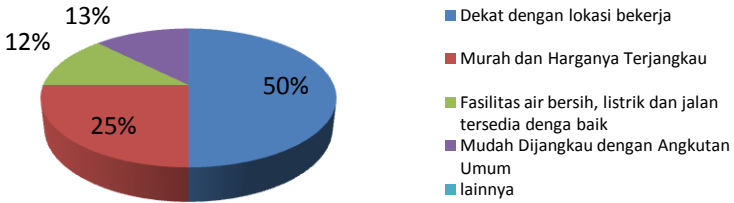


Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.17 Asal Daerah Masyarakat Permukiman Kumuh Ringan

Apabila dilihat dari nilai modusnya mayoritas masyarakat memilih lokasi hunian adalah karena adanya kedekatan dengan lokasi bekerja, yaitu sebesar 50%, sebagian masyarakat lainnya memilih lokasi hunian tersebut karena harganya yang murah (25%) dan sisanya (13%) karena lokasi tersebut mudah untuk dijangkau oleh angkutan umum. Alasan kedekatan dengan lokasi

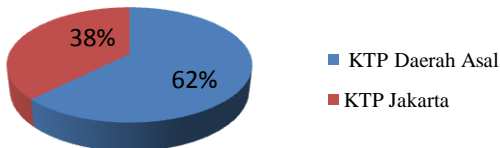
bekerja dipilih karena pada umumnya masyarakat di permukiman tersebut merupakan masyarakat pendatang, yang berasal dari berbagai daerah untuk bekerja di Jakarta, sehingga hal tersebut juga turut mempengaruhi pola bermukim masyarakat tersebut.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.18 Alasan Memilih Hunian Masyarakat Permukiman Kumuh Rendah

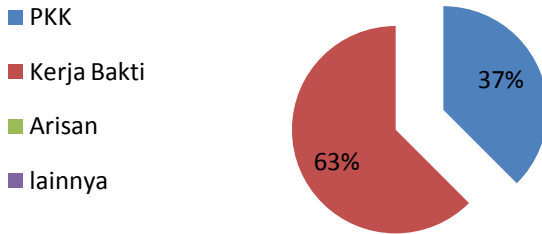
Untuk status kependudukan, sebagian masyarakat masih menggunakan KTP Asal Daerah (62%), sedangkan hanya sebesar 38% masyarakat yang sudah memiliki KTP Jakarta.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.19 Status Kependudukan Masyarakat

Sedangkan untuk tingkat kekerabatan masyarakat, dapat dilihat dari kegiatan sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat itu sendiri. Di permukiman kumuh rendah kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat yaitu kegiatan PKK (63%) dan juga kerja bakti (37%).

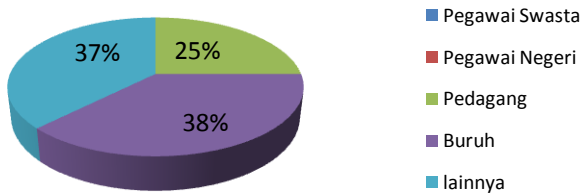


Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.20 Tingkat Keekerabatan Masyarakat

4.2.1.4 Ekonomi

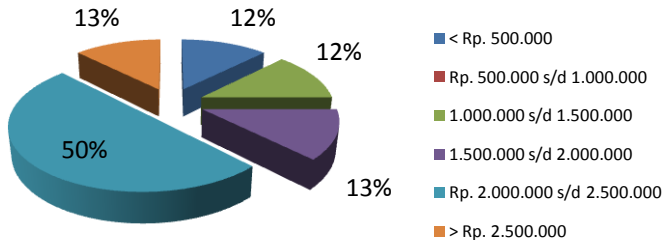
Sebagian besar masyarakat responden di lingkungan permukiman ini memiliki mata pencarian sebagai buruh (38%) dan sebesar 25% bekerja sebagai pedagang, dan sisanya (37%) umumnya bekerja di sektor informal, seperti sebagai tukang jagal ataupun serabutan, namun adapula yang bekerja sebagai wiraswasta.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.21 Jenis Pekerjaan Masyarakat Permukiman Kumuh Rendah

Untuk pendapatan, **sebagian besar masyarakat responden memiliki penghasilan dengan rentang antara Rp. 2.100.000 s/d Rp. 2.500.000.** Hal tersebut dikarenakan karakteristik masyarakatnya yang umumnya bekerja sebagai buruh, sehingga kurang lebih mereka menerima gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta, yaitu sebesar 2.441.301.

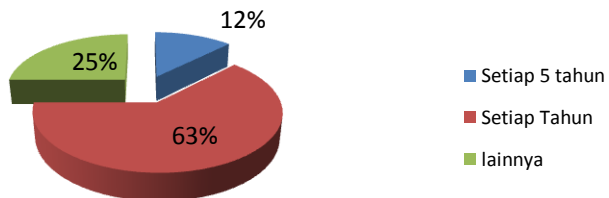


Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.22 Tingkat Pendapatan Masyarakat

4.2.1.5 Bahaya (*hazard*)

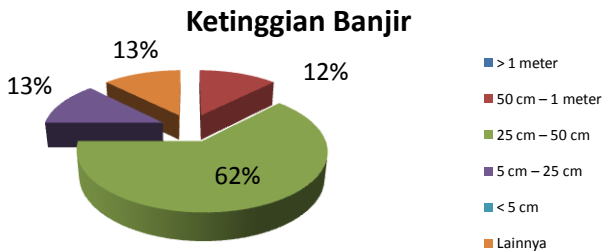
Berdasarkan data kuesioner, diketahui bahwa lingkungan hunian di permukiman kumuh rendah ini merupakan permukiman rawan banjir. Hal ini sesuai, karena sebesar 63% masyarakat responden menyatakan bahwa lingkungan permukiman mereka setiap tahun tergenang oleh banjir, 12% menyatakan setiap 5 tahun permukiman mereka tergenang oleh banjir.



Sumber : Hasil Analisis

Gambar 4.23 Intensitas Banjir di Permukiman Kumuh Rendah

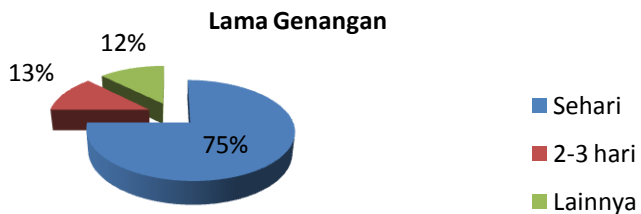
Sedangkan untuk ketinggian banjir/genangan itu sendiri sekitar 62% masyarakat responden menyatakan bahwa ketinggian banjir di lingkungan huniannya antara 25 cm – 50 cm, 12% menyatakan antara 50 cm – 1 meter, dan 13% menyatakan bahwa ketinggian genangan tersebut antara 5 cm – 25 cm.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.24 Ketinggian Banjir di Permukiman Kumuh Rendah

Untuk lamanya genangan, lebih dari separuh dari masyarakat responden (75%) menyatakan bahwa lama genangan/banjir yang terdapat di lingkungan mereka adalah selama sehari, sedangkan sebanyak 13% menyatakan bahwa lama genangan yang terjadi di lingkungan permukiman tersebut adalah antara 2-3 hari.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

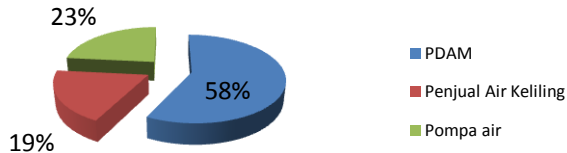
Gambar 4.25 Lama Genangan di Permukiman Kumuh Rendah

4.2.2 Karakteristik Permukiman Kumuh Sedang

4.2.2.1 Sarana dan Prasarana

Dalam pemenuhan akan kebutuhan air bersih, nilai modus yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di

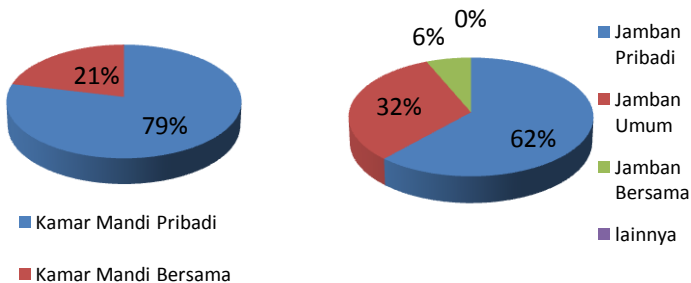
permukiman ini menggunakan sumber air dari PDAM (PALYJA) yaitu sebanyak 58% namun ada pula masyarakat yang menggunakan air pompa/sumur dalam memenuhi kebutuhannya (23%), dan sisanya (19%) memanfaatkan penjual air keliling.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

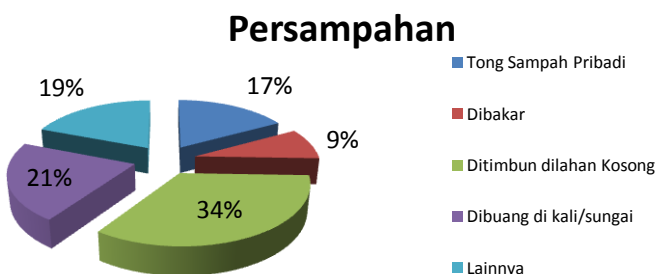
Gambar 4.26 Prasarana Air di Permukiman Kumuh Sedang

Untuk kebutuhan akan sanitasi, sebagian besar masyarakat sudah memiliki kamar mandi pribadi di rumahnya (79%) dan juga sebesar 62% kamar mandi masyarakat tersebut sudah dilengkapi dengan jamban pribadi, hanya sekitar 7% masyarakat yang masih menggunakan jamban umum dan sisanya sebesar 6% masyarakat menggunakan jamban bersama. Hanya saja meskipun sudah memiliki kamar mandi dan jamban pribadi, namun ternyata umumnya kondisi kamar mandi dan jamban tersebut tidak terawat dan terkesan jorok



Gambar 4.27 Diagram Kondisi Sanitasi

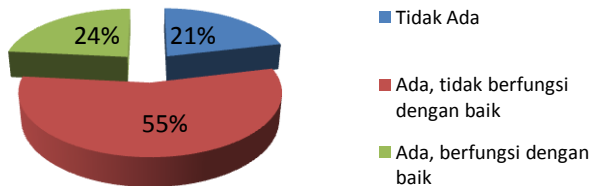
Mayoritas masyarakat yaitu sebesar 34% membuang sampah pada lahan kosong. Tidak semua masyarakat memiliki tong sampah dirumahnya, hanya sebanyak 17% masyarakat yang memiliki tong sampah pribadi tersebut, 9% masyarakat memilih untuk langsung membakar sampah tersebut, dan 21% lainnya membuang sampah tersebut ke kali/sungai. Persampahan memang menjadi permasalahan yang cukup mengganggu di lingkungan permukiman kumuh tingkat sedang ini, hal tersebut dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan sampah di lingkungan tersebut sehingga selama ini masyarakat hanya memanfaatkan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat penampungan.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.28 Kondisi Persampahan di Permukiman Kumuh Sedang

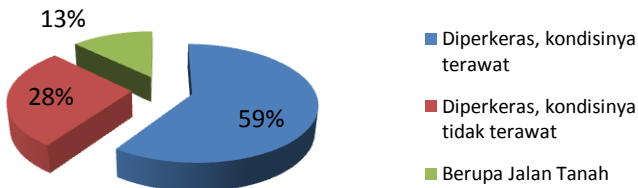
Untuk prasarana drainase, umumnya masyarakat telah memiliki saluran air di lingkungan rumahnya, hanya saja saluran air yang ada tersebut umumnya tidak berfungsi dengan baik (55%), bahkan sebanyak 21% masyarakat menyatakan bahwa tidak terdapat saluran air di lingkungannya, hanya sebesar 24% masyarakat yang menyatakan bahwa di lingkungan mereka terdapat saluran air dengan kondisi yang baik. Umumnya saluran air yang ada tersebut dipenuhi oleh tumpukan sampah yang menggenangnya sehingga membuat saluran air yang ada tidak berfungsi dengan baik.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.29 Kondisi Drainase di Permukiman kumuh Sedang

Sedangkan untuk aksesibilitas, umumnya sudah cukup baik, hal tersebut dikarenakan sebesar 59% masyarakat menyatakan bahwa kondisi jalan yang terdapat dilingkungan mereka cukup baik dan terawat, hanya 28% masyarakat yang memiliki kondisi jalan lingkungannya tidak terawat, dan sisanya sebesar 13% masyarakat memiliki jalan yang masih berupa tanah.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.30 Kondisi Prasarana Jalan

4.2.2.2 Fisik

Permukiman yang terdapat pada tingkat sedang adalah berupa bangunan permanen. Hal ini terlihat dari material bangunan yang digunakannya. Sebesar 80% masyarakat menggunakan asbes sebagai bahan atap rumah mereka, 70%

material lantai mereka berupa semen dan sebanyak 49% bahan dinding rumah mereka sudah berupa ½ tembok- ½ papan

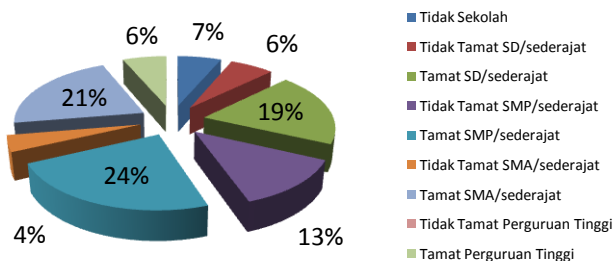
Tabel 4.13 Kondisi Fisik Permukiman Kumuh Sedang

Atap		Lantai		Dinding	
Kondisi	Persentase	Kondisi	Persentase	Kondisi	Persentase
Genteng	11 %	Keramik	21%	Tembok	32%
Seng	5%	Semen	70%	Papan	19%
Asbes	80%	Tanah	7%	½ tembok- ½ papan	49%
Lainnya	4%	Lainnya	2%	Lainnya	0%
Total	100%	Total	100%	Total	100%

Sumber : Survey Primer, 2014

4.2.2.3 Sosial

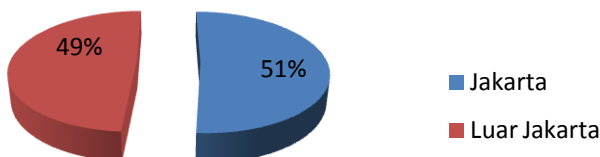
Tidak jauh berbeda dengan permukiman kumuh tingkat rendah, melihat pada nilai modus yang didapat terlihat bahwa mayoritas masyarakat di lingkungan ini hanya megenyam pendidikan hingga tamat SMP/ sederajat (24%) , sebesar 21% tamat SMA, 19% tamat SD, 13% tidak tamat SMP, bahkan sebesar 7% masyarakatnya tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Hanya saja pada permukiman ini, masih terdapat masyarakat yang menempuh pendidikan hingga tamat perguruan tinggi, yaitu sebesar 3%.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.31 Tingkat Pendidikan Masyarakat Permukiman Kumuh Sedang

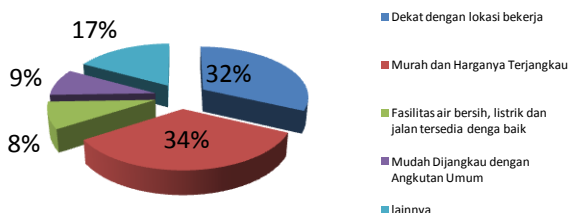
Untuk asal daerah masyarakat di lingkungan permukiman ini tergolong cukup sama antara penduduk asli Jakarta dengan masyarakat pendatangnya, yaitu masing-masing sebesar 49% dan 51%.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.32 Asal Daerah Masyarakat Permukiman Kumuh Sedang

Sedangkan untuk alasan pemilihan lokasi hunian, umumnya masyarakat memilih karena harganya yang murah (34%), 32% karena dekat dengan lokasi bekerja, dan 9% karena fasilitas air bersih, listrik dan jalan tersedia dengan baik.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.33 Alasan Memilih Hunian Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang

Status kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan permukiman ini umumnya sudah memiliki KTP Jakarta meskipun mereka bukan penduduk asli Jakarta. Sebesar (92%) menyatakan bahwa mereka telah memiliki KTP Jakarta,

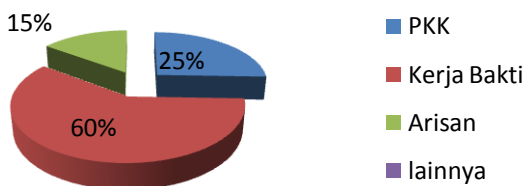
hanya sekitar 6% masyarakat yang masih memakai KTP Asal Daerah, dan sisanya sebesar 2% menyatakan tidak memiliki KTP.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.34 Status Kependudukan Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang

Tingkat kekerabatan yang dimiliki masyarakat penghuni di lingkungan permukiman kumuh sedang dilihat dari kegiatan sosial masyarakatnya, yaitu berupa kegiatan PKK sebesar (25%), Kerja Bakti (60%), dan Arisan (15%). Kondisi ini berbeda dengan yang terdapat di lingkungan permukiman kumuh rendah, dimana pada lingkungan permukiman kumuh sedang ini tidak hanya terdapat kegiatan PKK dan Kerja Bakti saja, tetapi juga terdapat kegiatan arisan oleh masyarakatnya.



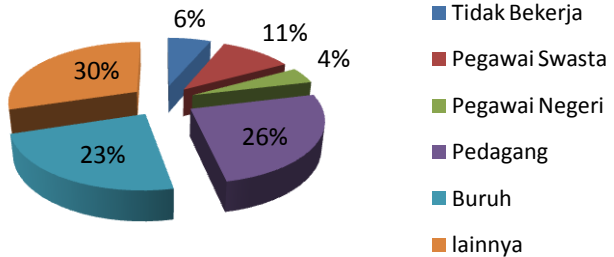
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.35 Tingkat Kekerabatan Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang

4.2.2.4 Ekonomi

Berbeda dengan permukiman kumuh tingkat rendah, dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh, pada permukiman ini, mata pencaharian masyarakat lebih heterogen meskipun banyak pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh. Sebanyak 26% masyarakat bekerja sebagai pedagang, 11%

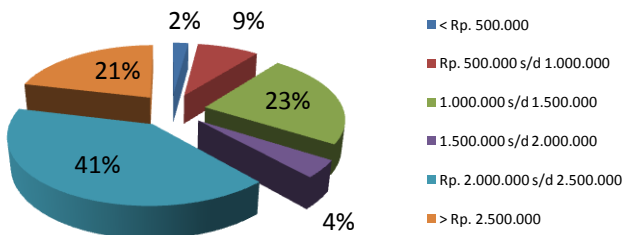
sebagai pegawai swasta, 23% sebagai buruh, dan 4% sebagai pegawai negeri.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.36 Jenis Pekerjaan Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang

Untuk pendapatan, melihat dari nilai modus yang didapatkan, mayoritas masyarakat di lingkungan ini memiliki penghasilan dengan rentang antara Rp. 2.100.000 s/d 2.500.000. Hal ini salah satunya dikarenakan masih cukup banyaknya masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh sehingga umumnya mereka mendapatkan gaji sesuai dengan UMR DKI Jakarta.

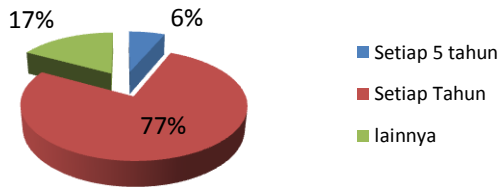


Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.37 Tingkat Pendapatan Masyarakat di Permukiman Kumuh Sedang

4.2.2.5 Bahaya (*hazard*)

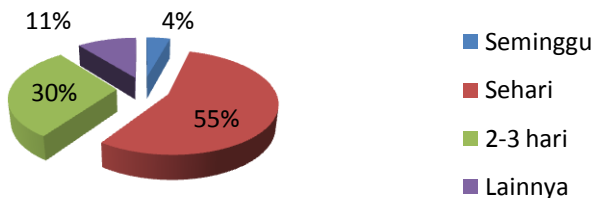
Berdasarkan pada kuesioner yang ditanyakan pada masyarakat responden, sebanyak 77% menyatakan bahwa banjir yang terjadi di lingkungan permukiman mereka terjadi setiap setahun sekali, 6% menyatakan setiap 5 tahun sekali.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.38 Intensitas Banjir di Permukiman Kumuh Sedang

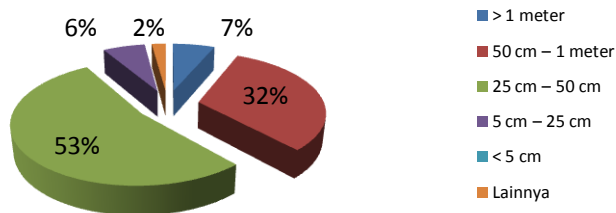
Sedangkan untuk lama banjir, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa genangan yang ada terjadi selama sehari (55%), 4% masyarakat menyatakan bahwa banjir yang terjadi di lingkungan permukiman mereka berlangsung selama seminggu, 30% selama 2-3 hari.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.39 Lama Banjir di Permukiman Kumuh Sedang

Ketinggian genangan yang terdapat pada lokasi permukiman ini umumnya berkisar antara 25 cm – 50 cm (53%), 50 cm – 1 meter (32%), 5 cm – 25 cm 6% dan > 1 meter (6%) .



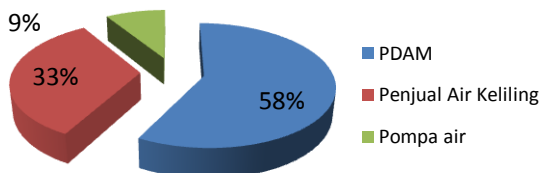
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.40 Ketinggian Genangan di Permukiman Kumuh Sedang

4.2.3 Karakteristik Permukiman Kumuh Berat

4.2.3.1 Sarana dan Prasarana

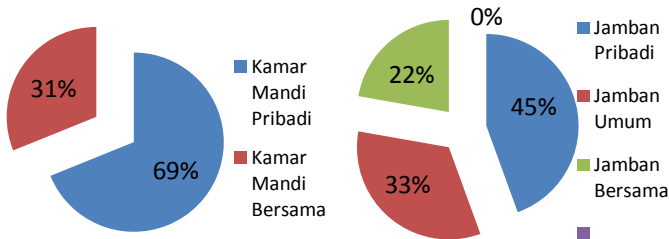
Untuk kebutuhan prasarana air bersih di lingkungan permukiman, melihat pada nilai modus yang didapatkan, sebagian besar sudah menggunakan air PDAM (58%), dan sebanyak 33% masyarakat menggunakan air bersih dari penjual air keliling dan 9% masyarakat mendapatkan air sumur/pompa.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

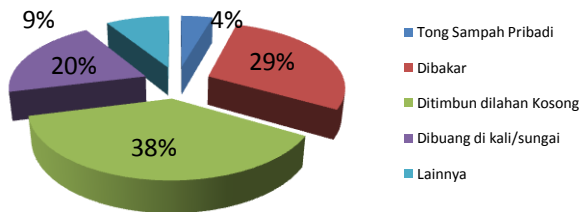
Gambar 4.41 Prasarana Air di Permukiman Kumuh Berat

Untuk prasarana sanitasi, sebagian besar masyarakat telah memiliki kamar mandi pribadi dan juga jamban pribadi di rumahnya, yaitu masing-masing 69% dan 45%. Meski demikian, masih terdapat sekitar 31% masyarakat yang menggunakan kamar mandi bersama dan 33% masyarakat pengguna jamban umum.



Gambar 4.42 Diagram Kondisi Sanitasi

Untuk prasarana persampahan, sama hal nya dengan permukiman kumuh sedang, pada lingkungan permukiman ini juga memiliki permasalahan terkait dengan tempat pembuangan sampah. Sebanyak 38% masyarakat membuang sampahnya pada lahan kosong yang ada disekitarnya atau dipinggir jalan, 4% memiliki tong sampah pribadi, 29% dibakar, 20% dibuang di kali/sungai.

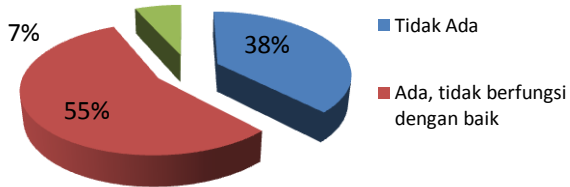


Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.43 Persampahan di Permukiman Kumuh Berat

Untuk prasarana drainase, umumnya masyarakat telah memiliki saluran air di lingkungan rumahnya, hanya saja saluran air yang ada tersebut umumnya tidak berfungsi dengan baik (55%), bahkan sebanyak 38% masyarakat menyatakan bahwa tidak terdapat saluran air di lingkungannya, hanya sebesar 7% masyarakat yang menyatakan bahwa di lingkungan mereka terdapat saluran air dengan kondisi yang baik. Umumnya saluran air yang ada tersebut dipenuhi oleh tumpukan sampah yang

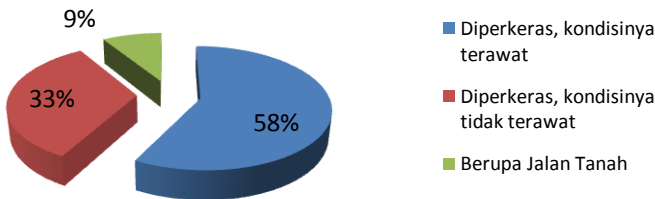
dibuang oleh masyarakat kemudian menggenangi saluran tersebut sehingga membuat saluran air yang ada tidak berfungsi dengan baik.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.44 Prasarana Drainase di Permukiman Kumuh Berat

Untuk aspek aksesibilitas, umumnya jalan yang ada di lingkungan permukiman tersebut sudah diperkeras baik menggunakan aspal maupun paving, sebesar 58% kondisinya terawat, sebesar 33% masyarakat yang menyatakan bahwa kondisi jalan di lingkungannya terawat sedangkan sisanya (9%) masih berupa jalan tanah.



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.45 Prasarana Jalan di Permukiman Kumuh Berat

4.2.3.2 Fisik

Konstruksi bangunan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di lingkungan permukiman ini adalah berupa bangunan semi permanen. Hal ini terlihat dari material pembentuk bangunan yang digunakan oleh masyarakat dimana sebanyak 69% rumah masyarakat atapnya berbahan asbes, 49% lantai nya berupa semen, dan 58% dari konstruksi bangunan rumah mereka terbuat dari ½ tembok- ½ papan.

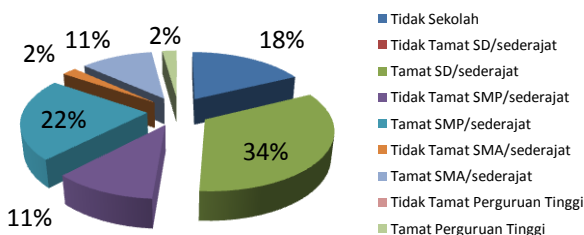
Tabel 4.14 Kondisi Fisik Permukiman Kumuh Berat

Atap		Lantai		Dinding	
Kondisi	Persentase	Kondisi	Persentase	Kondisi	Persentase
Genteng	11 %	Keramik	33%	Tembok	35%
Seng	13%	Semen	49%	Papan	7%
Asbes	69%	Tanah	11%	½ tembok- ½ papan	58%
Lainnya	7%	Lainnya	7%	Lainnya	0%
Total	100%	Total	100%	Total	100%

Sumber : Survey Primer, 2014

4.2.3.3 Sosial

Tidak jauh berbeda dengan dua permukiman sebelumnya, pada permukiman kumuh tingkat berat ini umumnya masyarakat juga memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Hanya sekitar 2% saja dari masyarakat responden yang menyatakan bahwa mereka mengenyam pendidikan hingga tamat perguruan tinggi, mayoritas masyarakat (34%) hanya menempuh pendidikan hingga tamat SD saja, 22% masyarakat hingga tamat SMP, dan 11% mengaku tidak menyelesaikan pendidikan SMP nya

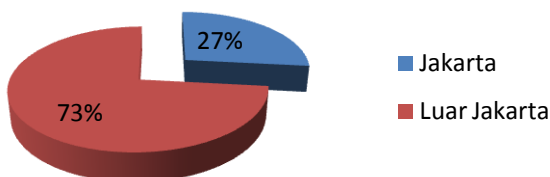


Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.46 Tingkat pendidikan masyarakat

Karakteristik penduduk yang berada pada di lingkungan permukiman ini sebagian besar merupakan masyarakat pendatang

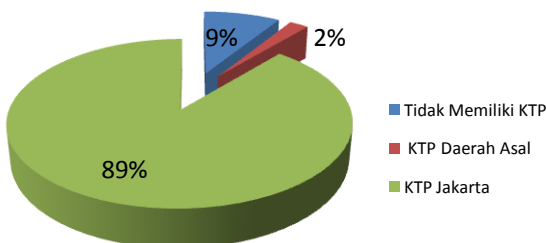
yang berasal dari luar Jakarta (73%) dan sebagian mereka yang asli dari Jakarta (27%).



Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.47 Asal Daerah Masyarakat

Meski demikian, mayoritas dari masyarakat di permukiman ini sudah memiliki KTP Jakarta (89%), hanya sekitar 2% yang masih menggunakan KTP Asal Daerah dan sisanya, sebanyak 9% mengaku mereka tidak memiliki KTP. Banyaknya masyarakat yang sudah memiliki KTP DKI Jakarta ini dikarenakan umumnya mereka telah lama menetap di daerah tersebut.

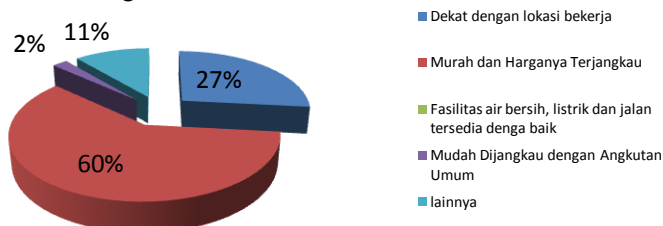


Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.48 Status Kependudukan Masyarakat Permukiman Kumuh Berat

Untuk alasan pemilihan lokasi hunian sendiri, umumnya masyarakat memilih lokasi permukiman tersebut dikarenakan harganya yang murah (60%), sekitar 27% menyatakan karena

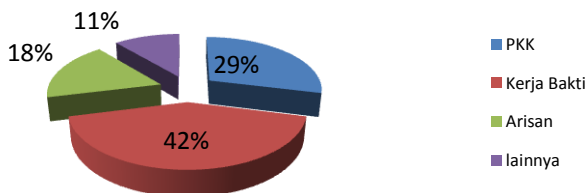
kedekatan permukiman dengan lokasi bekerja, 2% karena mudah dijangkau oleh angkutan umum.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.49 Alasan Memilih Hunian oleh Masyarakat di Permukiman Kumuh Berat

Tingkat kekerabatan yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan permukiman kumuh berat secara umum lebih beragam dibandingkan dengan kedua kategori lainnya, dimana pada permukiman kumuh berat ini kegiatan sosial masyarakatnya cukup beragam. Masyarakat selain memiliki kegiatan PKK (29%), Kerja Bakti (42%), Arisan (18%), tetapi juga ternyata terdapat kegiatan pengajian, yaitu sebanyak (11%) (Lampiran D).

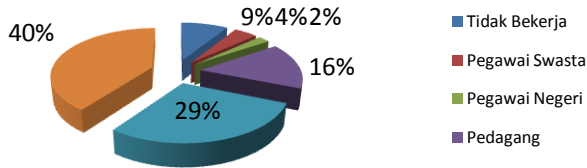


Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.50 Tingkat Kekerabatan Masyarakat

4.2.3.4 Ekonomi

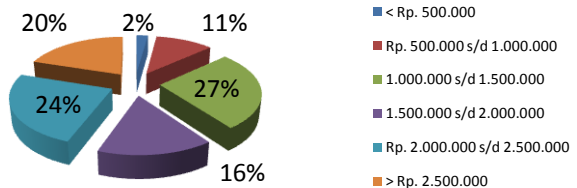
Untuk pekerjaan sebesar 29% masyarakat di lingkungan ini memiliki mata pencaharian sebagai buruh, sebanyak 16% sebagai pedagang, namun mayoritas masyarakat (40%) memiliki pekerjaan lainnya, seperti tukang sapu, kuli bangunan, tukang tambal, tukang ojek, dan lain sebagainya (Lampiran D).



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.51 Jenis Pekerjaan Masyarakat Permukiman Kumuh Berat

Sebagian masyarakat di lingkungan permukiman ini memiliki penghasilan dengan rentang antara Rp. 1.100.000 – Rp. 1.500.000 (27%). Penghasilan ini merupakan pendapatan di bawah UMR, hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor informal dan umumnya merupakan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan atau pun pendidikan yang cukup tinggi.

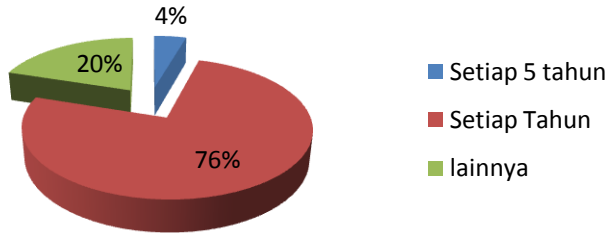


Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.52 Tingkat Pendapatan

4.2.3.5 Bahaya (*hazard*)

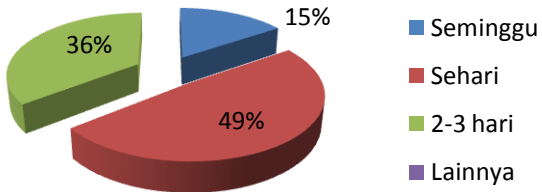
Sama seperti dua permukiman sebelumnya, pada permukiman kumuh kategori berat ini juga merupakan daerah rawan banjir. Hal ini terlihat dari tingginya masyarakat yang menyatakan bahwa daerah permukiman mereka merupakan daerah rawan banjir, sekitar 76% masyarakat menyatakan bahwa lingkungan permukiman mereka terkena banjir di setiap tahunnya, bahkan 20% menyatakan bahwa banjir yang terjadi di lingkungan permukiman mereka terjadi di setiap kali hujan turun, hanya sekitar 4% dari mereka yang menyatakan bahwa banjir yang terdapat di lingkungan tersebut terjadi setiap 5 tahun sekali.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.53 Intensitas Banjir di Permukiman Kumuh Berat

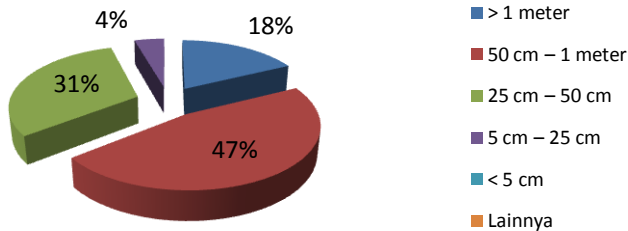
Umumnya lama banjir yang menggenangi permukiman mereka adalah selama sehari (49%), 35% menyatakan selama 2-3 hari, dan sebanyak 16% masyarakat mengatakan bahwa genangan tersebut bisa selama seminggu menggenangi permukiman mereka.



Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.54 Lama Genangan di Permukiman Kumuh Berat

Ketinggian rata-rata yang terdapat di lingkungan permukiman ini adalah berkisar antara 50 cm – 1 meter (47%), sebanyak 31% masyarakat responden menyatakan bahwa ketinggian banjir setinggi 25 cm – 50 cm, 18% menyatakan ketinggian tersebut > 1 meter, dan sisanya sebanyak 4 % menyatakan ketinggiannya antara 5 cm – 25 cm.



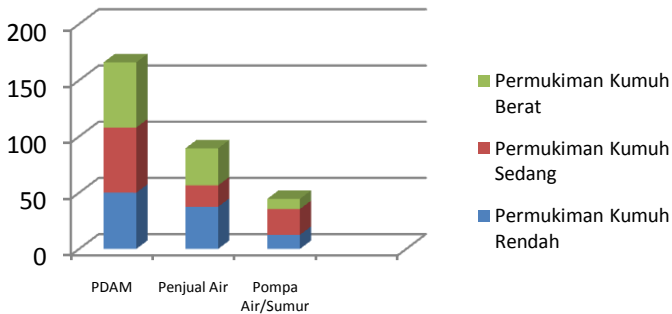
Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.55 Ketinggian Banjir di Permukiman Kumuh Berat

Setelah dilakukan paparan mengenai masing-masing aspek di tiap-tiap tingkat kekumuhan tersebut, maka berikut ini akan disajikan matriks komparasi yang berisikan kompilasi dari ketiga kategori kumuh yang ada.

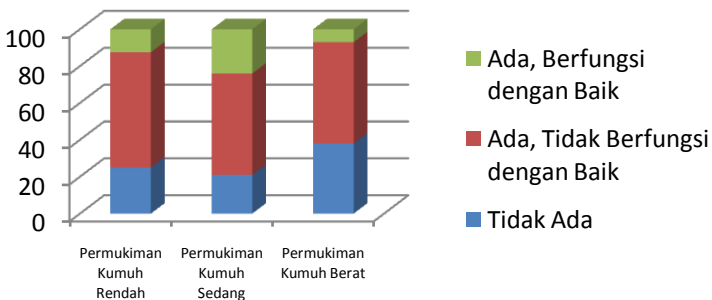
A. Aspek Sarana dan Prasarana

Melihat pada **Gambar 4.56** dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat baik itu di permukiman kategori kumuh rendah, sedang, maupun berat, sudah dapat mengakses sumber air dari PAM (PALYJA). Sedangkan sumber air bersih lainnya yang juga banyak diakses oleh masyarakat adalah dengan menggunakan penjual air keliling, lalu sumber lainnya adalah pada pompa air/sumur.



Gambar 4.56 Diagram Komparasi Prasarana Air Bersih

Untuk kondisi prasarana drainase, umumnya ketiga kategori permukiman kumuh, baik rendah, sedang, maupun berat, memiliki kondisi yang sama, yaitu memiliki saluran air/drainase, hanya saja tidak berfungsi dengan baik. Berikut diagram dari kondisi drainase di masing-masing permukiman kumuh yang ada.



Gambar 4.57 Diagram Komparasi Prasarana Drainase

Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa permukiman kumuh kategori berat ternyata memiliki persentase paling besar tidak tersedianya saluran air dibandingkan dengan kedua kategori

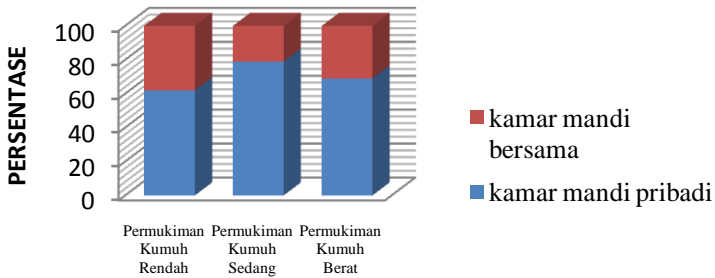
permukiman lainnya. Selain itu, meskipun mayoritas sama-sama memiliki saluran air yang tidak berfungsi dengan baik, namun terdapat perbedaan kondisi antara permukiman kumuh ringan, dengan permukiman kumuh sedang dan berat, dimana tidak optimalnya fungsi saluran air yang terdapat di permukiman kumuh ringan umumnya disebabkan oleh keberadaan dari industri dan juga Rumah Potong Hewan (RPH) disekitarnya yang kerap kali membuang limbahnya ke saluran warga, akibatnya saluran tersebut menjadi tercemar dan juga mampet. Sedangkan pada permukiman kumuh sedang dan berat, tidak optimalnya saluran air tersebut umumnya disebabkan karena masyarakat itu sendiri yang kerap membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan saluran yang ada tersumbat dan kotor.



(a) Kondisi Saluran Air di Permukiman Kumuh Ringan (b) dan kumuh berat

Sumber : Survey Primer, 2014

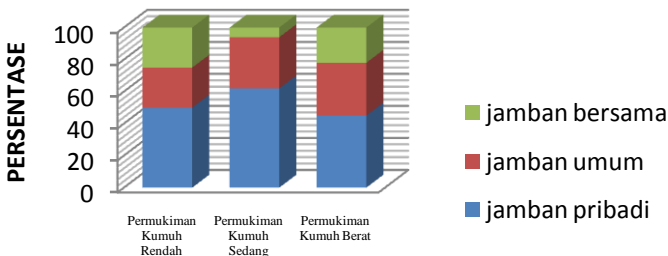
Untuk prasarana sanitasi, umumnya baik di permukiman kumuh rendah, sedang dan berat, telah memiliki kamar mandi pribadi di masing-masing rumahnya, seperti yang dapat dilihat pada **Gambar.4.59** berikut.



TINGKAT PERMUKIMAN KUMUH

Gambar 4.59 Diagram Komparasi Prasarana Kamar Mandi

Sedangkan untuk prasarana jamban, masyarakat permukiman kumuh sedang merupakan permukiman yang paling banyak memiliki jamban pribadi dirumahnya (62%), untuk kemudian paling banyak kedua adalah permukiman kumuh rendah (50%), dan terakhir adalah permukiman kumuh berat (45%). Sedangkan masyarakat pengguna jamban umum yang paling banyak adalah masyarakat permukiman kumuh berat (33%), kemudian masyarakat permukiman kumuh sedang (32%) dan terakhir adalah permukiman kumuh rendah (25%).



TINGKAT PERMUKIMAN KUMUH

Gambar 4.60 Diagram Komparasi Prasarana Jamban

Namun, meskipun telah memiliki prasarana sanitasi berupa kamar mandi dan wc pribadi, umumnya kondisi dari prasarana tersebut tergolong tidak terawat dan kotor.



(a)

(b)

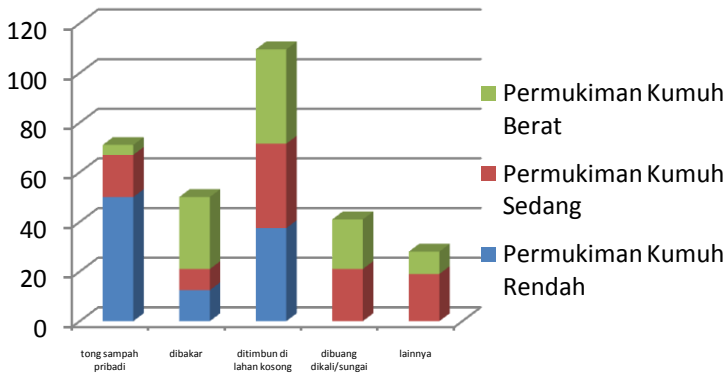
Gambar 4.61

(a) Kondisi Kamar mandi di Permukiman Kumuh Sedang (b) dan Kumuh Berat

Sumber : Survey Primer, 2014

Untuk aspek prasarana persampahan, memang menjadi suatu permasalahan yang cukup mengganggu di permukiman kumuh Kelurahan Kapuk. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan sampah yang terdapat di Kelurahan tersebut, sehingga selama ini masyarakat cenderung untuk membuang sampahnya baik dengan dibuang langsung di kali, ditimbun, ataupun langsung dibakar. Berdasarkan **Gambar 4.62** terlihat bahwa pada permukiman kumuh berat, masyarakat cenderung untuk membuang sampahnya dengan cara ditimbun dilahan kosong, begitu pula pada permukiman kumuh sedang, sedangkan pada permukiman kumuh rendah umumnya mereka telah memiliki tong sampah masing-masing dirumahnya. Selain dengan cara ditimbun di lahan kosong, mayoritas masyarakat permukiman kumuh berat juga membuang sampahnya dengan cara langsung dibakar, langkah ini dianggap praktis oleh

masyarakat karena selain sampahnya tidak menumpuk dirumahnya, mereka juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar seperti misalnya iuran sampah.



Gambar 4.62 Diagram Komparasi Prasarana Persampahan



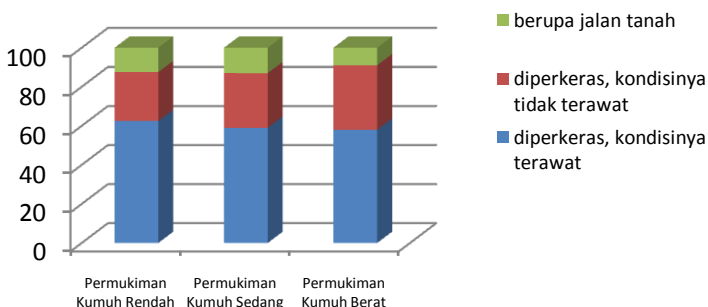
(a)

(b)

Gambar 4.63 (a) Timbunan sampah di Permukiman Kumuh sedang (b) Pembuangan sampah dengan cara dibakar di Permukiman Kumuh Berat

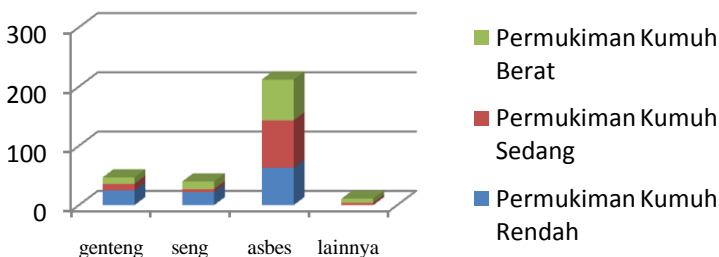
Sumber : Survey Primer, 2014

Untuk aspek aksesibilitas, umumnya kondisi jalan yang terdapat di permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk sudah diperkeras, baik menggunakan paving maupun aspal, dan kondisinya cukup baik. Namun diantara ketiga kategori permukiman tersebut, kondisi jalan yang tidak terawat terbanyak ditemui pada permukiman kumuh berat, yaitu sebesar 33%, kemudian permukiman kumuh sedang sebesar (28%) dan permukiman kumuh ringan (12,5%). Agar lebih jelas, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

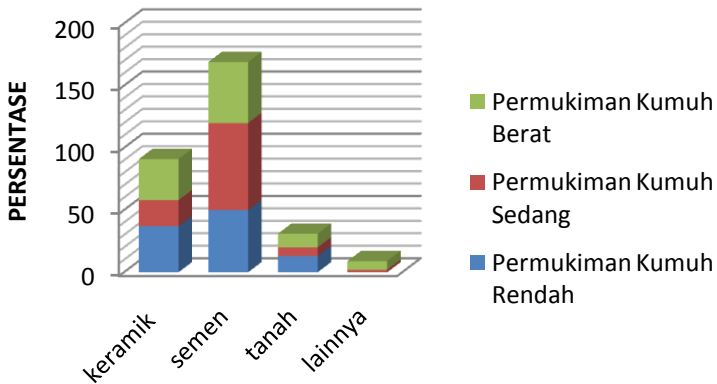


Gambar 4.64 Diagram Komparasi Aksesibilitas

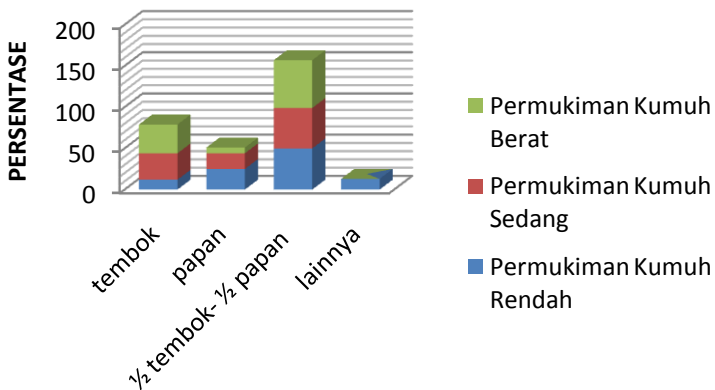
B. Aspek Fisik



Gambar 4.65 Diagram Komparasi Bahan Atap



Gambar 4.66 Diagram Komparasi Bahan Lantai



Gambar 4.67 Diagram Komparasi Bahan Dinding

Kondisi bangunan dalam hal ini dilihat dari bahan/material bangunan yang dimiliki masing-masing rumah masyarakat permukiman kumuh dan berdasarkan pada diagram yang disajikan diatas, dapat terlihat bahwa bahan-bahan yang umumnya digunakan masyarakat dalam membangun rumah mereka merupakan bahan rumah semi-permanen. Hal tersebut

terlihat dari tingginya pemakaian bahan atap berupa asbes, bahan lantai berupa semen dan dengan dinding berupa $\frac{1}{2}$ tembok $\frac{1}{2}$ papan



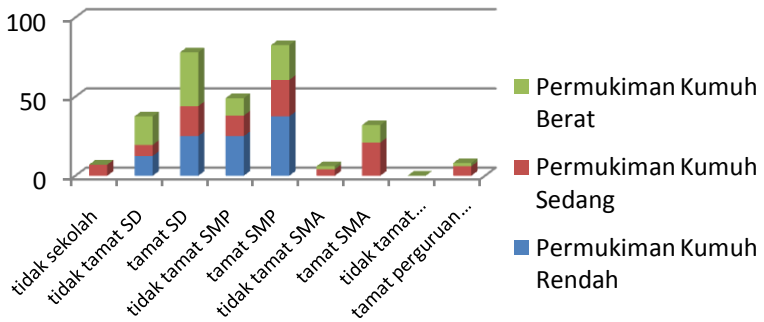
(a)

(b)

Gambar 4.68 (a) Kondisi Bangunan di Permukiman Kumuh Sedang (b) Kondisi Bangunan di Permukiman Kumuh Berat

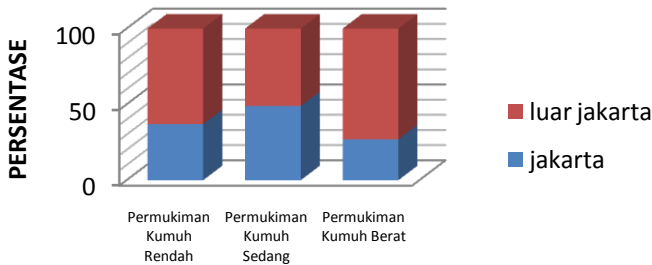
C. Sosial

Umumnya masyarakat yang tinggal pada wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada **Gambar 4.71** dimana mayoritas masyarakatnya hanya mengenyam pendidikan hingga tamat SMP/ sederajat. Bahkan pada permukiman kumuh tingkat berat, masyarakat tamatan SD/ sederajat merupakan kelompok jenjang pendidikan mayoritas yang dimiliki masyarakatnya. Hanya sedikit diantara mereka yang memiliki jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.



Gambar 4.69 Komparasi Tingkat Pendidikan Masyarakat

Aspek sosial masyarakat permukiman kumuh lainnya, dilihat dari asal daerah masyarakatnya, dimana setelah diberikan kuesioner diketahui bahwa banyak masyarakat yang merupakan pendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

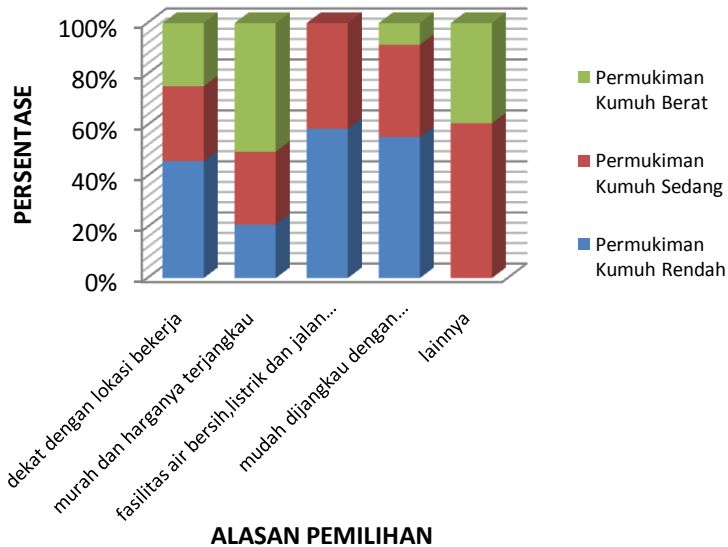


Gambar 4.70 Komparasi Asal Daerah Masyarakat

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa masyarakat pendatang terbanyak ada di wilayah permukiman kumuh rendah dan juga kumuh berat, sedangkan pada

permukiman kumuh sedang cenderung seimbang antara masyarakat pendatang dengan masyarakat yang asli Jakarta.

Sedangkan untuk alasan pemilihan lokasi hunian, umumnya masyarakat mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan lokasi bekerja, agar lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut.

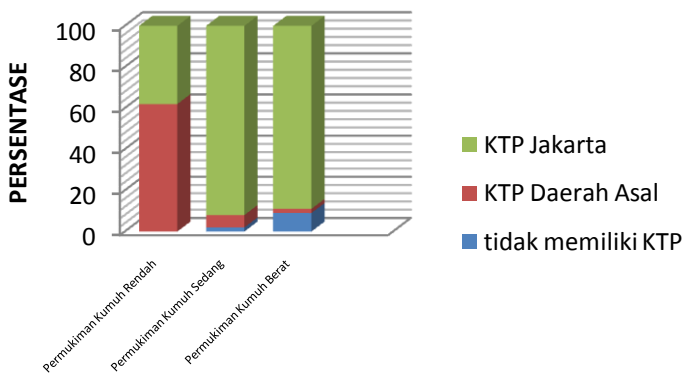


Gambar 4.71 Komparasi Alasan Pemilihan Masyarakat

Pada masyarakat penghuni permukiman kumuh rendah alasan terbesar memilih lokasi hunian tersebut adalah karena adanya kedekatan dengan lokasi bekerja. Hal ini mengingat dekatnya wilayah tersebut dengan lokasi industri tempat mereka bekerja. Sedangkan pada permukiman kumuh sedang dan berat alasan mereka adalah karena harganya yang murah sehingga dapat dijangkau oleh mereka. Dari gambar terlihat bahwa, kelompok masyarakat yang paling banyak memilih faktor harga adalah kelompok masyarakat penghuni permukiman kumuh berat,

dimana seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat permukiman kumuh berat umumnya lebih rendah dibandingkan dengan dua kategori permukiman lainnya. Sedangkan untuk alasan lainnya, yang banyak dipilih oleh permukiman kumuh sedang, merupakan alasan lainnya yang ditemui di lapangan, yaitu karena adanya faktor sejak lahir yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini sesuai, karena sesuai dengan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa jumlah masyarakat asli Jakarta cukup banyak jumlahnya dan tergolong seimbang dengan masyarakat pendatang.

Untuk status kependudukan, sebagian besar masyarakat telah memiliki KTP Jakarta meskipun mereka bukan warga asli Jakarta. Agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini.

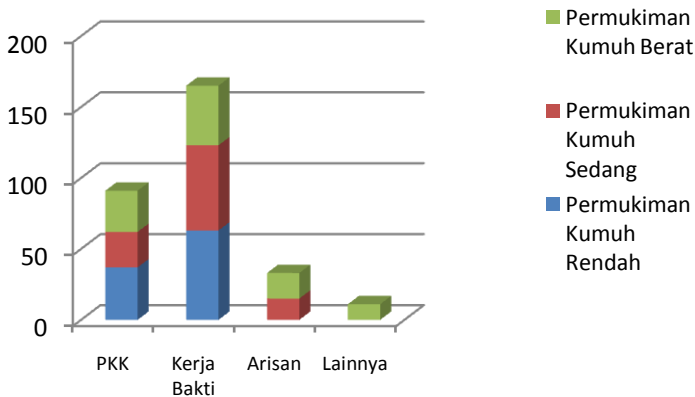


Gambar 4.72 Komparasi Status Kependudukan Masyarakat

Masyarakat permukiman kumuh rendah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki KTP Asal Daerah tertinggi dibandingkan dengan dua kategori permukiman kumuh lainnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya masyarakat penghuni permukiman kumuh tersebut merupakan masyarakat pendatang yang baru menetap di daerah tersebut selama beberapa tahun.

Berbeda halnya dengan masyarakat permukiman kumuh sedang dan berat, meskipun banyak pula dari mereka yang merupakan masyarakat pendatang, namun mereka sudah cukup lama menetap di wilayah tersebut, sehingga telah memiliki KTP Jakarta.

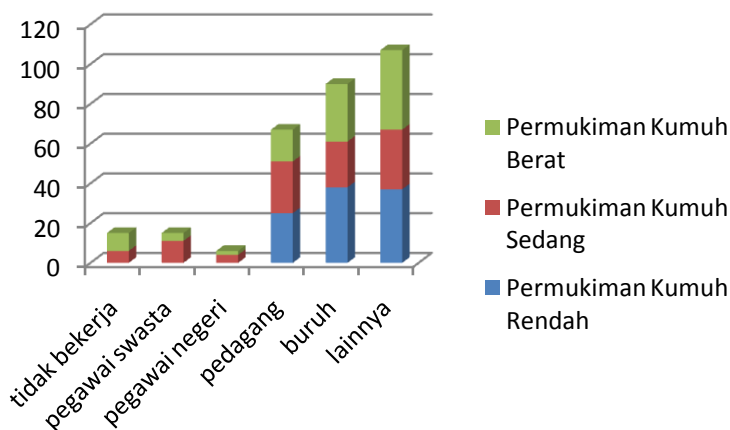
Tingkat kekerabatan masyarakat dilihat dari kegiatan sosial yang terdapat di lingkungan permukiman masyarakat ternyata menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara permukiman kumuh kategori rendah, sedang dan berat. Dimana pada permukiman kumuh kategori rendah kegiatan sosial yang dimiliki masyarakat hanya kerja bakti dan juga kegiatan PKK, berbeda dengan permukiman kumuh rendah, di permukiman kumuh sedang selain kegiatan kerja bakti dan kegiatan PKK, terdapat pula kegiatan arisan. Lain halnya dengan kedua kategori permukiman tersebut, dimana pada permukiman kumuh berat memiliki kegiatan sosial yang lebih beragam, yaitu kerja bakti, PKK, arisan, dan juga terdapat kegiatan pengajian didalamnya (Lampiran D). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut.



Gambar 4.73 Komparasi Tingkat Kekerabatan Masyarakat

D. Ekonomi

Aspek ekonomi masyarakat penghuni permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk dilihat berdasarkan jenis pekerjaan dan juga tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat.

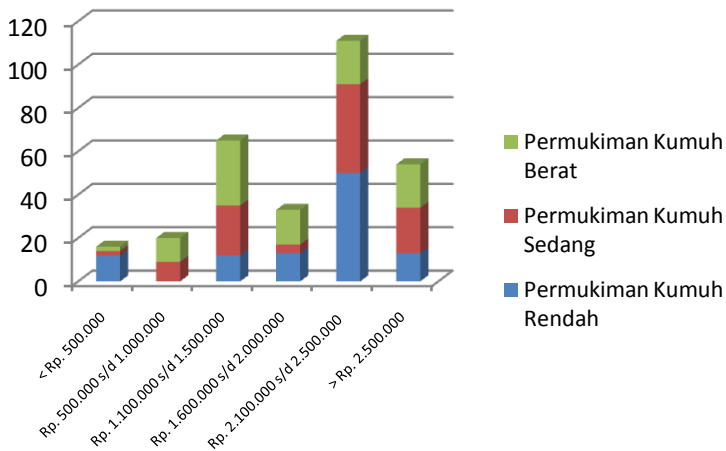


Gambar 4.74 Komparasi Jenis Pekerjaan

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa mayoritas masyarakat di wilayah permukiman kumuh Kelurahan Kapuk memiliki mata pencaharian sebagai buruh, dimana jumlah masyarakat yang bekerja sebagai buruh terbanyak terletak di wilayah permukiman kumuh rendah (38%). Hal tersebut dikarenakan kedekatan lokasi industri yang berada di wilayah tersebut. sedangkan pada wilayah permukiman kumuh sedang, mata pencaharian sebagai pedagang merupakan yang terbanyak, baru kemudian diikuti oleh mata pencaharian sebagai buruh. Untuk mata pencaharian lainnya, umumnya merupakan pekerjaan yang berada di sektor informal, seperti misalnya tukang ojek, kuli bangunan, penjaga warteg dan lain sebagainya (**Lampiran D**). pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak

memerlukan suatu *skill* khusus, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa umumnya masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga rendahnya jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengakibatkan terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat diakses oleh mereka.

Selanjutnya adalah tingkat pendapatan, penghasilan masyarakat umumnya adalah pada rentang antara Rp. 2.100.000 s/d Rp. 2.500.000 seperti dapat dilihat pada diagram berikut

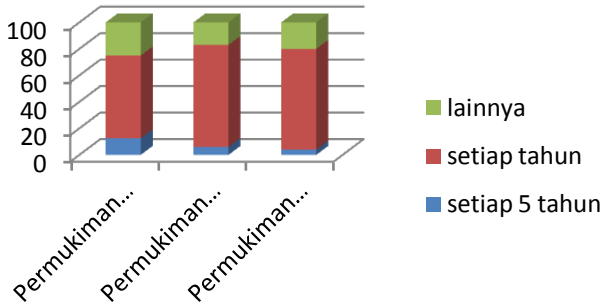


Gambar 4.75 Komparasi Tingkat Pendapatan Masyarakat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat permukiman kumuh rendah dan sedang memiliki tingkat pendapatan antara Rp. 2.100.000 s/d Rp.2.500.000, namun berbeda dengan permukiman kumuh berat. Masyarakat di wilayah permukiman berat umumnya memiliki tingkat penghasilan lebih rendah, yaitu antara Rp. 1.100.000 s/d Rp. 1.500.000.

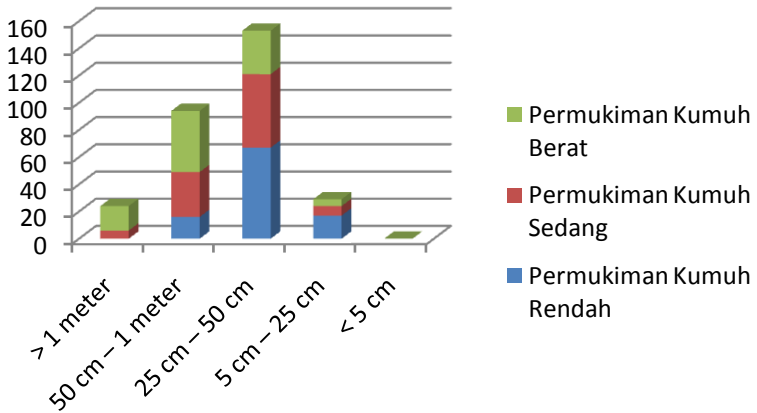
E. Bahaya (*hazard*)

Aspek bahaya ini dilihat dari intensitas daerah studi terjadi banjir, berapa lama genangan/banjir tersebut terjadi dan berapa ketinggian yang terdapat di wilayah tersebut.



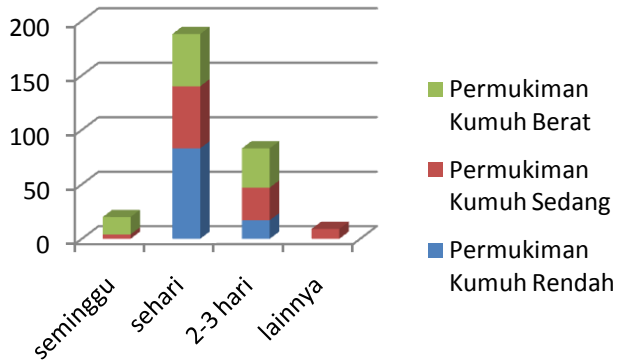
Gambar 4.76 Komparasi Intensitas Terjadinya Banjir/Genangan

Dari diagram terlihat bahwa intensitas terjadinya banjir di wilayah studi umumnya adalah setiap tahun, baik itu di permukiman kumuh rendah, permukiman kumuh sedang dan juga berat.



Gambar 4.77 Komparasi Ketinggian Banjir/Genangan

Ketinggian genangan/banjir pada permukiman kumuh berat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, hal ini terlihat pada ketinggian rentang 50 cm – 1 meter mayoritas ada pada wilayah ini. Sedangkan pada permukiman kumuh sedang dan berat, mayoritas rentang ketinggian terdapat pada 25 cm – 50 cm. Sedangkan untuk lama genangan/banjir, biasanya selama sehari. Agar lebih jelas dapat dilihat dalam diagram berikut ini.



Gambar 4.78 Komparasi Lama Banjir/Genangan

Untuk lama genangan/banjir yang terjadi di wilayah studi umumnya terjadi selama sehari atau 2-3 hari, baik itu pada permukiman kumuh ringan, sedang, maupun berat. Agar memudahkan pemahaman, berikut akan dibuatkan matriks mengenai karakteristik dari masing-masing tingkat permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Kapuk.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Tabel 4.15 Karakteristik Permukiman Kumuh di Masing-masing Tingkat Kekumuhan

	Aspek Sarana dan Prasarana	Fisik	Sosial	Ekonomi	Bahaya (<i>hazard</i>)
Rendah	<p>Umumnya kondisi sarana dan prasarana permukiman kumuh rendah cenderung lebih baik dibandingkan dengan kategori permukiman kumuh lainnya. Untuk air bersih umumnya masyarakat telah mengakses air PAM (50%). Sedangkan untuk masalah persampahan umumnya masyarakat telah memiliki tong sampah pribadi di masing-masing rumahnya untuk kemudian diangkut oleh petugas sampah langsung menuju truk pengangkut sampah untuk dibuang ke TPA Bantar Gebang. Dari segi aksesibilitas, umumnya kondisi jalan yang terdapat di lingkungan permukiman ini cukup baik dan sudah diperkeras dan diantara ketiga kategori tersebut, permukiman kumuh rendah memiliki persentase jalan yang terawat paling besar (62,5%). Untuk sanitasi, sebagian besar masyarakat telah memiliki kamar mandi dan jamban pribadi di masing-masing rumahnya, sedangkan kamar mandi atau jamban bersama umumnya adalah mereka yang mengontrak, dimana pada wilayah tersebut ternyata juga terdapat kontrakan atau kos-kosan yang umumnya ditempati oleh pekerja/buruh. Hal ini terjadi mengingat lokasi wilayah ini yang berdekatan dengan industri. Namun disayangkan, untuk aspek prasarana drainase umumnya memiliki kondisi yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terjadi mengingat adanya kegiatan industri dan juga RPH babi</p>	<p>Untuk kondisi bangunan, umumnya pada seluruh kawasan permukiman kumuh Kelurahan Kapuk, termasuk permukiman kumuh tingkat rendah, memiliki konstruksi bangunan semi permanen. Hal tersebut terlihat dari bahan material yang digunakan masyarakat dalam membangun rumah mereka.</p>	<p>Umumnya masyarakat penghuni permukiman kumuh rendah merupakan pendatang yang berasal dari luar Jakarta, dimana sebagian dari mereka masih menggunakan KTP Asal Daerah. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat penghuni permukiman kumuh rendah tersebut cenderung baru beberapa tahun berada pada wilayah tersebut. Untuk alasan pemilihan lokasi tempat tinggal tersebut umumnya masyarakat mempertimbangkan faktor kedekatan antara tempat tinggal dengan lokasi bekerja. Hal ini disebabkan karena adanya keberadaan pabrik dan pergudangan di sekitar lingkungan tersebut. Untuk tingkat pendidikan, umumnya masyarakat penghuni permukiman kumuh rendah tersebut tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, mayoritas dari mereka berada pada jenjang pendidikan tamat SMP/ sederajat. Sedangkan untuk tingkat kekerabatan antar individu masyarakat, di lingkungan</p>	<p>Untuk aspek ekonomi, mayoritas penghuni permukiman kumuh rendah memiliki mata pencaharian sebagai buruh. Penghasilan masyarakat yang didapat per bulannya berkisar antara Rp. 2.100.000 s/d 2.500.000. Hal tersebut dikarenakan karakteristik masyarakatnya yang sebagian besar bekerja sebagai buruh sehingga kurang lebih mereka menerima gaji sesuai dengan UMR DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp. 2.441.301</p>	<p>Permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk sebagian besar merupakan daerah rawan banjir, termasuk dengan wilayah permukiman kumuh rendah. Namun kondisi genangan/banjir yang terdapat pada permukiman kumuh ringan ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan permukiman kumuh berat. Pada wilayah ini, ketinggian banjir biasanya berkisar antara 25 cm – 50 cm, dengan lama genangan umumnya selama sehari</p>

	yang tak jarang membuang limbahnya ke saluran air disekitar permukiman tersebut.		permukiman kumuh rendah ini hanya terdapat kegiatan kerja bakti dan juga PKK, berbeda dengan permukiman kategori lainnya yang sedikit lebih beragam.		
	Sarana dan Prasarana	Fisik	Sosial	Ekonomi	Bahaya (<i>hazard</i>)
Sedang	Kondisi pemenuhan sarana dan prasarana di permukiman kumuh tingkat sedang ada yang cukup baik, namun ada pula yang masih kurang baik. Sama halnya dengan permukiman kumuh rendah, untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih, umumnya masyarakat menggunakan sumber air dari PAM (PALYJA). Sedangkan untuk prasarana sanitasi, sebagian besar masyarakat telah memiliki kamar mandi dan jamban pribadi di masing-masing rumahnya, namun demikian masih ada pula masyarakat yang menggunakan kamar mandi atau jamban umum. Sedangkan untuk prasarana persampahan, hanya sebagian masyarakat yang memiliki tong sampah di masing-masing rumahnya (17%) sedangkan sebagian lainnya membuang sampahnya dengan cara ditimbun di lahan kosong (34%) dan juga dibuang dikali/sungai (21%). Untuk prasarana drainase, umumnya saluran yang ada di wilayah ini tidak berfungsi dengan baik, hal ini umumnya diakibatkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri yang kerap membuang sampahnya ke saluran air. Untuk aksesibilitas, umumnya jalan yang terdapat di permukiman ini telah diperkeras baik dengan menggunakan	Untuk kondisi fisik rumah yang terdapat di permukiman kumuh sedang ini memiliki karakteristik permukiman semi-permanen, sama seperti yang terdapat pada permukiman kumuh rendah. Umumnya masyarakat menggunakan bahan bangunan berupa asbes sebagai atap rumah mereka, semen sebagai bahan lantai dan ½ tembok ½ papan sebagai bahan dinding nya.	Berbeda dengan masyarakat permukiman kumuh rendah yang sebagian besar merupakan penduduk luar Jakarta, pada permukiman ini proporsi antara penduduk asli Jakarta dengan penduduk Luar Jakarta cukup seimbang, masing-masing sebesar (49%) dan (51%). Sedangkan untuk status kependudukan, mereka umumnya telah memiliki KTP Jakarta, termasuk mereka yang merupakan penduduk Luar Jakarta. Hal ini dikarenakan umumnya masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut sudah cukup lama menetap di wilayah itu. Sedangkan untuk alasan pemilihan lokasi bermukim, umumnya masyarakat mempertimbangkan faktor harga yang murah (34%) dan juga kedekatan dengan lokasi bekerja (32%), namun ternyata pada saat di lapangan, di permukiman	Untuk aspek ekonomi, berbeda dengan masyarakat permukiman kumuh rendah yang umumnya didominasi oleh pekerjaan sebagai buruh, pada permukiman ini meskipun banyak pula masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai buruh, namun pekerjaan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat tingkat kumuh ini adalah sebagai pedagang (26%). Sedangkan untuk penghasilan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat kumuh sedang sama dengan terdapat di kumuh ringan, yaitu berada pada rentang Rp. 2.100.000 s/d Rp 2.500.000	Sama halnya dengan permukiman kumuh rendah, pada permukiman ini umumnya juga memiliki ketinggian banjir/genangan setinggi antara 25 cm – 50 cm. dengan lama genangan selama sehari dan dengan intensitas terjadinya banjir setiap setahun sekali.

	<p>paving maupun aspal, dan kondisi dari prasarana jalan tersebut sebagian besar sudah cukup baik (59%). Hanya sekitar 28% yang kondisinya kurang terawat .</p>		<p>ini, terdapat beberapa masyarakat yang menyatakan bahwa alasan mereka untuk bermukim di wilayah tersebut adalah karena sudah sejak lahir mereka berada di daerah tersebut. Sedangkan untuk tingkat pendidikan, sama halnya dengan masyarakat permukiman kumuh ringan yang umumnya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, di wilayah ini umumnya masyarakat hanya mengenyam pendidikan hingga tamat SMP/ sederajat (24%).</p> <p>Sedangkan untuk tingkat kekerabatan masyarakat di lingkungan permukiman kumuh sedang cenderung lebih beragam dibandingkan dengan permukiman kumuh ringan, dimana pada permukiman kumuh sedang ini tidak hanya terdapat kegiatan kerja bakti dan PKK saja, tetapi juga terdapat kegiatan arisan.</p>		
--	---	--	--	--	--

	Sarana dan Prasarana	Fisik	Sosial	Ekonomi	Bahaya (hazard)
Berat	<p>Pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar yang terdapat di permukiman kumuh berat umumnya kurang baik. Dari segi persampahan, hanya sedikit masyarakat yang memiliki tong sampah dirumahnya (4%). Masyarakat permukiman ini cenderung lebih sering untuk membuang sampahnya dengan cara menimbunnya pada lahan yang kosong yang terdapat di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat lainnya juga lebih suka untuk langsung membakar sampah tersebut. Hal ini dilakukan karena dianggap lebih praktis dan ekonomis, karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk iuran sampah.</p> <p>Untuk masalah sanitasi, sebagian masyarakat telah memiliki kamar mandi dan jamban masing-masing meskipun kondisi dari kamar mandi dan jamban tersebut tergolong kurang baik dan kotor. Untuk prasarana saluran air umumnya kondisi yang terdapat di lingkungan permukiman ini tidak berfungsi dengan baik (55%), bahkan banyak pula rumah-rumah yang tidak terdapat saluran air di lingkungannya (38%), persentase ini lebih besar dibandingkan dengan kategori permukiman lainnya.</p> <p>Namun untuk prasarana aksesibilitas dan juga air umumnya kondisinya cukup baik, dimana pada lingkungan ini prasarana jalan yang ada sudah banyak yang diperbaiki dan diperkeras dan juga cukup terawat (58%). Sedangkan dari aspek prasarana air, mayoritas masyarakat telah tersalurkan air bersih dari PAM (PALYJA).</p>	<p>Untuk kondisi fisik tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada permukiman kumuh rendah dan juga sedang, pada wilayah permukiman ini juga cenderung memiliki konstruksi bangunan yang semi permanen. Hal tersebut sesuai dengan yang tertera dalam dokumen <i>Laporan Kegiatan Pembinaan Kel. Kapuk 2011</i> yang menyatakan bahwa mayoritas bangunan yang terdapat di permukiman kumuh kelurahan tersebut adalah bangunan semi permanen.</p>	<p>Untuk kondisi sosial dilihat dari aspek tingkat pendidikan, umumnya masyarakat permukiman kumuh rendah memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan permukiman kumuh rendah dan sedang, dimana pada permukiman kumuh ini mayoritas masyarakatnya berada pada jenjang pendidikan tamat SD/ sederajat (34%). Sedangkan untuk asal masyarakatnya, mayoritas masyarakat penduduk ini merupakan penduduk dari luar Jakarta, hanya saja berbeda dengan permukiman kumuh rendah, pada permukiman ini umumnya masyarakat telah memiliki KTP Jakarta. Hal ini dikarenakan umumnya masyarakat yang berada pada permukiman ini telah menetap selama bertahun-tahun, sehingga mereka telah memiliki KTP Jakarta. Untuk alasan masyarakat dalam memilih lokasi bermukim disana mayoritas adalah karena faktor harga yang terjangkau (60%). Sedangkan untuk tingkat kekerabatan masyarakat di lingkungan permukiman kumuh berat cenderung</p>	<p>Kondisi masyarakat permukiman kumuh berat apabila dilihat dari segi ekonomi tergolong lebih rendah dengan lainnya, dimana mayoritas masyarakat permukiman ini memiliki penghasilan dengan rentang antara Rp. 1.100.000 s/d 1.500.000. Untuk pekerjaan, mayoritas masyarakat selain bekerja sebagai buruh, namun banyak pula masyarakat yang bekerja pada sektor informal, seperti misalnya tukang ojek, kuli bangunan, tukang sapu, PRT dan lain sebagainya (Lampiran D)</p>	<p>Pada permukiman kumuh berat kondisi ketinggian genangan/banjir yang ada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan dua kategori permukiman kumuh lainnya, dimana pada permukiman kumuh ini ketinggian rata-rata antara 50 meter s/d 1 meter (47%). Sedangkan untuk lama genangan umumnya terjadi selama sehari (49%) dan juga 2-3 hari (35%). Umumnya genangan/banjir yang terjadi di permukiman ini terjadi di setiap tahunnya.</p>

			lebih beragam dibandingkan dengan kedua kategori permukiman lainnya. Dalam permukiman kumuh berat ini interaksi ataupun kegiatan sosial yang dimiliki masyarakat tidak hanya kerja bakti, PKK, dan arisan saja, tetapi ternyata ditemui pula kegiatan pengajian yang rutin dilakukan oleh masyarakat di lingkungan tersebut.		
--	--	--	--	--	--

Sumber: Penulis, 2014

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

4.3 Analisis Penyebab Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk

Berdasarkan transkrip wawancara, dibuat beberapa kode yang menunjukkan faktor-faktor apa saja yang ternyata menyebabkan terbentuknya lingkungan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Kapuk. Pengkodean tersebut disesuaikan dengan variabel penelitian yang telah dikaji sebelumnya. Setelah dilakukan pengelompokan tersebut, dilakukan pengkodean selanjutnya yaitu dengan cara *verbatim* (kutipan) yang diambil dari hasil transkrip. Berikut kategori pengkodean yang dilakukan dalam tahapan ini

a. Validasi (V)

Merupakan pengkodean dengan penjelasan responden bersifat menyetujui pernyataan ataupun dugaan peneliti

b. Eksplanasi (E)

Merupakan pengkodean dengan penjelasan responden yang sifatnya menjelaskan terhadap suatu fenomena di lapangan atau bahkan membantah dugaan peneliti. Guna memudahkan pemahaman, dalam pengkodean ini akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu :

- E1 : Pengkodean untuk *statement* responden yang bersifat memberi penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan peneliti
- E2 : Pengkodean untuk *statement* yang sifatnya menjelaskan ataupun memberikan argumen dalam membantah dugaan peneliti.

c. Penemuan Amatan (N)

Merupakan penjelasan responden yang sifatnya menyatakan mengenai hal baru ataupun temuan baru di lapangan diluar dari dugaan peneliti

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Tabel 4.16 Pengkodean Faktor dalam Transkrip

No.	Aspek	Faktor	Kelompok Stakeholder				
			Masyarakat		Pemerintah		Private
			LMK Kelurahan Kapuk	Wakil Ketua RW	Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan	Kelurahan Kapuk	Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita
1	Urbanisasi	Pertambahan Jumlah Penduduk Pendatang	T1.2, T1.3, T1.4, T1.46	T2.2, T2.3, T2.5, T2.29,	T3.1, T3.2, T3.4	T4.4, T4.5, T4.6,	T5.1, T5.2, T5.3
2	Peran Pemerintah	Penyediaan Perumahan Layak	T1.5, T1.6,	T2.6, T2.7	T3.5, T5.6,	T4.7, T4.8, T4.9, T4.10	T5.4,
3	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Prasarana Air bersih	T1.8, T1.9, T1.10	T2.13, T2.14	T3.7, T3.8	T4.11, T4.12	T5.6, T5.7, T5.8, T5.9, T5.10
		Pemenuhan Prasarana Persampahan	T.11, T.12, T.13, T1.14, T1.15, T1.16, T1.39	T2.15, T2.16, T2.17	T3.9, T3.10, T3.11, T3.12, T3.13	T4.13, T4.14, T4.15, T4.16, T4.17, T4.18	T5.13, T5.15
		Pemenuhan Prasarana Sanitasi	T1.17, T1.18, T1.19	T2.18, T2.19	T3.14, T3.15,	T4.19, T4.20, T4.21,	T5.17
		Pemenuhan Prasarana Drainase	T1.1, T1.20, T1.22, T1.48, T1.49	T2.20, T2.21	T3.16, T3.17, T3.18, T3.19, T3.20, T3.21	T4.23, T4.24, T4.25, T4.26, T4.27, T4.28	T5.18, T5.19
		Pemenuhan Prasarana Jalan	T1.23,	T2.9, T2.10, T2.11, T2.12, T2.22 T2.23	T3.22, T3.23, T3.24	T4.29, T4.30	T.20
		Jenis Pekerjaan	T1.24, T1.25,	T2.25, T2.27, T2.28	T3.25	T4.31, T4.32	T5.21
4	Ekonomi						

No.	Aspek	Faktor	Kelompok <i>Stakeholder</i>				
			Masyarakat		Pemerintah		Private
			LMK Kelurahan Kapuk	Wakil Ketua RW	Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan	Kelurahan Kapuk	Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita
		Tingkat Pendapatan	T1.7, T1.26, T1.28, T1.29, T1.37, T1.44	T2.1, T2.29, T2.30	T3.26, T3.27, T3.28, T3.29, T3.34, T3.39, T3.43	T4.1, T4.3, T4.33,	T5.22, T5.23, T5.24
5	Peran Masyarakat	Keinginan masyarakat memelihara lingkungannya	T1.21, T1.27, T.30, T.31, T1.32	T2.4, T2.31, T2.32,	T3.3, T3.30, T3.35	T4.22, T4.37, T4.38	T5.11, T5.12, T5.14, T5.16, T5.25
		Kemampuan masyarakat menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana	T1.33, T1.34	T2.33	T3.31, T3.32, T3.33	T4.41	T5.26
		Kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan	T1.35, T1.36, T1.38, T1.40, T1.41, T1.42	T2.39, T2.35, T2.36	T3.36, T3.37, T3.38, T3.40, T3.41	T4.34, T4.35, T4.36	T5.5, T5.29, T5.30, T5.31, T5.32, T5.33
6	Sosial	Tingkat Pendidikan	T1.43, T1.45, T1.45, T1.47	T2.8, T2.37, T2.38	T3.42, T3.44	T4.2, T4.39, T4.40	T5.27, T5.28

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Keterangan :

Kode "Tx.y"

Tx = Urutan transkrip wawancara pada lampiran, Y = Urutan kalimat dalam transkrip

Berdasarkan hasil matriks komparasi transkrip wawancara dengan faktor-faktor tersebut langkah berikutnya adalah abstraksi. Dalam tahap ini akan dihasilkan faktor – faktor yang menyebabkan terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk. Berikut merupakan abstraksi dari masing – masing faktor yang menyebabkan terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk.

Tabel 4.17 Analisis Faktor Pertambahan Jumlah Penduduk

Penjelasan		Analisis
Faktor Pertambahan Jumlah Penduduk		
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk)	V, E1	<p>Kondisi peruntukkan lahan di Kelurahan Kapuk dimana didalamnya terdapat pabrik dan pergudangan dan juga tempat-tempat pengelasan besi, turut menyebabkan banyaknya penduduk pendatang tertarik untuk bermukim di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan umumnya pabrik dan pergudangan, dan tempat pengelasan besi tersebut membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, penduduk pendatang juga mempertimbangkan faktor kedekatan lokasi bekerja dengan tempat bermukim (<i>opportunity value</i>) agar mereka dapat menekan <i>cost</i> dalam hal transportasi, hal inilah yang turut mempengaruhi pola bermukim penduduk untuk memilih bermukim di wilayah Kapuk. Hal ini pula yang kemudian menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di lingkungan tersebut.</p> <p>Tidak hanya itu, banyak pula masyarakat yang memilih bertempat tinggal di wilayah tersebut karena harganya yang relatif murah dan terjangkau oleh mereka (asas keterjangkauan)</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pertambahan jumlah penduduk pendatang merupakan penyebab lingkungan permukiman yang ada di Kelurahan Kapuk menjadi kumuh. Adanya pertambahan jumlah penduduk pendatang di Kelurahan Kapuk ternyata mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kepadatan penduduk 2. Kurangnya kepedulian masyarakat pendatang terhadap lingkungan <p>Kedua hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan kualitas lingkungan permukiman yang ada disana menjadi rendah dan terawat.</p>
(Kode T1.3) “ <i>Ya mempengaruhi, ya sekarang kalau kita lihat kalau 1 lingkungan RT itu menurut aturannya kan cuma 80 KK itungannya, tapi sekarang ada tuh yang 1 RT sampai 200 itu kan udah kurang memadai kan tempatnya, jadi padat.</i> “		
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012)	V, E1	
(Kode T2.3) “ <i>...mereka tidak disiplin kan, satu tidak disiplin, buang sampahnya apa kan juga. Namanya juga pendatang, tanggung jawab dia kan istilahnya cuma nyari duit di Jakarta, jadi ya ngaruh juga lah, jadi kotor kan disini</i> ”		
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat)	V, E1	
(Kode T3.1) “ <i>Mm..permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk itu kepadatan cukup tinggi, ya walaupun tidak sepadat di Tambora ya</i> ” (Kode T3.4) “ <i>Ya pengaruh, kan pengaruh dari urbanisasi itu kan, khususnya di RW 04 dan 07 kan banyak yang pekerja industri ...</i> “		
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)	V, E1	
(Kode T4.4) “ <i>Memang jelas, istilahnya itu mereka nggak punya sense of belonging, artinya mereka tidak punya rasa saling memiliki ...</i> “ (Kode T4.5) “ <i>... seperti yang tadi saya katakan, bermacam-macam suku tinggal di Kelurahan Kapuk ini, jadi kurang memiliki kampungnya</i> “ (Kode T4.6) “ <i>Iya, kan otomatis mereka jadi kurang mikirin lingkungan sini, ya jadinya begini lah kondisinya</i> “		

Penjelasan		Analisis
Stakeholder 5 (Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita)	V, E1	
(Kode T5.1) <i>“Pendatang banyak, karena memang disana juga banyak pekerja pabrik-pabrik. Disitu banyak, ada kawasan pabrik-pabrik disitu, ada pabrik sepatu, pabrik plastik...”</i>		
(Kode T5.2) <i>“Iya, tetapi ada yang menjadi menarik juga disitu, karena kawasan nya yang kumuh seperti itu, agak relatif harga kos-kosannya lebih murah dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Jadi saya lihat mungkin banyak orang tinggal disana selain karena kedekatan dengan tempat bekerja, mungkin ada juga yang mencari kos-kosan atau kontrakan yang murah meriah, kan ...”</i>		
Kesimpulan		Faktor Pertambahan Jumlah Penduduk Pendatang Menyebabkan Terbentuknya Lingkungan Kumuh di Wilayah Studi

Tabel 4.18 Faktor Penyediaan Perumahan Layak

Penjelasan		Analisis
Faktor Penyediaan Perumahan Layak		
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk)	V, E1	Penyediaan perumahan yang layak yang murah bagi masyarakat miskin di Kelurahan Kapuk oleh pemerintah masih minim. Dalam hal ini upaya pemerintah lebih kepada perbaikan kondisi rumah seperti misalnya melalui Program Kampung Deret. Namun ternyata tidak semua wilayah kumuh di Kelurahan kapuk yang mendapatkan program tersebut, hanya beberapa rumah di RW 03 dan RW 04 saja yang mendapatkannya. Sedangkan untuk penyediaan rumah dalam bentuk rumah susun murah juga belum ada di wilayah tersebut.
(Kode T1.6) <i>“Ya bisa juga seperti itu, karena memang kondisi wilayah ya disini mah rumahnya ya bisa diliat sendiri, apa adanya lah. Ada yang disambung-sambung pake triplek gitu ada, soalnya ya kan mereka bangun sendiri, jadi ya sesuai kemampuan dari masyarakatnya aja”</i>		
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012)	V, E1	Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin di Kelurahan Kapuk masih sangat kurang, sehingga hal ini kemudian berpengaruh pula terhadap kondisi/kualitas fisik bangunan rumah yang ada di lingkungan tersebut. Umumnya kondisi fisik bangunan yang terdapat di wilayah Kelurahan Kapuk tersebut merupakan bangunan semi permanen, pernyataan tersebut sesuai pula dengan karakteristik permukiman yang telah dibahas sebelumnya dimana mayoritas dari kondisi bangunan rumah masyarakat di wilayah Kelurahan Kapuk merupakan bangunan semi permanen.
(Kode T2.7) <i>“... jauh dari layak lah. Tapi masyarakat kita kan udah adaptasi ya, disini kan cukup atau tidak cukup, ya harus cukup, kalo misalnya kurang-kurang kayak rumah, gitu, ya kondisinya mau jelek juga, udah cukup buat warga mah, asal ada yang penting mah”</i>		
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat)	V, E1	
(T3.5) <i>“Ya makanya kalau seperti itu kan kita adakan penataan kampung dari pemerintah, dari Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat itu penataan kampung itu kita memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni ya ... “</i>		

Penjelasan		Analisis
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)	V, E1	
(Kode T4.7) <i>“Sementara ini,ada ya program dari pemerintah itu, yang terkenal rumah deret. Yang dikasih sama pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Joko Widodo, gitu ...”</i> (T4.7) <i>“Sebenarnya belum cukup, tapi dari pemerintah istilahnya baru rencana menyediakan rumah susun itu, istilahnya rusunawa atau rusunami gitu ya ...”</i>		
Stakeholder 5 (Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita)	V, E1	
(Kode T5.4) <i>“Pemerintah eee...sebelum Jokowi ya, pada masa Pak Fauzi Bowo agak kurang saya melihat dalam penyediaan perumahan yang layak ya. Saat ini kan di masa Jokowi dia punya program kampung deret, yang ada di beberapa tempat di Kapuk itu ya. Tapi kita ya pesimis juga nih kalau dia jadi capres itu ya, apakah programnya itu masih terkawal dengan baik atau tidak, berlanjut atau tidak”</i>		
Kesimpulan		Faktor Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah Bagi Masyarakat Miskin Menyebabkan Terbentuknya Lingkungan Kumuh di Kelurahan Kapuk

Tabel 4.19 Analisis Faktor Penyediaan Prasarana Air Bersih

Penjelasan		Analisis
Faktor Penyediaan Prasarana Air Bersih		
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk)	E2	<p>Sebagian besar masyarakat telah terlayani oleh air bersih yang berasal dari PAM (PALYJA). Selain itu, pernyataan tersebut didukung pula oleh hasil identifikasi karakteristik permukiman yang telah dilakukan sebelumnya dimana diketahui bahwa penyediaan prasarana air bersih di wilayah studi sebagian besar sudah cukup baik dan sudah terlayani oleh air PAM, di permukiman kumuh ringan (50%), permukiman kumuh sedang 58%, dan permukiman kumuh berat sebesar 58%. Sedangkan untuk mereka yang belum terlayani dapat memanfaatkan air dari pedagang keliling. Untuk air sumur, umumnya mereka hanya memanfaatkan sumber air tersebut untuk mencuci atau mandi saja.</p> <p>Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyediaan air bersih tidak menyebabkan terbentuknya kondisi lingkungan di wilayah tersebut menjadi buruk atau kurang baik. Hal tersebut dikarenakan umumnya penyediaan air bersih yang ada sudah cukup memadai, sedangkan untuk mereka yang belum memiliki sumber air PAM masih dapat mengakses pedagang air keliling. Sedangkan untuk masalah perawatan tanaman, terlebih untuk mereka yang belum tersalurkan oleh air dari PALYJA, masyarakat masih bisa dengan menggunakan air sumur dan tidak harus dari air beli sehingga tanaman-tanaman tersebut masih dapat dirawat guna memperindah lingkungan masyarakat.</p>
(Kode T1.8) “ ... Air bersih juga, ada sebagian yang udah masuk PAM ada juga sebagian yang belum. Kalau yang belum biasanya bisa dari tukang-tukang air saja yang biasa keliling ...”		
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012)	E2	
(Kode T2.14) “Sudah, sudah cukuplah. Kalau orang yang ngontrak, biasanya pake air dorong ya mbak, kalo buat nyucinya mereka pake sumur ...”		
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat)	E2	
(Kode T3.7) “Untuk air bersih saya rasa tidak ada masalah ya, karena sebagian besar masyarakat disana sudah memiliki air dari PALYJA. Jadi sudah cukup memadai lah kalau masalah air bersih”		
(Kode T3.8) “Ya kalo yang belum tersalurkan mungkin ada, tetapi hanya sepersekitan persen saja dari masyarakatnya, sedangkan mereka yang belum terlayani tersebut biasanya memanfaatkan sumur atau juga air dorong untuk kebutuhan minumannya”		
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)	E2	
(Kode T4.11) “Kondisi air bersih disini, kan disini sudah terbangun PALYJA yang nanganin. Jadi kondisi diwilayah Kapuk ini 75% sudah terlayani air PAM, tinggal 25% itu ada yang dari sumur, dari beli yang dari dorongan itu ya sisanya kalo kali kan nggak ada disini karena nggak bisa dimanfaatkan lagi gitu kondisinya”		
Stakeholder 5 (Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)	V, E1	
(Kode T5.10) “Ya mereka ini, air kalau dimusim-musim kering, mereka untuk menghijaukan lingkungan kan juga agak susah kalo mau menyiram. Mereka pasti berpikir untuk menggunakan air lebih mementingkan untuk minum kan gitu”		
(Kode T5.10) “Iya, kan mereka kalau air beli, pasti mereka lebih mementingkan kebutuhan primer nya, tapi untuk bagaimana menghijaukan kampung, green, mereka tidak anu, meyiram		



Penjelasan	Analisis
<i>tanaman jadi susah karena dianggap pemborosan kan. Yang membuat kampung-kampung kelihatan kumuh kan tidak ada tanaman-tanaman hijau, sementara untuk menanam tanaman hijau itu kan butuh pemeliharaan, salah satu sumber pemeliharaannya kan ketercukupan air...”</i>	
Kesimpulan	Faktor Penyediaan Air Bersih Tidak Menyebabkan Terbentuknya Lingkungan Kumuh di Wilayah Studi

Tabel 4.20 Analisis Faktor Penyediaan Sarana Persampahan

Penjelasan	Analisis
Faktor Penyediaan Sarana Persampahan	
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk) (Kode T1.11) <i>“Nah itu, emang jadi masalah memang. Jadi kondisi sampah di Kapuk ini emang tempat penampungannya kurang, kemudian juga alat pembersihnya kayak mobil pengangkutnya juga kurang”</i>	Berdasarkan penjelasan dari <i>stakeholder</i> tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa persampahan menjadi masalah dan juga salah satu penyebab terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di wilayah Kapuk. Penyediaan fasilitas persampahan dinilai masih banyak memiliki kendala. Kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang resmi dari Sudin Kebersihan sehingga selama ini warga hanya memanfaatkan lahan-lahan kosong yang terdapat disekitar permukiman warga sebagai tempat pembuangannya. Masalah lainnya adalah terkait armada pengangkut sampah yang masih minim sehingga tidak mampu mengangkut volume sampah yang ada dan menyebabkan adanya tumpukan sampah dan berbau di lingkungan tersebut. Selain kedua hal tersebut, juga terdapat kendala lainnya yang juga dihadapi yaitu terkait penyediaan tong sampah yang juga dirasa masih minim, hal tersebut mengakibatkan pula banyaknya sampah yang ditumpuk di sudut-sudut jalan.
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012) (Kode T2.15) <i>“masih ada masalah juga, ya dari armada pengangkutnya juga masih kurang gitu buat ngangkut jadi suka ketunda”</i> (Kode T2.17) <i>“...itu di RT 20 sana, tapi ya cuma bisa nampung buat wilayah sini aja tempatnya, itu juga sebenarnya bukan tempat ngebuang sampah beneran”</i>	
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat) (Kode T3.9) <i>“Ya persampahan itu yang cukup kompleks juga, tapi itu wewenangnya kebersihan ya. Disana itu belum ada tempat pembuangan sampah yang resmi, jadi selama ini masyarakat kesulitan juga itu untuk membuang sampahnya”</i> (Kode T3.10) <i>“Ya mereka itu disana selama ini memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dijadikan TPS. Seperti misalnya di RW 16 disana ada itu lahan Perumnas yang cukup luas tetapi tidak digunakan, jadi ya dipakai oleh masyarakat untuk membuang sampah, menumpuk sampah itu disana.”</i>	
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)	

Penjelasan		Analisis
(Kode T4.13) <i>“Ya...kondisi sarana persampahan di Kelurahan Kapuk ini memang sekarang ada kendala... sampah disini di Kelurahan Kapuk, dari Dinas Kebersihan kan sudah menginformasikan kepada RW, masyarakat, jika ada tanah yang ada akan dibeli, nah nyatanya kan sekarang tidak ada sarana persampahan yang disebut TPS itu...”</i> (Kode T41.14) <i>“Iya sementara ini , belum ada. Hanya satu kita manfaatkan pertamanan sudah ada, sifatnya temporer aja”</i>		
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita)	V, E1	
(Kode T5.13) <i>“Itu juga agak kurang, kan seharusnya di rumah-rumah kumuh seperti itu kan masyarakat secara pro-aktif perlu di pasang tempat-tempat sampahlah...”</i> (Kode T5.15) <i>“...ya kan , dari pemerintah itu mobil-mobil pengangkut sampah itu kan harus aktif, nah di Kapuk itu juga kadang sampai satu minggu, dua minggu sampai sudah berbau gitu, baru diangkut, jadi masih kurang “</i>		
Kesimpulan		Faktor Kurangnya Penyediaan Sarana Persampahan Menjadi Penyebab Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Studi

Tabel 4.21 Analisis Faktor Penyediaan Prasarana Sanitasi

Penjelasan		Analisis	
Faktor Penyediaan Prasarana Sanitasi			
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk) (Kode T1.18) <i>“Ya secara umumnya sih lumayan lah, kalau kondisinya kan masyarakat yang penting punya lah nggak harus bagus”</i>	E2	<p>Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum masyarakat di Kelurahan Kapuk telah memiliki prasarana sanitasi masing-masing dirumahnya, namun banyak pula diantara sanitasi tersebut yang kondisinya tidak layak dan juga tidak terawat, begitu juga dengan penyediaan WC umum nya. Hanya saja terkadang masyarakat telah beradaptasi dengan keadaan yang ada dan menganggap bahwa hal tersebut biasa saja dan tidak terlalu berpengaruh terhadap lingkungan mereka. Berdasarkan observasi lapangan juga terlihat bahwa kondisi sanitasi yang ada di wilayah tersebut tergolong kurang memadai sehingga menyebabkan terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di wilayah tersebut.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(a)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(b)</p> </div> </div> <p>Gambar (a) Kondisi WC pribadi masyarakat (b) Kondisi WC Umum di Kelurahan Kapuk</p>	
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012) (Kode T2.18) <i>“Sanitasi...bagus juga, jadi nggak ada yang di jaman, nggak ada, karena nggak ada empang nya”</i> (Kode T2.19) <i>“Nggak ada, nggak ada. Rata-rata udah punya sendiri, gengsi sekarang mah masa diatas kali”</i>	E2		
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat) (Kode T3.14) <i>“Kalau sanitasi saya rasa tidak begitu masalah, karena disana tidak ada masyarakat yang membangun jamban di pinggir-pinggir kali itu tidak ada, rata-rata sudah memiliki sendiri lah”</i> (Kode T3.15) <i>“Iya, disana kalau mereka yang belum memiliki MCK tersedia juga WC umum ada itu...”</i>	E2		
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk) (Kode T4.19) <i>“Terkait masalah itu sekarang sudah ada, kalau dulu kan terkenal masih pake jamban, sekarang udah nggak ada lagi. Ya Alhamdulillah sekarang setiap rumah sudah ada WC sendiri...”</i>	E2		
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita) (Kode T5.17) <i>“Masih kurang ya saya lihat. Disana itu rata-rata kondisinya masih kurang layaklah untuk sanitasi. Selain itu disana juga ada itu WC umum untuk yang belum punya MCK, kondisinya juga tidak bagus umumnya”</i>	V		
Kesimpulan			Faktor Kurang Layaknya Penyediaan Prasarana Sanitasi Menjadi Penyebab Terbentuknya Lingkungan Kumuh di Kelurahan Kapuk

Tabel 4.22 Analisis Faktor Penyediaan Prasarana Drainase

Penjelasan		Analisis
Faktor Penyediaan Prasarana Drainase		
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk) (Kode T1.22) <i>"...ini juga masalah, jadi selain saluran air didepan, saluran di lingkungan rumah-rumah juga nggak bisa ngalir ke saluran depan, ya itu, gara-gara sampah itu juga..."</i>	V, E1	<p>Saluran air yang terdapat di Kelurahan Kapuk terdiri dari saluran primer (Kali Angke dan Cengkareng Drain), saluran sekunder (saluran penghubung di Jalan Kapuk Raya), dan saluran air tersier (saluran di lingkungan rumah warga). Secara umum penyediaan saluran air yang ada di Kelurahan Kapuk memiliki masalah baik itu saluran tersier, sekunder, atau bahkan primer. Untuk saluran air primer permasalahan yang ada adalah menyangkut banyaknya sampah yang menggenangnya dan juga masalah sedimentasi yang berakibat pada pendangkalan kali sehingga saluran tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal. Selanjutnya untuk saluran sekunder banyaknya sampah dan juga lumpur yang mengendap didalamnya membuat saluran tersebut tidak dapat maksimal mengalirkan air dari saluran warga menuju ke kali. Begitu pula dengan saluran tersier, banyaknya genangan sampah yang terdapat di saluran air tersebut kerap kali membuat saluran yang ada menjadi mampet sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar menuju saluran sekunder dan primer</p> <p>Selain itu, ternyata terdapat permasalahan lainnya terkait dengan saluran air, yaitu keberadaan RPH dan juga pabrik yang ada di sekitar wilayah Kapuk juga ternyata mempengaruhi kondisi dan kinerja dari saluran air yang ada. Hal ini dikarenakan adanya pencemaran limbah yang berasal dari kedua kegiatan tersebut.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi saluran air merupakan salah satu penyebab terbentuknya kualitas lingkungan yang rendah yang ada di wilayah Kelurahan Kapuk dikarenakan kondisi dan juga kualitasnya yang kurang baik yang mengakibatkan pada kurang maksimalnya kinerja Prasarana Drainase yang ada.</p>
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012) (Kode T2.21) <i>"Iya suka mampet, itu mah wajar ya disini mah. Namanya juga warga ya mbak, tapi ya untungnya masyarakat disini masih pada mau kerjabakti ya, jadi lumayanlah"</i>	V, E1	
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat) (Kode T3.16) <i>"Ae...kumuh sekali itu, mana nggak ngalir, mana banyak sampah. Makanya kalau dari kita kan kita benahi, jadi saluran lama itu kita bongkar kita ganti baru dan salurannya tertutup tapi walaupun tertutup itu, bisa kita angkat-angkat itu tutupnya biar bisa gampang dibersihkan..."</i>	E, E1	
(Kode T3.17) <i>"...disana yang juga jadi permasalahan itu adalah drainase primer dan juga sekunder. Jadi kalau primer ini, seperti kali-kali kecil, nah penghubung kalau sekunder itu, sedangkan kita dari Sudin Perumahan lebih menyentuh ke perbaikan area yang tersier"</i>		
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk) (Kode T4.22) <i>"Saluran air yang ada di wilayah Kelurahan Kapuk ini, ya memang masih ada trouble sedikit ya. Saya kira masyarakatnya belum menyadari arti kebersihan, makanya salurannya, got-got nya mampet"</i>	V, E1	
(Kode T4.24) <i>"Warga sempet protes juga itu limbah dari PT. Indo Hanco, itu pabrik peleburan besi ada semacam limbah yang disebutnya kimia, itu ada juga, mereka memang membuang limbah cair nya ke permukiman warga tanpa diolah terlebih dahulu"</i>		
(Kode T4.27) <i>"Ya kemarin hasil penelitian yang ada dari Dinas Kesehatan bersama dengan Pak Wali kemarin menyatakan memang tidak layak sih disitu, tapi sekarang sudah dibangun yang baru itu RPH nya"</i>		

Penjelasan		Analisis
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita) (Kode T5.18) <i>“Iya itu, itu cukup memperhatikan itu salurannya yang ada di pinggir jalan (saluran sekunder)”</i> (Kode T5.19) <i>“Sering mampet, yaitu tuh yang perlu untuk di revitalisasi. Saluran itu juga sudah dibuat sebenarnya, tapi sekarang itu bagaimana caranya supaya itu bisa tembus sampai dibuang ke sungai gitu. Coba kamu kalo pas lagi kesana lihat itu saluran yang dekat jalannya, kondisinya kan mampet, wah sampah nya banyak sekali itu. Jadi airnya yang dari warga itu tidak bisa ngalir kesana, terus ke kali itu”</i>	V, E1	
Kesimpulan		Faktor Kurang Maksimalnya Kinerja Prasarana Drainase Menjadi Penyebab Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumh di Wilayah Studi

Tabel 4.23 Analisis Faktor Penyediaan Prasarana Jalan

Penjelasan		Analisis
Faktor Penyediaan Prasarana Jalan		
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk) (Kode T1.23) <i>“Kalau jalan lingkungan di sini sih sudah lumayan, seperti yang didepan anda lihat, itu juga baru diperbaiki juga oleh pemerintah dari Sudin Perumahan, jadi artinya udah lumayan bagus lah sekarang”</i>	E2	<p>Penyediaan jalan yang terdapat di Kelurahan Kapuk saat ini umumnya kondisinya sudah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan sudah banyak diantara jalan-jalan yang ada di wilayah tersebut yang telah dilakukan perbaikan oleh pemerintah baik itu berupa pavingisasi maupun aspal, dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap jalan-jalan lingkungan (< 3 meter) adalah dari pihak Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Pernyataan tersebut didukung pula oleh hasil identifikasi karakteristik permukiman, dimana diketahui bahwa sebagian besar kondisi prasarana jalan yang terdapat di wilayah studi sudah diperkeras dan cukup terawat, yaitu pada permukiman kumuh ringan sebesar 62%, kumuh sedang 59%, dan kumuh berat 58%.</p> <p>Hanya beberapa saja dari prasarana jalan tersebut yang kondisinya masih buruk atau berupa tanah. Sedangkan untuk jalan yang rusak dan juga masih buruk kondisinya umumnya warga telah mengusulkannya ke musrenbang untuk dilakukan perbaikan</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun masih terdapat pula kondisi jalan yang tidak terawat, namun secara umum penyediaan prasarana jalan yang terdapat di wilayah Kapuk sudah cukup baik karena sudah cukup banyak dari prasarana jalan tersebut yang sudah diperkeras baik itu</p>
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012) (Kode T2.10) <i>“Rusak kan, ya di kapuk ini masih ada juga yang rusak, tapi udah banyak juga kok yang bagus. Ya nanti yang masih kurang-kurang biasanya diusulkan ke musrenbang mbak buat diperbaiki”</i> (Kode T2.23) <i>“Udah lumayan ya mbak, ya ada juga sih, tapi banyak juga udah banyak yang diperbaiki oleh pemerintah”</i>	V, E2	
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat) (Kode T3.22) <i>“Umumnya cukup baik, paling masih ada perlu perbaikan dikit ya mbak, khususnya di rumah-rumah yang didalem-dalem itu kan jalan-jalannya dari tanah, atau puing-puing”</i> (Kode T3.23) <i>“...kalau yang di rumah-rumah yang didelem-dalem itu. Nanti dia masuk ke program</i>	E2	

Penjelasan		Analisis
<i>peningkatan lingkungan bukan kampung deret. Jadi kalau di Jakarta Barat ini kita ada program peningkatan kualitas lingkungan, juga ada program perbaikan kampung”</i>		dengan menggunakan aspal maupun paving, hanya beberapa saja yang kondisinya masih buruk atau berupa tanah. Sehingga secara keseluruhan kondisi prasarana jalan tidak terlalu mempengaruhi lingkungan permukiman kumuh yang ada di wilayah tersebut karena pemenuhannya sudah cukup baik.
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)	E2	
(Kode T4.29) <i>“Ya untuk infrastruktur jalan sekarang sudah 80% sudah bagus, sudah diaspal sebagian besar”</i>		
(Kode T4.30) <i>“Nggak terlalu sih, disini udah lumayan bagus kalau untuk prasarana jalan, udah lumayan bagus lah dari pemerintah disini, udah banyak juga yang dibenerin”</i>		
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita)	E2	
(Kode T5.20) <i>“Dulu awal-awal cukup memperhatikan juga. Tetapi sekarang di Jalan Kapuk Raya situ sudah mulai dibenerin tuh, artinya jalannya sudah baguslah sudah banyak yang diperbaiki disana itu”</i>		
Kesimpulan		Faktor Penyediaan Prasarana Jalan tidak Menyebabkan Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Studi

Tabel 4.24 Analisis Faktor Jenis Pekerjaan

Penjelasan		Analisis
Faktor Jenis Pekerjaan		
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk)	V, E1	<p>Jenis pekerjaan menyebabkan terbentuknya lingkungan permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Kapuk. Hal tersebut dikarenakan jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat di wilayah ini akan berkaitan pula dengan jumlah penghasilan yang dimiliki mereka, dimana umumnya mereka memiliki penghasilan yang cukup rendah sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari mereka daripada lingkungan permukimannya. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Kapuk memiliki pekerjaan sebagai buruh ataupun pedagang kecil dengan tingkat penghasilan yang juga relatif kecil pula, hal ini lah yang kemudian berdampak kepada kuarngnya kepedulian mereka terhadap kualitas lingkungan yang ada.</p> <p>Selain itu, ternyata terdapat alasan yang diutarakan oleh beberapa responden dimana pada wilayah Kapuk, banyak masyarakatnya yang memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan mereka yaitu dengan mengumpulkan barang-barang bekas yang memiliki nilai ekonomi, seperti misalnya botol-botol, kardus dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut diletakan dan dikumpulkan di rumah-rumah mereka untuk kemudian dijual ke lapak, sehingga kondisi tersebut juga mengakibatkan lingkungan permukiman jadi terlihat kotor dan juga di khawatirkan akan mengganggu kesehatan warga akibat dari tumpukan barang-barang bekas tersebut, seperti misalnya penyakit DBD.</p>
(Kode T1.24) <i>“mmm... ngaruh juga ya neng, soalnya kan ya kayak yang kita berapa sih gaji buruh. Jadi rata-rata penduduk disini tuh jarang mikirin lingkungan nya, mikirin rumahnya, buat makan sehari-hari aja kan kadang juga masih suka mikir ya...”</i> (Kode T1.25) <i>“Iya tapi mau gimana lagi ya neng. Masyarakat disini kan yang penting mereka bisa dapet duit, jadi kalau rumahnya jadi kelihatan kotor karena barang-barang bekas yang dikumpulin tersebut ya memang begitulah”</i>	V, E1	
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012)	V, E1	
(Kode T2.25) <i>“Oh iya, ya itu tadi, buruh itu kan biasanya dari luar daerah. Karena mobilitas mereka tinggi. Orang ngontrak kan, kadang-kadang kalau dia nggak betah dia pindah, nggak betah pindah, kan seperti itu”</i> (Kode T2.27) <i>“Ya kurang merawat gitu itu mereka, pada masa bodoh. Rasa tanggung jawabnya dari mereka, yang pentingkan mereka bayar”</i>	V, E1	
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat)	V, E1	
(Kode T3.25) <i>“Oh iyalah, pasti. kan kalo misalnya kerjaan mereka serabutan kayak gitu, ya kemampuan mereka juga otomatis rendah mbak. Penghasilan juga kan nggak tetap tiap harinya jadi mereka suka nggak mikirin rumahnya apa lagi lingkungannya”</i>	V, E1	
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)	V, E1	
(Kode T4.31) <i>“banyak sekali. Jadi istilahnya pemulung ya, limbah, limbah yang ada di Kelurahan Kapuk ini macem-macem, jadi ya sebenarnya bagus juga sih ya, Cuma ya itu tadi sifatnya perorangan nggak ada koordinatornya jadi nyari kerjaan sampingan, gitu”</i> (Kode T4.32) <i>“Jadi itu, khawatirnya disini terjadinya tidak bagus lah lingkungan, timbulnya penyakit seperti yang saya sebutkan tadi itu, adnaya genangan air, timbulnya nyamuk, itu disitu, demam berdarah, disitu dampak dari limbah-limbah itu ”</i>	V, E1	
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)	V	



(a)



(b)

Gambar (a) dan (b) Kondisi rumah masyarakat pengumpul barang bekas

Penjelasan	Analisis
(Kode T5.21) “: <i>Ya pengaruh jugalah, ya itu tadi saya bilang kan banyak juga itu masyarakat disana yang bekerja serabutan. Jadi ya penghasilan mereka juga kan tidak menentu...</i> ”	Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat di wilayah studi menjadi salah satu penyebab terbentuknya lingkungan kumuh yang ada.
Kesimpulan	Faktor Jenis Pekerjaan Masyarakat Menyebabkan Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk

Tabel 4.25 Analisis Faktor Tingkat Pendapatan

Penjelasan	Analisis
Faktor Tingkat Pendapatan	
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk)	<p>Secara keseluruhan kelima responden menyatakan bahwa variabel tingkat pendapatan menyebabkan terbentuknya kualitas lingkungan permukiman yang terdapat di Kelurahan Kapuk menjadi cukup rendah. Kondisi rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat berpengaruh pula terhadap daya beli masyarakat. Hal tersebutlah yang kemudian mengakibatkan terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di wilayah tersebut, karena cukup rendahnya penghasilan yang dimiliki masyarakat, maka turut berpengaruh pula terhadap kualitas rumah dan juga lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat dari ketidakberdayaan mereka dari segi ekonomi.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor rendahnya tingkat pendapatan masyarakat menjadi salah satu penyebab terbentuknya kualitas lingkungan permukiman mereka menjadi rendah akibat dari ketidakmampuan mereka secara ekonomi untuk menciptakan kualitas lingkungan yang baik.</p>
(Kode T1.28) “ <i>Ya artinya, seperti yang saya bilang tadi, boro-boro mikirin lingkungan, orang mikirin rumah tangga sendiri aja masih kurang, kadang kan gitu pemikirannya mereka...</i> ”	
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012)	
(Kode T2.29) “ <i>Mm, ngaruh ya mbak. Apalagi kalo yang pendatang itu, kan pikiran mereka disini itu buat nyari uang, ya jadi uangnya kalo udah dapet kan biasanya dikumpulin buat dibawa ke kampung atau gimana gitu ya, jadi jarang gitu yang mau nyisihin duitnya buat lingkungan sini mbak.</i> ”	
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat)	
(Kode T3.25) “ <i>Oh iyalah, pasti. kan kalo misalnya kerjaan mereka serabutan kayak gitu, ya kemampuan mereka juga otomatis rendah mbak. Penghasilan juga kan nggak tetap tiap harinya jadi mereka suka nggak mikirin rumahnya apa lagi lingkungannya</i> ” (Kode T3.28) “ <i>Ngaruh juga mbak, kalo misalnya penghasilan mereka tinggi ya mungkin mereka bisa ngebenerin rumah mereka sendiri, nggak harus nunggu dari pemerintah</i> ”	
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)	
(Kode T4.3) ... “ <i>ya karakter permukiman yang ada disini, disebutnya istilahnya itu kumis ya, kumis itu maksudnya adalah kumuh miskin</i> ” (Kode T4.33)	

Penjelasan		Analisis
<p><i>“...pengaruh juga ya sih. Lebih ke daya beli masyarakat ya, kalau penghasilan segitu ya kira-kira lah dibagi 30 kan sebulan, paling per harinya berapa itu. Ya kalo itu mah, paling-paling abisnya buat maka sama kebutuhan hari-hari aja, jadi kalo buat rumahnya apalagi lingkungan ya, masih kuranglah”</i></p>		
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita)	V, E1	
<p>(Kode T5.22) <i>“Iya, ada itu hubungannya sama pendapatan mereka. Kan kalo serabutan kayak tukang ojek gitu, paling ya penghasilannya itu mereka sekitar 30 ribu sehari, ya mana cukup buat ngebenerin rumah buat layak, gitu kan istilahnya”</i></p> <p>(Kode T5.23) <i>“Ya saya kira pengaruh, kalo pendapatan nya sedikit itu kan, lagi-lagi untuk memperbaiki penataan lingkungannya juga kan agak sulit tanpa bantuan pemerintah. Jadi mereka itu istilahnya makan saja kurang, gimana mau yang lain, kan gitu kan, saya kira pengaruh juga”</i></p>		
Kesimpulan		Faktor Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat Menjadi Penyebab Terbentuknya Lingkungan Kumuh di Kelurahan Kapuk

Tabel 4.26 Analisis Faktor Keinginan Masyarakat Memelihara Lingkungannya

Penjelasan	Analisis
Faktor Keinginan Masyarakat Memelihara Lingkungannya	
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk) (Kode T1.27) <i>“eee... ini yang kadang-kadang sulit ya kadang juga masyarakat sendiri juga masih agak kurang ya inisiatifnya untuk memelihara lingkungannya disini...”</i>	<p>Semua responden menyatakan bahwa kesadaran atau keinginan masyarakat untuk memelihara lingkungannya menjadi salah satu faktor penyebab terciptanya lingkungan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Kapuk. Hal tersebut dikarenakan budaya masyarakat yang masih sering untuk membuang sampah sembarangan sehingga hal ini membuat lingkungan permukiman yang ada di wilayah tersebut menjadi kurang baik dan kotor. Hal tersebut diperparah dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat kampungnya menjadi lebih nyaman, seperti misalnya dengan menanam tanaman-tanaman hijau agar menimbulkan kesan kampung yang nyaman dan asri.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor rendahnya keinginan masyarakat memelihara lingkungannya menjadi salah satu yang menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan yang terdapat di Kelurahan Kapuk.</p>
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012) (Kode T2.31) <i>“...tapi ya gitu, banyak juga mereka yang masih buang sampah asal-asalan gitu. Kalo masalah ini mah, nggak pendatang nggak pribumi, semuanya, ya wajar lah”</i>	
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat) (Kode T3.35) <i>“Selain itu mereka juga kadang, masih susah buat diatur, apalagi masalah sampah, buangnya kemana-mana kan jadi ngerusak lingkungan mereka sendiri itu”</i>	
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk) (Kode T4.37) <i>“Masyarakat...disini itu masih susah ya, terutama untuk masalah buang sampah gitu mbak rata-rata dari mereka itu masih sering buang sampahnya kemana-mana. Mereka buang ke got-got ke kali-kali gitu kan kesannya lingkungannya jadi gimana gitu kan, padahal itu dari ulah mereka sendiri itu”</i>	
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita) (Kode T5.11) <i>“...jadi keasrian kampung itu ya butuh kesadaran yang baik dari masyarakat karena selama ini juga masyarakat disana masih jarang yang memiliki kesadaran seperti itu untuk membuat kampungnya terlihat jadi asri”</i>	
Kesimpulan	
Faktor Rendahnya Keinginan Masyarakat Memelihara Lingkungannya Menjadi Penyebab Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk	

Tabel 4.27 Analisis Faktor Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penjelasan		Analisis
Faktor Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana		
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk)	V, E1	<p>Secara garis besar faktor kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan akan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan kondisi perekonomian yang dimiliki oleh masyarakatnya. Rendahnya kondisi ekonomi yang dimiliki sebagian besar masyarakat di wilayah Kapuk tersebut membuat masyarakat cukup kesulitan untuk dapat menjangkau kebutuhan akan sarana dan prasarana yang layak. Bahkan terkadang mereka tidak terlalu mementingkan kelayakan dari sarana ataupun prasarana yang ada, karena mereka berpikir bahwa yang terpenting mereka dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini lah yang membuat kualitas dari sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah tersebut tergolong cukup rendah.</p> <p>Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarananya menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas lingkungan yang terdapat di wilayah studi.</p>
(Kode T1.33) <i>“Ya kalau bicara soal kemampuan masyarakat kan kembali lagi ke finansial masyarakatnya seperti apa disini, kan begitu ya. Ya masyarakat disini sih kan juga bisa menjangkau sarana dan prasarana yang bagus, kayak di perumahan-perumahan gitu tapi ya kan nggak bisa”</i>		
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012)	E2	
(Kode T2.33) <i>“...Yang tadi saya bilang, kalo masyarakat mah udah adaptasi mbak sama keadaan, jadi kadang ya kalau menurut orang lain itu sebenarnya kurang, kayak MCK gitu, kadang kondisinya kan ya begitulah, tapi buat mereka itu udah cukup ya mbak. Ya karena keterbatasan itu tadi, jadi yang penting buat mereka sih ada”</i>		
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat)	V, E1	
(Kode T3.31) <i>“Ya masih kurang sih mbak, kayak misalnya jalan, mereka ya mengandalkan pemerintah. Kalau prasarana yang dibuat swadaya masyarakat sendiri, kayak misalnya sanitasi gitu ya begitulah kondisinya mbak, ya apa adanya aja. Rata-rata sih secara umum, masih rendah ya mbak kemampuan mereka”</i>		
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)	V, E1	
(Kode T4.41) <i>“Jelas pengaruh, daya jangkau mereka untuk memenuhi kebutuhan kan secara otomatis juga akan terbatas ya, seperti misalnya fasilitas pendidikan, disini kan masyarakat jarang sekali yang bisa menjangkau perguruan tinggi, ya seperti yang kita tau biaya nya mahal itu, masyarakat tidak mampu”</i>		
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)	E2	
(Kode T5.26) <i>“Untuk kemampuan, mereka cukup bisa menjangkau ya. Untuk kesehatan disana juga sudah ada puskesmas 2 itu disana, untuk pasar juga ada itu di RW 16 dan RW 12 situ ada. Kalau prasarana, ya kan mayoritas juga sudah dapet air PAM ya walaupun masih ada juga yang belum dapet, tapi kan mereka masih bisa mengakses air dorong itu. Ya saya rasa sudah cukup lah”</i>		
Kesimpulan		Faktor Rendahnya Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana Menjadi Penyebab Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk

Tabel 4.28 Analisis Faktor Kapasitas Masyarakat Dalam Peningkatan Lingkungan

Penjelasan		Analisis
Faktor Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana		
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk)	E2	<p>Masih cukup rendahnya kapasitas masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungannya secara swadaya, ini terlihat dari kegiatan perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat yang umumnya mereka hanya mampu memperbaiki bagian-bagian kecil atau sepersekian persen saja, terutama dalam hal pendanaan, sehingga untuk selebihnya mereka mengandalkan pihak lain seperti misalnya pemerintah ataupun swasta.</p> <p>Untuk kapasitas mereka dalam program perbaikan lingkungan, masyarakat umumnya hanya dilibatkan dalam bentuk tenaga, namun adapula keterlibatan mereka dalam bentuk pemikiran yaitu melalui usulan musrenbangkel untuk perbaikan lingkungan di wilayahnya, sedangkan partisipasi masyarakat dalam bentuk monitoring ataupun evaluasi terhadap suatu program atau kegiatan belum ada. Hal ini dirasa penting mengingat dengan melibatkan masyarakat dalam serangkaian kegiatan perencanaan partisipatif, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi partisipatif dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungannya. Kondisi lainnya yang juga terdapat di wilayah studi terkait kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan adalah terkait ketidakberdayaan mereka untuk dapat mengakses sumberdaya-sumberdaya yang ada, sehingga apabila mereka memiliki suatu ide atau gagasan terkait perbaikan lingkungan sering kali tidak terfasilitasi dengan baik sehingga tidak dapat direalisasikan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungannya baik itu secara swadaya maupun kapasitas mereka dalam program-program perbaikan lingkungan masih kurang, sehingga kemudian faktor tersebut menjadi salah satu penyebab pula terbentuknya kualitas lingkungan yang masih kurang memadai di wilayah tersebut.</p>
(Kode T1.35) <i>“Nah kalo swadaya itu tergantung sama inisiatif masyarakat. Kadang ya masih ada juga masyarakat yang mau bersama-sama secara swadaya, misalnya ya kalau ada jalan yang rusak kan suka kelamaan nunggu dari pemerintah, ya mau nggak mau kadang mereka bareng-bareng ngebetulin itulah, nambel-nambel sebisa mereka...”</i> (Kode T1.41) <i>“Kebanyakan ya tenaga, misalnya ada kegiatan perbaikan lingkungan kayak jalan gitu, masyarakat ngebantuin”</i> (Kode T1.42) <i>“Kalau uang secara swadaya sih ya, misalnya dengan cara beli semen gitu berapa sak lumayan buat nambah-nambahin, itu kan juga udah dalam bentuk swadaya. Kalau pemikiran masyarakat juga dilibatkan neng, disini kan ada yang namanya musrenbangkel. Tapi kalo sampai, apa namanya... mengevaluasi jarang masyarakat yang dilibatin ya paling sampai pelaksanaan aja masyarakat sini”</i>		
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012)	V	
(Kode T2.34) <i>“Ya paling kalo urgent ya, mereka masih mau lah buat urunan buat jalan, ya tapi cuma nambel-nambel gitu mereka rata-rata”</i> (Kode T2.36) <i>“Ya paling tenaga, buat angkut dari luar ke dalem. ngangkutin hotmix itu yang udah jadi, jadi ya diberdayakan masyarakat gitu, kadang sampe subuh juga ada. Itu program PNPM perbaikan jalan ke gang”</i>		
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat)	V, E1	
(Kode T3.38) <i>“Ya, kalau swadaya umumnya masyarakat masih rendah ya mbak. Ya itu, kan penghasilan mereka juga yang nggak seberapa. Kebanyakan dari mereka itu istilahnya apa itu, gali lobang tutup lobang lah mbak, jadi ya pendapatan mereka bisa dikatakan pas-pas an lah, jadi ya boro-boro mikirin lingkungan, seperti itu”</i>		
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)	V, E1	
(Kode T4.35) <i>“Mm... memang dianjurkan sudah ada pemberdayaan dari masyarakat, tinggal ngelanjutin bagaimana masyarakat itu bisa mandiri, sebenarnya sih itu arahnya. Supaya masyarakat bisa mandiri, bisa membangun lingkungannya, bisa membantu warga sekitar juga, itu seharusnya”</i>		

Penjelasan		Analisis
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita)	V, E1	
(Kode T5.29) <i>“Bicara soal kapasitas, yaitu tadi seperti yang saya katakan, mereka itu ya buat memperbaiki lingkungannya seperti yang di RW 01 itu, karena kurang dana ya mereka meninggikan itu rumah mereka dengan bahan-bahan seadanya. Sedangkan kalau untuk prasarana mereka kurang mampu ya, ya masih mengandalkan dari pihak lain, seperti pemerintah.”</i>		
(Kode T5.31) <i>“Ya dilibatkan, biasanya sih dalam bentuk tenaga mereka ya.jadi saat pelaksanaan program mereka mau lah untuk bantu-bantu kegiatan tersebut”</i>		
Kesimpulan		Faktor Rendahnya Kapasitas Masyarakat Dalam Peningkatan Lingkungan Menjadi Penyebab Terbentuknya Lingkungan Kumuh di Kelurahan Kapuk

Tabel 4.29 Analisis Faktor Tingkat Pendidikan

Penjelasan		Analisis
Faktor Tingkat Pendidikan		
Stakeholder 1 (LMK Kelurahan Kapuk)	V, E1	<p>Seluruh responden sepakat bahwa tingkat pendidikan menjadi penyebab lingkungan di wilayah Kelurahan Kapuk tersebut menjadi kumuh. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka tidak mampu untuk menjangkau pekerjaan yang layak seperti misalnya di kantor-kantor, dan mayoritas hanya mampu bekerja sebagai buruh. Selain itu, ternyata terdapat pula kecenderungan untuk anak-anak muda yang ada di wilayah tersebut, umumnya juga hanya mengenyam pendidikan hingga SMA, jarang sekali diantara mereka yang melanjutkan hingga ke perguruan tinggi setelah lulus karena umumnya mereka lebih memilih untuk bekerja. Namun karena tingkat pendidikan yang dimiliki tersebut juga tergolong tidak terlalu tinggi sehingga mereka cukup sulit untuk dapat berkompetisi dan mengakses pekerjaan yang lebih baik, hal ini lah salah satu alasan yang menyebabkan kondisi lingkungan di Kelurahan Kapuk sulit untuk melakukan peningkatan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu yang menyebabkan kualitas lingkungan yang terdapat di wilayah studi cukup rendah.</p>
(Kode T1.43) <i>“Ya kalau pendidikan secara umum, masyarakat kita tingkat pendidikannya umumnya masih rendah, maksudnya ya paling cukup di SD. Ya kalau orang gede nya (bapak-bapak dan ibu-ibu) ya paling banter juga SD, SMP”</i>		
(Kode T1.45) <i>“Ya mempengaruhi juga dari segi pendidikan soalnya ngaruh ke ekonomi juga. Contoh misalnya kan kalau di kantor-kantor mah kan ada persyaratan biasanya minimal lulusan apa gitu, tapi ya karena mereka nggak bisa ya paling jadi buruh, kan bisa diambil dari lulusan SMP atau SMA”</i>		
Stakeholder 2 (Wakil Ketua RW 012)	V, E1	
(Kode T2.37) <i>“Pastilah. Kalo cuma SD, SMP pola pikirnya kan udah jauh banget dari yang tingkat pendidikannya tinggi. Emang pendidikan bukan jaminan buat orang untuk hidup layak, hidup sukses, tapi kan itu pasti kan juga buka kesempatan buat jenjang karirnya lebih dibandingkan sama mereka yang cuma tamatan SD atau SMP”</i>		
Stakeholder 3 (Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat)	V, E1	

Penjelasan	Analisis	
<p>(Kode T3.42) <i>“Ya kalau pendidikan masyarakat disana biasa-biasa saja ya mbak. Saya suka diskusi juga ya kebanyakan masyarakat tamat SMA atau SMP disitu ya mbak jarang lah yang sampe perguruan tinggi mereka”</i></p> <p>(Kode T3.44) <i>“Jadi ya kalo urusan begitu suka dikesampingkan mbak, jadi ya karena sumberdaya manusianya gitu, ya lingkungannya juga gitu-gitu aja.”</i></p>		
<p>Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)</p>		V, E1
<p>(Kode T4.39) <i>“Pendidikan disini rata-rata ya SMA, jadi pendidikannya masih dibawah ya, sarjana nya masih sekitar dibawah sekian persen lah, masih minim. Apalagi buat yang udah tua-tua, kayak bapak-bapak ibu-ibu nya disini mereka malah banyak yang cuma sampe SMP atau bahkan SD, masih banyak juga itu”</i></p> <p>(Kode T4.40) <i>“Ya ngaruh juga sih ya, kan mereka jadi susah juga buat dapet kerjaan yang variatif gitu, kan kalo pendidikannya sampe sarjana gitu kan bisa ya kerja dikantor-kantor, jadi penghasilannya juga kan beda kalo ketimbang jadi buruh lepas kayak disini, ya kalo penghasilan nya warga-warga disini gede kan bisalah mereka nyisihin uangnya buat kepentingan lingkungan mereka gitu kan istilahnya”</i></p>		V, E1
<p>Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)</p>		V, E1
<p>(Kode T5.28) <i>“Ya pengaruh juga, kan berarti dengan kondisi pendidikan mereka yang rendah, berarti ada masalah juga kan di SDM mereka, sehingga mempengaruhi juga pola pikir masyarakat untuk mau maju dan bergerak membangun kampungnya”</i></p>		
<p>Kesimpulan</p>	<p>Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Menjadi Penyebab Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk.</p>	

Abstraction

Berdasarkan hasil dari tahap *organizing* yang dilakukan, tahapan terakhir dalam analisis ini adalah abstraksi, dimana didapatkan hasil faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk. Terdapat beberapa faktor yang direduksi karena dianggap tidak terlalu menyebabkan terbentuknya lingkungan kumuh di wilayah studi. Dalam mereduksi data ini, peneliti mempertimbangkan pendapat atau *statement* dari responden dan juga kondisi eksisting yang terdapat pada wilayah studi. Agar lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.30 Hasil Abstraksi Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terbentuknya Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Studi

Aspek	Faktor Penyebab	Bukan Faktor Penyebab
Urbanisasi	Pertambahan Jumlah Penduduk Pendetang	
Peran Pemerintah	Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah	
Sarana dan Prasarana		Penyediaan Prasarana Air Bersih
	Kurangnya Penyediaan Sarana Persampahan	
	Kurang Maksimalnya Kinerja Prasarana Drainase	
	Kurang Layaknya Penyediaan Prasarana Sanitasi	
		Penyediaan Prasarana Jalan
Ekonomi	Jenis Pekerjaan	
	Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat	

Aspek	Faktor Penyebab	Bukan Faktor Penyebab
Peran Masyarakat	Rendahnya Keinginan Masyarakat dalam Memelihara Lingkungannya	
	Rendahnya Kemampuan Masyarakat Masyarakat dalam Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana	
	Rendahnya Kapasitas Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan	
Sosial	Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	

Sumber: Hasil Analisis, 2014

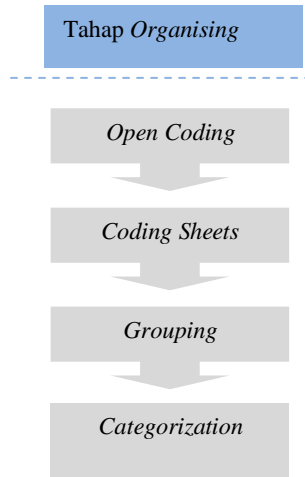
Hasil dari sasaran 2 ini kemudian akan menjadi input dalam proses perumusan arahan pada analisis konten selanjutnya.

4.4 Perumusan Arah Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk

Setelah didapatkan faktor-faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Kapuk, kemudian hasil tersebut dijadikan input dalam proses perumusan arahan di sasaran 3 ini. Dalam mencapai sasaran 3 ini, seperti yang telah dibahas sebelumnya pada Bab 3, dimana pada tahapan persiapan telah dilakukan proses wawancara dan juga pentranskripan.

Dalam perumusan arahan ini menggunakan metode *Inductive Content Analysis* dimana konstruksi analisis yang dibangun berdasarkan pada *data driven* yang didapatkan dalam transkrip wawancara yang kemudian dilakukan penginterpretasian dan pemaknaan dari hasil tersebut dengan melakukan pengkodean, pengelompokan dan juga pengkategorian (*Grounded Research*).

Coding yang dilakukan pada tahapan ini merupakan pengelompokan dari *verbatim* (kutipan) yang diambil dari penjelasan responden dalam transkrip untuk kemudian dimasukkan kedalam sebuah tabel analisis (*Coding Sheets*). Setelah dilakukan proses pengkodean, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan proses pengelompokan, dimana dalam proses ini, kutipan transkrip tersebut dikelompokkan berdasarkan pada pemaknaannya, apakah bersifat menjelaskan (E) ataukah merupakan hal baru diluar dari dugaan peneliti (N). Proses selanjutnya adalah pengkategorian, pada proses ini pengkategorian dilakukan berdasarkan pada 3 kategori utama, yaitu *Sub-Category*, *Generic-Category*, dan *Main Category* seperti yang telah dijelaskan dalam **Gambar 3.4**.



Gambar 4.79 Tahapan *Organising* pada *Inductive Content Analysis*
Sumber: Diolah dari Elo & Kyngas, 2008

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Tabel 4.31 Pengkodean Faktor dalam Transkrip

No.	Aspek	Faktor	Kelompok <i>Stakeholder</i>				
			Masyarakat		Pemerintah		Private
			LMK Kelurahan Kapuk	Wakil Ketua RW	Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan	Kelurahan Kapuk	Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita
1	Urbanisasi	Pertambahan Jumlah Penduduk Pendetang	E	E	E	E	E
			T6.1, T6.2	T7.1, T7.2, T7.3, T7.6, T7.7	T8.1	T9.1, T9.2	T10.1
2	Peran Pemerintah	Penyediaan Perumahan Layak	E	E	E, N	E	E
			T6.3, T6.4, T6.5	T7.4, T7.5, T7.8	T8.2, T8.3, T8.4, T8.5, T8.6, T8.12, T8.17	T9.3	T10.2, T10.3, T10.4
3	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Prasarana Persampahan	E	E	E	E	E
			T6.6	T7.9, T7.10, T7.12	T8.7, T8.8, T8.9, T8.13	T9.4	T10.5, T10.7
		Pemenuhan Prasarana Sanitasi	E	E	E	E	E
			T6.9	T7.13	T8.10	T9.7	T10.9, T10.10
		Pemenuhan Prasarana Drainase	E	E	E	E	E
			T6.7, T6.8	T7.14	T8.11	T9.5, T9.6	T10.11
Jenis Pekerjaan	E	E	E	E	E		
			T6.10	T7.15	T8.14	T9.9, T9.10	T10.13
4	Ekonomi	Tingkat Pendapatan	E	E	E	E	E
			T6.11	T7.16	T8.15, T8.16	T9.11,	T10.14, T10.15

No.	Aspek	Faktor	Kelompok <i>Stakeholder</i>				
			Masyarakat		Pemerintah		Private
			LMK Kelurahan Kapuk	Wakil Ketua RW	Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan	Kelurahan Kapuk	Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita
5	Peran Masyarakat	Keinginan masyarakat memelihara lingkungannya	E	E	E	E	E
			T6.12, T6.13	T7.17, T7.18	T8.20	T9.8	T10.6
		Kemampuan masyarakat menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana	E	E	E	E	E
			T6.14	T7.19	T8.18	T9.12	T10.17, T10.19
		Kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan	E	E	E	E	E
T6.15	T7.21		T8.19	T9.13, T9.14	T10.21		
6	Sosial	Tingkat Pendidikan	E	E	E	E	E
			T6.16	T7.20	T8.21, T8.22	T9.15	T10.8, T10.18, T10.20, T10.22, T10.23, T10.24

Sumber : *Komparasi Transkrip Wawancara dengan Variabel, 2014*

Keterangan :

Kode "Tx.y"

Tx = Urutan transkrip wawancara pada lampiran, Y = Urutan kalimat dalam transkrip

Tabel 4.32 Hasil Arahan Faktor Pertambahan Penduduk Pendatang

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Pertambahan Jumlah Penduduk Pendatang		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk)		
(Kode T6.1) “... Artinya perlu adanya pembatasan masyarakat yang datang ke suatu wilayah dengan persyaratan-persyaratan tertentu...”	Pelarangan Penduduk Pendatang	Faktor Pertambahan Jumlah Penduduk Pendatang
(Kode T6.2) “... Kalau dari segi umur, kan mereka nggak diliat itu kalo di perusahaan, atau kalo dari segi pendidikan juga kan tidak dilihat...”		
Stakeholder 2 (Ketua RW 01)		
(Kode T7.2) “... Seperti misalnya orang yang mau tinggal di Jakarta dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya dia harus sudah dijamin pekerjaannya ada, dan skill nya atau kemampuannya memang harus punya...”	Pembatasan Penduduk Pendatang dengan	
(Kode T7.3) “...Ya harus ada semacam koordinasi lah, dengan pemerintah daerah dengan pemerintah Jakarta. Ini bapak bapak di Solo, misalnya gitu kan, kalo warganya mau datang ke Jakarta dengan syarat kalo ada jaminan pekerjaan silahkan datang...”		
Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan)		
(Kode T8.1) “Kalau ekstrimnya itu, kita larang untuk masuk karena kita dengan adanya jumlah penduduk nambah, berarti kekumuhan kan juga meningkat ...”	Pengurusan Administrasi	
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)		
(Kode T9.1) “...tapi nanti kalau sudah memiliki Jakarata, sudah menjadi bagian, maka ada sense of belonging memiliki kampungnya, disitu mulai ada keterampilan disitu, ya nanti mulai membenahi itu ya kampungnya supaya tidak kumuh, sebenarnya itu langkah-langkah awalnya ...”	Penertiban Penduduk Pendatang yang Tidak	
(Kode T9.2) “...istilahnya kan kalo tidak punya adminitrasi atau sebagainya nanti ada langkah-langkah, kita seperti penertiban nanti kita kembalikan ...”		
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)		
(Kode T10.1) “...pemerintah perlu mengembangkan kebijakan mengenai pembatasan penduduk pendatang yang akan datang ke wilayah ini, misalnya saja dengan screening penduduk ...”		

Arahan

Didapatkan 4 upaya yang dapat dilakukan terkait dengan faktor ini, namun tidak semuanya digunakan sebagai arahan dalam penelitian ini. Berikut penjelasan lebih jelasnya.

1. Pelarangan Penduduk Pendatang

Langkah pelarangan masyarakat pendatang untuk datang ke Jakarta dirasa kurang tepat untuk diterapkan karena **mengacu kepada UUD 1945 Pasal 28E ayat (1)**, dalam kutipannya menyatakan bahwa “... *memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali*” maka setiap penduduk berhak untuk datang ke Jakarta. Selain itu, langkah pelarangan juga dirasa kurang tepat dilakukan, karena bagaimanapun juga, pada dasarnya suatu wilayah memerlukan tenaga kerja untuk dapat membangun wilayah tersebut selama SDM yang dimiliki penduduk pendatang tersebut berkompeteren dan berkualitas

2. Penetapan Kebijakan Mengenai Persyaratan Minimal bagi Penduduk Pendatang

Melihat berdasarkan pada identifikasi yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, dimana karakteristik masyarakat Kelurahan Kapuk umumnya memiliki tingkat pendidikan dan jenjang pekerjaan yang cukup rendah terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh berat, yaitu berada pada jenjang pendidikan tamat SD/ sederajat (34%) dan mayoritas bekerja pada sektor rentan, seperti misalnya tukang ojek, kuli bangunan, kuli bongkar muat dsb (Lampiran D) dimana mereka tidak memiliki pendapatan yang tetap setiap bulannya. Maka kedepan untuk menekan penduduk luar Jakarta agar tidak sembarang orang dapat masuk adalah dengan membuat kebijakan yang mengatur mengenai persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh penduduk pendatang, seperti misalnya:

- a. Umur
- b. Pendidikan
- c. Jaminan pekerjaan
- d. *Skill* (kemampuan)

Sehingga kedepannya di wilayah studi didapatkan SDM yang lebih berkualitas agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan juga lingkungan permukimannya.

3. Pengurusan Administrasi Penduduk Pendatang

Melihat pada identifikasi yang telah dilakukan pada pembahasan sasaran 1, dimana karakteristik asal daerah dan juga status kependudukan yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang tinggal di RW kumuh ringan dimana mayoritas diantara mereka merupakan masyarakat pendatang (63%) dan masih belum memiliki KTP sebagai warga Jakarta (62%). Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat kurang mempedulikan lingkungannya, karena mereka menganggap bahwa mereka bukanlah bagian dari warga Jakarta. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu responden yang menyatakan bahwa “...*tapi nanti kalau sudah memiliki Jakarata, sudah menjadi bagian, maka ada sense of belonging memiliki kampungnya....*” Maka diperlukan adanya pengurusan administrasi mereka agar mereka dapat diakui sebagai bagian dari warga Jakarta. Diharapkan dengan begitu maka, kemudahan akan tumbuh *sense of belonging* dari masyarakat pendatang untuk mau merawat lingkungannya.

4. Penertiban bagi masyarakat yang tidak memenuhi administrasi untuk kemudian dapat dikembalikan ke daerah asalnya

Bagi masyarakat yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan sebagai persyaratan pengurusan administrasi, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembalikan mereka ke daerah asalnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Pertambahan Jumlah Penduduk Pendatang ini adalah :

- **Perumusan dan penetapan kebijakan mengenai persyaratan minimal bagi penduduk pendatang yang akan masuk dan menetap di wilayah studi**
- **Pengurusan administrasi penduduk pendatang yang telah berada di wilayah studi terutama masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ringan.**
- **Penertiban bagi masyarakat yang tidak memenuhi administrasi untuk kemudian dikembalikan ke daerah asalnya.**

Tabel 4.33 Hasil Arahan Faktor Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah Bagi Masyarakat Miskin

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk)		
(Kode T6.3) “...tapi bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan permukiman yang seperti sekarang mereka kadang-kadang tidak suka kalau tinggal dirumah susun, karena misalnya karena ruangnya sempit ...”		
(Kode T6.4) “Ya seharusnya kan mungkin dapat diberikan semacam arahan, sosialisasi atau bagaimana. Kan kalau tiba-tiba disini mau dibangun rumah susun seperti itu, kan mereka tanda tanya juga, lokasinya seperti apa, tanggapan masyarakat seperti apa ...”	Membangun Rumah Susun	
Stakeholder 2 (Ketua RW 01)		
(Kode T7.4) “... dengan membuat rumah susun tetapi dengan adanya konsep rumah susun, dan rumah susun sendiri menurut saya konsepnya harus dikaji ulang dek.”		
(Kode T7.5) “... Nah untuk kalau mereka punya anak kan, otomatis tidak memiliki ruang privasi antara orang tua dengan anak-anaknya, nah ini lah yang menjadi masalah karena kan kurang bagus juga untuk perkembangan si anak juga ya...”	Membangun <i>Landed House</i> dengan Konsep	
Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan)		
(Kode T8.2) “...kalau misalkan dalam 1 Ha dia bisa menampung sebanyak 100 KK dengan landed house, kita bangun, kita bangun itu dengan cara vertikal ...”		
(Kode T8.3) “Iya, tetapi yang pertama masalahnya itu, terkait sama budaya, budaya kita itu kadang masih belum bisa tinggal di rumah susun, soalnya kalo tambah anak kan nggak bisa tambah kamar ... jadi kita bentuk masyarakatnya dulu untuk membiasakan, jangan tiba-tiba langsung aja dihajar rumahnya...”	Membangun <i>Mess</i> atau <i>Cluster</i> bagi pekerja Pabrik	
(Kode T8.5) “... nah lahan kosong ini nanti jadi sarananya ini atau mungkin mau bangun landed house kita sediakan bagi mereka yang mungkin tidak mau tinggal di rumah susun...”		
(Kode T8.12) “... Ya untuk masalah ini, nggak cuma dari pemerintah ya, tetapi sebenarnya juga harus ada kerjasama sama yang punya perusahaan atau pabrik disitu harus menyediakan, menyediakan paling tidak sisain itu lahan untuk mes ...”		Kurangnya Penyediaa Perumaha Yang Layak Oleh Pemerintah

<p>(Kode T8.17) <i>“...Misalnya swasta, mereka selaku pemilik industri, pemerintah dalam hal ini yang memiliki wilayah, sedangkan masyarakat yang ada di dalamnya, nah inilah ketiga ini yang harus bekerja, kalau tidak ada peran serta dari industri tidak ada tanggung jawabnya hanya dari masyarakat dan kita (pemerintah) ini nggak akan bisa ketemu. Makanya kalau misalkan kita secara keras, mungkin kita pengen keras terhadap industri itu, “oke, lo mau lanjut, ijin lo mau keluar lagi, oke sediakan untuk mereka (masyarakat pekerja buruh) mes”. Kita buat semacam cluster ...”</i></p>		
<p>Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)</p>		
<p>(Kode T9.3) <i>“... Sedangkan kalau rumah susun saya rasa itu memang kewajiban kalau di Jakarta untuk menyediakan rumah susun, itu harus disegerakan diadakan rumah susun itu, segera direalisasikan adanya rumah susun ...”</i></p>		
<p>Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)</p>		
<p>(Kode T10.2) <i>“...lebih baik kalau ada yang namanya kampung branding misalnya saja kampung hijau, ramah lingkungan, rumahnya tetap sederhana tetapi lingkungannya itu bisa di desain sedemikian rupa sehingga lingkungan itu bisa nyaman gitu ya, tidak mesti mahal-mahal ...”</i></p>		
<p>(Kode T10.3) <i>“... Boleh dibangun rumah susun, namun juga disediakan landed house buat mereka yang mungkin tidak mau tinggal di rumah susun, ya itu dengan membuat kampung branding tadi itu di sekitarnya ...”</i></p>		
<p>(Kode T10.4) <i>“Iya, tema kampung sendiri yang mereka bangun sendiri. Itu menarik, misalnya dari kebijakan pemerintah daerah, kampung itu kenapa tidak semuanya itu berornamen Betawi... “</i></p>		
<p style="text-align: center;">Arahan</p>		
<p>Berdasarkan pada tahap <i>categorization</i> diatas, didapatkan 3 upaya yang dapat dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan faktor kurangnya penyediaan perumahan yang layak oleh pemerintah, berikut penjelasannya.</p> <p>1. Pembangunan Rumah Susun Bagi Masyarakat Pembangunan rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan di wilayah Kelurahan Kapuk. Hal ini dilakukan karena melihat pada hasil identifikasi kondisi fisik permukiman yang telah dilakukan pada pembahasan di sasaran 1 dan juga dengan mengacu pada <i>Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan Kel. Kapuk Tahun 2011</i>, yang menyatakan bahwa mayoritas dari konstruksi bangunan yang dimiliki oleh masyarakat, baik itu di lingkungan permukiman kumuh ringan, sedang maupun berat merupakan bangunan semi permanen. Hal tersebut dikarenakan masyarakat umumnya membangun rumahnya tersebut secara swadaya, maka dari itu diperlukan bantuan dari pemerintah dalam hal penyediaan rumah yang layak, seperti dengan pembangunan rumah susun. Hanya saja, dalam proses pembangunannya perlu diperhatikan beberapa aspek, terutama terkait dengan masyarakat itu sendiri, seperti misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu ada keterlibatan masyarakat pada saat proses perencanaan pembangunan, dalam hal ini dimaksudkan agar pembangunan rumah susun yang ada harus mempertimbangkan sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan masyarakat. Pembangunan rumah susun tidak dapat dilakukan dengan hanya membangun fisiknya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, dalam hal ini adalah masyarakat penghuni rumah susun tersebut, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar pembangunan rumah susun yang ada dapat berjalan secara efektif. b. Perlu adanya sosialisasi dan juga komunikasi dua arah antara masyarakat selaku penghuni dan juga pemerintah selaku penyedia. Hal ini dilakukan agar tercapai kesepahaman antara kedua belah pihak <p>2. Pembangunan Landed House dengan konsep Kampung Branding</p>		

Selain dengan membangun rumah susun di wilayah studi, perlu pula tetap dipertahankan *landed house* di lahan-lahan yang tersisa. Hal ini dapat digunakan untuk masyarakat yang tetap tidak mau untuk tinggal di rumah susun tersebut. Namun penyediaan *landed house* ini harus memiliki ciri khas tersendiri, misalnya dengan menerapkan konsep kampung *branding*, kampung di Kelurahan Kapuk dapat saja didesain dengan tema Kampung Hijau, Kampung Betawi ataupun tema lainnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Langkah ini dapat dilakukan guna menciptakan kesan kampung yang lebih indah dan juga nyaman, tidak seperti saat ini dimana kesan lingkungan yang ada di wilayah tersebut cenderung kotor dan kurang nyaman.

3. Pembangunan *Mess* atau *Cluster* bagi pekerja pabrik

Melihat pada hasil identifikasi permukiman pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh, terutama mereka yang berada di lingkungan permukiman kumuh ringan, yaitu sebesar 38%. Sehingga dapat dibuat upaya dengan membuat suatu kebijakan oleh pemerintah yang mengatur mengenai persyaratan perijinan pabrik, salah satunya dengan menyediakan *mes* bagi para pekerjanya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesan kumuh yang tercipta akibat perilaku dari para masyarakat pendatang yang bekerja sebagai buruh yang umumnya mereka cenderung kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga dapat disediakan semacam *cluster* bagi mereka agar dapat lebih tertata.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah adalah :

1. **Membangun rumah susun bagi masyarakat**
2. **Membangun *Landed House* dengan konsep Kampung *Branding***
3. **Membangun *Mes* atau *Cluster* bagi masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pabrik atau buruh**

Tabel 4.34 Arahan Faktor Kurangnya Penyediaan Sarana Persampahan

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian Membuat sn hasil kutipan)	Main Category
Faktor Kurangnya Penyediaan Sarana Persampahan		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk)		
(Kode T6.6) “...alat tersebut bisa menghancurkan sampah, sampah apa saja, kan setelah itu bisa dijadikan sebagai kompos, atau bisa jadi apa. Hanya saja memang alat tersebut artinya cukup mahal sehingga pemma sendiri belum mampu untuk menyediakan alat tersebut ...”	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Penyediaan Lahan Sebagai Tempat </div>	
Stakeholder 2 (Ketua RW 01)		
(Kode T7.9) “Ya untuk masalah sampah itu memang menjadi masalah yang sangat kompleks, kalau saya bercerita tentang sampah, penemu Bank Sampah pertama yang ada di Indonesia itu ada namanya mas Bambang, konsep tersebut sangat menarik ya mungkin bisa diterapkan didaerah Kapuk ini kalau serius, bener-bener kan gitu istilahnya ...”		
(Kode T7.10) “... kalau masyarakatnya juga berkoordinasi dengan pemerintah mungkin benar-benar menerapkan konsep ini		

<p><i>kan justru malah sebaliknya, mereka akan mendapatkan uang dari sampah tersebut ...”</i></p>			
<p>(Kode T7.12) <i>“Iya memang seharusnya untuk masalah penanganan sampah itu harus diselesaikan dari tingkat hulunya ...”</i></p>			
<p>Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan)</p>			
<p>(Kode T8.7) <i>“Iya, usulan masyarakat untuk disediakan TPS...”</i></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p>Penyediaan Sarana Persampahan</p> </div>		
<p>(Kode T8.7) <i>“...Selain itu msyarakat juga perlu untuk dibudayakan mendaur ulang sampah, yang paling berperan dalam mendaur ulang sampah itu adalah ibu-ibu”</i></p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Faktor Kurangnya Penyediaan Prasarana Persampahan</p> </div>	
<p>(Kode T8.8) <i>“Iya, daur ulang sampah itu, memilah-milah sampah, mana sampah basah, sampah kering, sampah organik dan juga non organik, kan itu kan duit ...”</i></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2e6;"> <p>Penerapan Konsep Bank Sampah</p> </div>		
<p>(Kode T8.9) <i>“Iya, apa lagi kalau bisa ada Bank Sampah disana, itu kan top. Nah pemerintah disini bisa masuk, harus mau membebaskan satu lahan untuk Bank Sampah dan serius ini dikelola dengan baik, baik itu dari pemerintah maupun masyarakatnya, jadi itu ...”</i></p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6e6ff;"> <p>Membuat Produk Kreatif Daur Ulang</p> </div>
<p>(Kode T8.13) <i>“Ya itu, dengan membentuk Bank Sampah, pembentukan Bank Sampah yang benar-benar didukung oleh pemerintah daerah ...”</i></p>			
<p>Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)</p>			
<p>(Kode T9.4) <i>“... upaya yang harus dilakukan ya pertama disini itu terkait penyediaan tanah atau lahan untuk TPS...”</i></p>			
<p>(Kode T9.4) <i>“...setiap rumah tangga diharapkan dapat membuat semacam 3R itu, harus memilah-milah sampahnya nah dengan adanya memilah-milah itu kan bisa ada nilai komersil, ya kayak plastik, kalau ada yang organik itu dibuat pupuk, kan gitu ...”</i></p>			
<p>Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)</p>			
<p>(Kode T10.5) <i>“...sarana juga walaupun mereka sudah sadar tetapi sarana nya juga tidak memadai, kan juga menjadi permasalahan ...”</i></p>			
<p>(Kode T10.7) <i>“... juga dengan menerapkan konsep Bank Sampah, plastik dijual. ...”</i></p>			
<p>(Kode T10.7) <i>“...atau dibuat barang kreatifitas apa itu. ...”</i></p>			

Arahan

Berdasarkan hasil dari tahapan *categorization* diatas, didapatkan 4 upaya yang dapat dilakukan dalam perumusan arahan terkait kurangnya penyediaan Sarana perampahan di wilayah studi, yaitu :

1. Penyediaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Sampah

Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pada pembahasan sasaran 2 mengenai faktor penyebab terbentuknya lingkungan permukiman kumuh dari segi sarana persampahan, diketahui bahwa di wilayah studi belum tersedia tempat pembuangan sampah sementara yang resmi dari Sudin Kebersihan, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang membuang sampahnya pada lahan-lahan kosong di sekitar rumahnya dan juga menjadikan lahan tersebut sebagai TPS illegal. Pernyataan tersebut didukung oleh kondisi eksisting yang diperoleh pada identifikasi karakteristik permukiman yang dilakukan, dimana sebanyak 34% masyarakat permukiman kumuh sedang dan 38% masyarakat permukiman kumuh berat membuang sampahnya di lahan-lahan kosong.

2. Penyediaan sarana persampahan

Penyediaan sarana persampahan dalam hal ini lebih kepada penyediaan sarana tong sampah, melihat karakteristik permukiman di wilayah studi umumnya tidak tersedia sarana tong sampah, khususnya mereka yang berada di permukiman kumuh sedang dan berat, dimana masing-masing hanya sebesar 17% dan 4% yang memiliki sarana tong sampah dilingkungannya. Sedangkan untuk penyediaan salah satu responden mengenai penyediaan sarana persampahan berupa alat pengahncur sampah, tidak harus dilakukan, hal ini dikarenakan mengingat biaya penyediaan alat tersebut yang tergolong cukup mahal, sehingga tidak diarahkan untuk dilakukan di wilayah studi.

3. Penerapan Konsep Bank Sampah

Upaya yang dapat dilakukan dalam menanganai permasalahan terkait persampahan harus diselesaikan dari hulu nya (dari sumber penghasil sampah rumah tangga). Konsep penanganan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan sistem Bank Sampah dimana masyarakat dapat menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi, yaitu dengan memilah-milah mana sampah an-organik, seperti misalnya botol-botol, kardus, koran dan lain sebagainya untuk dapat dijual ke Bank Sampah. Sedangkan sampah organik yang dihasilkan dapat diolah menjadi pupuk dan kemudian hasilnya dapat dijual. Upaya tersebut dapat dilakukan mengingat pada pembahasan di sasaran 2 diketahui bahwa ternyata masyarakat sudah mulai melakukan kegiatan pengumpulan sampah yang dapat dijual, sehingga apabila konsep Bank Sampah ini diterapkan dan dikelola dengan baik, maka permasalahan terkait sampah dapat diatasi dan juga masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi didalamnya. Dalam hal ini pemerintah (Sudin Kebersihan) selaku pihak yang selama ini bertanggung dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk menyediakan sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan masyarakat, selain itu juga diharapkan pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara mengolah pupuk sesuai dengan standar sehingga hasil dari produk tersebut dapat memiliki kualitas baik. Tidak hanya itu, diharapkan pula pemerintah juga membantu dan menyiapkan pasar guna membantu masyarakat dalam memasarkan hasil produk pupuk mereka. Apabila konsep tersebut dikelola dan di-organisir dengan baik maka permasalahan terkait dengan sampah dapat diatasi, dan tidak lagi terjadi penumpukan sampah seperti yang selama ini terjadi.

4. Membuat Produk Kreatif Daur Ulang Sampah

Selain dengan memilah-milih sampah an-organik yang dapat dijual ke Bank Sampah, masyarakat juga dapat memanfaatkan sampah tersebut menjadi produk-produk kreatifitas yang juga dapat memiliki nilai ekonomi. Diharapkan pemerintah, dalam hal ini Sudin Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Barat dapat memberikan pelatihan dan juga pendampingan agar produk yang dihasilkan masyarakat dapat berkualitas, selain itu pemerintah juga perlu membantu masyarakat dalam hal pemasaran, agar produk-produk kreatifitas tersebut dapat tersalurkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Kurangnya Penyediaan Sarana Persampahan adalah :

- **Penyediaan Lahan Sebagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara**
- **Penyediaan Sarana Persampahan**
- **Penerapan Konsep Bank Sampah berbasis masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah Jakarta Barat**
- **Membuat Produk Kreatif Daur Ulang Sampah oleh Masyarakat**

Tabel 4.35 Arahan Faktor Kurang Layaknya Penyediaan Prasarana Sanitasi

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Kurangnya Penyediaan Prasaran Sanitasi		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk)		
(Kode T6.9) <i>"... kalau kita mau bangun MCK kan pasti juga butuh lahan, sedangkan disini lahan udah dimiliki sama masyarakat semua, jadi ya susah juga kalau mau menyediakan MCK ..."</i>		
Stakeholder 2 (Ketua RW 01)		
(Kode T7.13) <i>"Ya kalau masalah sanitasi itu masyarakat sih juga pengennya bagus ya, kayak yang di program rumah deret situ kan juga bagus, dibenerin mereka ..."</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f8d7da;"> Pembenahan Kondisi MCK Masyarakat </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> Faktor Kurangnya Penyediaan Prasarana Sanitasi </div>
Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan)		
(Kode T8.10) <i>"septic tank komunal yang itu sistemnya pakai bakteri, pakai pengurai, kan nantinya bakterinya itu bekerja untuk mengurai, nah nanti hasilnya itu bisa jadi air yang tidak berbau jadi bisa itu dialirin ke saluran air warga. Selain dengan memperbaiki kondisi tempat kamar mandinya, sistem sanitasinya juga harus diperbaiki., kan kalau secara benarnya itu kalau ngebangun sanitasi itu kan harus ada jaraknya dengan rumah sebelahnya kan itu berapa meter itu, mana bisa kalo di rumah-rumah disana kan, orang mepet-mepet gitu, makanya disiasati dengan cara lain, seperti misalnya septic tank komunal ini "</i>		
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)		
(Kode T9.7) <i>"...Terkait masalah MCK, seperti yang ada di Rumah Deret ini kan kita sudah berikan MCK kepada masyarakat. Sistemnya kan bagus itu, jadi hasil limbah domestik yang ada tersebut nanti diolah dan kemudian hasilnya berupa air dia itu, kan bisa langsung dialirkan ke saluran warga tidak berbahaya jadinya, tidak bau juga ..."</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d1ecf1;"> Pembangunan Sanitasi Komunal </div>	
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)		
(Kode T10.9) <i>"... Selain diperbaiki kondisi MCK nya, saya kira pengembangan sanitasi berbasis masyarakat yang komunal itu perlu digalakan ..."</i>		
(Kode T10.7) <i>"... Jadi itu ada namanya sanimas, sanitasi berbasis masyarakat jadi WC-WC berbasis komunal jadi di sebuah komplek kampung kan lahan terbatas, beli sesuatu itu bisa multi-fungsi, bisa jadi tamannya mereka diatasnya pohon-pohonan kan bisa juga tuh memperluas RTH nya, sedangkan dibawahnya itu adalah toilet besar dan juga bisa menghasilkan gas, jadi misalnya ada 300 rumah atau 1000 rumah dan itu bisa di manage bisa dikembangkan itu jadi pemerintah membeli lahan dan tempat itu dan diatur sehingga toiletnya itu juga bisa menghasilkan gas, kemudian kan diatasnya itu bisa jadi taman, tempat interaksi atau sebagai tempat olahraga dengan RTH tadi itu ..."</i>		

Arahan

Berdasarkan hasil dari tahapan *categorization* diatas, didapatkan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perumusan arahan terkait kurang layak nya penyediaan sarana perampahan di wilayah studi, yaitu :

1. Pembenahan Kondisi MCK Masyarakat

Melihat pada pembahasan mengenai karakteristik permukiman masyarakat terkait sanitasi, mayoritas baik itu di permukiman kumuh ringan, sedang maupun berat yang mayoritas memiliki kondisi sanitasi yang kurang layak dan terkesan jorok, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan atau pembenahan kondisi MCK yang dimiliki masyarakat di wilayah studi.

2. Pembangunan Sanitasi Komunal

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem sanitasi komunal, baik itu menggunakan metode sanitasi berbasis masyarakat (*sanimas*) ataupun metode sanitasi pengolahan air limbah domestik seperti yang diterapkan pada konsep Program Rumah Deret yang hanya terdapat di beberapa tempat di wilayah studi dimana limbah domestik yang ada diolah dan kemudian hasil pengolahan limbah tersebut menjadi air yang ramah lingkungan dan dapat langsung dialirkan ke saluran air warga. Sistem tersebut dapat mencegah terjadinya pencemaran air tanah, mengingat jarak minimal yang harus dimiliki dengan menggunakan *septic tank* biasa adalah 10 m dari sumur air bersih. Hal ini tentu sulit untuk dipenuhi untuk rumah-rumah seperti yang terdapat di Kelurahan Kapuk yang cukup padat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Kurangnya Penyediaan Sarana Persampahan adalah :

- **Pembenahan kondisi MCK masyarakat**
- **Pembangunan Sanitasi Komunal bagi masyarakat**

Tabel 4.36 Arahan Faktor Kurang Maksimalnya Kinerja Prasarana Drainase

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Kurang Maksimalnya Kinerja Drainase		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk)		
(Kode T6.7) <i>"... saluran air itu yang seharusnya turun ke kali ini kalau tidak dibantu dengan alat lain seperti mislanya pompa, ini susah untuk turun lancar, jadi kalau ada banjir gitu ya di lingkungan jadi air nggak cepat turun ke kali"</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f8d7da;"> Pengoptimalan Fungsi Saluran Air Secara </div>	
(Kode T6.7) <i>"...Itu permasalahannya, selain itu kalinya juga harus di normalisasi dulu, supaya bisa lancar ngalirin ke laut. ..."</i>		
Stakeholder 2 (Ketua RW 01)		

<p>(Kode T7.14) <i>“Masalah yang jadi sumber utama kan ini soal banjir, nah penyelesaian banjir ini bukan dengan cara menguruk tempat yang banjirnya, tetapi dengan membuat saluran-saluran yang sudah ada, atau memfungsikan secara maksimal saluran-saluran yang sudah ada, kalau pun tidak maksimal ya harus dimaksimalkan, walaupun tidak ada ya harus dibuat... nah kalo lumpur itu dikeruk total, sampai ke dasar sungai itu. Terutama yang ada di Kali Angke ya, itu dangkal banget kalau dibandingkan dengan dulu ...”</i></p>		
<p>Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan)</p>		
<p>(Kode T8.11) <i>“Masalah saluran air itu harus ditangani secara komprehensif ya, maksudnya adalah tidak hnaya saluran-saluran yang ada di lingkungan saja tetapi juga sampai dengan saluran yang di kali-kali itu ...”</i></p>		
<p>Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)</p>		
<p>(Kode T9.5) <i>“Nah kalau terkait infrastruktur permasalahan saluran air yang ada di Kelurahan Kapuk ini, terutama saluran yang primer ini ya penting sekali nah itu saya infrastruktur yang menghadapi bahaya banjir kan kendalanya itu saluran ...”</i></p>	<p>Pengadaan dan Pengoperasian RPH</p>	
<p>(Kode T9.6) <i>“... selain itu, kinerja saluran ini juga kan terganggu karena ada pencemaran di RPH sama pabrik-pabrik itu, nanti kemudian sudah dibuatkan itu RPH yang baru, yang modern jadi nggak perlu buang ke saluran warga lagi. Nah kalau masalah pabrik, nanti bisa diberikan teguran ataupun kebijakan supaya mereka benar-benar mematuhi peraturan yang ada kalau masih mau diberikan ijin disini ...”</i></p>		
<p>Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)</p>		
<p>(Kode T10.11) <i>“ Ya itu masalah juga ya, mungkin itu bisa berkoordinasi antar pemerintah itu untuk membenahi saluran-saluran disana, nggak cuma yang didalam-dalam tapi juga yang besar-besar itu “</i></p>		
<p>Arahan</p>		
<p>Berdasarkan hasil dari tahapan <i>categorization</i> diatas, didapatkan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perumusan arahan terkait kurang maksimalnya kinerja prasarana drainase di wilayah studi, yaitu :</p> <p>1. Pengoptimalan fungsi saluran air secara komprehensif</p> <p>Pemaksimalan saluran air yang ada dapat dilakukan secara komprehensif, dimulai dari saluran air primer, sekunder hingga tersier. Hal tersebut dilakukan mengingat pada pembahasan mengenai faktor penyebab terbentuknya lingkungan permukiman kumuh dari aspek prasarana drainase diketahui bahwa permasalahan yang terdapat di wilayah studi tidak hanya mengenai saluran tersiernya saja, tetapi juga saluran sekunder dan saluran primernya yang mengalami pendangkalan akibat sampah dan juga lumpur yang mengendap sehingga mengakibatkan saluran tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal.</p> <p>a. Saluran air primer Dilakukan dengan normalisasi secara total di saluran-saluran air primer yang ada di Kelurahan Kapuk (Kali Angke dan Kali Cengkarenag Drain), lumpur yang mengalami sedimentasi dikeruk secara menyeluruh hingga ke dasar sungai/kali agar dapat menampung volume air secara maksimal dan lancar hingga ke laut.</p> <p>b. Saluran air sekunder Dilakukan dengan pengerukan sampah dan lumpur yang menggenangi saluran air sekunder yang ada di wilayah studi (saluran di Jalan Raya Kapuk) agar dapat secara maksimal mengalirkan air dari saluran air lingkungan warga ke saluran air primer</p>		

c.	Saluran air tersier Dilakukan dengan pembersihan sampah-sampah yang menggenangi saluran-saluran air warga, dan juga pembuatan saluran air warga bagi yang belum tersedia, khususnya di lingkungan permukiman kumuh berat , yang masih banyak belum tersedia saluran air lingkungan didalamnya, yaitu sebesar 38%
2.	Pengadaan rumah pompa air Pengadaan rumah pompa air ini dilakukan untuk membantu menyedot air yang ada di lingkungan warga terutama pada saat terjadi hujan agar tidak terjadi genangan/banjir. Rumah pompa ini diperlukan, terutama di lingkungan permukiman kumuh berat dimana berdasarkan pada identifikasi karakteristik permukiman yang dilakukan, umumnya memiliki kondisi genangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan permukiman kumuh kategori lainnya, yaitu setinggi antara 50 cm- 1 m.. Penempatan pompa air ini haruslah ditempatkan pada lokasi yang tepat agar dapat berfungsi secara efektif. Pada lingkungan permukiman kumuh berat selain memiliki genangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya, tetapi juga dengan melihat pada lokasinya yang berdekatan dengan Kali Cengkareng Drain sehingga dirasa sesuai untuk dilakukukan penempatan pompa air tersebut dan memudahkan untuk air genangan yang ada di lingkungan rumah warga agar dapat dialirkan langsung menuju Kali Cengkareng Drain tersebut.
3.	Pengoperasian RPH Modern dan juga IPAL perusahaan Berdasarkan pada pembahasan identifikasi karakteristik permukiman yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa kurang maksimalnya kinerja dari saluran air yang ada di wilayah studi, terutama di lingkungan permukiman kategori rendah , salah satunya juga disebabkan karena saluran tersebut yang tercemar oleh limbah, baik itu limbah dari RPH maupun limbah pabrik, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara membangun RPH baru yang modern sehingga tidak lagi membuang limbahnya ke saluran warga, sedangkan untuk pabrik diberikan ketegasan agar mereka mematuhi dengan membuang limbahnya melalui IPAL jika mereka masih mau mendapatkan ijin untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Kurangnya Penyediaan Sarana Persampahan adalah :

- **Pengoptimalan Fungsi Saluran Air Secara Komprehensif**
- **Pengadaan Rumah Pompa Air**
- **Pengadaan dan Pengoperasian RPH Modern dan juga IPAL Perusahaan**

Tabel 4.37 Arahan Faktor Jenis Pekerjaan Masyarakat

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Jenis Pekerjaan Masyarakat		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk) (Kode T6.10) <i>“... kalau yang mereka bekerja di buruh bisa diberikan pelatihan-pelatihan atau ketrampilan apa gitu dari perusahaannya jadi kemampuan mereka juga bisa bertambah, kan bisa juga nantinya mereka jadi punya kerjaan lain yang lebih bagus ...”</i>		
(Kode T6.10) <i>“...kalo mereka-mereka yang dagang, mungkin bisa dikasih pembinaan juga tapi yang terkait sama kerjaan mereka, seperti apa yang benar yang bagusnya, supaya kehidupan mereka juga bisa meningkat ...”</i>		

<p>Stakeholder 2 (Ketua RW 01) (Kode T7.15) <i>“...Ya mungkin itu perlu ada semacam tambahan atau sampingan ya, seperti misalnya budidaya ikan lele oleh masyarakat, konsep Tridaya itu bagus ya ...”</i></p>	<div data-bbox="1503 477 1794 727" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pengembangan dan penerapan Konsep Tridaya dimana didalamnya terdapat</p> </div>	<div data-bbox="1839 288 2029 727" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Faktor Jenis Pekerjaan Masyarakat</p> </div>
<p>Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan) (Kode T8.14) <i>“Ya itu, dengan membentuk Bank Sampah, pembentukan Bank Sampah yang benar-benar didukung oleh pemerintah daerah. Pertama itu kita subsidi dulu, dari APBD dari dinas-dinas yang terkait dengan hal itu ... misalkan dalam 3 tahun mereka sudah mandiri, yaudah ini nggak perlu diambil, jadi sifatnya multi-years ... jadi masyarakat kan bisa punya pekerjaan lainnya disamping dari pekerjaan mereka sehari-hari ...”</i></p>		
<p>Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk) (Kode T9.9) <i>“...dengan bina usaha, masyarakat itu diberikan suatu ketrampilan diberikan suatu pendidikan. Seperti misalnya pelatihan masyarakat di BLK (Balai Latihan Kerja), kedua nanti ada informasi-informasi yang sifatnya keterampilan tadi seperti ibu-ibu PKK dengan membuat produk unggulan ...”</i></p>		
<p>(Kode T9.10) <i>“... nanti koordinasi dengan berbagai dinas, seperti Disperindag, jadi nanti produk-produk tersebut bisa di supply kemana gitu, kayak ke restoran atau hotel ...”</i></p>		
<p>Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita) (Kode T10.12) <i>“Untuk masalah jenis pekerjaan ini saya rasa perlu ada pembinaan usaha, semacam pengorganisasian usaha mikro di kalangan masyarakat itu penting “</i></p>		
<p>(Kode T10.13) <i>“...itu bisa dilakukan, tidak harus dalam bentuk koperasi tetapi lebih kepada pengembangan bisnis berbasis lokal, kita juga bisa melibatkan teman-teman dari perguruan tinggi dan juga pihak swasta mungkin untuk men-support mereka supaya bisa berbisnis. Misalnya saja dengan membuat tambak lele, mereka kan bisa usaha lele, dan kemudian dibuat koperasi lele, seperti misalnya kan itu bisa dilakukan disamping mereka bekerja sebagai buruh ...”</i></p>		
Arahan		
<p>Berdasarkan hasil dari tahapan <i>categorization</i> diatas, didapatkan upaya yang dapat dilakukan dalam perumusan arahan terkait jenis pekerjaan masyarakat di wilayah studi, berikut penjelasannya:</p> <p>1. Pengembangan dan Penerapan Konsep Tridaya dimana Didalamnya Terdapat Kegiatan Bina Ekonomi dan Bina Usaha Kepada Masyarakat</p> <p>Melihat pada identifikasi karakteristik permukiman yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa masyarakat di wilayah studi mayoritas memiliki jenis pekerjaan yang tidak terlalu menjanjikan secara finansial, seperti misalnya saja buruh, pedagang kecil, dan bahkan banyak pula masyarakat yang bekerja di sektor informal dan serabutan, terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh sedang (30%) dan juga kumuh berat (40%). Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan ini, upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan Konsep Tridaya, dimana didalam konsep tersebut terdapat kegiatan Bina Ekonomi dan Usaha yang dapat dikembangkan. Kegiatan Bina Ekonomi dan Usaha yang dapat dilakukan di wilayah studi dapat melalui :</p>		

<p>a. Pemberian Pelatihan-Pelatihan atau Ketrampilan Kepada Masyarakat Melihat pada karakteristik masyarakat dimana mayoritas dari mereka bekerja sebagai buruh, terutama mereka yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh kategori rendah, maka masyarakat dapat diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan juga kemampuan masyarakat sehingga dapat menciptakan kesempatan supaya masyarakat dapat memiliki dan mengembangkan usaha lain dan tidak selalu menjadi buruh agar kualitas kehidupan mereka dapat lebih baik.</p> <p>b. Pemberian Pelatihan Kewirausahaan Melihat pada karakteristik masyarakat di Kelurahan Kapuk dimana banyak pula masyarakatnya yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, terutama mereka yang berada di lingkungan permukiman kumuh kategori sedang yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang, maka masyarakat perlu diberikan pelatihan dan juga pemberian arahan terkait dengan kegiatan perdagangan agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka.</p> <p>c. Penerapan Konsep Bank Sampah Melihat pada kondisi masyarakat yang suka mengumpulkan barang-barang bekas, dapat menjadi potensi untuk dikembangkannya konsep Bank Sampah, agar kemudian konsep tersebut dapat didukung dan diorganisasikan secara terpadu oleh pemerintah hingga mereka dapat mandiri sehingga masyarakat memiliki kegiatan lainnya disamping dari kegiatan mereka sehari-hari, kegiatan ini dapat menciptakan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat</p> <p>d. Melakukan Pengembangan Bisnis Berbasis Lokal Menggalakan pengorganisasian usaha mikro kepada masyarakat agar mereka mau dan mampu untuk mengembangkan usaha sehingga dapat menciptakan usaha kecil menengah baru di kalangan masyarakat.</p> <p>Berdasarkan penjelasan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Jenis Pekerjaan Masyarakat adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penerapan Konsep Tridaya dimana didalamnya terdapat kegiatan Bina Ekonomi dan Bina Usaha kepada masyarakat berupa pemberian pemberian pelatihan atau ketrampilan teknik dan manajerial kepada masyarakat, pemberian pelatihan kewirausahaan, penerapan konsep bank sampah, dan melakukan pengembangan bisnis berbasis lokal.
--

Tabel 4.38 Arahan Faktor Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk)		
(Kode T6.11) <i>“.. mereka juga nggak mau kalau selamanya jadi karyawan buruh, dia juga kan mungkin ingin bisa berupaya sendiri, mandiri gitu kan istilahnya. Jadi kalau nanti punya ketrampilan lain kan, mereka bisa punya usaha lain yang bisa berkembang, tidak terus-terusan jadi buruh pabrik seperti itu. Kan kalau jadi buruh pabrik seperti ini kan tidak bisa berkembang, selain itu upah yang diterima juga kan banyak juga yang dibawah UMR ...”</i>		

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
<p>Stakeholder 2 (Ketua RW 01) (Kode T7.16) “... Nah disini itu kan banyak masyarakat yang punya warung-warung kecil, pedagang-pedagang kecil, disini itu sering mereka menggunakan jasa keuangannya dari rentenir untuk modal keuangannya itu biasanya mereka pakai jasa keuangan seperti itu, kalau dia menggunakan jasa keuangan seperti itu kan usaha dagang mereka umumnya tidak bisa berkembang atau bahkan tutup karena ya bayar bunga nya itu. Nah disini lah seharusnya, masyarakat membutuhkan pinjaman dengan bunga yang murah atau bahkan tidak ada bunganya sama sekali, kan mereka akan lebih bisa survive dagangnya...”</p> <p>Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan) (Kode T8.15) “... kan bisa meningkatkan pendapatan mereka juga itu Bank Sampah kalau dikelola dengan bener-bener, kan laku, bagus itu ...”</p> <p>(Kode T8.16) “... yaudah mereka itu diberikan pelatihan nantinya misalnya pelatihan bengkel ...”</p> <p>Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk) (Kode T9.11) “... dengan cara ini dengan adanya pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat, jadi dengan pemberdayaan pendekatan ke masyarakat. Selain itu juga dengan membuat kripik singkong, diolah bagus kan juga dapat menambah ekonomi masyarakat sekitar, diolah macem-macam kemasannya juga bagus supaya lebih menarik bisa dijual jadinya, ya emang kadang masih cukup kesulitan juga sih buat masarin nya ini, perlu ada koordinasi atau semacam bantuan lah dari pihak lain ...”</p> <p>Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita) (Kode T10.14) “Ya, tadi sekaligus selain dengan pengorganisasian usaha mikro berbasis masyarakat itu, memang mereka perlu dilakukan peningkatan kualitas ketrampilan SDMnya karena kan ketrampilan SDM nya itu seringkali berbanding lurus dengan tingkat pendapatannya ...”</p> <p>(Kode T10.15) “... mungkin bisa difasilitasi dengan penyediaan komputer untuk desainnya, kalau mereka disuruh untuk berinvestasi sendiri, ya susah itu kan uangnya hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Itu harus jeli, jadi lagi-lagi pemerintah harus cepat itu menangkap potensi-potensi semacam itu ...”</p>	<p>Upaya Diversifikasi dan Intensifikasi terkait Pekerjaan Masyarakat</p>	<p>Faktor Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat</p>

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Arahan		
Berdasarkan hasil dari tahapan <i>categorization</i> diatas, didapatkan upaya yang dapat dilakukan dalam perumusan arahan terkait rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di wilayah studi, berikut penjelasannya:		
<p>2. Upaya Diversifikasi dan Intensifikasi terkait Pekerjaan Masyarakat</p>		
<p>Berdasarkan hasil analisis faktor kekumuhan di kawasan Kelurahan Kapuk salah satunya disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini didukung oleh identifikasi karakteristik masyarakat yang telah dilakukan, dimana umumnya masyarakat memiliki pendapatan per bulan hanya pas dengan UMR (\pm Rp. 2.500.00) dan bahkan banyak pula diantara mereka yang masih memiliki penghasilan dibawah UMR seperti yang terdapat di lingkungan permukiman kumuh kategori berat, dimana mayoritas pendapatan yang dimiliki mereka adalah \pm Rp. 1.500.000. Terdapat korelasi antara pekerjaan masyarakat dengan tingkat pendapatan yang dimiliki mereka, maka dari itu diperlukan adanya suatu upaya diversifikasi dan intensifikasi pekerjaan yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan penghasilan yang dimiliki mereka, diantaranya adalah dengan :</p>		
<p>1. Upaya diversifikasi terkait pekerjaan masyarakat</p>		
<p>Upaya diversifikasi ini lebih kepada penciptaan lapangan usaha lain diluar dari pekerjaan sehari-hari masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk dapat berkembang secara finansial, yaitu dengan cara :</p>		
<p>a. Pemberdayaan Masyarakat</p>		
<p>Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian ketrampilan tambahan kepada masyarakat, selain itu juga pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam hal pemasaran produk dan juga penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat agar mereka dapat berkembang dan dapat meningkatkan penghasilan mereka</p>		
<p>b. Penerapan Konsep Bank Sampah</p>		
<p>Dengan penerapan konsep Bank Sampah dengan baik dan terorganisasi dengan baik, maka konsep tersebut dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.</p>		
<p>2. Upaya intensifikasi terkait pekerjaan masyarakat</p>		
<p>Upaya ini lebih kepada pengoptimalan terkait pekerjaan yang telah dimiliki oleh masyarakat, dapat dilakukan dengan</p>		
<p>a. Peminjaman Modal Usaha Berbunga Rendah</p>		
<p>Melihat pada karakteristik masyarakat Kelurahan Kapuk dimana cukup banyak diantara mereka yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang terutama mereka yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh sedang yang mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, maka dari itu perlu adanya pengoptimalisasian terhadap potensi tersebut, salah satunya adalah dengan men-<i>support</i> masyarakat dalam hal permodalan, karena tidak jarang pula masyarakat yang mendapatkan peminjaman modal dengan cara menggunakan jasa keuangan dari rentenir, sehingga usaha mereka sulit berkembang akibat bunga yang diberikan terlalu tinggi.</p>		
<p>Berdasarkan penjelasan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat adalah :</p>		
<p>1. Upaya diversifikasi dan intensifikasi terkait pekerjaan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerapan konsep Bank Sampah, dan juga peminjaman modal usaha berbunga rendah.</p>		

Tabel 4.39 Arahan Faktor Rendahnya Keinginan Masyarakat Memelihara Lingkungannya

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Rendahnya Keinginan Masyarakat Memelihara Lingkungannya		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk) (Kode T6.13) <i>".. Iya, padahal kan juga udah ada perda masalah sampah, masalah kebersihan, tertib lingkungan, ada perdanya, mereka baca, tapi ya tetep aja mereka begitu. Karena ya kan tidak ada tindakan tegas setiap orang yang buang sampah sembarangan harus bagaimana, perdanya ada tapi ya perda itu nggak pernah diterapkan ..."</i>		
Stakeholder 2 (Ketua RW 01) (Kode T7.17) <i>"... Kalau pasarnya itu ada, saya yakin banyak masyarakat juga yang berlomba-lomba membuat kompos, selesai masalah kebersihan ini, nah perilaku masyarakat dengan sendirinya akan jalan dek, karena kalau itu sudah laku seperti gelas aqua ini, ini orang akan menyimpan karena dianggap memiliki nilai ekonomi, tidak lagi mereka buang sembarangan ..."</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f8d7da;"> Sosialisasi Melalui Pendekatan </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> Faktor Rendahnya Keinginan Masyarakat Memelihara Lingkungannya </div>
(Kode T7.18) <i>"... Nah dengan cara itu, si ibu tersebut lama-lama akan tertanam rasa kecintaannya terhadap penghijauan, terhadap pohon, dia siram tiap hari jangan sampe mati karena kalau sampai mati kan nanti mereka mikir nggak dapet minyak goreng nih, nah lama-lama muncul rasa cinta itu, kalo ada sampah apa kayak bungkus rokok diambilin itu dek, karena mereka sudah cinta dengan kebersihan itu, kan udah bagus lingkungannya. Nah itulah, bagaimana caranya kita merubah mindset masyarakat untuk bisa seperti itu, pemerintah atau swasta bisa masuk kedalam situ kan dalam konsep tersebut "</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d1ecf1;"> Ketegasan Pemerintah Dalam Menjalankan </div>	
Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan) (Kode T8.20) <i>".. Ya kalau itu kita perlu sosialisasikan ya, menggunakan pendekatan kepada kelompok masyarakat yang ada disana, gunakan itu modal sosial yang ada disana seperti apa supaya bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan ..."</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d1c4e9;"> Mengubah Mindset Masyarakat Terkait </div>	
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk) (Kode T9.8) <i>"... Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini kita harus banyak sosialisasi, setiap ada pertemuan pertemuan warga kita informasikan, seperti misalnya acara Isra' Mi'raj kita informasikan, selain itu diadakan spanduk diberikan semacam pencerahan kepada masyarakat. Semacam blusukan kepada masyarakat terutama dari lingkup RT/RW lah, jadi supaya lebih menysar kepada masyarakat ..."</i>		

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
<p>Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita) (Kode T10.6) <i>"... Nah ini butuh pendekatan kepada masyarakat, ada 2 faktor yang pertama itu faktor mindset mereka itu ya terhadap sampah itu, artinya masih banyak masyarakat yang tidak sadar bagaimana membuang sampah pada tempatnya, itu yang perlu disosialisasikan melalui berbagai pendekatan, dan muatan, bisa dengan pendekatan apa saja, bisa dengan keilmuan terkait bahaya sampah, muatan agama, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, atau pendekatan budaya melalui musik dan lain-lain, bisa apa saja karena masalah kesadaran ini penting tetapi perhatikan siapa masyarakatnya jangan disamaratakan, kita bisa masuk sesuai dengan masyarakat di grup in lah istilahnya begitu ..."</i></p>		
Arahan		
<p>Dari hasil dari tahapan <i>categorization</i> diatas, didapatkan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perumusan arahan terkait rendahnya keinginan masyarakat memelihara lingkungannya di wilayah studi. Berdasarkan hasil analisis mengenai faktor yang menyebabkan terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, faktor rendahnya keinginan masyarakat dalam memelihara lingkungannya merupakan salah satunya, hal ini terlihat dari perilaku masyarakat dimana banyak diantara mereka yang masih membuang sampahnya sembarangan, baik itu dikali, di saluran air, dan lain sebagainya. Upaya yang dapat dilakukan terkait permasalahan ini adalah :</p>		
<p>1. Sosialisasi melalui pendekatan masyarakat</p>		
<p>Melihat pada karakteristik masyarakat yang ada di Kelurahan Kapuk dimana di lingkungan tersebut memiliki modal sosial yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di lingkungan tersebut, terutama mereka yang berada di lingkungan permukiman kumuh kategori berat, seperti misalnya kegiatan PKK, pengajian, arisan ataupun kerja bakti, maka ini dapat menjadi potensi tersendiri agar pada saat kegiatan tersebut berlangsung, dapat pula dimasukkan sosialisasi mengenai pentingnya mereka merawat lingkungannya secara bersama-sama. Selain itu sosialisai tersebut juga dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti misalnya melalui musik berupa ajakan kepada masyarakat, ataupun metode keagamaan terkait dengan kebersihan. Diharapkan penggunaan pendekatan tersebut sosialisasi yang dilakukan dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif.</p>		
<p>2. Ketegasan pemerintah dalam menjalankan perda terkait sampah</p>		
<p>Selain melalui sosialisasi, dalam hal ini diperlukan pula adanya ketegasan dari pemerintah agar dapat secara tegas mengimplementasikan kebijakan terkait sampah tersebut, sehingga diharapkan masyarakat juga dapat memiliki efek jera dan juga mau untuk menjaga lingkungannya.</p>		
<p>3. Mengubah <i>mindset</i> masyarakat terkait sampah melalui kegiatan pemanfaatan sampah</p>		
<p>Langkah lainnya yang juga dapat diterapkan di lingkungan Kelurahan Kapuk agar masyarakatnya dapat lebih peduli terhadap lingkungannya adalah melalui pendekatan secara persuasif, yaitu dengan merubah <i>mindset</i> masyarakat bahwa sampah ternyata memiliki nilai ekonomi bagi mereka, sehingga dengan begitu maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai sampah dan tidak lagi membuang sampahnya sembarangan.</p>		
<p>Berdasarkan penjelasan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Rendahnya Keinginan Masyarakat Dalam Memelihara Lingkungannya adalah :</p>		
<p>1. Sosialisasi melalui Pendekatan Masyarakat</p>		
<p>2. Ketegasan pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait sampah</p>		
<p>3. Mengubah <i>mindset</i> masyarakat terkait sampah melalui kegiatan pemanfaatan sampah</p>		

Tabel 4.40 Arahan Faktor Rendahnya Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Rendahnya Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk)		
(Kode T6.14) <i>"... Jadi ya itu tadi, kembali lagi ke masalah pendapatan ya, kalau misalnya masyarakat diberi pelatihan ketrampilan lain, mungkin masyarakat bisa memiliki usaha lain yang bisa berkembang dan memiliki prospek lah dan nggak terus-terusan jadi buruh. Jadi kalau usahanya sudah berkembang kan otomatis mereka juga kan bisa lebih mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka secara lebih layak lagi ..."</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Penguatan Kemampuan Ekonomi - - </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Faktor Rendahnya Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana </div>
Stakeholder 2 (Ketua RW 01)		
(Kode T7.19) <i>"... Ya kuncinya ya itu tadi ya, kembali lagi ke finansial masyarakatnya, bagaimana supaya ekonomi masyarakat itu bisa kebantu, ya itu salah satunya dengan menyediakan peminjaman modal tanpa bunga kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa berkembang usahanya, kan begitu ya ..."</i>		
Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan)		
(Kode T8.18) <i>"Ya itu, balik lagi ya ke kemampuan ekonomi mereka. Jadi dengan pelatihan-pelatihan atau juga pengorganisasian Bank Sampah dengan serius dan benar kan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi mereka, nah kalo ekonominya udah bagus kan secara otomatis tuh kemampuannya juga meningkat, ya nggak ? jadi seperti itu ..."</i>		
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)		
(Kode T9.12) <i>"... Ya untuk meningkatkan kualitas masyarakat disini ya pendidikan itu yang utama, pendidikan. Ya kan dengan pendidikan bisa segala-galanya, kalau orang punya pendidikan kan bisa lebih bagus lagi ..."</i>		
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)		
(Kode T10.17) <i>"... Yaitu dengan melakukan peningkatan ilmu pengetahuan mereka, ketrampilan mereka, pendidikan itu bisa jadi entry point tetapi tidak hanya pendidikan formal tetapi juga secara informal ..."</i>		
(Kode T10.19) <i>"Ya dengan pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, taman-taman bacaan dan lain-lain. Nanti kan kalau mereka punya ketrampilan lain juga akan bisa berdampak pula kepada kemampuan mereka secara finansial"</i>		

Arahan

Dari hasil dari tahapan *categorization* diatas, didapatkan upaya yang dapat dilakukan dalam perumusan arahan terkait rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana dasarnya, berikut penjelasannya :

- **Penguatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat**

Berdasarkan hasil kajian analisis terhadap faktor yang menyebabkan terbentuknya lingkungan kumuh yang terdapat di Kelurahan Kapuk, rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarananya menjadi salah satu penyebabnya. Terdapat korelasi antara kemampuan masyarakat tersebut dengan kondisi ekonomi yang dimilikinya, maka upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut adalah dengan cara penguatan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan dilakukannya penguatan kemampuan ekonomi masyarakat maka akan berdampak pula terhadap peningkatan kemampuan masyarakat untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa cara yang dapat dilakukan terkait dengan penguatan kemampuan ekonomi masyarakat adalah dengan :

- a. **Pemberian keterampilan kepada masyarakat**
- b. **Pemberian pinjaman modal usaha**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Rendahnya Kemampuan Masyarakat dalam Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarananya adalah :

- **Upaya penguatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberian ketrampilan kepada masyarakat dan pemberian pinjaman modal usaha bagi masyarakat.**

Tabel 4.41 Arahan Rendahnya Kapasitas Masyarakat Dalam Peningkatan Lingkungan

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Rendahnya Kapasitas Masyarakat Dalam Peningkatan Lingkungan		
Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk) (Kode T6.15) <i>“... Ya misalnya kegiatan-kegiatan ataupun program yang ada di lingkungan ini diberikan dengan sifatnya itu dana pancangan. Maksudnya adalah, tidak murni semua dana yang dipakai dalam kegiatan tersebut adalah dana dari pemerintah. Misalnya di lingkungan ini ingin ada kegiatan perbaikan jalan dengan nilai seharga 10 juta, nah dana yang dari pemerintah itu hanya 75% nya, sedangkan yang 25% itu harus ditarik dari swadaya masyarakat, nah itu namanya pancangan supaya masyarakat juga mau terlibat ... masyarakat dengan begitu secara tidak langsung diajak untuk turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan”</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pemberian Kegiatan Dengan </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Faktor Rendahnya Kapasitas Masyarakat Dalam Peningkatan Lingkungan </div>
Stakeholder 2 (Ketua RW 01) (Kode T7.21) <i>“... Nah pembangunan infrastruktur lainnya, seperti jembatan, rumah belajar, MCK atau lainnya, kan masyarakat tidak punya cukup biaya tetapi mereka punya semangat, itu makanya setiap kegiatan membuat infrastuktur atau memperbaikinya, sebaiknya itu pengerjaannya dilakkan secara bersama-sama, kenapa? tujuannya ya sederhana saja, bagaimana agar masyarakat diantara sesama masyarakat itu agar ada komunikasi, masyarakat turun bersama-sama, nanti mereka akan timbul rasa memiliki karena menurut saya kebersamaan</i>		

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
<p><i>adalah modal dasar yang sangat besar ditengah-tengah masyarakat, apapun bisa kita lakukan ketika kebersamaan itu ada, ciptakan kebersamaan itu ...”</i></p>	<div data-bbox="1498 499 1789 652" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pelibatan Masyarakat disetiap Tahapan </div>	
<p>Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan)</p>		
<p>(Kode T8.19) <i>“.. Ya itu dengan melakukan pendampingan masyarakat dari kita, pendampingan masyarakat dalam hal Tridaya tadi. Nah masyarakat itu perlu dilibatkan, bukan hanya dalam pelaksanaannya saja diminta tenaga nya saja, tetapi juga dalam hal perencanaan, bahkan sampai monitoring dan juga evaluasi program yang ada, itu harus, kan sekarang itu harus sistemnya bottom up...”</i></p>		
<p>Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)</p>		
<p>(Kode T9.13) <i>“...hanya stimulan itu sifatnya, katakanlah kalau ingin bangun jalan atau saluran, kita hanya stimulan itu, katakan misalnya dananya 5 juta, ya dari kita berapa gitu, nah sisanya masyarakat sendiri yang nambahin, supaya terpancing juga masyarakatnya ...”</i></p>		
<p>Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)</p> <p>(Kode T10.21) <i>“... ada hal yang sangat penting menurut saya adalah kelibatan masyarakatnya bukan hanya dalam pelaksanaannya saja, tau-tau masyarakat itu disuruh bantuin tetapi juga saat merencanakannya, libatkan itu masyarakat bagaimana pendapat mereka, keinginan mereka, rangkul lah masyarakatnya itu. Kan supaya kegiatan itu juga bisa berjalan efektif juga ...”</i></p>		
Arahan		
<p>Dari hasil dari tahapan <i>categorization</i> diatas, didapatkan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perumusan arahan terkait rendahnya kapasitas masyarakat dalam peningkatan Lingkungan. Berdasarkan analisis terhadap faktor yang menjadi penyebab terbentuknya kualitas lingkungan yang rendah di Kelurahan Kapuk salah satunya adalah karena Rendahnya kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan baik itu secara swadaya maupun dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan perbaikan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dilakukan dengan :</p> <p>1. Pemberian kegiatan dengan sistem dana stimulan</p> <p>Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan analisis faktor penyebab kekumuhan akibat faktor rendahnya kapasitas masyarakat tersebut, diketahui bahwa peran serta masyarakat dalam kegiatan terkait perbaikan lingkungan secara swadaya, mereka umumnya hanya berkapasitas dalam perbaikan mikro saja, terutama dalam hal pendanaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh salah satu responden yang dalam kutipannya menyatakan “...mereka kurang mampu ya, ya masih mengandalkan dari pihak lain, seperti pemerintah...” maka dari itu diperlukan suatu upaya yang sifatnya memancing swadaya masyarakat tersebut seperti misalnya dengan pemberian bantuan dana stimulan. Dalam hal ini bantuan yang diberikan dalam suatu kegiatan tidaklah sepenuhnya berasal dari pemerintah, pemerintah hanya memberikan sebagiannya saja, sedangkan sebagiannya lagi merupakan tanggung jawab masyarakat secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan dapat menjadikan pancingan agar masyarakat dapat memberikan kontribusi lebih terhadap suatu kegiatan perbaikan lingkungan yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan permukimannya.</p>		

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
<p>2. Pelibatan masyarakat disetiap tahapan kegiatan/program Melihat pada pembahasan dalam analisis faktor penyebab kekumuhan yang telah dilakukan, diketahui bahwa peran serta ataupun pelibatan masyarakat dalam sebuah program ataupun kegiatan peningkatan lingkungan yang ada di wilayah studi, terutama dalam hal pemikiran umumnya hanya pada saat perencanaan, yaitu melalui musrenbangkel, sedangkan pada tahapan selanjutnya umumnya masyarakat sudah tidak dilibatkan. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu upaya pelibatan masyarakat disetiap proses kegiatan, seperti yang diterapkan dalam konsep <i>monitoring & evaluation participation</i> (MEP), dimana dalam konsep tersebut, masyarakat dilibatkan baik itu dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan partisipatif, monitoring hingga evaluasi partisipatif, sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap suatu program sehingga keinginan masyarakat untuk merawat apa yang sudah dilakukan juga akan lebih besar karena mereka merasa dilibatkan.</p> <p>Berdasarkan pemaparan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Rendahnya Kapasitas Masyarakat dalam Peningkatan Lingkungan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Kegiatan Dengan Sistem Dana Stimulan • Pelibatan Masyarakat disetiap Tahapan Kegiatan/Program 		

Tabel 4.42 Arahan Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sub Category (Kutipan Transkrip)	Generic Category (Penginterpretasian hasil kutipan)	Main Category
Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat		
<p>Stakeholder 1 (Ketua LMK Kelurahan Kapuk) (Kode T6.16) <i>“... supaya pendapat masyarakat bisa lebih baik jadi mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi supaya nantinya juga mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, tidak jadi pegawai pabrik lagi, ya salah satunya ya melalui peningkatan sumberdaya manusianya, gimana caranya masyarakat itu punya keahlian lainnya supaya mereka punya sumber ekonomi tambahan juga ..”</i></p>	<div data-bbox="1503 991 1794 1145" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Memberikan Pendidikan Informal</p> </div>	<div data-bbox="1839 903 2033 1297" style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat</p> </div>
<p>Stakeholder 2 (Ketua RW 01) (Kode T7.20) <i>“... Ya diantaranya ya itu mungkin bisa dengan membangun rumah belajar ya supaya ada wadah buat mereka lah, seperti ini (menunjuk ke arah rumah belajar) ini diberikan oleh yayasan, mungkin pemerintah dengan swasta bisa masuk dalam hal ini berkoordinasi”</i></p>		
<p>Stakeholder 3 (Kasi Perencanaan Teknis Perumahan & Permukiman Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintahan) (Kode T8.21) <i>“Nah, kalau masalah rendahnya pendidikan kan memang pemerintah itu saat ini hanya mampu memeberikan pendidikan gratis kepada masyarakat sampai tingkat SMA saja, maka dari itu perlu ada siasat lain, seperti mengadakan pendidikan informal itu kepada masyarakatnya”</i></p>		

(Kode T8.22) <i>“Ya berikan itu masyarakat pelatihan-pelatihan ataupun ketrampilan, seperti misalnya tataboga buat ibu-ibunya, bengkel itu buat bapak-bapaknya, atau komputer buat anak-anaknya, supaya mereka punya keahlian lain yang dapat menjadi nilai plus begitu”</i>		
Stakeholder 4 (Kepala Kelurahan Kapuk)		
(Kode T9.15) <i>“... Ya seperti yang saya bilang itu tadi ya, kembali lagi ke peningkatan ketrampilan masyarakatnya, ya SDM masyarakatnya supaya bisa lebih bagus lagi kalau itu dapat di manage dengan baik bisa berjalan secara komprehensif ya kan diharapkan bisa memperbaiki kualitas masyarakatnya kan. ya diberikan ketrampilan melalui BLK itu tadi salah satunya, memberikan ketrampilan kepada masyarakat, ya pendidikan ekstrakurikuler lah istilahnya ...”</i>		
Stakeholder 5 (Pengurus Koperasi Kredit (Credit Union) Pelita)		
(Kode T10.8) <i>“... Selain itu beri juga semacam pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat untuk terampil dalam pemupukan ...”</i>		
(Kode T10.20) <i>“Ya itu memang ya, seperti tadi tadi dengan melakukan pendidikan informal, semacam pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyarakat ...”</i>		
(Kode T10.22) <i>“Program Jokowi itu yang KJP (Kartu Jakarta Pintar) itu menarik ya, dari SD, SMP dan SMA gratis, itu perlu terus dilakukan. tetapi perlu juga dilakukan dengan memperhatikan pendidikan yang informal juga, kayak dengan mengadakan rumah-rumah kreatif, karena kan pendidikan-pendidikan umum itu tidak cukup untuk membuat orang dapat bekerja secara langsung, butuh juga pendidikan-pendidikan informal ...”</i>		
(Kode T10.23) <i>“Iya, tetapi juga bukan hanya diberikan pelatihan, juga dilengkapi dengan sarananya, pendampingan dan melakukan pengorganisasian ...”</i>		
Arahan		
<p>Berdasarkan hasil dari tahapan <i>categorization</i> diatas, didapatkan upaya yang dapat dilakukan dalam perumusan arahan terkait rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah studi, berikut penjelasannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Pendidikan Informal <p>Berdasarkan pada pembahasan mengenai identifikasi karakteristik masyarakat Kelurahan Kapuk yang telah dilakukan, diketahui bahwa umumnya masyarakat memiliki jenjang pendidikan formal yang tidak cukup tinggi, terutama di permukiman kumuh kategori berat dimana mayoritas masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan hanya pada tingkat tamat SD (34%). Maka diperlukan adanya suatu upaya untuk mengimbangi kondisi tersebut, yaitu dengan melakukan pemberian pendidikan secara informal kepada masyarakat, misalnya melalui pemberian pelatihan-pelatihan teknik dan manajerial, serta keterampilan-keterampilan yang aplikatif sesuai dengan minat ataupun potensi masyarakat yang ada. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat dapat memiliki keahlian lainnya yang dapat diterapkan sehingga dapat berdampak pada perbaikan kualitas hidup mereka pula.</p> <p>Berdasarkan pemaparan diatas, maka arahan yang dilakukan terkait dengan faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Pendidikan Informal Kepada Masyarakat. 		

Berdasarkan penjabaran diatas, berikut merupakan hasil ringkasan arahan yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.43 Ringkasan Abstraksi Arahan dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Studi

Faktor	Arahan
Pertambahan Jumlah Penduduk Pendatang	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan dan Penetapan Kebijakan Mengenai Persyaratan Minimal bagi Penduduk Pendatang Yang Akan Masuk dan Menetap di wilayah studi • Pengurusan Administrasi Penduduk Pendatang Yang Telah Berada di Wilayah Studi Terutama Masyarakat Yang Tinggal di Permukiman Kumuh Ringan • Penertiban bagi masyarakat yang tidak memenuhi administrasi untuk kemudian dapat dikembalikan ke daerah asalnya
Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah Bagi Masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun rumah susun bagi masyarakat • Membangun <i>Landed House</i> dengan konsep <i>Kampung Branding</i> • Membangun <i>Mes</i> atau <i>Cluster</i> bagi masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pabrik atau buruh terutama di lingkungan permukiman kumuh ringan
Kurangnya penyediaan Prasarana Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Lahan Sebagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara • Penyediaan sarana persampahan berupa tong sampah terutama di lingkungan permukiman kumuh sedang dan berat • Penerapan Konsep Bank Sampah berbasis masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah Jakarta Barat • Membuat Produk Kreatif Daur Ulang Sampah oleh Masyarakat
Kurang Layaknya Penyediaan Prasarana Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan kondisi MCK masyarakat • Pembangunan Sanitasi Komunal bagi masyarakat
Faktor Kurang Maksimalnya Kinerja Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoptimalan Fungsi Saluran Air Secara Komprehensif, baik itu saluran primer, sekunder hingga tersier. • Pengadaan Rumah Pompa Air di permukiman kumuh

Faktor	Arahan
Drianase	<ul style="list-style-type: none"> berat Pengadaan dan Pengoperasian RPH Modern dan juga IPAL Perusahaan di permukiman kumuh ringan
Faktor Jenis Pekerjaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penerapan Konsep Tridaya dimana didalamnya terdapat kegiatan Bina Ekonomi dan Bina Usaha kepada masyarakat berupa pemberian pelatihan atau ketrampilan teknik dan manajerial kepada masyarakat, pemberian pelatihan kewirausahaan, penerapan konsep bank sampah, dan melakukan pengembangan bisnis berbasis lokal.
Faktor Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Upaya diversifikasi dan intensifikasi terkait pekerjaan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerapan konsep Bank Sampah, dan juga peminjaman modal usaha berbunga rendah.
Faktor Rendahnya Keinginan Masyarakat Dalam Memelihara Lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi melalui Pendekatan Masyarakat Ketegasan pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait sampah Mengubah <i>mindset</i> masyarakat terkait sampah melalui kegiatan pemanfaatan sampah
Faktor Rendahnya Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Upaya penguatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberian ketrampilan kepada masyarakat dan pemberian pinjaman modal usaha bagi masyarakat.
Faktor Rendahnya Kapasitas Masyarakat Dalam Peningkatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Kegiatan Dengan Sistem Dana Stimulan Pelibatan Masyarakat disetiap Tahapan Kegiatan/Program
Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan Pendidikan Informal Kepada Masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Melihat pada tabel **4.42** dapat diketahui arahan umum yang dapat diimplementasikan pada keseluruhan kategori atau tingkat permukiman kumuh yang terdapat di wilayah studi (ringan, sedang, berat), namun adapula beberapa arahan yang secara khusus atau diutamakan untuk dapat diimplementasikan pada kategori permukiman kumuh tertentu. Untuk arahan secara umum yang digunakan pada keseluruhan kategori adalah :

- Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan faktor banyaknya pertambahan jumlah penduduk pendatang adalah perumusan dan penetapan kebijakan mengenai persyaratan minimal bagi penduduk pendatang yang akan masuk dan menetap di wilayah studi dan penertiban bagi masyarakat yang tidak memenuhi administrasi untuk kemudian dapat dikembalikan ke daerah asalnya
- Untuk mengatasi permasalahan terkait faktor kurangnya penyediaan perumahan yang layak oleh pemerintah bagi masyarakat miskin adalah dengan membangun rumah susun bagi masyarakat dan juga membangun *Landed House* dengan konsep Kampung *Branding*
- Untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya penyediaan sarana persampahan adalah penyediaan lahan sebagai tempat pembuangan sampah sementara, penerapan konsep bank sampah berbasis masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah Jakarta Barat, membuat produk kreatif daur ulang sampah oleh masyarakat
- Upaya untuk mengatasi permasalahan terkait faktor kurang layaknya penyediaan prasarana sanitasi dalah dengan cara pembenahan kondisi MCK masyarakat, pembangunan sanitasi komunal bagi masyarakat.
- Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan faktor kurang maksimalnya kinerja prasarana drainase adalah dengan cara

pengoptimalan fungsi saluran air secara komprehensif, baik itu saluran primer, sekunder hingga tersier.

- Upaya terkait permasalahan faktor jenis pekerjaan masyarakat adalah dengan cara pengembangan dan penerapan Konsep Tridaya dimana didalamnya terdapat kegiatan Bina Ekonomi dan Bina Usaha kepada masyarakat berupa pemberian pelatihan atau ketrampilan teknik dan manajerial kepada masyarakat, pemberian pelatihan kewirausahaan, penerapan konsep bank sampah, dan melakukan pengembangan bisnis berbasis lokal.
- Untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan upaya diversifikasi dan intensifikasi terkait pekerjaan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerapan konsep Bank Sampah, dan juga peminjaman modal usaha berbunga rendah.
- Upaya terkait permasalahan rendahnya keinginan masyarakat dalam memelihara lingkungannya adalah dengan cara sosialisasi melalui pendekatan masyarakat, ketegasan pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait sampah, mengubah *mindset* masyarakat terkait sampah melalui kegiatan pemanfaatan sampah
- Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan faktor rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjangkau sarana dan prasarana adalah dengan upaya penguatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberian ketrampilan kepada masyarakat dan pemberian pinjaman modal usaha bagi masyarakat
- Untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan adalah dengan cara pemberian kegiatan dengan sistem dana stimulan dan pelibatan masyarakat disetiap tahapan kegiatan/program
- Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat adalah dengan cara pemberian pendidikan informal kepada masyarakat.

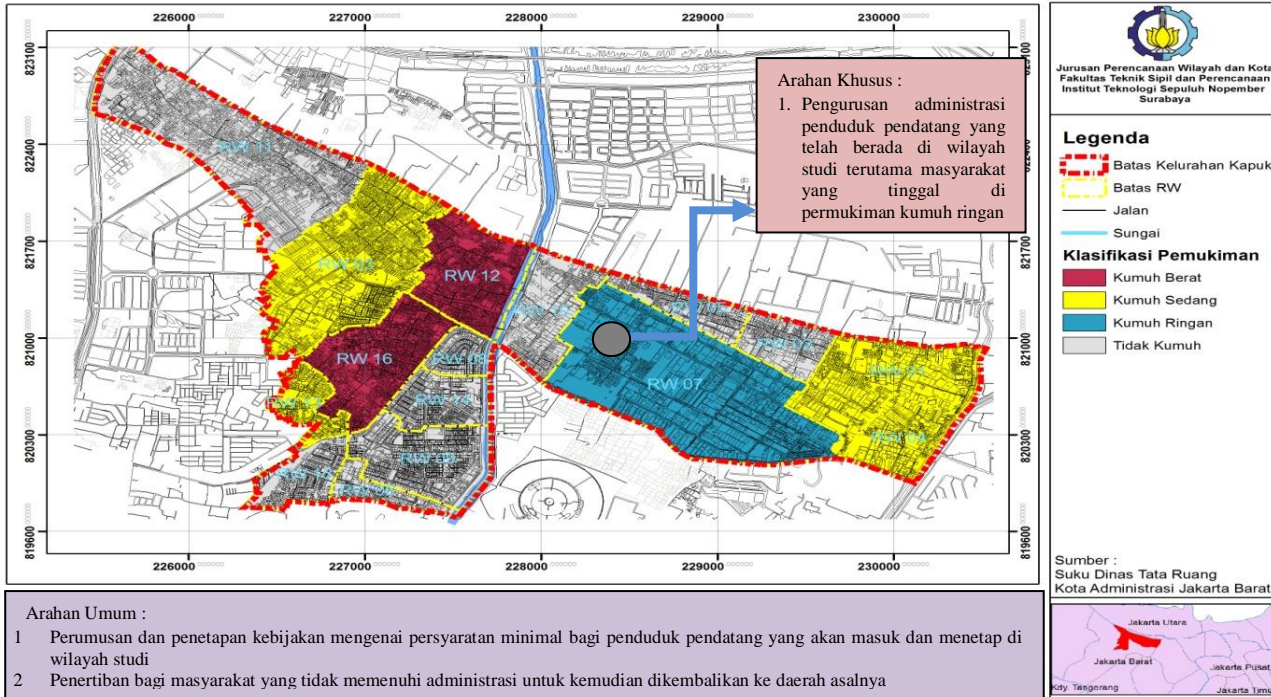
Sedangkan untuk arahan khusus yang secara khusus ataupun diutamakan untuk dapat diimplementasikan pada kategori permukiman kumuh tertentu, adalah sebagai berikut :

- Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan faktor banyaknya penambahan jumlah penduduk pendatang adalah dengan pengurusan administrasi penduduk pendatang yang telah berada di wilayah studi terutama masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ringan
- Upaya terkait permasalahan kurangnya penyediaan perumahan yang layak oleh pemerintah adalah dengan cara membangun *mess* atau *cluster* bagi masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pabrik atau buruh terutama di lingkungan permukiman kumuh ringan
- Upaya terkait dengan kurangnya penyediaan sarana persampahan yaitu dengan cara penyediaan sarana persampahan berupa tong sampah terutama di lingkungan permukiman kumuh sedang dan berat
- Upaya terkait permasalahan kurang maksimalnya kinerja prasarana drainase adalah dengan cara pengadaan rumah pompa air di permukiman kumuh berat dan pengadaan dan pengoperasian RPH modern dan juga IPAL Perusahaan di permukiman kumuh ringan

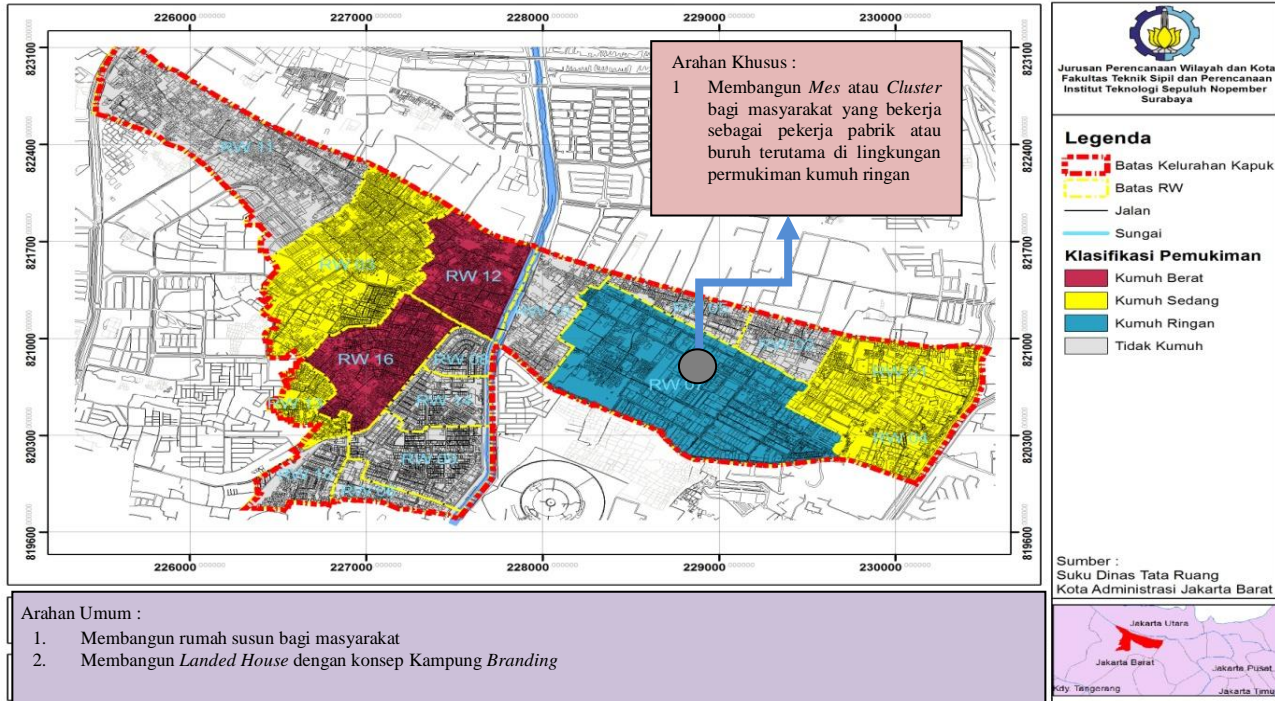
Untuk memudahkan pemahaman, dapat dilihat pada peta arahan yang disajikan pada gambar berikut ini.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

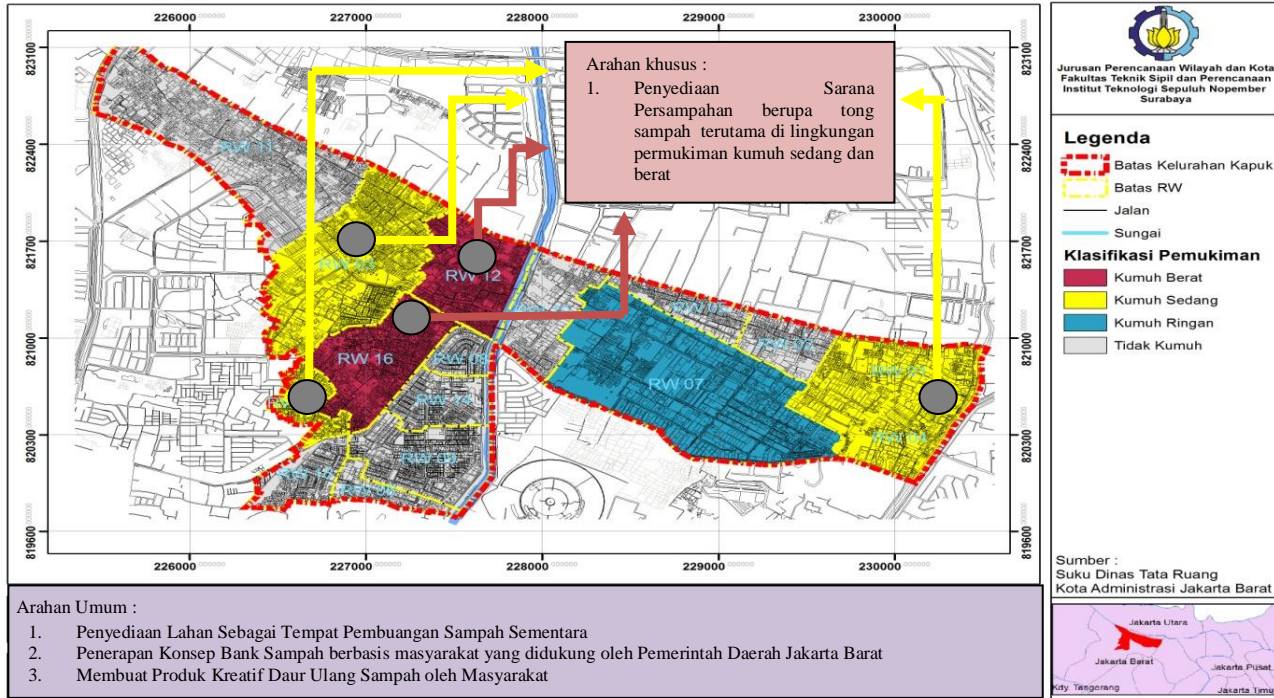
Gambar 4.82 Peta Arahan Faktor Pertambahan Jumlah Penduduk Pendatang



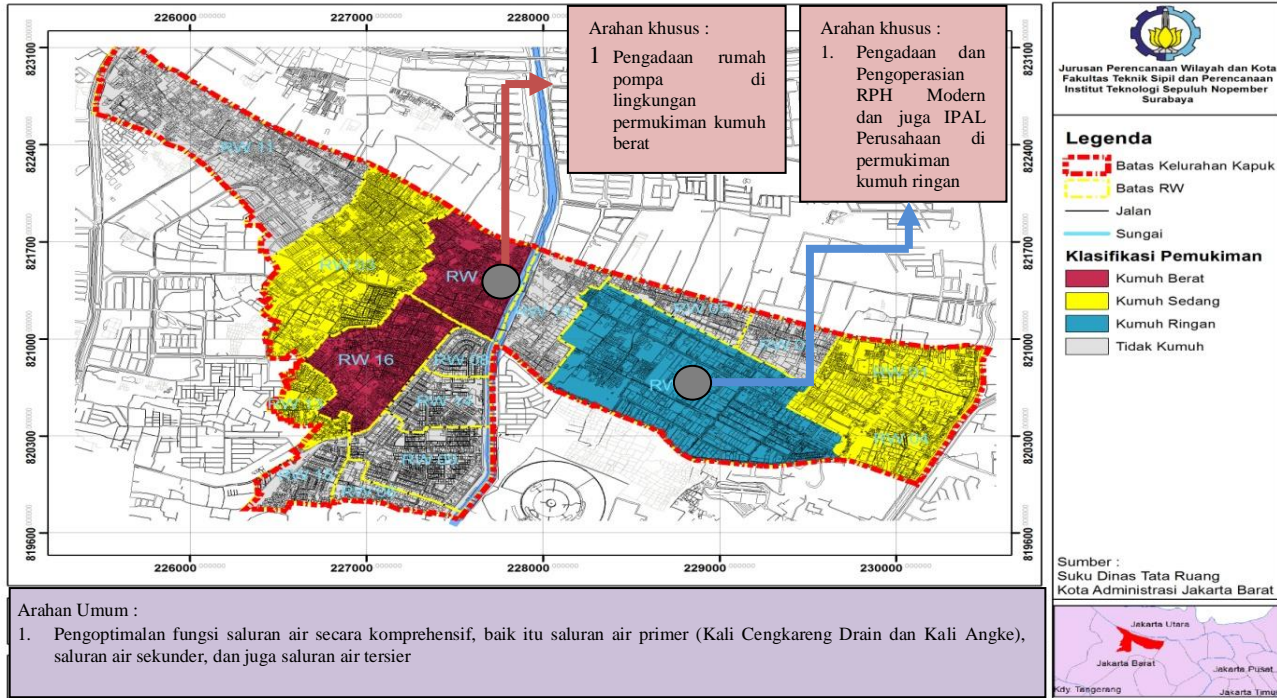
Gambar 4.83 Peta Arahan Faktor Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah



Gambar 4.84 Kurangnya Penyediaan Sarana Persampahan



Gambar 4.85 Peta Arahan Faktor Kurang Maksimalnya Kinerja Prasarana Drainase



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kelurahan Kapuk merupakan suatu wilayah dimana mengacu pada dokumen Direktori RW Kumuh 2011 dalam *Evaluasi RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011* adalah salah satu wilayah dimana didalamnya terdapat RW-RW yang dinyatakan kumuh (*slum area*), dengan tipologi kumuh ringan, sedang bahkan berat. Maka dari itu perlu adanya suatu arahan guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang terdapat di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, didapatkan karakteristik lingkungan permukiman kumuh yang terdapat di wilayah penelitian dilihat dari aspek sarana dan prasarana, fisik, sosial, ekonomi dan juga bahaya (*hazard*).

a. Aspek sarana dan prasarana

Umumnya lingkungan permukiman kumuh ringan memiliki kondisi pemenuhan sarana dan prasarana yang cukup baik dibandingkan dengan permukiman kumuh sedang dan berat, seperti penyediaan prasarana dan sarana jalan, air bersih dan persampahan. Sedangkan untuk penyediaan prasarana drainase dan juga sanitasi umumnya masih kurang baik untuk diketiga kategori permukiman tersebut.

Untuk penyediaan prasarana saluran air, buruknya kondisi prasarana tersebut di lingkungan permukiman kumuh ringan lebih disebabkan karena saluran air tersebut tercemar oleh limbah yang berasal dari pabrik dan juga RPH yang ada disekitarnya, sedangkan di lingkungan permukiman kumuh sedang dan berat lebih diakibatkan karena banyaknya tumpukan sampah yang memenuhi saluran air yang ada.

Sedangkan untuk kondisi sanitasi diketiga kategori permukiman yang ada, sebagian sudah terdapat MCK maupun kamar mandi didalamnya, namun masih ada pula masyarakat yang menggunakan MCK ataupun kamar mandi bersama

karena mengingat banyaknya masyarakat pendatang terutama di lingkungan permukiman kumuh ringan, dan umumnya kondisi dari penyediaan sanitasi baik di permukiman kumuh ringan, sedang, dan berat tersebut kurang layak dan kotor.

b. Fisik

Kondisi fisik bangunan permukiman masyarakat baik itu di permukiman kumuh ringan, sedang maupun berat mayoritas merupakan bangunan semi permanen

c. Sosial

Untuk kondisi sosial, mayoritas masyarakat di lingkungan permukiman kumuh ringan merupakan masyarakat pendatang dan belum memiliki KTP Jakarta. Sedangkan untuk masyarakat permukiman kumuh sedang cukup berimbang antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli, dan untuk masyarakat permukiman kumuh berat sama dengan permukiman kumuh ringan, umumnya juga merupakan masyarakat pendatang, hanya saja umumnya masyarakat di lingkungan tersebut sudah memiliki KTP Jakarta, ini dikarenakan sebagian besar dari pendatang tersebut telah cukup lama menetap di wilayah tersebut.

Untuk alasan masyarakat bermukim di lingkungan permukiman kumuh ringan karena adanya kedekatan dengan lokasi bekerja, sedangkan untuk masyarakat di permukiman kumuh sedang dan juga berat lebih karena harganya yang murah dan terjangkau oleh mereka.

Tingkat pendidikan masyarakat di lingkungan pemukiman kumuh ringan dan sedang sedikit cukup baik dibandingkan dengan permukiman kategori berat, yaitu hingga tamat SMP/ sederajat, dimana pada permukiman kumuh berat umumnya mereka hanya sampai pada tingkat tamat SD/ sederajat. Namun untuk tingkat kekerabatan umumnya kegiatan kemasyarakatan yang dimiliki masyarakat di lingkungan kumuh berat lebih beragam dibandingkan dengan kategori permukiman kumuh ringan dan juga sedang.

d. Ekonomi

Jenis pekerjaan mayoritas masyarakat permukiman kumuh ringan adalah bekerja sebagai buruh, sedangkan untuk masyarakat permukiman kumuh sedang dan berat sebagian besar bekerja sebagai pedagang, namun di lingkungan permukiman kumuh berat, banyak pula masyarakatnya yang memiliki mata pencaharian serabutan. Untuk tingkat pendapatan, umumnya masyarakat di permukiman kumuh ringan dan sedang sedikit lebih baik kondisinya dibandingkan dengan kategori permukiman kumuh berat..

e. Bahaya (*Hazard*)

Lingkungan permukiman di wilayah studi merupakan daerah rawan banjir, namun ketinggian genangan yang terjadi di permukiman kumuh ringan dan sedang tergolong cukup rendah dibandingkan dengan lingkungan permukiman kategori berat, yaitu berkisar antara 25 cm – 50 cm, dimana pada lingkungan kumuh berat berkisar antara 50 cm – 1 m.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, yaitu :

- a. Faktor Pertambahan Jumlah Penduduk Pendatang
- b. Faktor Kurangnya Penyediaan Perumahan Yang Layak Oleh Pemerintah Bagi Masyarakat Miskin
- c. Faktor Kurangnya Penyediaan Prasarana Persampahan
- d. Faktor Kurang Layaknya Penyediaan Prasarana Sanitasi
- e. Faktor Kurang Maksimalnya Kinerja Prasarana Drainase
- f. Faktor Jenis Pekerjaan Masyarakat
- g. Faktor Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat
- h. Faktor Rendahnya Keinginan Masyarakat Memelihara Lingkungannya
- i. Faktor Rendahnya Kemampuan Masyarakat Menjangkau Kebutuhan Sarana dan Prasarana
- j. Faktor Rendahnya Kapasitas Masyarakat Dalam Peningkatan Lingkungan
- k. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sedangkan untuk arahan yang digunakan terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di wilayah studi adalah :

1. Arahan penanganan masalah terkait pertambahan jumlah penduduk pendatang meliputi : Penetapan kebijakan mengenai persyaratan minimal bagi penduduk pendatang, pengurusan administrasi penduduk pendatang terutama masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ringan, dan penertiban bagi masyarakat yang tidak memenuhi administrasi untuk kemudian dapat dikembalikan ke daerah asalnya
2. Arahan penanganan terkait masalah kurangnya penyediaan perumahan yang layak oleh pemerintah bagi masyarakat, diantaranya adalah dengan cara membangun rumah susun, membangun *Landed House* dengan konsep *Kampung Branding*, dan membangun *mess* atau *cluster* bagi masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pabrik atau buruh
3. Upaya terkait kurangnya penyediaan prasarana persampahan adalah dengan penyediaan lahan yang resmi dari Sudin Kebersihan Jakarta Barat sebagai tempat pembuangan sampah sementara, penyediaan sarana persampahan, penerapan konsep bank sampah berbasis masyarakat, dan membuat produk kreatif daur ulang sampah oleh masyarakat.
4. Upaya terkait kurang layaknya penyediaan prasarana sanitasi dilakukan dengan cara membenah kondisi MCK dan kamar mandi masyarakat, dan pembangunan sanitasi komunal bagi masyarakat.
5. Upaya terkait kurang maksimalnya kinerja prasarana drainase adalah dengan cara pengoptimalan fungsi saluran air secara komprehensif, pengadaan rumah pompa air, pembangunan dan pengoperasian RPH Modern dan juga IPAL perusahaan

6. Arahan terkait jenis pekerjaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengembangan dan penerapan **Konsep Tridaya, dengan melakukan kegiatan bina** ekonomi dan **usaha** melalui pemberian pelatihan-pelatihan atau keterampilan teknik dan manajerial kepada masyarakat, pemberian pelatihan kewirausahaan, penerapan konsep bank sampah, dan melakukan pengembangan bisnis berbasis lokal
7. Arahan terkait masalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat adalah melalui upaya diversifikasi dan intensifikasi terkait pekerjaan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerapan dan pengorganisasian konsep bank sampah, dan juga peminjaman modal usaha berbunga rendah.
8. Upaya terkait rendahnya keinginan masyarakat memelihara lingkungannya adalah melalui sosialisasi melalui pendekatan masyarakat, ketegasan pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait sampah, dan mengubah *mindset* masyarakat terkait sampah melalui kegiatan pemanfaatan sampah.
9. Upaya terkait rendahnya kemampuan masyarakat menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana dengan cara penguatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberian keterampilan kepada masyarakat, dan pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat. Ini dilakukan karena terdapat korelasi antara kemampuan masyarakat tersebut dengan kondisi ekonomi yang dimilikinya.
10. Upaya terkait rendahnya kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan yaitu dengan pemberian kegiatan dengan sistem dana stimulan, dan pelibatan masyarakat disetiap tahapan kegiatan/program
11. Upaya terkait rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dengan memberikan pendidikan informal kepada masyarakat.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait hasil studi dalam penelitian ini adalah

1. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai aspek *social capital* yang digunakan dalam penelitian agar hasil penelitian yang didapatkan dapat berbasis kekuatan lokal.
2. Perlu adanya kajian mengenai keefektifan dan juga optimalisasi program-program yang diberikan oleh pemerintah di wilayah studi. Selain itu, dalam pengambilan dan pemutusan suatu program hendaknya dilakukan secara sistematis dan juga konsisten, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat didalamnya hal ini guna menghasilkan kesepahaman dan juga keberlanjutan suatu program. Selain itu, berbagai program yang diberikan tersebut hendaknya juga dapat melatih kemandirian masyarakat, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi agar dapat memperbaiki pola kehidupan masyarakat.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan studi selanjutnya dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan pula keikutsertaan ataupun partisipasi masyarakat yang ada di wilayah studi agar hasil penelitian yang dilakukan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Ike. 2013. *Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya*. Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1 Nomor 1 Januari 2013. ISSN 2303 – 34IX
- Basri, Hasyim et al, 2010, *Model Penanganan Permukiman Kumuh Studi Kasus Permukiman Kumuh Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*. Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
- Budiharjo, Eko. 2005. *Tata Ruang Perkotaan*, PT Alumni, Bandung
- Butar, Debora Catherine. 2012. Tugas Akhir. *Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Bianpoen, 1991. *Menata Kota dan Permukiman Kumuh*. JHS, No1. PAU-IS-UI. Jakarta:Gramedia.
- Chang, Tina. 2009. *Improving Slum Conditions with Public-Private Partnership*. Panorama. Vol 10, No.1, pp.35-57
- Evaluasi RW Kumuh Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, 2011.
- Elo, S and Kyngas, H. 2008. *The Qualitative Content Analysis Process*. Blackwell Publishing Ltd. Journal of Advanced Nursing 62(1), 107-115.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Martadwiprani, Hesti. 2013. Tugas Akhir. *Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Pemberdayaan*

- Ekonomi Masyarakat Dalam Konsep Minapolitan Di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.* Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
- Masrun, L. (2009). *Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh.*
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat.* Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,* Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Silas, Johan (1985). *Perumahan dan Permukiman.* Surabaya: Arsitektur, FTSP-ITS Surabaya
- Sudriamunawar, Haryono. 2006. *Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas.* Mandar Maju. Bandung
- Supriharjo, Rimadewi et al, 2013, *Diktat Metodologi Penelitian,* Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
- Sutami, 2009. Tesis. *Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara.* Universitas Diponegoro, Semarang
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian.* Bina Reana Pariwara. Jakarta.
- Tools to Support Participatory Urban Decision Making.* United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS Habitat). 2001
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Yulianti, (2006). Tesis. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Permasalahan Di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjung Pinang Timur.* Universitas Diponegoro, Semarang.

Lampiran I

KUESIONER KARAKTERISTIK PERMUKIMAN

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya selaku mahasiswa program Sarjana (S-1) Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sedang mengadakan penelitian sebagai syarat kelulusan dalam penyusunan Tugas Akhir (TA). Penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk menghasilkan Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya memohon bantuan Bapak/Ibu agar bersedia menjawab beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lingkungan Bapak/Ibu agar dapat mengetahui karakteristik permukiman di Kelurahan Kapuk. Setiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan sangat membantu dalam penelitian ini. Terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat saya,

Niken Fitria.

3610 1000 29

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin : L / P

Usia : tahun

A. Data Kondisi Sarana dan Prasarana

1. Dari mana sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari rumah tangga Bapak/Ibu ?
 - a. PDAM
 - b. Penjual air keliling
 - c. Sumur timba/ sumur pompa
 - d. Lainnya.....
2. Bagaimana kondisi air bersih yang Bapak/Ibu gunakan ?
 - a. Jernih, tidak berbau, tidak berasa
 - b. Keruh, berbau, berasa
3. Apakah di rumah Bapak/Ibu tersedia kamar mandi ?
 - a. Ya (jika ya, lanjut ke no.5)
 - b. Tidak
4. Jika tidak bagaimana Bapak/Ibu memenuhi kebutuhan tersebut ?
Sebutkan.....
5. Apakah di rumah Bapak/Ibu tersedia WC ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Jika tidak, bagaimana Bapak/Ibu memenuhi kebutuhan tersebut ?
 - a. Jamban umum
 - b. Jamban bersama
 - c. Lainnya.....
7. Apakah tersedia tong sampah di rumah Bapak/Ibu ?
 - a. Ada
 - b. Tidak (jika tidak, lanjut ke no.10)
8. Apakah terdapat petugas kebersihan di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu ?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada

9. Apakah petugas kebersihan secara rutin mengambil sampah di rumah Bapak/Ibu ?
 - a. Tidak tentu
 - b. Rutin (Sebutkan.....)
10. Jika tidak tersedia tong sampah, bagaimana Bapak/Ibu membuang sampah ?
 - a. Dibakar
 - b. Ditimbun di lahan kosong
 - c. Dibuang di kali/sungai
 - d. Lainnya.....
11. Bagaimana kondisi saluran got di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu ?
 - a. Tidak ada
 - b. Ada, tidak berfungsi dengan baik
 - c. Ada, berfungsi dengan baik
12. Bagaimana kondisi jalan di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu ?
 - a. Diperkeras (aspal/paving), kondisinya terawatt
 - b. Diperkeras (aspal/paving), kondisinya ada yng rusak
 - c. Berupa jalan tanah
13. Apakah di tempat tinggal Ibu/Bapak terdapat penerangan jalan umum ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
14. Jika iya, bagaimana kondisinya ?
 - a. Berfungsi dengan baik dan terawat
 - b. Berfungsi dengan baik, namun tidak terawat
 - c. Tidak berfungsi dengan baik dan tidak terawat
 - d. Lainnya.....

B. Data Kondisi Fisik

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu beserta keluarga tinggal di permukiman ini ?

Sebutkan : Bulan/tahun

2. Jenis konstruksi rumah :

- **Atap** :

a. Genteng b. Seng c. Asbes

d. Lainnya.....

- **Lantai**

a. Keramik b. Semen c. Tanah

d. Lainnya.....

- **Dinding**

a. Tembok b. Papan c. ½ tembok - ½ papan

d. Lainnya.....

- **Ventilasi rumah**

a. Jendela, sebanyak.....

b. Tidak ada

C. DATA KONDISI SOSIAL

1. Pendidikan formal terakhir yang Bapak/Ibu peroleh

a. Tidak sekolah

b. Tidak tamat SD/ sederajat

c. Tamat SD/ sederajat

d. Tidak tamat SMP/ sederajat

e. Tamat SMP/ sederajat

f. Tidak tamat SMA/ sederajat

g. Tamat SMA sederajat

h. Tidak tamat perguruan tinggi

i. Tamat perguruan tinggi

2. Apakah pekerjaan utama Bapak/Ibu ?
 - a. Tidak bekerja
 - b. Tidak tetap, sebutkan.....
3. Status kependudukan yng dimiliki Bapak/Ibu ?
 - a. KTP Musiman
 - b. Tidak memiliki KTP
 - c. KTP Daerah Asal
 - d. KTP Jakarta
4. Asal daerah Bapak/Ibu ?
 - a. Asli Jakarta
 - b. Luar Jakarta (Sebutkan.....)
5. Apakah alasan Bapak/Ibu memilih bertempat tinggal disini ?
 - a. Dekat dengan lokasi bekerja
 - b. Murah dan harganya terjangkau
 - c. Fasilitas air bersih, listrik dan jalan tersedia dengan baik
 - d. Mudah dijangkau dengan angkutan umum
 - e. Lainnya (Sebutkan.....)
6. Berapakah jumlah anggota keluarga yang terdapat dirumah Bapak/Ibu ?
 Sebutkan : orang
7. Berapa ukuran rumah yang Bapak/Ibu beserta keluarga tempati sekarang ?
 Ukuran/Luas Tanah :m²
 Ukuran/Luas Bangunan :m²
8. Apakah di lingkungan Bapak/Ibu terdapat kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

9. Jika ya, kegiatan apa yang terdapat dilingkungan Bapak/Ibu ?
 - a. PKK
 - b. Kerja Bakti
 - c. Arisan
 - d. Lainnya.....

D. DATA ASPEK KEPEMILIKAN

1. Bagaimanakah status kepemilikan rumah Bapak/Ibu ?
 - a. Milik sendiri
 - b. Kontrak/sewa
 - c. Lainnya.....
2. Apakah Bapak/Ibu memiliki surat atas tanah yang Bapak/Ibu tempati ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Jika ya, bagaimana status lahan yang Bapak/Ibu miliki ?
 - a. Hak milik
 - b. Hak Guna Usaha
 - c. Hak Guna Bangunan
 - d. Hak Pakai Tanah
 - e. Lainnya.....

E. DATA EKONOMI

1. Apakah mata pencaharian Kepala Keluarga ?
 - a. Tidak Bekerja
 - b. Pegawai Swasta
 - c. Pegawai Negeri
 - d. Pedagang
 - e. Buruh
 - f. Lainnya.....
2. Berapa pendapatan Kepala Keluarga?

- Sebutkan : Rp(per bulan)
3. Berapa jumlah anggota keluarga yang memiliki pendapatan selain kepala keluarga : Orang, sebutkan :
 - a. Rp (per bulan)
 - b. Rp (per bulan)
 - c. Rp (per bulan)
 4. Berapakah rata-rata pendapatan total rumah tangga Bapak/Ibu setiap bulannya ?
 - a. Kurang dari Rp. 500.000
 - b. Antara Rp. 500.000 s/d 1.000.000
 - c. Antara Rp. 1.000.000 s/d 1.500.000
 - d. Antara Rp. 1.500.000 s/d 2.000.000
 - e. Antara Rp. 2.000.000 s/d 2.500.000
 - f. Lebih dari Rp. 2.500.000 (Sebutkan :)
 5. Apa saja bentuk pengeluaran yang rumah tangga Bapak/Ibu lakukan ?
 - a. Rumah (kontrak/sewa/pajak/perawatan)
Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 - b. Makan : Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 - c. Sekolah : Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 - d. Pakaian : Rp(per hari/bulan/tahun)
 - e. Transportasi : Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 - f. Air Bersih : Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 - g. Listrik : Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 - h. Kesehatan : Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 - i. Hiburan : Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 - j. Tabungan : Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 - k. Lainnya : Rp.....(per hari/bulan/tahun)
 6. Berapa pengeluaran total rumah tangga Bapak/Ibu setiap bulannya ?

- a. Kurang dari Rp. 500.000,-
- b. Antara Rp 500.000,- s/d Rp. 1.000.000
- c. Antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000
- d. Antara Rp 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000
- e. Antara Rp 2.000.000,- s/d Rp. 2.500.000
- f. Lebih dari Rp. 2.500.000,- (Sebutkan :.....)

F. DATA BAHAYA (HAZARD)

1. Apakah tempat tinggal Bapak/Ibu sering terkena banjir ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika ya, seberapa sering tempat tinggal Bapak/Ibu terkena banjir tersebut ?
 - a. Setiap 5 tahun
 - b. Setiap tahun
 - c. Lainnya.....
3. Biasanya berapa lama banjir tersebut menggenangi tempat tinggal Bapak/Ibu ?
 - a. Seminggu
 - b. Sehari
 - c. Lainnya.....
4. Berapa ketinggian rata-rata banjir tersebut ?
 - a. > 1 meter
 - b. 50 cm – 1 meter
 - c. 25 cm – 50 cm
 - d. 5 cm – 25 cm
 - e. < 5 cm

Lampiran II

LAMPIRAN ANALISIS STAKEHOLDER

Kelompok Stakeholders	Interest Stakeholders Terhadap Peningkatan Lingkungan Kumuh Di Kelurahan Kapuk	Dampak yang Diperoleh Berdasarkan Interest (+) 0 (-)	Tingkat Pengaruh Stakeholder Terhadap Peningkatan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk 1 : Kecil/Tidak Berpengaruh 2 : Cukup Berpengaruh 3 : Berpengaruh 4 : Sangat Berpengaruh 5 : Sangat Berpengaruh Sekali	Tingkat Kepentingan Stakeholder Terhadap Peningkatan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk 1 : Kecil/Tidak Ada Kepentingan 2 : Cukup Penting 3 : Penting 4 : Sangat Penting 5 : Sangat Penting
Pemerintah				
Bappeda Prov. DKI Jakarta	- Merumuskan kebijakan umum perencanaan pembangunan dan pengendalian	+	5	4

	<ul style="list-style-type: none"> permukiman - Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan - Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dengan merumuskan rencana tata ruang dimana didalamnya terdapat rencana untuk pengembangan permukiman 			
Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penanganan pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah Jakarta Barat - Melaksanakan program perbaikan kampung dalam sektor perumahan, 	+	5	5

	termasuk di Kelurahan Kapuk - Menyusun Program Kampung Deret di Kelurahan Kapuk			
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	- Merencanakan dan menyusun program di bidang permukiman beserta sarana dan prasarana penunjangnya	+	4	4
Pemerintah Kecamatan Cengkareng	- Mengkoordinasikan dan mengawasi perencanaan dan pembangunan permukiman di Kecamatan Cengkareng	+	3	3
Pemerintah Kelurahan	- Mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi perencanaan serta pembangunan permukiman di	+	5	5

	Kelurahan Kapuk			
Kelompok Masyarakat				
Lembaga Musyawarah Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Mitra kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. - Mengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dimana didalamnya fokus terhadap bidang sosial dan fisik 	+	5	5
Ketua RW	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada masyarakat - Menyebarkan 	+	5	5

	informasi program kepada masyarakat			
Private Sector				
Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pinjaman modal kepada anggota masyarakat dengan bunga yang layak - Memberikan Pinjaman Dana Bergulir - Memberikan pendidikan, pelatihan dan pelayanan keuangan kepada anggota masyarakat.. 	+	5	5

Tingkat Pengaruh Stakeholder		Tingkat Kepentingan Stakeholder				
		Tidak Ada Kepentingan	Cukup Penting	Penting	Sangat Penting	Sangat Penting Sekali
		1	2	3	4	5
Tidak Ada Pengaruh	1					
Cukup Berpengaruh	2			- Pemerintah Kec. Cengkareng		
Berpengaruh	3					
Sangat Berpengaruh	4				- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
Sangat Berpengaruh Sekali	5				- Bappeda Prov. DKI Jakarta	- Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Pemerintah Kelurahan Kapuk - Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) - Ketua RW - Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita

Berdasarkan hasil analisis *stakeholder* yang dilakukan, didapatkan *stakeholder* yang merupakan *critical player* dalam penelitian ini. *Stakeholder* yang merupakan *critical player* adalah *stakeholder* yang memiliki tingkat pengaruh sangat berpengaruh sekali dan tingkat kepentingan sangat penting sekali. *Stakeholder* yang akan mendapatkan peran penting dalam konsensus pakar dalam menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya kekumuhan dan juga rumusan arahan di Kelurahan Kapuk adalah terdiri dari :

A. Pemerintah

1. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta
2. Kepala Kelurahan Kapuk

B. Kelompok Masyarakat

1. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
2. Ketua RW

C. Private Sector

1. Koperasi Kredit (*Credit Union*) Pelita

Lampiran III

Lampiran Screener IDI Analisis Konten Sasaran 2 dan Sasaran 3

Setelah didapatkan instansi ataupun pihak-pihak yang berkompetensi dan terlibat dalam kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk melalui analisis *stakeholder* yang telah dilakukan sebelumnya. Maka langkah selanjutnya adalah penentuan responden dengan menggunakan *screener* IDI (*In Depth Interview*) ini. Screener ini digunakan agar responden yang ditanyakan merupakan individu yang benar-benar paham terhadap fokus diskusi dan juga wilayah penelitian dan juga tepat sasaran. *Critical player* yang didapatkan dalam analisis *stakeholder* sebelumnya adalah :

Kelompok <i>Stakeholder</i>	<i>Critical Player</i>
Pemerintah	Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Barat
	Pemerintah Kelurahan Kapuk
Masyarakat	Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
	Ketua RW
Private	Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita

5 IDI maximum 2 jam

Lokasi : Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat

Kriteria responden :

1. Laki-laki atau wanita
2. Usia 25 – 60 tahun

Kriteria responden :

a. 2 IDI Pemerintah

- Merupakan perwakilan dari Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Barat/ dan Pihak dari Kelurahan Kapuk
- Memahami wilayah penelitian
- Mengetahui tujuan peningkatan lingkungan permukiman kumuh
- Mengetahui ciri khas/karakteristik kawasan permukiman kumuh
- Pernah melakukan pendampingan terhadap program terkait peningkatan lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk.

b. 2 IDI Pihak Kelompok Masyarakat

- Merupakan perwakilan dari masyarakat di kelurahan kapuk
- Mengetahui kondisi wilayah penelitian dengan baik
- Telah menetap di Kelurahan Kapuk minimal 20 tahun
- Mengetahui tujuan peningkatan lingkungan permukiman kumuh
- Mengetahui ciri khas/karakteristik kawasan permukiman kumuh
- Merupakan tokoh masyarakat dan pernah dilibatkan dalam program terkait peningkatan lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk

c. 1 IDI Private Sector

- Merupakan perwakilan dari pihak Koperasi Kredit (*Credit Union*) Pelita
- Mengetahui tujuan peningkatan lingkungan permukiman kumuh
- Mengetahui ciri khas/karakteristik kawasan permukiman kumuh

- Telah tergabung selama minimal 5 tahun
- Pernah melaksanakan atau mengelola keuangan anggota masyarakat

Naskah pertanyaan

(catatan: interviewer boleh melakukan improvisasi pada bahasa dengan syarat substansi dan tahapan pertanyaan harus tetap sesuai pedoman naskah).

“Selamat (pagi/siang/sore/malam), nama saya Niken Fitria dari ITS Surabaya. Dalam waktu dekat saya, akan mengadakan wawancara mengenai pendapat stakeholder untuk suatu topik dan sekarang saya sedang mencari responden yang sekiranya bersedia untuk terlibat dalam wawancara tersebut. Mohon diingat bahwa kami tidak berniat menjual apapun dan setiap informasi yang kami kumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja”.

Q1a. Jenis Kelamin(Observasi)

Laki-laki	1	LANJUTKAN UNTUK SEGMENT A, SEGMENT B, SEGMENT C
Perempuan	2	LANJUTKAN UNTUK SEGMENT A, SEGMENT B, SEGMENT C

Q1b. Hanya untuk tujuan klasifikasi tolong sebutkan umur anda (SA)

Umur	Kode (Q1c)	KETERANGAN
15 – 17 tahun	1	STOP & TK
18-24 tahun	2	STOP & TK
25-35 tahun	3	LANJUTKAN HANYA UNTUK GROUP 3, 4, 5, 6 DAN 7
36 – 45 tahun	4	LANJUTKAN
46 -60 tahun	5	LANJUTKAN

Di atas 60 tahun	6	STOP & TK
Tidak tahu/tidak mau menjawab	7	STOP & TK

Q1c. Apakah pendidikan terakhir yang Anda selesaikan?

Tidak tamat SD	1	STOP & TK
SD	2	LANJUTKAN
SMP	3	LANJUTKAN
SMA	4	LANJUTKAN
Diploma	5	LANJUTKAN
Sarjana atau Pasca Sarjana	6	

Q2. Dapatkah Anda menjelaskan pekerjaan anda saat ini ?

	SA	
Pelajar	1	STOP & TK
Mahasiswa	2	STOP & TK
Pegawai Sudin DPGP	3	LANJUTKAN
Pegawai Kelurahan Kapuk	4	LANJUTKAN
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)	5	LANJUTKAN
Ketua RW		LANJUTKAN
Koperasi Kredit (<i>Credit Union</i>) Pelita	6	LANJUTKAN
Ibu Rumah Tangga	7	STOP & TK
Pengangguran	8	STOP & TK

INTERVIEWER

Segmen Pemerintah :

- a. Rekrut 1 responden Sudin DPGP
- b. Rekrut 1 responden Kelurahan Kapuk

Segmen Kelompok Masyarakat :

- a. Rekrut 1 responden kelompok masyarakat dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
- b. Rekrut 1 responden Ketua RW

Segmen *Private Sector* :

- a. Koperasi Kredit (*Credit Union*) Pelita

Q3a. Menurut Anda apakah permukiman kumuh itu?

	Kode (Q4)	Keterangan
Saya tidak pernah dengar sama sekali tentang kawasan permukiman kumuh dan tidak tahu apa itu	1	STOP & TK
Saya pernah dengar mengenai kawasan permukiman kumuh tapi tidak tahu itu apa dan tidak tahu apakah wilayah Kelurahan Kapuk termasuk kawasan permukiman kumuh atau tidak	2	STOP & TK
Saya pernah dengar mengenai kawasan permukiman kumuh dan saya tahu apa itu, tapi saya tidak tahu apakah daerah Kelurahan Kapuk termasuk termasuk kawasan permukiman kumuh	3	LANJUTKAN UNTUK SEGMENT C
Saya pernah dengar kalau daerah Kelurahan Kapuk termasuk kawasan permukiman kumuh, tetapi saya tidak tahu menahu apa maksudnya	4	LANJUTKAN
Saya tahu mengenai kawasan permukiman Kelurahan Kapuk dan mengerti maksudnya		LANJUTKAN
Saya ikut berpartisipasi dalam upaya peningkatan lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk	5	LANJUTKAN
Tidak mau menjawab/Tidak tahu	6	STOP & TK

Q3b. Apa pengertian peningkatan lingkungan menurut Anda ?

Saya mengetahui pengertian dari peningkatan lingkungan permukiman kumuh walaupun sedikit	1	Lanjut untuk segmen B & C
Saya cukup mengerti mengenai maksud dari peningkatan lingkungan	2	Lanjut untuk segmen B & C

permukiman kumuh		
Saya sangat mengetahui mengenai pengertian dari peningkatan lingkungan permukiman kumuh	3	Lanjut untuk segmen A
Saya tidak mengetahui pengertian peningkatan lingkungan	4	Stop dan TK

Q3c. Apa ciri khas/karakteristik kawasan permukiman kumuh menurut Anda ?

Saya hanya mengetahui sedikit tentang karakteristik/ciri khas kawasan permukiman kumuh	1	Lanjut untuk segmen B & C
Saya cukup mengetahui dan paham tentang karakteristik/ciri khas kawasan permukiman kumuh	2	Lanjut untuk segmen B & C
Saya sangat mengetahui dan paham tentang karakteristik/ciri khas kawasan permukiman kumuh	3	Lanjut untuk segmen A
Saya tidak mengetahui tentang karakteristik/ciri khas kawasan permukiman kumuh	4	Stop dan TK

TANYAKAN HANYA UNTUK SEGMENT PEMERINTAH

Q4a. Apakah anda pernah terlibat dalam pendampingan/sosialisasi program peningkatan lingkungan di Kelurahan Kapuk?

YA		LANJUTKAN
TIDAK	2	STOP & TK

Q4b. Berapa lama anda telah terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan peningkatan lingkungan di Kelurahan Kapuk ?

Lebih dari 1 tahun		LANJUTKAN ke Q5
TIDAK	2	STOP & TK

TANYAKAN HANYA UNTUK SEGMENT PERWAKILAN KELOMPOK MASYARAKAT

Q5a. Apakah anda pernah dilibatkan dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan peningkatan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Kapuk?

YA		LANJUTKAN
TIDAK	2	STOP & TK

Q5b. Berapa kali anda telah terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan peningkatan lingkungan di Kelurahan Kapuk ?

Lebih dari 1 kali		LANJUTKAN ke Q6
Tidak pernah	2	STOP & TK

Q5c. Berapa lama Anda telah tinggal di kawasan permukiman ini ?

1-5 tahun	1	STOP & TK
6-10 tahun	2	STOP & TK
> 20 tahun	3	LANJUTKAN

TANYAKAN HANYA UNTUK SEGMENT *PRIVATE SECTOR*

Q6a. Apakah anda mengetahui mengenai keberadaan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk ?

YA		LANJUTKAN
TIDAK	2	STOP & TK

Q6b. Apakah anda pernah memberikan bantuan keuangan kepada anggota masyarakat di permukiman kumuh tersebut?

YA		LANJUTKAN
TIDAK	2	STOP & TK

Q6c. Apakah anda pernah turun langsung ke lokasi permukiman kumuh tersebut untuk memberikan bantuan ?

YA		LANJUTKAN
TIDAK	2	STOP & TK
YA		LANJUTKAN
TIDAK	2	STOP & TK

Q6d. Berapa lama anda tergabung dalam lembaga keuangan tersebut ?

➤ 5 Tahun		LANJUTKAN
< 5 Tahun	2	STOP & TK

Lampiran IV

Data Karakteristik Permukiman Kumuh Rendah

a. Sarana dan Prasarana

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Sarana dan Prasarana							
			Air	Sanitasi		Sampah	Drainase	Jalan	PJU	
				Kamar mandi	WC				Ketersediaan PJU	Kondisi PJU
Suyotno	L	42	2	Kamar mandi bersama	2	1	1	1	1	2
Hasri	L	39	1	1	1	2	2	1	1	1
Tugiyono	L	41	2	1	1	3	2	1	2	-
Wiranto	L	43	1	1	1	1	2	3	2	-
Asih	P	38	3	1	3	3	3	1	1	2
Wasiman	L	36	1	Kamar mandi bersama	3	1	2	2	1	2
Apit	L	55	2	Kamar mandi bersama	2	3	2	1	1	2
Nuryono	P	45	1	1	1	1	1	2	2	-

b. Fisik dan Sosial

Nama	Fisik			Sosial							
	Konstruksi bangunan			Pendidikan	Status Kependudukan	Asal	Alasan memilih hunian	Jumlah Anggota	Ukuran rumah m ²	Lama tinggal	Tingkat kekerabatan
	Atap	Lantai	Dinding								
Suyotno	2	1	3	4	4	1	3	5 org	30	7 tahun	2
Hasri	3	1	1	5	4	1	1	3 org	35	6 tahun	2
Tugiyono	3	1	3	5	3	Kebumen	1	4 org	28	5 tahun	2
Wiranto	1	2	3	3	3	Cilacap	4	2 org	48	1 tahun	1
Asih	3	2	2	4	3	Majalengka	2	5 org	28	2 tahun	1
Wasiman	3	3	2	5	3	Tegal	1	4 org	24	3 tahun	2
Apit	1	2	3	2	3	Brebes	2	1 org	12	1 bulan	1
Nuryono	3	2	Asbes dan seng	3	4	1	1	6 org	18	10 tahun	2

c. Status Kepemilikan, Ekonomi dan Kerentanan

Nama	Status Kepemilikan	Ekonomi			Kerentanan		
	Status Kepemilikan Bangunan	Jenis Pekerjaan	Pendapatan Total Rumah Tangga	Terdapat Banjir/Genangan	Intensitas Bnajir	Lama Banjir	Ketinggian Banjir
Suyotno	2	5	5	1	Setiap Hujan	2	2
Hasri	1	4	3	1	2	2	3
Tugiyono	1	5	5	1	1	2-3 hari	3
Wiranto	2	Wiraswasta	6	1	2	2	3
Asih	2	4	5	1	2	2	3
Wasiman	2	5	5	1	2	2	4
Apit	2	Serabutan	1	1	2	2	3
Nuryono	1	Tukang jagal	4	2	-	-	-

Data Karakteristik Permukiman Kumuh Berat

a. Sarana dan Prasarana

RW 12										
Nama	Jenis Kelamin	Usia	Sarana dan Prasarana							
			Air	Sanitasi	WC	Sampah	Drainase	Jalan	PJU	Kondisi PJU
				Ketersediaan Kamar Mandi					Ketersediaan PJU	Kondisi PJU
Beny	L	40	1	Kamar mandi bersama	1	Tong sampah bersama	2	1	1	3
Adam	L	32	1	1	1	2	2	1	1	2
Maemunah	P	40	1	1	1	2	1	1	2	-
Suarsih	P	33	1	1	3	4	1	1	2	-
Sri Alfiah	P	49	3	Kamar mandi bersama	1	3	1	2	2	-
Sudirman	L	55	1	1	2	3	2	2	2	-
Sriyanti	P	49	2	Kamar mandi bersama	3	3	2	2	2	-
Wahidah	P	41	2	1	1	3	1	1	2	-

Maya	P	22	2	Kamar mandi bersama	3	4	1	3	2	-
Suyatnah	P	40	1	1	1	3	2	2	1	2
Sugiono. P	L	49	1	1	3	4	2	1	2	-
Misbah	L	61	2	1	2	2	2	2	2	-
Ntik	P	39	2	Kamar mandi bersama	1	4	2	1	2	-
Lina	P	30	1	1	3	4	2	3	2	-
Sri Daryani	P	37	2	1	1	3	1	2	1	2
Onah	P	46	1	Kamar mandi bersama	1	2	2	2	2	-
Suhadi	L	60	2	1	3	4	2	1	2	-
Masriah	P	39	3	1	1	2	2	2	2	-
Muhimin Sani	L	46	1	1	2	4	2	1	2	-
Mu'in	L	50	2	Kamar mandi bersama	3	3	1	3	2	-
Suparni	P	65	1	1	2	Tong sampah bersama	3	1	2	-
Sarjiman	L	54	2	Kamar mandi bersama	3	3	1	2	2	-
Sudrajat	L	47	2	1	2	Tong sampah bersama	1	1	2	-
RW 16										
Rohman	L	43	1	1	3	2	3	1	1	2
Maya	P	31	1	1	2	4	2	2	2	-
Ayhan	L	37	1	Kamar mandi bersama	2	3	2	1	1	2
Muhimin	L	40	1	1	1	3	1	2	2	-
Wahyuni	P	41	2	1	1	3	2	1	1	1
Maman	L	38	1	1	2	1	1	2	2	-
Suyoto	L	42	1	Kamar mandi bersama	2	3	2	1	2	-
Beni	L	57	2	1	1	2	3	1	1	2
Kunatci	P	48	1	1	1	3	2	2	1	2
Ending Suryono	L	50	1	1	2	1	1	1	2	-
Eni suhaeti	P	48	2	Kamar mandi bersama	1	5	1	2	2	-
Hasri	L	53	2	Kamar mandi bersama	2	3	2	1	2	-
Hasyim	L	45	1	1	1	2	2	1	1	2
Suryo	L	47	1	1	2	2	1	2	2	-
Wirman Ali	L	48	1	1	1	2	2	1	2	-
Suyati	P	60	1	1	2	2	2	1	1	2
Sri. W	P	39	3	1	1	2	1	1	2	-
Roni. S	L	48	1	1	1	3	1	1	1	2

Basri	L	53	3	1	2	2	2	1	1	2
Haryadi	L	40	2	1	1	3	2	1	2	-
Yusiman. H	L	45	1	Kamar mandi bersama	2	3	1	1	2	-
Wagiman	L	43	1	Kamar mandi bersama	3	4	2	3	2	-

b. Fisik dan Sosial

RW 12											
Nama	Fisik			Sosial							
	Konstruksi bangunan			Pendidikan	Status Kependudukan	Asal	Alasan memilih hunian	Jumlah Anggota	Ukuran rumah m ²	Lama tinggal	Tingkat kekerabatan
	Atap	Lantai	Dinding								
Beny	3	1	1	6	4	1	1	4 org	40	40 tahun	2
Adam	3	1	3	3	4	1	1	5 org	30	30 tahun	2
Maemunah	3	2	3	2	4	1	Karena dari lahir	7 org	36	40 tahun	1
Suarsih	3	2	3	3	4	Banten	2	4 org	12	11 tahun	2
Sri Alfiah	3	2	3	3	4	Jombang	1	4 org	28	30 tahun	1
Sudirman	3	1	3	5	4	Brebes	2	2 org	75	25 tahun	2
Sriyanti	2	2	3	2	4	1	Karena dari lahir	11 org	50	34 tahun	3
Wahidah	3	2	3	2	4	1	1	3 org	12	34 tahun	3
Maya	2	2	3	5	4	Banten	2	10 org	24	3 tahun	1
Suyatnah	3	1	1	3	2	Brebes	2	7 org	21	8 tahun	2
Sugiono. P	3	1	3	5	4	Kudus	2	4 org	18	19 tahun	2
Misbah	3	1	3	2	4	Kebumen	2	8 org	35	23 tahun	Pengajian
Ntik	3	2	3	3	4	Sukabumi	2	5 org	8	30 tahun	3
Lina	2	3	3	5	4	1	1	5 org	9	8 tahun	3
Sri Daryani	2	2	3	2	4	Cilacap	2	8 org	42	10 tahun	1
Onah	3	1	1	4	3	Kuningan	Pemberian orang tua	5 org	32	40 tahun	1
Suhadi	3	1	3	3	4	Tegal	2	3 org	8	32 tahun	2
Masriah	3	2	3	4	2	1	2	5 org	24	12 tahun	Pengajian
Muhimin Sani	3	2	3	3	2	Blora	2	8 org	30	13 tahun	1
Mu'in	3	1	3	2	4	1	1	7 org	48	14 tahun	3

Suparni	3	2	1	3	4	Purworejo	2	4 org	50	12 tahun	Pengajian
Sarjiman	2	2	3	3	2	Cepu	2	7 org	28	23 tahun	2
Sudrajat	2	2	3	2	4	Cianjur	1	8 org	35	19 tahun	1
RW 16											
Rohman	3	1	1	7	4	Semarang	2	5 org	72	13 tahun	1
Maya	3	2	1	5	4	1	Karena dari kecil	4 org	40	20 tahun	2
Ayhan	3	3	1	3	4	1	1	5 org	28	15 tahun	2
Muhimin	3	3	1	3	4	1	1	6 org	24	23 tahun	2
Wahyuni	3	Semen dan kayu	1	4	4	Jateng	2	8 org	40	8 tahun	1
Maman	3	2	2	3	4	1	Pemberian orang tua	8 org	30	20 tahun	3
Suyoto	1	1	1	9	4	Semarang	2	5 org	60	11 tahun	2
Beni	3	1	1	5	4	Semarang	2	4 org	56	29 tahun	2
Kunatci	1	3	1	3	4	Kuningan	1	7 org	32	29 tahun	1
Ending Suryono	3	kayu	1	7	4	Kebumen	2	4 org	32	26 tahun	Pengajian
Eni suhaeti	3	3	3	5	4	Banten	2	3 org	30	30 tahun	3
Hasri	3	2	3	5	4	Solo	2	8 org	30	24 tahun	1
Hasyim	1	1	1	7	4	Malang	4	5 org	80	14 tahun	1
Suryo	Genteng dan asbes	2	3	3	4	Semarang	2	6 org	24	18 tahun	2
Wirman Ali	3	2	3	3	4	Jateng	2	7 org	24	21 tahun	2
Suyati	3	2	3	4	4	Jogja	2	5 org	20	32 tahun	2
Sri. W	3	2	3	2	4	Semarang	2	5 org	21	12 tahun	2
Roni. S	1	1	1	7	4	Medan	2	6 org	63	11 tahun	2
Basri	1	1	1	7	4	Solo	2	7 org	80	21 tahun	1
Haryadi	Asbes dan genteng	2	2	5	4	Kudus	1	7 org	35	14 tahun	Pengajian
Yusiman. H	3	Semen dan kayu	2	5	4	Banten	1	7 org	20	15 tahun	3
Wagiman	Asbes dan Genteng	2	3	4	4	Kebumen	2	8 org	20	19 tahun	2

c. Status Kepemilikan, Ekonomi dan Kerentanan

RW 12							
Nama	Status Kepemilikan	Ekonomi			Kerentanan		
	Status Kepemilikan Bangunan	Jenis Pekerjaan	Pendapatan total rumah tangga	Terdapat Banjir/Genangan	Intensitas Bnajir	Lama Banjir	Ketinggian Banjir
Beny	1	Wiraswasta	4	2	2	2	2
Adam	Atas nama orang tua	5	4	1	Setiap hujan	2 hari	2
Maemunah	1	1	3	1	2	2	3
Suarsih	2	5	3	1	2	2	3
Sri Alfiah	Atas nama orang tua	bantu-bantu di kantor RW	3	1	2	2	2
Sudirman	1	Usaha kontrakan	3	1	2	2	4
Sriyanti	1	PRT	6	1	2	2	3
Wahidah	2	4	3	1	2	2	3
Maya	1	PRT	6	1	2	2	2
Suyatnah	1	PRT	5	1	Setiap hujan	2 hari	3
Sugiono. P	1	4	3	1	Setiap hujan	2-3 hari	2
Misbah	1	1	4	1	Setiap hujan	2-3 hari	3
Ntik	Atas nama orang tua	5	2	1	2	2	2
Lina	1	Tukang sapu	2	1	2	2-3 hari	2
Sri Daryani	1	5	6	1	2	2	3
Onah	1	5	2	1	1	2	3
Suhadi	2	1	3	1	1	2	3
Masriah	1	PRT	4	1	2	2-3 hari	2
Muhimin Sani	1	Kuli bangunan	3	1	2	2-3 hari	2
Mu'in	2	Serabutan	3	1	2	2	3
Suparni	1	1	4	1	2	2	4
Sarjiman	1	Tukang sapu	2	1	2	1	1
Sudrajat	1	Supir	3	1	2	1	1
RW 16							
Rohman	1	2	6	1	2	2-3 hari	2
Maya	Atas nama orang tua	IRT	5	1	2	2-3 hari	2
Ayhan	2	5	5	1	2	2	2

Muhimin	2	Supir truk	5	1	2	1	1
Wahyuni	1	4	6	1	2	1	2
Maman	Atas nama orang tua	5	5	1	Setiap hujan	1	1
Suyoto	1	Supir	6	1	2	2	3
Beni	1	4	5	1	2	2	3
Kunatci	1	Guru ngaji	5	1	2	3 hari	1
Ending Suryono	1	Supir	5	1	2	2	2
Eni suhaeti	1	Tukang cetak sablon	1	1	2	2	2
Hasri	1	4	3	1	2	2	3
Hasyim	1	2	6	1	Setiap hujan	2-3 hari	2
Suryo	2	Tukang tambal	2	1	Setiap hujan	2-3 hari	1
Wirman Ali	1	Tukang las	3	1	Setiap hujan	2-3 hari	2
Suyati	1	4	5	1	2	3 hari	1
Sri. W	1	5	4	1	2	2-3 hari	2
Roni. S	1	4	6	1	2	2	2
Basri	1	3	6	1	2	2	3
Haryadi	1	5	5	1	2	3 hari	2
Yusiman. H	1	5	5	1	2	1	2
Wagiman	2	Tukang ojek	4	1	Setiap hujan	1	1

Data Karakteristik Permukiman Kumuh Sedang

a. Sarana dan Prasarana

RW 01										
Nama	Jenis Kelamin	Usia	Sarana dan Prasarana							
			Air	Sanitasi	WC	Sampah	Drainase	Jalan	PJU	Kondisi PJU
				Ketersediaan Kamar Mandi					Ketersediaan PJU	
Umar Fadillah	L	23	1	1	2	4	3	1	1	1
Rohman Priyadi	L	58	1	Kamar mandi bersama	3	4	2	1	1	1
Jaya	L	65	1	1	1	1	2	3	1	1
Gani	L	45	3	1	1	Tong sampah	1	1	1	1

						bersama				
Rinan	L	44	2	1	2	1	2	1	1	1
Ronin	L	32	1	Kamar mandi bersama	1	3	3	1	1	1
Murniati	P	42	2	Kamar mandi bersama	1	1	1	3	1	1
Poniman	L	54	1	1	1	4	2	1	1	2
Rudi	L	44	1	1	2	Tong sampah bersama	1	1	1	1
Idi	L	44	1	1	1	3	1	1	1	2
Usman	L	51	3	1	1	4	2	1	1	1
Subari	L	53	2	Kamar mandi bersama	2	Tong sampah bersama	1	1	1	2
RW 03										
Muhammad	L	47	1	1	1	4	2	1	1	2
Mardi	L	58	3	1	1	Tong sampah bersama	2	1	1	1
Abdul Rosmad	L	36	1	1	1	3	3	1	1	1
Lilis	P	40	1	Kamar mandi bersama	1	1	2	1	2	-
Kamad	L	53	1	1	1	3	2	1	1	1
Fifi Susanto	P	48	3	1	2	Tong sampah komunal	1	2	1	1
Kemisah	P	60	1	1	2	4	2	2	1	1
Lewi	L	27	2	1	1	1	3	3	1	2
Wahid	L	39	1	1	1	Ting sampah komunal	2	2	1	1
Lisna	P	33	3	1	1	4	2	3	1	2
Ihsan	L	61	2	1	1	Tong sampah komunal	2	2	1	2
Sulaiman	L	43	3	1	1	3	2	1	1	2
Restu	L	41	2	Kamar mandi bersama	2	3	2	3	1	2
Wagimin	L	48	3	1	1	3	1	2	1	2
Joko	L	39	1	1	1	4	2	1	2	-
Syahrim	L	48	1	1	3	Tong sampah komunal	2	1	2	-
Odih	L	51	1	1	1	Tong sampah komunal	2	2	1	1
Toto	L	43	1	1	2	3	2	1	1	3
Suryani asih	P	38	3	1	1	3	2	2	2	-

Djatam	L	52	3	Kamar mandi bersama	2	3	2	1	2	-
RW 04										
Tri Handayani	P	36	1	1	1	3	3	1	1	1
Upi	P	42	1	1	2	3	3	1	1	1
Nimin	L	58	2	1	1	4	3	1	1	1
Haryanto	L	33	1	1	2	4	3	2	1	2
RW 13										
Yusmandi	L	45	1	1	1	3	2	1	2	-
Nurjanah	P	39	1	1	2	2	1	3	2	-
Santi. A	P	33	1	1	1	1	3	2	1	1
Dirman	L	49	1	1	1	1	3	1	1	1
Yusuf Iman	L	46	1	1	2	3	1	1	1	1
Juhrian	L	48	3	1	1	3	1	1	2	-
Asrul Munawar	L	42	1	1	3	3	2	1	1	3
Saefulah	L	47	3	Kamar mandi bersama	1	2	2	2	2	1
Faisal	L	44	1	Kamar mandi bersama	1	1	3	2	1	1
Ajrin	L	43	2	1	2	2	2	2	1	1
Edo S	L	45	2	Kamar mandi bersama	2	2	2	2	2	-

b. Fisik dan Sosial

RW 01											
Nama	Fisik			Sosial							
	Konstruksi bangunan			Pendidikan	Status Kependudukan	Asal	Alasan memilih hunian	Jumlah Anggota	Ukuran rumah m ²	Lama tinggal	Tingkat kekerabatan
Atap	Lantai	Dinding									
Umar Fadillah	3	2	2	5	4	Brebes	1	6 org	28	4 tahun	2
Rohman Priyadi	3	1	3	5	4	1	Karena sejak lahir	3 org	54	58 tahun	2
Jaya	3	2	1	1	4	1	Karena dari lahir	4 org	48	65 tahun	2
Gani	3	2	3	3	4	1	Karena dari lahir	6 org	24	45 tahun	1
Rinan	3	2	1	9	4	1	3	4 org	40	44 tahun	2

Ronin	3	2	3	4	4	1	1	3 org	12	32 tahun	3
Murniati	Asbes dan kayu	kayu	3	4	4	Kebumen	2	5 org	24	18 tahun	3
Poniman	3	2	3	4	4	Purwokerto	1	6 org	18	25 tahun	1
Rudi	3	1	1	3	4	1	Karena sejak lahir	7 org	30	44 tahun	2
Idi	3	kayu	3	3	4	1	Karena dari lahir	5 org	42	43 tahun	2
Usman	3	1	3	3	4	Banten	1	6 org	48	30 tahun	3
Subari	3	Kayu	3	4	4	Brebes	1	4 org	30	31 tahun	2
RW 03											
Muhammad	3	2	1	7	4	1	Karena dari lahir	5 org	60	47 tahun	3
Mardi	3	2	1	5	4	Magetan	1	4 org	72	36 tahun	2
Abdul Rosmad	3	2	1	5	4	1	3	7 org	18	30 tahun	2
Lilis	3	1	3	2	4	1	Karena dari lahir	4 org	30	40 tahun	2
Kamad	1	2	3	1	4	1	Karena sejak lahir	4 org	60	53 tahun	1
Fifi Susanto	3	2	3	1	3	Medan	2	4 org	72	8 bulan	2
Kemisah	3	2	1	5	4	Jogja	1	12 org	90	15 tahun	2
Lewi	3	1	1	7	4	1	2	4 org	56	33 tahun	1
Wahid	3	2	2	5	4	Tegal	1	4 org	21	24 tahun	1
Lisna	3	1	1	7	4	1	2	4 org	28	33 tahun	3
Ihsan	3	2	2	3	4	1	2	5 org	42	40 tahun	2
Sulaiman	3	2	1	4	4	1	1	5 org	24	20 tahun	2
Restu	3	1	3	5	4	1	1	5 org	42	30 tahun	2
Wagimin	3	2	3	4	4	Purworejo	4	3 org	30	10 tahun	2
Joko	3	2	3	3	4	Jateng	2	7 org	24	21 tahun	2
Syahrin	3	2	1	7	4	Banten	4	4 org	56	18 tahun	2
Odih	3	2	2	7	4	Tasikmalaya	4	5 org	60	25 tahun	1
Toto	3	2	3	5	4	Sukabumi	2	5 org	60	16 tahun	3
Suryani asih	2	2	3	3	2	Jogja	2	5 org	36	10 tahun	2
Djatam	3	1	3	3	4	Sleman	1	5 org	35	15 tahun	1
RW 04											
Tri	3	2	1	7	4	1	1	6 org	42	36 tahun	1

Handayani												
Upi	3	2	1	7	4	1	3	5 org	48	40 tahun	2	
Nimin	3	2	2	2	4	1	4	7 org	24	50 tahun	2	
Haryanto	3	1	1	9	4	1	3	5 org	60	33 tahun	1	
RW 13												
Yusmandi	1	2	2	5	4	Jateng	1	6 org	56	21 tahun	3	
Nurjanah	Asbes dan kayu	3	3	5	4	1	2	6 org	45	12 tahun	2	
Santi. A	3	2	3	7	3	Medan	2	5 org	45	5 tahun	1	
Dirman	1	2	2	9	4	jogja	2	5 org	60	19 tahun	2	
Yusuf Iman	3	2	1	6	4	Jabar	2	6 org	54	13 tahun	2	
Juhrian	3	1	3	6	4	1	1	4 org	35	12 tahun	2	
Asrul Munawar	3	2	3	3	4	1	2	3 org	24	27 tahun	1	
Saefulah	3	2	3	5	4	Jabar	1	5 org	30	21 tahun	2	
Faisal	1	2	1	7	4	Jogja	2	4 org	60	14 tahun	2	
Ajrin	1	2	2	7	4	1	2	6 org	32	12 tahun	2	
Edo S	2	2	2	2	3	Magetan	2	5 org	40	15 tahun	1	

c. Status Kepemilikan, Ekonomi dan Kerentanan

RW 01							
Nama	Hokum	Ekonomi			Kerentanan		
	Status Kepemilikan Bangunan	Jenis Pekerjaan	Pendapatan total rumah tangga	Terdapat Banjir/Genangan	Intensitas Bnajir	Lama Banjir	Ketinggian Banjir
Umar Fadillah	1	Penjaga warteg	3	1	2	2	3
Rohman Priyadi	1	Petugas kebersihan	5	1	2	1	3
Jaya	1	Kepala kuli bongkar muat	6	1	2	2-3 hari	3
Gani	1	Kuli bangunan	2	1	Setiap hujan	Setiap hari	2
Rinan	1	4	6	1	1	2-3 hari	1

Ronin	1	5	5	1	2	2-3 hari	2
Murniati	1	Kuli bangunan	3	1	Setiap hujan	Setiap hari	3
Poniman	1	5	5	1	2	2	3
Rudi	1	Serabutan	2	1	2	2-3 hari	2
Idi	1	4	3	1	Setiap hujan	Setiap hari	2
Usman	1	5	5	1	2	2	3
Subari	1	5	5	1	Setiap hujan	Setiap hari	1
RW 03							
Muhammad	1	2	2	1	2	2	3
Mardi	2	Tukang ojek	3	1	2	2	3
Abdul Rosmad	1	4	2	1	2	2	3
Lilis	1	1	3	1	2	2	3
Kamad	1	2	3	1	1	2	3
Fifi Susanto	2	PRT	3	1	2	2	3
Kemisah	1	4	6	1	2	2	4
Lewi	1	5	3	2	-	-	-
Wahid	2	Tukang tambal ban	5	1	2	2	3
Lisna	Atas nama orang tua	4	3	1	2	2	3
Ihsan	1	4	4	1	2	2	3
Sulaiman	2	5	5	1	2	2	2
Restu	1	5	5	1	2	2	3
Wagimin	1	5	5	1	2	2	3
Joko	1	2	6	1	2	2-3 hari	2
Syahrim	1	2	5	1	2	2	3
Odih	1	3	6	1	2	2	3
Toto	2	4	5	1	2	2	3
Suryani asih	1	Tukang sapu	5	1	2	2	2
Djatam	1	5	5	1	2	2	3
RW 04							
Tri Handayani	1	2	6	1	2	2-3 hari	2
Upi	1	4	6	1	1	2-3 hari	2
Nimin	1	Serabutan	1	1	2	3 hari	3
Haryanto	1	4	5	1	2	2-3 hari	2
RW 13							
Yusmandi	1	Supir	5	1	2	2-3 hari	1
Nurjanah	1	1	5	1	2	2	2
Santi. A	1	1	5	1	2	2	4

Dirman	1	Tukang Ojek	6	1	2	2	3
Yusuf Iman	1	4	6	1	2	2-3 hari	2
Juhrian	1	5	5	1	Setiap hujan	2-3 hari	2
Asrul Munawar	1	Kuli Bongkar Muat	3	1	Setiap hujan	3 hari	3
Saefulah	1	5	5	1	2	1	3
Faisal	1	3	6	1	2	2	4
Ajrin	1	4	3	1	2	2	2
Edo S	2	4	4	1	Setiap hujan	2-3 hari	2

Keterangan :

Data Sarana dan Prasarana

a. Air

- 1 : PDAM
- 2 : Penjual Air Keliling
- 3 : Pompa air

b. Ketersediaan Kamar Mandi

- 1 : Ada

c. Ketersediaan WC/jamban

- 1 : Jamban Pribadi
- 2 : Jamban Umum
- 3 : Jamban Bersama

d. Persampahan

- 1 : Tong Sampah Pribadi
- 2 : Dibakar
- 3 : Ditimbun dilahan Kosong
- 4 : dibuang di kali/sungai

e. Drainase

- 1 : Tidak Ada
- 2 : Ada, tidak berfungsi dengan baik
- 3 : Ada, berfungsi dengan baik

f. Jalan

- 1 : Diperkeras, kondisinya terawat
- 2 : Diperkeras, kondisinya tidak terawat
- 3 : Berupa Jalan Tanah

g. Ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- 1 : Ada
- 2 : Tidak Ada

h. Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU)

- 1 : Berfungsi dengan Baik dan Terawat
- 2 : Berfungsi dengan baik, namun tidak terawat
- 3 : Tidak berfungsi dengan baik dan tidak terawat

Data Fisik dan Sosial

a. Kondisi Atap

- 1 : Genteng
- 2 : Seng
- 3 : Asbes

b. Kondisi Lantai

- 1 : Keramik
- 2 : Semen

- 3 : Tanah
- c. Kondisi Dinding**
 - 1 : Tembok
 - 2 : Papan
 - 3 : ½ tembok- ½ papan
- d. Tingkat Pendidikan**
 - 1 : Tidak Sekolah
 - 2 : Tidak Tamat SD/ sederajat
 - 3 : Tamat SD/ sederajat
 - 4. Tidak Tamat SMP/ sederajat
 - 5 :Tamat SMP/ sederajat
 - 6 : Tidak Tamat SMA/ sederajat
 - 7 : Tamat SMA/ sederajat
 - 8 : Tidak Tamat Perguruan Tinggi
 - 9 : Tamat Perguruan Tinggi
- e. Status Kependudukan**
 - 1 : KTP Musiman
 - 2 : Tidak Memiliki KTP
 - 3 : KTP Daerah Asal
 - 4 : KTP Jakarta
- f. Asal Daerah**
 - 1 : Asli Jakarta
- g. Alasan Memilih Lokasi Hunian**

- 1 : Dekat dengan lokasi bekerja
- 2 : Murah dan Harganya Terjangkau
- 3 : Fasilitas air bersih, listrik dan jalan tersedia dengan baik
- 4 : Mudah Dijangkau dengan Angkutan Umum
- h. Tingkat Keekerabatan**
 - 1 : PKK
 - 2 : Kerja Bakti
 - 3 : Arisan
- i. Jenis Pekerjaan**
 - 1 : Tidak Bekerja
 - 2 : Pegawai Swasta
 - 3 : Pegawai Negeri
 - 4 : Pedagang
 - 5 : Buruh
- j. Pendapatan Total Rumah Tangga**
 - 1 : Kurang dari Rp. 500.000
 - 2 : Antara Rp. 500.000 s/d 1.000.000
 - 3 : Antara Rp. 1.000.000 s/d 1.500.000
 - 4 : Antara Rp. 1.500.000 s/d 2.000.000
 - 5 : Antara Rp. 2.000.000 s/d 2.500.000
 - 6 : > Rp. 2.500.000

k. Terdapat Genangan/Banjir

- 1 : Ya
- 2 : Tidak

l. Intensitas Terkena Banjir/Genangan

- 1 : Setiap 5 tahun
- 2 : Setiap Tahun

m. Lama Genangan/Banjir

- 1 : Seminggu
- 2 : Sehari

n. Ketinggian Banjir/Genangan

- 1 : > 1 meter
- 2 : 50 cm – 1 meter
- 3 : 25 cm – 50 cm
- 4 : 5 cm – 25 cm
- 5 : < 5 cm

LAMPIRAN V

PEDOMAN WAWANCARA SASARAN 2

Sasaran :

Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat

Permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan yang kompleks, dimana didalamnya tidak hanya menyangkut permasalahan fisik bangunan permukiman saja yang umumnya kurang layak, tetapi juga permasalahan lainnya yang mengikutinya seperti misalnya permasalahan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya ketersediaan prasarana dasar di lingkungan permukiman mereka hingga bahaya (*hazard*) lingkungan tersebut terhadap suatu bencana, seperti banjir. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemahaman yang komprehensif dalam menanggapi permasalahan permukiman kumuh tersebut. Selain dengan mengetahui karakteristik permukiman kumuh yang terbentuk di masing-masing tingkat permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Kapuk, langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis faktor-faktor apa saja yang sebenarnya menjadi penyebab terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di kelurahan tersebut, sehingga kemudian dapat dilakukan suatu langkah ataupun upaya yang efektif dan tepat dalam peningkatan lingkungan permukiman kumuh yang ada di wilayah Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dalam wawancara ini peneliti ingin mengetahui dan juga mendapatkan masukan dari *stakeholder* untuk dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terbentuknya permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam menyusun “*Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat*”.

Nama Responden :

Jabatan :

Instansi/Lembaga :

Indikator	Variabel	Definisi Operasional	Pertanyaan Wawancara	Pertanyaan Umum
Urbanisasi	Pertambahan Jumlah Penduduk	Jumlah pertambahan penduduk pendatang yang bertempat tinggal di permukiman kumuh	1. Bagaimana kondisi penduduk di Kelurahan Kapuk menurut Bapak/Ibu, apakah banyak terdapat pendatang di wilayah tersebut? 2. Apakah keberadaan industri yang ada di wilayah Kelurahan Kapuk turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk pendatang di wilayah ini ? 3. Apakah menurut Bapak/Ibu pertumbuhan jumlah penduduk pendatang tersebut mempengaruhi lingkungan Bapak/Ibu ? 4. Apa alasan Bapak/Ibu ?	1. Bagaimana kondisi umum dari permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Kapuk ini menurut Bapak/Ibu ? 2. Apakah menurut Bapak/Ibu ada faktor penyebab lainnya yang berpengaruh terhadap terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di wilayah ini selain dari yang terdapat di list

Indikator	Variabel	Definisi Operasional	Pertanyaan Wawancara	Pertanyaan Umum
Peran Pemerintah	Penyediaan Perumahan layak	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah sudah cukup baik/belum ? 2. Menurut Bapak/Ibu adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah memberikan pengaruh terhadap kondisi lingkungan di wilayah ini ? 3. Apa alasan Bapak/Ibu ? 	<p>tersebut ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jika ya, faktor apa itu ? dan apa alasannya ?
Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Prasarana Air Bersih	Penyediaan prasarana air bersih yang memadai oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kondisi prasarana air bersih di lingkungan ini ? (baik/buruk) 2. Jika buruk, seperti apa kondisinya ? (menggunakan air sumur yang keruh, membeli dari penjual keliling, diambil dari air kali, dsb) 3. Menurut Bapak apabila sumber air bersih masyarakat tersebut menggunakan sumur/penjual air keliling/air kali, apakah hal tersebut menyebabkan lingkungan permukiman di wilayah ini menjadi terlihat kurang baik? 4. Apa alasan Bapak/Ibu ? 	
	Pemenuhan Prasarana Persampahan	Penyediaan prasarana persampahan yang memadai oleh pemerintah di lingkungan permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kondisi prasarana persampahan di lingkungan ini ? (memadai/tidak) 2. Jika tidak memadai, lalu biasanya bagaimana masyarakat tersebut membuang sampahnya ? (sampah dibuang dikali/dibuang di lahan kosong/dibuang di pinggir jalan, dsb) 3. Apakah menurut Bapak/Ibu apabila sampah-sampah tersebut dibuang di kali/lahan kosong/pinggir jalan mempengaruhi lingkungan ini ? 4. Apa alasan Bapak/Ibu ? 	
	Pemenuhan Prasarana Sanitasi	Penyediaan prasarana sanitasi yang memadai oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kondisi prasarana sanitasi di lingkungan ini ? (baik/buruk) 2. Jika buruk, seperti apa biasaya masyarakat memenuhi kebutuhan akan sanitasi tersebut ? (Buang Air Besar di kali/ sudah memiliki WC dan KM sendiri namun kondisinya jorok/ menggunakan WC dan KM umum namun kondisinya tidak terawat, dsb) 	

Indikator	Variabel	Definisi Operasional	Pertanyaan Wawancara	Pertanyaan Umum
			3. Bagaimana pendapat Bapak apabila kondisi sanitasi di wilayah ini seperti itu?	
	Pemenuhan Prasarana Saluran Drainase	Penyediaan prasarana drainase oleh pemerintah di lingkungan permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kondisi prasarana saluran air di lingkungan ini ? (baik/buruk) 2. Jika buruk, seperti apa kondisi air tersebut ? (tersumbat sampah/ tercemar,/ tidak terdapat saluran air, dsb) 3. Apakah keberadaan industri yang ada di sekitar wilayah tersebut turut mempengaruhi kondisi saluran air yang ada di Kelurahan Kapuk? 4. Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi prasarana saluran air tersebut berpengaruh terhadap kondisi lingkungan Bapak/Ibu ? 5. Apa alasan Bapak/Ibu ? 	
	Pemenuhan Prasarana Jalan	Penyediaan prasarana jalan oleh pemerintah di lingkungan permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kondisi prasarana jalan di lingkungan ini ? (baik/buruk) 2. Jika buruk, seperti apa kondisi jalan yang ada di wilayah ini ? (dari tanah/ tidak terawat, dsb) 3. Apakah menurut Bapak/Ibu kondisi prasarana jalan yang ada di lingkungan ini turut mempengaruhi lingkungan permukiman di wilayah ini? 4. Apa alasan Bapak/Ibu ? 	
Ekonomi	Jenis pekerjaan	Jenis mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mata pencaharian, bagaimana menurut Bapak/Ibu kondisi mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di lingkungan Kelurahan Kapuk ini ? 2. Apakah menurut Bapak/Ibu jenis mata pencaharian yang dimiliki masyarakat berdampak terhadap kondisi lingkungan di wilayah ini ? 3. Apa alasannya ? 	
	Tingkat Pendapatan	Jumlah pendapatan/penghasilan yang dimiliki masyarakat tiap bulannya..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan ini ? 2. Apakah menurut Bapak/Ibu jumlah pendapatan/penghasilan yang dimiliki masyarakat berdampak kepada kondisi lingkungan di permukiman ini? 3. Apa alasannya ? 	
Peran	Keinginan	Keinginan atau kesadaran	1. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat di Kelurahan	

Indikator	Variabel	Definisi Operasional	Pertanyaan Wawancara	Pertanyaan Umum
Masyarakat	masyarakat untuk memelihara lingkungan	masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan permukimannya	<p>Kapuk sudah memiliki kesadaran untuk menjaga/memelihara lingkungannya ?</p> <p>2. Jika tidak, perilaku masyarakat seperti apa yang mencerminkan kalau masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mau memelihara lingkungannya ?</p> <p>3. Apakah keinginan atau kesadaran masyarakat tersebut berpengaruh terhadap kondisi di wilayah ini ?</p> <p>4. Apa alasannya ?</p>	
	Kemampuan masyarakat menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana	Kemampuan masyarakat di lingkungan permukiman kumuh dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana dasar	<p>1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kemampuan masyarakat di lingkungan ini dalam menjangkau atau memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar mereka (pendidikan, kesehatan, sanitasi dan sebagainya) ?</p> <p>2. Apakah menurut Bapak/Ibu kemampuan masyarakat tersebut berdampak kepada kualitas lingkungan permukiman disini ?</p> <p>3. Apa alasannya ?</p>	
	Kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan	Kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan permukimannya	<p>1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat (tenaga, uang dan pemikiran) di wilayah ini dalam upaya peningkatan lingkungan permukimannya, baik itu secara swadaya maupun kapasitas mereka dalam kegiatan peningkatan lingkungan permukiman yang diberikan oleh pemerintah ?</p> <p>2. Apakah menurut Bapak/Ibu kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan permukiman mereka berpengaruh kepada lingkungan disini ?</p> <p>3. Apa alasannya ?</p>	
Sosial	Tingkat pendidikan masyarakat	Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di permukiman kumuh	<p>1. Bagaimana tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat yang bermukim di lingkungan ini ?</p> <p>2. Apakah tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut menurut Bapak/Ibu memiliki dampak kepada lingkungan di wilayah ini ?</p> <p>3. Apa alasannya ?</p>	

LAMPIRAN VI

PEDOMAN WAWANCARA SASARAN 3

Sasaran :

Merumuskan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

Permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan yang kompleks, dimana didalamnya tidak hanya menyangkut permasalahan fisik bangunan permukiman saja yang umumnya kurang layak, tetapi juga permasalahan lainnya yang mengikutinya seperti misalnya permasalahan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya ketersediaan prasarana dasar di lingkungan permukiman mereka hingga bahaya (*hazard*) lingkungan tersebut terhadap suatu bencana, seperti banjir. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemahaman yang komprehensif dalam menanggapi permasalahan permukiman kumuh tersebut. Selain dengan mengetahui karakteristik permukiman kumuh yang terbentuk di masing-masing tingkat permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Kapuk, menganalisis faktor-faktor apa saja yang sebenarnya menjadi penyebab terbentuknya lingkungan permukiman kumuh di kelurahan tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan suatu rumusan terkait upaya apa yang efektif dan tepat dalam peningkatan lingkungan permukiman kumuh yang ada di wilayah Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dalam wawancara ini peneliti ingin mengetahui dan juga mendapatkan masukan dari *stakeholder* untuk dapat merumuskan upaya peningkatan lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam menyusun “*Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat*”.

Indikator	Variabel	Definisi Operasional	Pertanyaan Wawancara
Urbanisasi	Pertambahan Jumlah Penduduk	Jumlah pertambahan penduduk pendatang yang bertempat tinggal di permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none">1. Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait pertambahan jumlah penduduk pendatang yang terdapat di wilayah Kelurahan Kapuk ini ?2. Keberadaan pabrik dan pergudangan yang berada di wilayah Kapuk ternyata juga turut mempengaruhi penduduk pendatang yang ada di wilayah itu, apakah menurut Bapak ada langkah tertentu yang harus dilakukan terkait masalah tersebut ?
Peran Pemerintah	Penyediaan Perumahan layak	Kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin dinilai menjadi salah satu penyebab kualitas lingkungan disana menjadi rendah karena umumnya mereka membangun rumahnya secara swadaya dan kurang mampu, bagaimana tanggapan bapak ?2. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan terkait terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah ?

Indikator	Variabel	Definisi Operasional	Pertanyaan Wawancara
Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Prasarana Persampahan	Penyediaan prasarana persampahan yang memadai oleh pemerintah di lingkungan permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan seperti tidak adanya TPS dan juga kurangnya armada pengangkut sampah menjadi salah satu penyebab lingkungan di Kelurahan Kapuk ini menjadi kurang baik, bagaimana tanggapan bapak ? 2. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait penyediaan prasarana persampahan yang memadai di Kelurahan Kapuk ini ?
	Pemenuhan Prasarana Sanitasi	Penyediaan prasarana sanitasi yang memadai oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang memadainya pemenuhan prasarana sanitasi yang ada di Kelurahan Kapuk menjadi salah satu penyebab terjadinya kurang baiknya lingkungan yang ada di wilayah tersebut, bagaimana tanggapan bapak ? 2. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait penyediaan prasarana sanitasi yang memadai oleh pemerintah bagi masyarakat di lingkungan ini ?
	Pemenuhan Prasarana Saluran Drainase	Penyediaan prasarana drainase oleh pemerintah di lingkungan permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang memadainya pemenuhan prasarana saluran air yang ada di Kelurahan Kapuk menjadi salah satu penyebab terjadinya kurang baiknya lingkungan yang ada di wilayah tersebut, bagaimana tanggapan bapak ? 2. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait perbaikan kondisi saluran air, baik yang tercemar oleh limbah maupun yang tergenang oleh tumpukan sampah di lingkungan Kelurahan Kapuk ini ?
Ekonomi	Jenis pekerjaan	Jenis mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis mata pencaharian masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai buruh ternyata turut mempengaruhi terbentuknya lingkungan kumuh yang ada di Kelurahan Kapuk, bagaimana pendapat bapak ? 2. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan Kelurahan Kapuk ?
	Tingkat Pendapatan	Jumlah pendapatan/penghasilan yang dimiliki masyarakat tiap bulannya..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendapatan masyarakat menjadi salah satu penyebab terbentuknya kualitas lingkungan yang rendah di wilayah Kapuk, bagaimana tanggapan bapak? 2. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat di lingkungan ini ?
Peran Masyarakat	Keinginan masyarakat untuk memelihara lingkungan	Keinginan atau kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan permukimannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau menjaga lingkungannya menjadi salah satu penyebab lingkungan di wilayah Kapuk menjadi kurang baik, bagaimana tanggapan bapak ? 2. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan permukimannya ?

Indikator	Variabel	Definisi Operasional	Pertanyaan Wawancara
	Kemampuan masyarakat menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana	Kemampuan masyarakat di lingkungan permukiman kumuh dalam menjangkau kebutuhan sarana dan prasarana dasar	1. Menurut Bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar mereka ?
	Kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan	Kapasitas masyarakat dalam peningkatan lingkungan permukimannya	1. Menurut Bapak, langkah apa yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan lingkungan permukiman (uang, tenaga dan pemikiran), baik itu secara swadaya maupun kapasitas mereka dalam kegiatan peningkatan lingkungan yang diberikan oleh pemerintah ? 2. Apakah menurut bapak perlu juga dilakukan partisipasi masyarakat dalam serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dalam suatu kegiatan/program perbaikan lingkungan yang ada di wilayah tersebut?
Sosial	Tingkat pendidikan masyarakat	Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di permukiman kumuh	1. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di wilayah ini menjadi salah satu penyebab terbentuknya lingkungan kumuh yang ada di wilayah ini, bagaimana tanggapan bapak ? 2. Menurut Bapak, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk ini ?

BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Bekasi, tanggal 01 April 1992 dan merupakan anak semata wayang di keluarga. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDN Aren Jaya VII Bekasi, SMP Bani Saleh 01 Bekasi, SMAN 2 Bekasi dan terakhir terdaftar di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Planologi (HMPL) ITS dan tergabung dalam Tim Big Event (TBE) tahun 2012-2013. Sebagai bagian dari TBE, penulis juga berperan serta dalam serangkaian acara Planopolis sebagai *Steering Committee* (SC). Apabila terdapat saran dan pertanyaan mengenai penelitian ini dapat langsung ditujukan pada email penulis : niken.fitriaa@gmail.com .